PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 - 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut perlu disusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan daerah dan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
c. bahwa sehubungan dengan adanya pengendalian, evaluasi, dan perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 perlu diubah dan disempurnakan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Pasal 1 diubah dan Pasal 1 angka 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagau unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
7. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Dihapus.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24 Oktober 2022

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 24 Oktober 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (13-191/2022).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daaerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Pemerintah Provinsi Maluku telah mempunyai RPJMD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. RPJMD yang memuat Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024 yaitu "Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan". Visi tersebut merupakan gambaran yang ingin dicapai Provinsi Maluku pada periode pemerintahan 2019-2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disampinh itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur perubahan RPJMD dilakukan apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; (c). terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan aturan normatif di atas, maka materi penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Penyesuaian terhadap indikator kinerja utama dan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi;dan
3. Penyesuaian terhadap materi muatan kebutuhan daerah dalam hal pendirian dan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah.

Pada saat ini terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah yang diantaranya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD akan dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 124.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3	Maksud dan Tujuan	I-9
1.4	Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.5	Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD	I-13
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	**II-1**
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Maluku	II-68
2.3	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Provinsi Maluku	II-95
2.4	Capaian Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Maluku	II-100
BAB III	**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**	**III-1**
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu	III-33
3.3	Kerangka Pendanaan	III-40
BAB IV	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**	**IV-1**
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2	Isu-isu Strategis	IV-19
BAB V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**	**V-1**
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-7
BAB VI	**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**	**VI-1**
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-12
6.3	Program Prioritas Daerah	VI-27
BAB VII	**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**	**VII-1**
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2	Program perangkat daerah	VII-7
BAB VIII	**INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH**	**VIII-1**
8.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
BAB IX	**PENUTUP**	**IX-1**
9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	II-3
Tabel II.2	Kondisi Dataran di Provinsi Maluku	II-4
Tabel II.3	Formasi Batuan Pulau Buru	II-6
Tabel II.4	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon	II-8
Tabel II.5	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Tengah	II-10
Tabel II.6	Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Timur	II-11
Tabel II.7	Formasi Batuan Kepulauan Kei	II-13
Tabel II.8	Formasi Batuan Kepulauan Aru	II-14
Tabel II.9	Formasi Batuan Kepulauan Tanimbar	II-14
Tabel II.10	Formasi Batuan Kepulauan Babar	II-15
Tabel II.11	Formasi Batuan Pulau Moa dan Pulau Damer	II-16
Tabel II.12	Formasi Batuan Pulau Wetar	II-17
Tabel II.13	Kondisi Iklim di Provinsi Maluku	II-19
Tabel II.14	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Tahun 2021	II-20
Tabel II.15	Jenis Bencana di Provinsi Maluku Tahun 2016-2021	II-22
Tabel II.16	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku	II-23
Tabel II.17	Sistem Perkotaan di Provinsi Maluku	II-26
Tabel II.18	Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku	II-27
Tabel II.19	Sistem Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku	II-29
Tabel II.20	Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan & Tingkat Pemanfaatan	II-32
Tabel II.21	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Maluku Tahun 2021	II-33
Tabel II.22	Perkembangan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi Maluku	II-34
Tabel II.23	Data Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Maluku	II-35
Tabel II.24	Data Lokasi Potensi Energi Arus Laut di Provinsi Maluku	II-36
Tabel II.25	Data Area Penambangan Liar di Provinsi Maluku Tahun 2018	II-36
Tabel II.26	Indikator Kependudukan di Provinsi Maluku Tahun 2021	II-38
Tabel II.27	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Provinsi Maluku Tahun 2021	II-39
Tabel II.28	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2016-2021	II-42
Tabel II.29	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Maluku Tahun 2016-2021	II-43
Tabel II.30	Indikator Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2017 – 2021	II-48
Tabel II.31	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Penyusunnya Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-49
Tabel II.32	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Listrik Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2021	II-57
Tabel II.33	Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-58
Tabel II.34	Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2016-2020	II-61
Tabel II.35	Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi Provinsi Maluku Tahun 2016-2020	II-61

Tabel II.36	Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Maluku Tahun 2017 -2021	II-62
Tabel II.37	Produksi Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2016 - 2021	II-63
Tabel II.38	Komoditi Unggulan Subkategori Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2017 - 2021	II-64
Tabel II.39	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Industri Pengolahan Provinsi Maluku Tahun 2017 -2021	II-64
Tabel II.40	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-65
Tabel II.41	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-66
Tabel II.42	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-67
Tabel II.43	Jumlah Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan Provinsi Maluku Tahun 2018-2021	II-68
Tabel II.44	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinereja Penyelanggaran Urusan Pemerintaj Provinsi Maluku	II-69
Tabel II.45	Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 (sesuai Permendagri 18 Tahun 2020)	II-90
Tabel II.46	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Provinsi Maluku Tahun 2020	II-97
Tabel II.47	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Maluku Tahun 2016-2020	II-100
Tabel III.1	Skala interval Otonomi Fiskal	III-3
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Maluku, Tahun 2016-2021	III-4
Tabel III.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (juta)	III-10
Tabel III.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (Dalam Jutaan)	III-15
Tabel III.5	Rata-Rata Pertumbuhan APBD Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (Dalam Jutaan)	III-18
Tabel III.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2021	III-24
Tabel III.7	Rasio Lancar Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2021 (dalam Jutaan)	III-29
Tabel III.8	Rasio Hutang Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2021 (dalam Jutaan)	III-30
Tabel III.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2021 (dalam Jutaan)	III-31
Tabel III.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan)	III-32
Tabel III.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Provinsi Maluku Tahun 2016– 2020 (dalam Jutaan)	III-33
Tabel III.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (dalam Jutaan)	III-34
Tabel III.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (dalam Jutaan)	III-36
Tabel III.14	Defisit Riil Anggaran Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (dalam Jutaan)	III-38
Tabel III.15	Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)	III-39

Tabel III.16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)	III-39
Tabel III.17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Maluku Tahun 2022 - 2021 (dalam Jutaan)	III-44
Tabel III.18	Proyeksi Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (dalam jutaan)	III-49
Tabel III.19	Proyeksi Perubahan Belanja Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)	III-52
Tabel III.20	Proyeksi Belanja Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)	III-56
Tabel III.21	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Provinsi Maluku Tahun 2022-2026	III-57
Tabel III.22	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)	III-58
Tabel III.23	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)	III-59
Tabel IV.1	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak, Sumber Air Minum Layak Dan Hunian Layak dan Terjangkau Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-11
Tabel IV.2	Permasalahan Pembangunan Provinsi Maluku Periode Pembangunan 2019-2024	IV-14
Tabel IV.3	Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Periode Pembangunan 2019 - 2024	IV-15
Tabel IV.4	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	IV-37
Tabel IV.5	Skenario Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Provinsi Maluku Tahun 2021-2024	IV-58
Tabel V.1	Tujuan dan Indikator tujuan RPJMD perubahan Provinsi Maluku	V-8
Tabel V.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Indikator Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	V-12
Tabel V.3	Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	V-16
Tabel V.4	Keterkaitan IKU Daerah dan IKU OPD Provinsi Maluku	V-27
Tabel V.5	Keselarasan Sasaran Pembangunan Provnsi Maluku dengan Nasional	V-37
Tabel V.6	Sandingan Sasaran RPJMD Murni Tahun 2019-2024 dan RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 Provinsi Maluku	V-41
Tabel VI.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	VI-2
Tabel VI.2	Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku 2022-2024	VI-16
Tabel VI.3	Tabel Sanding Strategi dan Arah Kebijkan RPJMD Murni dan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku	VI-19
Tabel VI.4	Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024	VI-28
Tabel VI.5	Program Prioritas Gugus Pulau	VI-32
Tabel VI.6	Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Wilayah Pembangunan Kabupaten/Kota	VI-36
Tabel VI.7	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi	VI-39

Tabel VI.8	Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024	VI-40
Tabel VI.9	Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024	VI-41
Tabel VI.10	Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024	VI-41
Tabel VI.11	Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024	VI-42
Tabel VI.12	Penetapan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024	VI-42
Tabel VI.13	Matriks Pembangunan RPJMN untuk Pengembangan Wilayah di Provinsi Maluku	VI-45
Tabel VI.14	Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Terhadap Program Nasional	VI-51
Tabel VI.15	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (Inflementasi Rencana RT/RW Provinsi Maluku (sebagai arahan pemanfataan Ruang Wilayah Provinsi Mauku) Tahun 2013-2033)	VI-76
Tabel VI.16	Keselarasan Program dengan Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	VI-91
Tabel VII.1	Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah Provinsi Maluku Tahun 2022-2024	VII-3
Tabel VII.2	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)	VII-6
Tabel VII.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	VII-7
Tabel VII.4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	VII-9
Tabel VIII.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	VIII-2
Tabel VIII.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	VIII-4
Tabel VIII.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah	VIII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-10
Gambar II.1	Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah	II-2
Gambar II.2	Peta Administrasi Provinsi Maluku	II-3
Gambar II.3	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku	II-22
Gambar II.4	Peta 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku	II-26
Gambar II.5	Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2021	II-37
Gambar II.6	Piramida Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2021	II-40
Gambar II.7	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Tahun 2017-2021 (Milyar Rp)	II-41
Gambar II.8	Struktur Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2021 (%)	II-44
Gambar II.9	PDRB per Kapita Provinsi Maluku Tahun 2017-2021 (Juta Rp.)	II-45
Gambar II.10	Indeks Gini Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-46
Gambar II.11	Laju Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual Tahun 2017-2021	II-47
Gambar II.12	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-49
Gambar II.13	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-50
Gambar II.14	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2021	II-51
Gambar II.15	Harapan Lama Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-52
Gambar II.16	Angka Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-53
Gambar II.17	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2021	II-53
Gambar II.18	Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Provinsi Maluku Tahun 2021	II-55
Gambar II.19	Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Provinsi Maluku Tahun 2021	II-55
Gambar II.20	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-56
Gambar II.21	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2021	II-57
Gambar II.22	Jumlah Penerima Bantuan/Pemberdayaan Sosial Provinsi Maluku Tahun 2020	II-58
Gambar II.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Maluku Tahun 2016-2021	II-59
Gambar II.24	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Tahun 2017-2021	II-60
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 (dalam juta)	III-5
Gambar III.2	Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)	III-7
Gambar IV.1	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Provinsi Maluku Tahun 2019-2024	IV-4

Gambar IV.2	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-6
Gambar IV.3	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-6
Gambar IV.4	Perbandingan Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-7
Gambar IV.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-8
Gambar IV.6	Perbandingan Tingkat Kemiskinan (September) (%) Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-9
Gambar IV.7	Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-12
Gambar IV.8	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-13
Gambar IV.9	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Maluku Tahun 2021	IV-13
Gambar IV.10	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021	IV-13
Gambar IV.11	Overview Dampak Ekonomi untuk Wilayah Maluku	IV-60
Gambar V.1	Visi dan Misi Provinsi Maluku	V-7
Gambar VI.1	Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024	VI-12
Gambar VI.2	Peta Keterkaitan Antar Wilayah Pengembangan dalam Gugus Pulau	VI-34
Gambar VI.3	Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan	VI-35
Gambar VI.4	Peta Pengembangan Kawasan Nasional di Wilayah Provinsi Maluku	VI-43
Gambar VI.5	Konsepsi Lumbung Ikan Nasional	VI-86
Gambar VI.6	Keselarasan Antara Tujuan, Sasaran dan Strategi LIN	VI-88
Gambar VI.7	Rencana Pengembengan (PoD Lapangan Abadi Masela)	VI-90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Lebih lanjut, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang berisi tentang penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas N. Orno yang diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran; strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Visi Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah "**MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN KEPULAUAN".** Dalam rangka mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 6 misi yaitu 1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau; 3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata dan 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Memasuki tahun pertama implementasi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 di mana pada awal tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk Provinsi Maluku. Hal ini juga sejalan dengan terbitnya 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dan 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) sebagai bencana Non Alam dimana pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan dan mengakomodir kebijakan dari pemerintah pusat baik terkait *refocusing* anggaran, kebijakan penanggulangan Covid 19 termasuk pemulihan ekonomi.

Selain itu, adanya dinamika regulasi nasional yang ditetapkan paska penetapan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang bersifat mandatori berpengaruh juga pada kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku. Regulasi tersebut antara lain ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Regulasi lain adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

penganggaran di daerah. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sisi lain terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah juga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional.

Proses perubahan RPJMD dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, pada pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam permendagri tersebut; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan permendagri tersebut; dan c) terjadi perubahan yang mendasar. Pada pasal 342 ayat (3) disebutkan bahwa perubahan yang mendasar meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 selain sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional juga perlu mempertimbangkan hasil pengendalian dan

evaluasi RPJMD Provinsi Maluku hingga dengan tahun 2020 di mana dalam hasil evaluasi ditemukan bahwa:

1. Tingkat capaian dari 28 IKU pada RPJMD Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa 6 indikator atau 21,43% melampaui target, 2 atau 7,14% indikator telah tercapai, 10 atau 35.71% indikator belum tecapai dan 10 atau 35.71% indikator belum dapat diinfomasikan oleh OPD;
2. Indikator Makro Pembangunan RPJMD Provinsi Maluku pada tahun 2019-2020 yakni Pertumbuhan Ekonomi, TPT, dan Angka Kemiskinan untuk realisasi pencapaian targetnya perlu upaya keras dan berpotensi tidak mencapai target;
3. Pandemi Covid-19 mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Maluku yang hingga tahun 2020 menunjukan bahwa tingginya angka tingkat ketidaktercapaian indikator IKK yakni sebesar 47.66%, indikator yang melebihi target sebesar 30.37%, indikator yang tercapai sebesar 13.55% dan indikator yang tidak dapat ditampilkan sebesar 7.48%; dan
4. Capaian Indikator Outcome program yang mengartikan tingkat keberhasilan program sampai dengan tahun 2020 menunjukan bahwa indikator yang belum tercapai memperoleh nilai yang lebih tinggi yakni 36.90%, indikator yang tercapai sebesar 16.90% indikator yang melebihi target 17.86% sementara sebanyak 26.90% indikator belum dapat ditampilkan.

Sejalan dengan simpulan tersebut hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Maluku juga merekomendasikan bahwa dalam rangka menjaga keselasaran, sinergitas dan integrasi perencanaan maka RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 perlu disesuaikan secara substantif baik terhadap RPJMN 2020-2024 maupun regulasi perencanaan serta regulasi penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 perlu untuk dilakukan sesegera mungkin.

Berdasarkan latar belakang di atas, Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 perlu dilakukan. Selain sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional, perubahan ini juga didasarkan kepada hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Maluku agar dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku

Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan di sisa tahun perencanaan dapat lebih *up to date*, dapat diacu/dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan, serta dapat mengakselerasi percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi dan pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Provinsi Maluku.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 13;
32. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103 Tahun 2020); dan
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 1).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ini dimaksudkan sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional serta hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 agar dokumen perencanaan pembangunan di sisa tahun perencanaan dapat lebih *up to date*, dapat diacu/ dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan dengan kondisi terkini yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku di sisa periode pembangunan, utamanya dalam penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca Pandemi Covid-19, selengkapnya Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman pada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu di sisa periode pembangunan yaitu tahun 2022-2024
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi maluku, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Maluku selama kurun waktu 2019 – 2024.
4. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
5. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat; serta
7. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

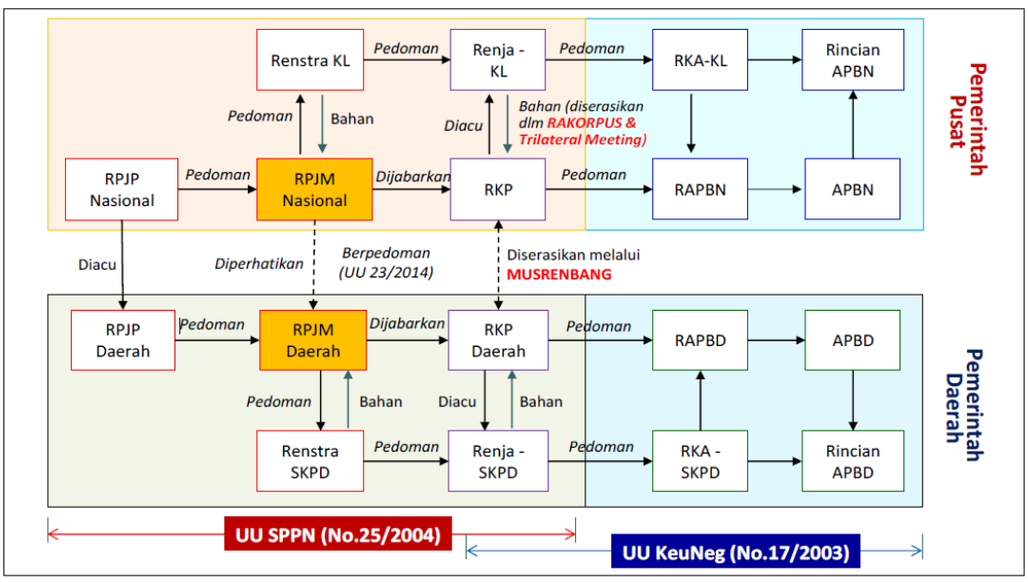
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan di mana penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Selanjutnya Perubahan RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), yang menjabarkan Perubahan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. RPJMD selanjutnya akan dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW sehingga RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 berpedoman pada RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dan RPJPD Provinsi Maluku

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku 2019–2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005–2025 terutama visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Perubahan RPJMD 2019–2024 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Maluku 2005– 2025. Sehingga, penyusunan Perubahan RPJMD memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019–2024 dan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD provinsi Maluku Tahun 2005–2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 Provinsi Maluku yang telah disusun, diarahkan untuk mencapai visi "**MALUKU YANG RUKUN DAN DAMAI, ADIL DAN DEMOKRATIS, SERTA MAJU DAN SEJAHTERA".** Terdapat 3 misi yaitu Mewujudkan Masyarakat kepualauan Provinsi Maluku yang (1) Bertaqwa, Rukun, Aman dan Damai, (2) Maju, Mandiri dan Sejahtera, serta (3) Adil dan Demokratis. Tahapan pembangunan RPJMD 2019–2024 merupakan tahapan keempat dalam pembangunan jangka panjang (RPJPD) Provinsi Maluku.

2. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dengan RPJMN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakeristik daerah.

Berdasarkan pada RPJMN Tahun 2020–2024, kebijakan pembangunan wilayah Maluku pada Tahun 2020–2024 diarahkan pada optimalisasi

keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau.

3. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dengan RTRW Provinsi Maluku

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013–2033. Penuangan keselarasan RPJMD dengan RTRW Provinsi dalam dokumen perubahan RPJMD telah melalui proses penelaahan dan penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW Provinsi dan indikasi program yang terdapat dalam dokumen RTRW Provinsi diharapkan tidak hanya menjadi dasar perumusan perubahan RPJMD, namun juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku. Selain itu pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi Maluku agar sesuai dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi maluku dengan Renstra Perangkat Daerah

Perubahan RPJMD menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019–2024. Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran setiap urusan bidang dan/fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.

5. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen

perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD akan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Hubungan Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota serta Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten /Kota untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional maupun provinsi. Beberapa dokumen tersebut yaitu : a) Agenda pembangunan berkelanjutan (SDG's = *Sustainable Development Goals),* b) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), c) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), c) Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAD MAPI), d) Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD GRK), e) Road Map Penyelenggaraan Rumah Basudara Sejahtera platform Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (RBS – SLRT), f) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi Maluku sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan Perubahan RPJMD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam periode 2019-2024.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan- tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Maluku serta pagu anggaran setiap tahunnya.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap tahun hingga akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana Perubahan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang terjadi selama ini. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Provinsi Maluku. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang temaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat”. Melihat hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berusaha untuk memberdayakan setiap elemen pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku menyusun perubahan perencanaan jangka menengah. Salah satu poin penting dalam perumusan berbagai kebijakan dalam perubahan rencana pembangunan adalah ditelaahnya kembali berbagai data dan informasi pembangunan sebelumnya yang merupakan salah satu komoditi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah agar terjaga relevansi antara program dan kegiatan pembangunan dengan permasalahan yang ingin dihadapi. Ketepatan rumusan dalam memilih kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode pembangunan harus terimplementasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai acuan perumusan perubahan kebijakan pembangunan ini, maka disusunlah gambaran umum kondisi daerah Provinsi Maluku sebagai potret dari hasil pembangunan daerah selama ini yang tersaji sebagai berikut:

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Data dan informasi pembangunan merupakan potret hasil pembangunan periode sebelumnya yang terangkum dalam gambaran umum kondisi daerah Provinsi Maluku. Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari aspek geografi

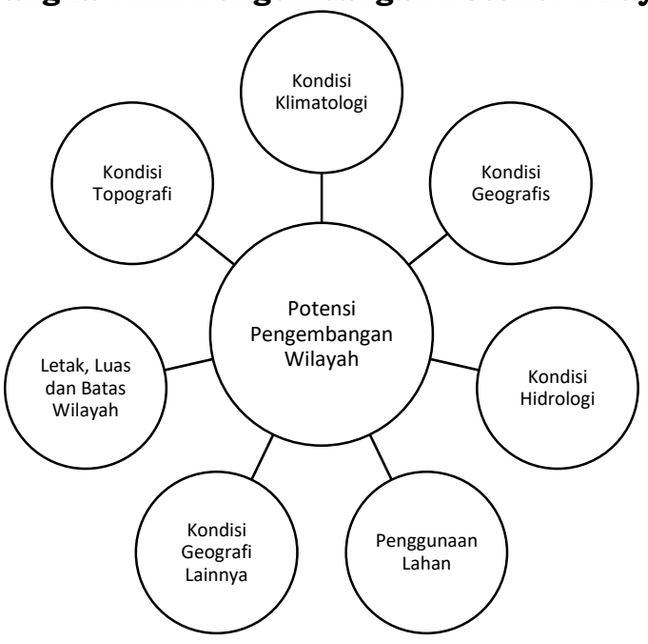
dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut diturunkan menjadi fokus-fokus pembangunan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja pembangunan daerah. Untuk memahami lebih lanjut berbagai potensi dan kinerja pembangunan selama ini, berikut gambaran umum Provinsi Maluku dari berbagai aspek.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Aspek geografi dan demografi merupakan dasar utama dalam melakukan perencanaan pembangunan yaitu adanya identifikasi potensi awal suatu wilayah. Dengan mengetahui aspek geografi dan demografi suatu wilayah, pemangku kebijakan dapat merencanakan dan mengelola pembangunan di masa yang akan datang. Alur pikir potensi pengembangan wilayah dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut.

Gambar II.1
Kerangka Pikir Pengembangan Potensi Wilayah



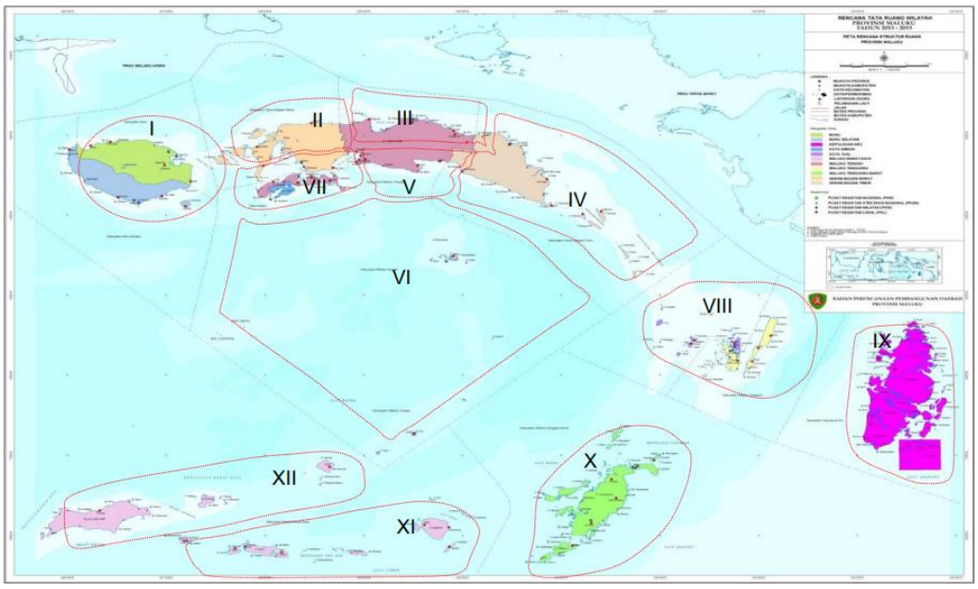
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Provinsi Maluku sendiri terletak di antara $2^{0}30'$-9^{0} Lintang Selatan dan 124^{0} -136^{0} Bujur Timur.

Secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 km^2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 662.565,66 km^2 (92,99%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 49.914,03 km^2 (7,01%). Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.392 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km.

Gambar II.2
Peta Administrasi Provinsi Maluku



Sumber: Pemerintah Provinsi Maluku

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.1.
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten / Kota	Luas Area (km^2)	Ibukota Kabupaten	Jumlah	
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Kab. Maluku Tengah	7.953,81	Masohi	18	196
2	Kab. Maluku Tenggara	1.031,81	Langgur	11	193
3	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.465,79	Saumlaki	10	89
4	Kab. Buru	4.932,32	Namlea	10	82
5	Kab. Seram Bagian Timur	6.429,88	Bula	15	198
6	Kab. Seram Bagian Barat	5.033,38	Piru	11	92
7	Kab. Kepulauan Aru	8.152,42	Dobo	10	119
8	Kab. Maluku Barat Daya	4.581,06	Tiakur	17	118
9	Kab. Buru Selatan	3.780,56	Namrole	6	81
10	Kota Ambon	298,61	Ambon	5	50
11	Kota Tual	254,39	Tual	5	30
MALUKU		46.914,03	**Ambon**	**118**	**1.248**

Catatan: Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2022

Secara administrasi, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga ke depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

B. Topografi

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan.

Tabel II.2.
Kondisi Dataran di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Dataran Rendah	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kepulauan Tanimbar	Tanimbar	1.100	Pulau Tanimbar
2	Kepulauan Aru	Dataran Aru	1.200	Kepulauan Aru
3	Seram Bagian Timur	Masiwang	5.000	Pulau Seram
4	Maluku Tengah	Seran Selatan Pasahari	4.000 40.000	Pulau Seram Pulau Seram
5	Seram Bagian Barat	Dataran Kawa Eti Kairatu	10.000 600 1.300	Pulau Seram Pulau Seram Pulau Seram
6	Buru dan Buru Selatan	Waeapo Wai Kating Wai Kumu Wai Mala Rana Samalagi Wai Lo	14.000 1.500 1.250 1.250 1.250 1.000 500	Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru
Jumlah			**83.950**	-

Sumber: RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

a. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter

tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.

b. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)

   Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.

c. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)

   Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.

d. Kepulauan Aru

   Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter.

e. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

   Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15- 30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk

lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.

C. Geologi

Karakteristik geologi Provinsi Maluku adalah terdiri dari batuan sedimen, batuan metamorfik dan batuan beku dengan penyebaran yang hampir merata di setiap gugus pulau. Hal ini dipengaruhi oleh klasifikasi umur pulau/kepulauan yang terbentuk pada 50-70 juta tahun yang lalu, pada periode Neogeon sampai Paleoceen, kendati Pulau Seram telah berusia 3000 juta tahun yang terbentuk pada periode Achracium. Karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh letak Maluku diantara lempeng bumi Indo-Australia, Pasifik, Laut Filipina dan Laut Banda. Secara umum kondisi geologi Provinsi Maluku dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Buru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3.
Formasi Batuan Pulau Buru

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lumpur. Tersebar di sepanjang pantai, terutama di lembah sungai yang besar yaitu Wa Apu, Wa Mala, Wa Kuma dan Wa Duna.
2	Qd: Endapan Danau	Kerikil, pasir, lanau, lempung, gambut. Terdapat di sebelah barat Danau Rana.
3	Qt: Endapan Undak	Bongkah, kerikil, pasir, lanau dan lempung. Bongkah umumnya terdiri atas kuarsa, kuarsit, sekis, filit, batu gamping dan batu pasir. Terdapat di daerah perbukitan rendah di sepanjang pantai utara dan pantai selatan. Di daerah pantai utara bagian timur, satuan ini terdiri atas pasir yang berselingan dengan lanau dan beberapa sisipan gambut.
4	Ql: Batu Gamping Terumbu	Batu gamping terumbu bioherma dan biostroma, berkembang baik di daerah pantai utara bagian timur.
5	Pl: Formasi Leko	Konglomerat polimik, batu pasir dan batu gamping.

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
6	Tpav: Batuan Gunung Api Ambelau	Lava andesit berongga dan piroklastika bersusunan andesit. Terdapat di Pulau Ambelau di Tenggara Pulau Buru berupa perbukitan yang tertindih tak selaras oleh batu gamping terumbu (Ql).
7	Tpa: Andesit	Andesit biotit umumnya lapuk, tersebar di daerah pantai selatan Pulau Buru antara kampung Tifu dengan Mefa.
8	Tmfv: Formasi Ftau	Lava, breksi gunung api dan tuf bersusunan andesit.
9	Tmh: Formasi Hotong	Batu pasir, serpih, lempung, napal, batu lanau, batu gamping dan konglomerat.
10	Tmw: Formasi Wakatin	Batu gamping koral berongga dan kadang-kadang terhablurkan.
11	Tomw: Formasi Waeken	Napal, napal pasiran, kalsilutit dan konglomerat.
12	MTk: Formasi Kuma	Kalsilutit, rijang, napal dan konglomerat.
13	JKd: Diabas	Singkapan yang baik terdapat di tepi pantai Tanjung Keramat.
14	Jm: Formasi Mefa	Batuan gunung api bawah laut, terdiri atas lava dan tuf.
15	TRd: Formasi Dalan	Batu pasir, serpih, batu lanau dan konglomerat. Konglomerat bersifat aneka bahan dan berkomponen kuarsa, sekis, filit dan batu sabak. Satuan terutama melampar di bagian barat Pulau Buru, menempati daerah pegunungan.
16	TRg: Formasi Ghegan	Batu gamping dolomitan, kalkarenit, serpih dan napal.
17	Pzr: Kompleks Rana	Filit, batu sabak, arkosa malih, grewake malih dan pualam
18	Pzw: Kompleks Wahlua	Sekis, filit, arkosa malih, kuarsit dan pualam.

Sumber: Peta Geologi Lembar Buru, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Poros lipatan pada batuan sedimen Pra-Tersier, mulanya berarah sesuai dengan pola arah cekungan yaitu barat laut-tenggara. Lipatan terbentuk akibat gaya memadat yang berarah timur laut-barat daya. Akibat proses tektonik kemudian, bersamaan dengan pelipatan dan pengangkatan pada akhir Tersier, membuat poros lipatan arahnya berubah pada barat-timur disebabkan oleh gaya memadat berarah utara-selatan.

Sesar turun banyak ditemukan, antara lain di sekitar Sungai Apu, sekitar Danau Rana, selatan Teluk Bara dan sekitar Kampung Mageswain. Danau Rana merupakan lekukan tektonik yang dibatasi oleh sesar turun yang diduga masih aktif. Sesar mendatar umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Sesar yang berarah timur laut-barat daya, pergerakannya berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Sesar yang berarah barat laut-tenggara mengikuti arah gerak jarum jam. Kedua sistem sesar tegak itu seumur dan sejenis, terbentuk oleh gaya memadat yang berarah lebih kurang utara-selatan. Sesar Wae Geren yang menyamping kiri panjangnya mencapai 63 km memanjang dari Danau Rana sampai Kampung Waperan di pantai timur laut. Sesar

ini diduga terus memanjang melalui bawah laut, sebagaimana ditunjukkan oleh sangat curamnya batimetri gawir bawah laut di utara kampung tersebut.

Di tepi selatan Danau Rana, sesar ini berubah jadi sesar turun, bagian utaranya merupakan bongkah yang menurun. Sepanjang sesar, terutama yang di timur Danau Rana, ditemukan jalur terbreksikan dan kadang-kadang milonit batuan malihan. Pantai selatan Pulau Buru dalam keadaan menurun, sebagaimana tercirikan oleh tebing pantai yang terjal dan sempit dan endapan aluvium hanya dite mukan di muara Wae Mala dan Wae Kuma. Pantai yang sempit dan terjal itu merupakan jalur sesar turun. Kegempaan Pulau Buru relatif rendah jika dibandingkan dengan Pulau Seram dan sekitarnya, dengan pusat gempanya yang dangkal sampai sedang.

2. Pulau Seram dan Sekitarnya (Kabupaten Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Timur dan Kota Ambon)

a. Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4.
Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lempung, lanau, pasir kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan.
2	TRJk: Formasi Kanikeh	Perselingan batu-pasir, serpih dan lanau, dengan sisipan konglomerat dan batu gamping.
3	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping mengandung koral, kalsilutit dan batu gamping oolit.
4	TQf: Formasi Fufa	Perselingan batu gamping, batu pasir, batu lanau dan lempung di bagian bawah. Batu pasir dan konglomerat di bagian atas.
5	Ql: Konglomerat	Konglomerat aneka bahan dengan tersingkap baik di daerah Lisabata Barat dan di sepanjang pantai selatan, membentuk perbukitan rendah dan landai.
6	Tmkv: Batuan Gunung Api Kelang	Lava, tuf, breksi gunung api dan aglomerat.
7	Tpav: Batuan Gunung Api Ambon	Lava breksi gunung api, breksi tuf dan tuf.
8	Pzta: Kompleks Taunusa	Sekis, kuarsit, genes, amfibolit, pualam dan filit.
9	PTRt: Kompleks Tehoru	Filit, batu sabak, batu gamping terpualamkan dan sedikit sekis.
10	TRS: Batuan Malihan Saku	Batu sabak, grewake meta dan konglomerat meta dengan sisipan batu gamping.
11	Jku: Batuan Ultramafik	Harsburgit, dunit, serpentinit dan sedikit gabro.
12	Jkg: Batuan Mafik	Gabro, plagiogabro dan diorit.

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
13	Ti(g): Granit Manipa	Umumnya terdiri dari granit biotit. Di Pulau Manipa batuan ini menerobos satuan filit (Batuan Malihan Tehoru) dengan menunjukkan gejala sentuhan.
14	Ti(d): Granit Ambon	Granit biotit, granit kordierit biotit tersingkap baik di Tanjung kampung Ema, Kp. Mahia dan sedikit Kp. Alang, kesemuanya terletak di Pulau Ambon. Seri, pantai selatan Pulau Ambon, di Sungai Resi dekat
15	Tmpu: Kompleks Uli	Batuan bancuh terdiri dari berbagai jenis batuan yang berukuran dari beberapa centimeter hingga beberapa meter tercampur di dalam massa dasar lempung. Kompleks Uli ini mirip dengan Kompleks Salas di Seram Timur.

Sumber: Peta Geologi Lembar Ambon, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sesar turun umumnya berarah barat laut-tenggara dan timur laut-barat daya, terdapat di Seram Barat, Pulau Manipa dan Pulau Ambon. Teluk Ambon dibatasi oleh sesar turun yang berarah timur laut-barat daya dan merupakan jalur terban yang cukup besar. Sesar turun yang memotong batuan Plistosen di timur Kawa (Seram Barat) dan di Pulau Ambon diduga masih giat sampai sekarang. Sistem sesar di sekitar Pulau Ambon mungkin merupakan kelanjutan lajur sesar mendatar mengiri yang memanjang dari Teluk Soleman melalui ujung timur Pegunungan Taunusa. Sesar geser yang berarah timur laut-barat daya umumnya berupa sesar mendatar sinistral. Sedangkan yang berarah barat laut-tenggara biasanya berupa sesar geser dekstral. Sesar naik umumnya berarah timur-barat dengan bidang sesar miring ke selatan. Sesar naik di utara Piru diduga menerus ke arah barat, melalui pantai utara Pulau Babi sampai utara Pulau Kelang.

Proses tektonik ini menyebabkan terjadinya batuan gunung api pada jalur magma Uliaser (Haruku, Saparua dan Nusalaut). Gunung api Kelang diduga keluar melalui lajur rekahan dalam karena letaknya yang terpisah dari jalur magma Uliaser. Unsur-unsur struktur yang terbentuk akibat proses tektonik tersebut adalah sesar naik, sesar mendatar dan sesar turun. Kegempaan di daerah ini cukup tinggi dengan kedalaman 0-99 Km kekuatan sampai 7,0 pada skala Richter.

b. Seram Bagian Tengah (Kabupaten Maluku Tengah)

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5.
Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Tengah

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lanau, lumpur, kerikil dan kerakal. Sebarannya di daerah pantai dan sekitar muara sungai-sungai besar, seperti Sungai Kawa, Sungai Lamasin, sekitar Teluk Elpaputih, dataran rendah bagian utara sebelah timur Teluk Saleman. Di daerah dataran rendah tersebut, endapan aluvium sering bercampur dengan humus dan gambut, terutama di daerah yang berawa
2	Ql: Batu Gamping Koralh	Batu gamping terumbu membentuk undak-undak pantai. Di sebelah barat Teluk Soleman (Tanjung Pulu Tujuh) terdapat enam buah undak, mencapai ketinggian 300 m, di sebelah selatan Masohi terdapat tujuh buah undak mencapai ketinggian 400 m lebih di atas permukaan laut.
3	Qt: Endapan Teras	Konglomerat dengan komponen kuarsa susu, rijang merah, sekis, filit, batu pasir dengan semen lempung pasiran dan pasir gampingan.
4	TQf: Formasi Fufa	Batu pasir, napal, lanau, lempung, konglomerat, batu gamping dan gambut.
5	Tpw: Formasi Wahai	Napal, napal tufan dan sisipan batu gamping.
6	Tpav: Batuan Gunung Api Ambon	Lava, breksi vulkanik, breksi tuf dan tuf.
7	Tmps: Komplek Salas	Secara litologi komplek ini terdiri dari massa dasar lempung bersisik dan bongkah-bongkah asing dan asal.
8	Toml: Formasi Lisabata	Batu gamping, batu gamping pasiran, batu pasir, napal dan serpih.
9	Tpeh: Formasi Hatuolo	Sepih, napal, batu gamping dan lensa rijang.
10	Ks: Formasi Sawai	Kalsilutit, serpih, batu lumpur dan rijang.
11	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping, rijang, kalsilutit, sisipan napal dan batu gamping oolit.
12	TRJk: Formasi Kanikeh	Perulangan antara batu pasir, batu lanau, serpih, rijang dan konglomerat.
13	TRs: Komplek Saku	Batu sabak, grewakemalih, arkosamalih, batu gamping dan konglomerat malih.
14	PTRt: Komplek Tehoru	Filit, batu sabak, sekis, psamitmeta dan batu gamping terpualamkan.
15	Pzta: Komplek Taunusa	Sekis, genes, amfibolit, kuarsit, filit dan pualam.
16	Jku: Komplek Batuan Beku Basa Ultramafik	Gabro, plagioklas, gabro hornblenda, serpentinit, harzburgit, dunit dan lherzolit.

Sumber: Peta Geologi Lembar Masohi, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sebagian besar batuan telah terlipat kuat dan mengalami deformasi. Arah jurus perlapisan pada batuan sedimen Pra Miosen umumnya berarah timur-barat dengan kemiringan umum ke arah selatan. Kemiringan bidang perlapisan tersebut umumnya 30°-60°, sebagian 79°-90°, bahkan ada yang terbalik. Dalam formasi Hatuolo (Tpeh), Formasi Sawai (Ks) dan Formasi Lisabata (Toml) dijumpai sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal terdapat di sebelah utara Pegunungan Manusela. Sesar geser umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara sedangkan sesar naik umumnya berarah timur-barat.

Proses tektonik ditafsirkan telah mengakibatkan ketidakselarasan antara Kompleks Saku (TRs) dengan Formasi Kanikeh (TRJk). Proses tektonik ini diduga didominasikan oleh gerakan menurun akibat tarikan (rifting) yang terus berlangsung berbarengan dengan proses sedimentasi Formasi Kanikeh (TRJk) yang dicirikan oleh korok-korok riolit dalam formasi tersebut, perubahan berangsur antara Komplek Saku dengan Formasi Kanikeh serta adanya hubungan ketidakselarasan antara Kompleks Saku dengan Formasi Kanikeh. Tektonik (Miosen Tengah-Pliosen) menyebabkan terjadinya kegiatan gunung api pada jalur Magma Uliaser (Haruku, Saparua, Nusa Laut) sesar naik, sesar datar dan sesar normal.

c. Seram Bagian Timur

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6.
Formasi Batuan Pulau Seram Bagian Timur

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lanau, pasir dan kerikil, terdapat di daerah dataran sepanjang Sungai Bobot dan Sungai Masiwang serta di daerah pantai utara sedangkan daerah yang berawa sekitar Wae (sungai) Semos, batuan ini bercampur dengan lempung, lumpur hitam dan humus.
2	Ql: Terumbu Koral Terangkat	Batu gamping koral, berongga, berstruktur terumbu. Satuan ini menindih Formasi Fufa secara tak selaras. Sebarannya terdapat di sekitar pantai dan tanjung di Pulau Parang, Pulau Akat, Pulau Seram Rai, Pulau Seram Laut, Kepulauan Gorong dan Kepulauan Watubela.
3	Qpf: Anggota Batu Gamping Formasi Fufa	Batu gamping mengandung banyak kepingan koral dan ganggang. Umumnya menunjukkan hubungan menjemari dengan Formasi Fufa (Qpf). Tersingkap di dekat Fufa, di bagian timur pulau dan di sepanjang Sungai Bobot, Sungai Wasiwang dan Sungai Semos.
4	Qpf: Formasi Fufa	Batu pasir halus, batu lanau dan lensa konglomerat serta gambut. Perlapisan hampir mendatar atau bersudut kemiringan kecil. Satuan ini tersingkap di sekitar Sungai Masiwang dan daerah Bula.
5	Tpw: Formasi Wahai	Napal berlapis tipis sampai setebal lebih dari 1 m, pada bagian atas, di banyak tempat dijumpai sisipan batu gamping pasiran dan batu pasir halus, tersingkap di sekitar Sungai Bobot dan Sungai Masiwang.
6	Tmps: Kompleks Salas	Berbagai macam bongkahan atau kepingan yang berasal dari batuan sedimen, batuan beku dan batuan malihan, berukuran dari beberapa cm sampai melebihi 10 m.
7	Toms: Formasi Selagor	Batu gamping, di beberapa tempat kalsilutit, napal dan bersisipan serpih. Di banyak tempat dijumpai cermin sesar pada napal dan tersingkap di sekitar Gunung Selagor.

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
8	Teh: Formasi Hatuolo	Serpih pasiran berlapis baik dengan sisipan napal dan lensa rijang yang mengandung radiolaria. Batuan ini terlipat kuat dan pada umumnya tergerus serta terkekarkan.
9	Ks: Formasi Sawai	Kalsilutit di beberapa tempat ditemukan sisipan tipis rijang.
10	KTn: Kompleks Nif	Kalsilutit, serpih dan napal yang tak dapat dipisahkan. Satuan ini telah terlipat kuat dan tergentengkan. Litologinya dapat disebandingkan dengan Formasi Sawai, Formasi Hatuolo dan Formasi Selagor.
11	TRJm: Formasi Manusela	Batu gamping berlapis baik di bagian bawah dan makin ke atas perlapisannya makin kabur. Dijumpai lapisan tipis rijang yang berwarna kelabu sampai kehitaman. Lokasi tipe formasi ini terletak di Pegunungan Manusela.
12	TRJk: Formasi Kanikeh	Perulangan antara batu pasir, batu lanau dan batu lempung, kompak dan keras. Batuan ini tersingkap di bagian tengah pulau dan di dekat pantai, daerah selatan Gunung Selagor, Kepulauan Gorong dan Watubela.
13	Pzta: Kompleks Kabipoto	Sekis mika, sekis tremolit aktinolit, sekis klorit, batu pualam terdaunkan, sekis epidot, sekis amfibol dan genes.
14	Jku: Batuan Ultramafik	Serpentinit, piroksenit dan dunit tersingkap di sebelah Tenggara dan Selatan Pulau Seram, Pulau Tibor, Pulau Watubela dan Pulau Gorong.

Sumber: Peta Geologi Lembar Bula dan Watubela, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Sebagian besar batuan di Lembar Bula, telah terlipat kuat dan tercenangga. Arah sumbu lipatan berkisar dari Barat-Timur sampai Barat Laut-Tenggara. Pada umumnya besar sudut kemiringannya melebihi 30°, hanya di beberapa tempat lebih kecil. Di selatan Bula sumbu lipatannya hampir sejajar dengan garis pantai. Pada umumnya besar sudut kemiringannya kurang dari 30°. Struktur perdaunan (foliasi) dijumpai pada batuan malihan dengan arah yang tidak teratur. Sesar yang dijumpai adalah sesar naik, sesar turun dan sesar geser jurus. Sesar naik arah jurusnya lebih kurang barat laut-tenggara dengan kemiringan ke arah barat daya. Sesar turun mempunyai arah jurus yang umumnya hampir serupa dengan arah jurus sesar naik. Sedangkan sesar geser arah jurusnya berlawanan dengan jurus sesar naik yakni timur laut-barat daya.

Pada kejadian tektonik yang terakhir menghasilkan sesar naik. Sesar ini mengakibatkan munculnya batuan ultramafik di atas batuan yang lebih muda. Pada fase tektonik ini juga, batuan bancuh (Kompleks Salas) terbentuk dan di beberapa tempat disertai pembentukan olistostrom (sebagai hasil sekunder) disusul pembentukan sesar sekunder.

3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru (Kabupaten Aru)

a. Kepulauan Kei

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Kei dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7.
Formasi Batuan Kepulauan Kei

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qc: Endapan Pantai	Pasir, kerikil dan lumpur. Tersebar di kepulauan Tayandu.
2	Qk: Formasi Kei Kecil	Batu gamping terumbu terdiri atas koral, moluska, ganggang dan briozoa. Umumnya membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan kars dan perbukitan rendah berlereng terjal.
3	Qpo: Formasi Ohoinol	Biokalkarenit yang tidak padat berselingan dengan napal. Menjemari dengan Formasi Kei Kecil, menindih tidak selaras Formasi Weryahan dan membentuk perbukitan rendah bergelombang.
4	Tpw: Formasi Weryahan	Napal dan batu gamping berlapis baik. Umur pliosen, diendapkan dalam lingkungan laut dangkal dan tebal 40 m.
5	Tomw: Formasi Meduar	Batu gamping terumbu dan napal. Napal mengandung sedikit foraminifera kecil sedangkan batu gamping terumbu umumnya berongga, menjemari dengan Formasi Tamangil dan menindih tak selaras Formasi Elat.
6	Tot: Formasi Tamangil	Batu gamping tersusun dari foraminifera bentos dalam matriks mikrit.
7	Tee: Formasi Elat	Kalkarenit napalan dengan sisipan napal.
8	Tey: Formasi Yamtimur	Napal bersisipan kalkarenit dan berlapis baik.
9	pTg: Kompleks Batuan Malihan	Genes-felspar-kuarsa-biotit-muscovit.
10	Tpm: Kompleks Tanjung Matot	Bongkahan kalkarenit, kalkarenit pasiran, dolomit, grewak.

Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Kei dan Tayandu, Maluku.

Struktur dan Tektonika

Di lembar ini paling tidak telah terjadi tiga kali arogenesis. Orogenesa pertama melipat Formasi Elat dan Yamtimur yang kedua melipat formasi-formasi itu lebih kuat dan Formasi Weduar. Orogenesa terakhir menyebabkan Formasi Weryahan ikut terlibat.

b. Kepulauan Aru

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Aru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8.
Formasi Batuan Kepulauan Aru

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lumpur, pasir, granul dari pecahan koral dan batuan.
2	Qt: Formasi Tanah Merah	Batu pasir kuarsa, setempat lempungan dengan sisipan konglomerat dan batu lanau karbonan.
3	TQw: Formasi Wasir	Napal dan batu lumpur gampingan berselingan dengan batu gamping bioklastik.
4	Tpmj: Anggota Jambulenga Formasi Manumbai	Napal, setempat pasiran, terdapat batu gamping bioklastik lempungan.
5	Tpml: Formasi Manumbai	Batu gamping coquina, berselingan dengan kalkarenit dengan sisipan setempat pasiran.
6	Tmk: Formasi Koba	Kalkarenit kapuran hingga napalan. Setempat bersisipan napal pasiran.

Sumber: Peta Geologi Lembar Aru, Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Pola struktur dasar laut sebelah Utara Kepulauan Aru berarah Utara-Selatan atau Utara-Timur Laut dan Selatan-Barat Daya. Struktur geologi yang dijumpai di Kepulauan Aru terutama sesar turun dan kelurusan. Sesar berarah timur laut-barat daya menyesarkan Formasi Koba dan Formasi Manumbai. Kelurusan berkembang baik di kedua formasi tersebut, juga berarah timur laut-barat daya. Perlapisan batuan umumnya mendatar atau hampir mendatar. Di bagian Pulau Wasir, Pulau Ujir dan pantai barat Pulau Wokam, batuan terlipat lemah dengan sumbu lipatan berarah Timur Laut-Barat Daya.

4. Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya

a. Kepulauan Tanimbar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Tanimbar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9.
Formasi Batuan Kepulauan Tanimbar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Lumpur, pasir dan kerikil.
2	Qs: Formasi Saumlaki	Batu gamping koral, padat, setempat terbreksikan, bagian bawah konglomerat dengan komponen batu gamping dan cangkang fosil.
3	QTb: Formasi Batilembuti	Napal dan napal kapuran.
4	Tmbm: Anggota Napal, Formasi Batimafudi	Napal bersisipkan batu gamping pasiran.
5	Tmb: Formasi Batimafudi	Perselingan batu gamping pasiran, napal, batu pasir gampingan.
6	Tpt: Formasi Tangustabun	Perselingan antara lempung, tufa kaca, rijang, batu pasir kuarsa dan batu gamping.
7	M:Kompleks Molu	Terdiri dari batu pasir kuarsa, batu gamping, napal, batu gamping kristal, batu gamping oolit, batu

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
		gamping berfosil spiriferina, rijang, sekis, andesit, piroksen, basal amigdal, diorit hornblenda, trakit porfir dan tufa.

Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Gerakan tektonik yang kuat mengakibatkan beberapa satuan/formasi menjadi terlipat dan tersesarkan. Perlipatan yang dapat diamati mempunyai arah hampir sejajar dengan poros Pulau Yamdena yaitu Timur Laut-Barat Daya. Di pulau Yamdena bagian Barat, perlipatan itu dapat digolongkan terbuka, sedang di bagian Timur tertutup.

b. Kepulauan Babar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Kepulauan Babar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10.
Formasi Batuan Kepulauan Babar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Kerikil, kerakal, pasir, lanau dan lumpur, mengandung sisa tumbuhan, koral dan cangkang kerang, hasil endapan sungai dan pantai.
2	Qk: Konglomerat	Konglomerat aneka bahan dengan komponen fragmen ultrabasa, gabro, diabas, andesit, basal, batu pasir kuarsit, filit, batu lempung, batu gamping malih dan batu gamping terumbu yang direkat karbonat dan limonit, bersisipan batu pasir konglomeratan.
3	Qpg: Batu Gamping Koral	Batu gamping koral, bagian bawah berlapis baik dan bagian atas pejal.
4	TQp: Batu Pasir Kuarsa	Batu pasir kuarsa dan napal pada bagian bawah satuan.
5	Tmpb: Batuan Bancuh	Bancuh mengandung bongkahan asal batuan malihan (pPs), batu gamping Permo-Trias (PTRg), serpih Jura (Js) dan Ofiolit (Of), berasosiasi dengan poton.
6	Js: Serpih	Serpih dan serpih lanauan dengan sisipan batu lempung, batu lanau, batu pasir dan batu gamping.
7	PTRg: Batu Gamping Krinoid	Batu gamping krinoid, berlapis baik, napal mengandung fosil yang rusak dan sukar dikenali, serpih mengandung bintal oksida besi, batu pasir litik berangsur menjadi batu gamping pasiran dan terlipat kuat.
8	PPs: Batuan Malihan	Sekis-klorit-kuarsa, sekis klorit-kuarsa-kalsit, sekis klorit epidot, sekis klorit-biotit, amfibolit, batu gamping malih dan filit, diduga asal sedimen klastika dan batu gamping.
9	Of: Ofiolit	Serpentit, dunit, gabro, diabas dan lava basal.

Sumber: Peta Geologi Lembar Babar Maluku Tenggara

Struktur dan Tektonika

Struktur geologi di daerah ini terdiri dari sesar normal dan sungkup, lipatan, kekar, perdaunan dan diapir. Sesar Sungkup diduga terjadi bersamaan dengan terbentuknya bancuh. Sesar normal berarah Barat-Timur dan Barat Laut-Tenggara.

c. Pulau Moa dan Pulau Damer

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Moa dan Pulau Damer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.11.
Formasi Batuan Pulau Moa dan Pulau Damer

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Pasir, kerikil dan kerakal mengandung pecahan ganggang, coral dan moluska, endapan pantai.
2	Qgp: Batu Gamping Koral	Batu gamping terumbu, setempat membentuk undak-undak, sisipan tufa gampingan berbatu apung.
3	Tmgp: Batu Gamping Klastik	Batu gamping klastika.
4	TRgp: Batu Gamping Berlapis	Batu gamping klastika berlapis baik.
5	PTRgp: Batu Gamping Merah	Batu gamping klastika, setempat bersisipan tipis serpih dan batu pasir. Satuan ini disetarakan dengan Formasi Maubisse di Timor.
6	Ps: Serpih	Serpih dengan sisipan batu pasir, sebagian gampingan.
7	Qv: Breksi Gunung Api	Breksi Vulkanik bersusunan andesit sampai basal, tuf dan bersisipan napal tufan.
8	Tv: Lava	Lava bersusunan andesit sampai basal.
9	PTof: Batuan Ultrabasa	Wherlit, serpentinit dan dunit. Terubah kuat.
10	PPm: Batuan Malihan	Sekis bersisipan genis, filit dan batu gamping malih.
11	Tmpb: Satuan Bancuh	Satuan ini terdiri dari bermacam bongkah batuan beku, batuan sedimen dan batuan malihan yang terkurung dalam massa-dasar serpih tergerus.

Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara

Struktur dan Tektonika

Pulau-pulau Leti, Moa dan Lakor terletak pada jalur busur luar Banda tak bergunung api dan pulau-pulau Romang, Damar, Teun, Nila dan Serua berada pada jalur busur dalam Banda. Struktur geologi yang terdapat di lembar ini terdiri dari sesar, lipatan, kekar dan perdaunan. Pada Busur dalam Banda terjadi sesar normal dan sesar miring sedangkan pada Busur luar Banda, sesar terdiri dari sesar mendatar mengiri dan sesar normal. Kejadian ini menyebabkan teraktifkan kembali struktur tua yakni dengan terjadinya pengangkatan dan terbentuknya batuan bancuh.

d. Pulau Wetar

Satuan/Formasi Batuan

Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Wetar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12.
Formasi Batuan Pulau Wetar

No.	Satuan/Formasi Batuan	Keterangan
1	Qa: Aluvium	Kerakal, kerikil, pasir, lanau, berupa endapan sungai dan pantai.
2	Ql: Batu Gamping Koral dan Breksi Koral	Satuan ini tersebar di pinggir pantai Pulau Wetar.
3	QTv: Batuan Gunung Api Tua	Lava, breksi dan tuf berbatu apung.
4	Tmpa: Formasi Alor	Lava dan breksi bersusunan andesit sampai basal, bersisipan batu pasir dan tuf.
5	Tmn: Formasi Naumatang	Lava dasit, breksi, aglomerat bersusunan dasit, disisipi batu pasir tufan, tuf dan batu pasir gampingan.
6	Tm (di,gd,gr,da): Batuan Terobosan	Diorit (di), granodiorit (gd), granit (gr) dan dasit (da).
7	Tmvs: Batuan Gunung Api Riolit Sakir	Lava riolit.
8	Tmt: Formasi Tihu	Breksi, lava dan tuf bersusunan andesit basal.
9	Ttgd: Granodiorit Tamenang	Granodiorit bertekstur porfir.

Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara

Struktur dan Tektonika

Termasuk dalam Busur Banda Bergunung Api, akan tetapi gunung api yang masih giat tidak dijumpai. Struktur geologi yang terdapat di daerah ini berupa sesar dan lipatan yang lemah. Sesar di daerah ini memiliki dua arah utama yaitu Timur Laut-Barat Daya dan hampir Timur-Barat atau sejajar pulau. Sesar-sesar tersebut berupa sesar geser sinistral dan sesar turun.

D. Hidrologi

1. Kepulauan Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

Sungai yang terdapat di Kepulauan Buru umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu Wae Koa, Wae Nunga, Wae Lihang, Wae Mahu, Wae Tibiki, Wae Lua, Wae Aga, Wae Walo, Wae Lumara, Wae Fogi, Wae Kea, Wae Nalut, Wae Namsina, Wae Sea, Wae Ura, Wae Waplau, Wae Perang, Wae Netat, Wae Rosi, Wae Mangit, Wae Pure, Wae Pait, Wae Wamlana, Wae Nibe dan Wae Poti.

2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur)

Sungai yang terdapat di Pulau Seram umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu Wae Matakabo, Wae Bobo, Wae Bali, Wae Lofin, Wae Kobi, Wae Samal, Wae Sariputih, Wae Isai, Wae Mual, Wae Usa, Wae Tuluamang, Wae Kawa, Wae Myaka, Wae Kuhu, Wae Sapalewa, Wae Utu, Wae Sala, Wae Tala, Wae Ela, Wae Maitihu dan Wae Palu.

3. Kepulauan Kei (Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru

Kondisi hidrologi yang diamati adalah kondisi sungai (besar dan kecil) yang diharapkan dapat menjadi potensi air bagi kehidupan masyarakat di kawasan kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Kondisi sungai yang ada di kawasan Kepulauan Kei merupakan sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau), yaitu sungai Evu, Semawi, Uf, Holay, Watuan, Ur, Weduar. Selain itu di Kepulauan Aru juga terdapat selat atau sering disebut sungai, yaitu Sungai Maikor dan Sungai Warkoi.

4. Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya

Sungai yang terdapat di Wilayah Kepulauan Tanimbar sebagian besar merupakan sungai tadah hujan dan umumnya dengan pola aliran memancar dan hanya berair di musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau kondisinya kering atau tidak berair. Adapun sungai-sungai di Kepulauan Tanimbar antara lain: Sungai Maktian, Selwasan, Wetar, Latdalam, Tamrian, Batmafuti, Lakalway, Wesor, Sinmai, Kamlili, Wemusin, Sahlan, Waslieta, Tepa, Tutuwawang, Yaltubung, Sabir, Linwau dan Arnau.

E. Klimatologi

Iklim di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan. Berdasarkan data klimatologi di 10 stasiun meteorologi di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa rata-rata temperature sempat mencapai 38,4^{0}C di Seram Bagian Timur dan 35,2^{0}C di Maluku Tengagh. Sedangkan rata-rata kelembaban yang pernah mencapai titik tertinggi hingga 100 persen berada di Seram Bagian Timur, Kota Ambon dan Kepulauan Tanimbar. Di beberapa daerah memiliki curah

hujan yang cukup tinggi, bahkan mencapai lebih dari 1.000 mm di Kota Ambon. Begitupula dengan hari hujan yang sempat mencapai hampir setiap hari selama sebulan yakni di Kota Tual dan Kota Ambon. Berikut kondisi Iklim di Provinsi Maluku secara terperinci:

Tabel II.13.
Kondisi Iklim di Provinsi Maluku Tahun 2021

Stasiun/Daerah	Suhu (⁰C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)
Mathilda Batlayeri Saumlaki	22,8 – 33,8	54 – 100	0 - 29	1.004,8 – 1.014,7	15,4 – 586,5	23 - 70
Dumatubun Langgur (Tual)	23,2 – 32,2	86 - 92	3 - 25	1.005,6 – 1.009,6	147,3 – 586,1	11 - 30
Amahai (Maluku Tengah)	22,1 – 35,2	57 - 99	1 – 13,5	1.000,00 – 1.015,3	80,5 – 559,0	36,5 – 71,6
Banda Neira (Maluku Tengah)	22,2 – 34,0	60 - 98	11 - 27	1.005,9 – 1.014,7	117,8 – 607,8	8 - 25
Namlea	23,5 – 31,9	73 - 97	5 - 16	1.004,8 – 1.012,9	43,8 – 278,2	8 - 24
Dobo	23,0 – 33,2	62 - 99	10 - 20	1.005,8 – 1.013,6	0,6 – 276,5	2 - 25
Seram Bagian Barat	20,2 – 34,0	66 - 98	0 - 37	1.005,2 – 1.013,9	84,5 – 591,4	14 - 29
Seram Bagian Timur	24,0 – 38,4	60 - 100	11 - 30	1.007,2 – 1.010,8	81,0 – 621,3	11 - 27
Pattimura Ambon	23,0 – 32,5	43 - 100	0 – 11,83	1.000,0 – 1.015,1	81,4 – 1.309,7	12 - 30
Maritim Ambon	24,0 – 34,1	51 - 99	0 – 15,94	1.006,2 – 1.015,1	89,1 – 1.155,1	16 - 29

Sumber: Provinsi Maluku Dalam Angka 2022

F. Penggunaan Lahan

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 seluas 3.919.617 Ha, yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas 429.538 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.256 Ha (16,00%), Hutan Produksi Terbatas 894.258 Ha (22,81%), Hutan Produksi Tetap 643.699 Ha (16,42%) dan Hutan Produksi Konversi 1.324.866 Ha (33,80%). Sedangkan areal penggunaan lain seluas 1.498.799 Ha. Berdasarkan data Maluku Dalam Angka tahun 2022 terdapat perubahan luas areal hutan karena telah dilakukan tata batas Kawasan oleh BPKH, sehingga rincian kawasan hutan menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.14.
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku Tahun 2021

Kabupaten / Kota	Luas Hutan	Hutan Konservasi (HL)	Hutan Lindung (HL)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Tetap (HP)	Hutan Produksi Konversi (HPK)
Kota Ambon	9.511	-	9.511	-	-	-
Maluku Tengah	618.659	175.766	134.233	179.406	28.522	100.732
Buru	427.434	6.849	108.166	109.951	106.912	95.556
Buru Selatan	345.142	-	73.118	101.652	90.768	79.604
Maluku Tenggara	47.142	18.017	6.438	2.399	2.966	17.322
Kota Tual	11.755	-	9.173	987	-	1.595
Kepulauan Tanimbar	419.467	77.199	13.010	78.165	112.045	139.048
Maluku Barat Daya	334.950	51.168	34.774	4.584	71.262	173.162
Seram Bagian Barat	414.405	32.219	124.699	156.045	9.810	91.632
Seram Bagian Timur	513.196	1.216	107.880	261.069	27.162	115.869
Kepulauan Aru	777.956	67.104	6.254	-	194.252	510.346
MALUKU	**3.919.617**	**429.538**	**627.256**	**894.258**	**643.699**	**1.324.866**

Sumber : Maluku Dalam Angka 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase luas kawasan hutan yang terbesar berada pada Kabupaten Aru dengan luas 777.956 Ha dan luas kawasan hutan terkecil berada pada Kota Ambon dengan luas 9.511 Ha. Luasan kawasan hutan terbesar adalah Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebesar 1.324.866 Ha atau 34% dari luas Kawasan Hutan, 38% Hutan Produksi Konversi berada di Kabupaten Kepulauan Aru atau seluas 510.346 Ha. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Provinsi Maluku sebesar 894.258 Ha atau 23% dari Luas Kawasan Hutan. 29,31% HPT berada di Kabupaten Seram Bagian Timur atau seluas 261.069 Ha. Luas Hutan Produksi Tetap di Provinsi Maluku tercatat sebesar 643.699 Ha atau 16% dari Luas Kawasan Hutan. Dari luasan Hutan Produksi Tetap 30% berada di Kepulauan Aru atau seluas 194.252 Ha. Dari luas kawasan hutan tersebut telah memenuhi luas minimum sebagaimana yang dipersyaratkan (minimum 30% luas daratan). Dengan luasan tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat baik dari segi konservasi, lindung dan produksi.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Maluku memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepulauan Maluku ditinjau dari aspek tektonik, berada pada pertemuan tiga lempeng bumi yakni lempeng Eurasia yang meliputi antara lain Pulau Seram, Buru, Ambon dan pulau-pulau sekitarnya yang bergerak relatif ke arah tenggara, berinteraksi dengan lempeng Hindia, Australia yang relatif bergerak ke arah Utara dengan kecepatan 10 cm/tahun dan

lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 12 cm/tahun, zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung yang mempunyai kedalaman sekitar 4.500-7.000 Meter yang dikenal dengan nama Zona Tumbukan atau Zona Subduksi, akibat dari benturan tersebut terbentuklah patahan-patahan (sesar) yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api dan bencana lainnya.

2. Secara klimatologis wilayah Provinsi Maluku memiliki pola musim yang berbeda di setiap daerah. Pulau Ambon, Lease, Banda dan Seram hampir memiliki pola musim yang sama, dimana musim hujan terjadi pada bulan April sampai dengan September dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Wilayah Pulau Buru, Tual, Saumlaki dan Geser hampir memiliki pola musim yang sama yakni musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Dari perbedaan pola musim yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku maka untuk setiap daerah tentunya memiliki potensi bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, abrasi dan lain-lain yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana fisik, maupun penderitaan manusia yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku
3. Daerah rawan bencana di Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yakni Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Lease, Kepulauan Banda, Pulau Seram, Pulau Ambon, Kawasan Pulau Buru dan sekitarnya, kawasan Pulau Wetar dan sekitarnya serta jenis ancaman yang berbeda seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemi dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut.

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Maluku dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.15.
Jenis Bencana di Provinsi Maluku Tahun 2016-2021

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gempa Bumi	27	21	580	10	1	8
Banjir dan Tanah Longsor	79	51	49	18	11	37
Angin Puting Beliung	29	4	7	7	5	19
Gelombang Pasang	14	1	8	1	0	5
Abrasi Pantai	39	0	2	1	0	0
Kebakaran	132	7	13	2	2	0
Konflik Sosial	20	3	0	0	0	1
Wabah Penyakit	0	0	0	0	1	0
Kekeringan	60	0	0	1	0	0
Total	**443**	**87**	**663**	**40**	**20**	**70**

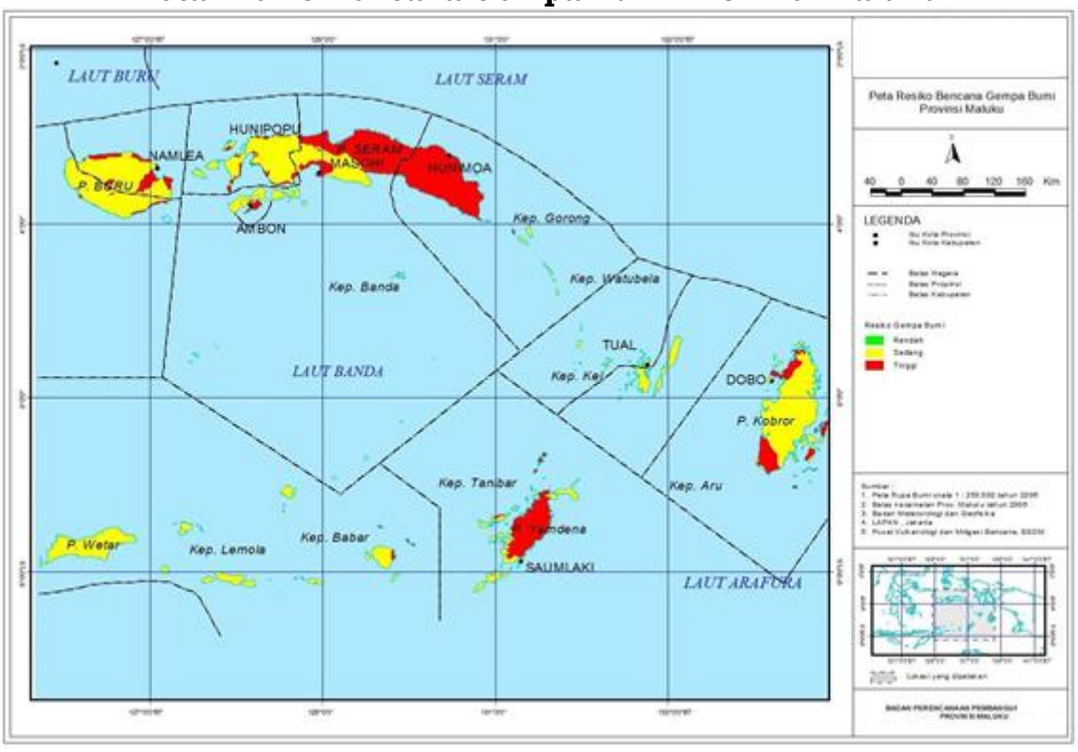
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kawasan-kawasan rawan bencana yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 sebagai berikut:

1. **Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi**

   Berdasarkan data kegempaan yang dimiliki BMKG stasiun Ambon, gempa tektonik berskala besar dan kecil sebanyak 2.736 gempa sejak tahun 2009-2012 yang dirasakan 98 kejadian (2 kali diatas 7 SR). Di samping merusak 8 infrastruktur umum dan 39 pemukiman rumah, gempa juga menimbulkan korban luka 12 orang serta kepanikan dalam masyarakat. Berikut wilayah Provinsi Maluku yang rawan terhadap bencana gempa bumi:

Gambar II.3
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi Maluku



Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

2. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Berdasarkan perhitungan kemiringan pantai sejauh 1.500 meter dari garis pantai maka ditetapkan:

a. Kawasan pantai dengan kemiringan kurang dari 50 merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi;
b. Kawasan pantai dengan kemiringan antara 50-300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan sedang;
c. Kawasan pantai dengan kemiringan lebih besar 300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Maluku 2013 dalam profil mitigasi bencana Provinsi Maluku menyebutkan bahwa kejadian tsunami di antaranya terjadi di Namlea pada tanggal 2 November 2005 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 5,7 skala Richter pada kedalaman 13 Km. Tsunami juga terjadi pada tanggal 14 Maret 2006 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 6,7 Skala Richter dengan kedalaman 30,6 Km. Selanjutnya Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.16.
Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria			Jumlah (Km^2)
		Rendah (Km^2)	Sedang (Km^2)	Tinggi (Km^2)	
1	Maluku Tengah	70.56	412.10	741.96	1224.62
2	Maluku Tenggara dan Kota Tual	55.92	201.03	565.61	822.56
3	Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya	145.87	846.87	1794.77	2787.51
4	Buru dan Buru Selatan	65.94	263.64	421.88	751.46
5	Seram Bagian Barat	64.15	261.82	461.13	787.10
6	Seram Bagian Timur	12.33	274.56	616.39	903.28
7	Kepulauan Aru	0.00	738.27	2003.15	2741.42
8	Ambon	19.56	49.51	53.62	122.69
Jumlah Total		**434.33**	**3.047.80**	**6.658.51**	**10.140.64**

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

3. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2009-2012 telah terjadi 185 kali peristiwa banjir dan tanah longsor di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 74 orang, luka-luka 367 orang, mengungsi 15.845 orang, rumah rusak 5.789.

4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Di Provinsi Maluku terdapat 9 buah gunung api aktif, terdiri dari 7 buah tipe A dan 2 buah Tipe B. Kawasan rawan letusan gunung api di Provinsi Maluku meliputi Pulau Gunung Api, Pulau-Pulau Teon, Nila, Serua dan

Pulau Damer. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 1830-2011 telah terjadi 2 kali peristiwa letusan gunung api pada bulan Mei tahun 1988 dengan korban meninggal 3 orang. Selain itu, meletusnya Gunung Api Banda yakni pada tahun 1989. Selanjutnya pada bulan Januari 1993 dengan jumlah korban meninggal 1 orang, luka-luka 12 orang serta korban menderita sejumlah 3.000 orang.

5. **Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang**

   Sejumlah kejadian tinggi gelombang perairan yang merusak talud penahan ombak pernah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pulau Haruku pada bulan Mei 2011 yang mengakibatkan 1 talud pengaman pantai mengalami kerusakan. Kejadian tinggi gelombang perairan lainnya terjadi di pantai Natsepa, Suli pada bulan Juni 2011 yang menyebabkan patahnya talud penahan ombak sepanjang 8 meter.

   Dalam hal gelombang pasang di Provinsi Maluku juga sangat terkait dengan peristiwa kecelakaan transportasi laut. Kondisi laut di musim barat dan musim timur gelombang air laut naik yang sangat mengganggu transportasi di laut dikaitkan dengan kapal-kapal yang belum mempunyai alat pendeteksi gelombang air laut serta belum dilengkapi peralatan penyelamatan (perahu karet, pelampung). Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2010-2012 telah terjadi 31 kali peristiwa kecelakaan transportasi di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 107 orang, luka-luka 48 orang.

6. **Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung**

   Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 76 kali peristiwa angin puting beliung di Provinsi Maluku dengan korban meninggal atau hilang sebanyak 7 orang dan 1.068 rumah rusak.

7. **Kawasan Rawan Bencana Konflik Sosial**

   Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 28 kali peristiwa konflik sosial di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal 33 orang, luka-luka 401 orang, mengungsi 4.771 orang, rumah rusak 1.275.

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Maluku diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku guna membangun Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan

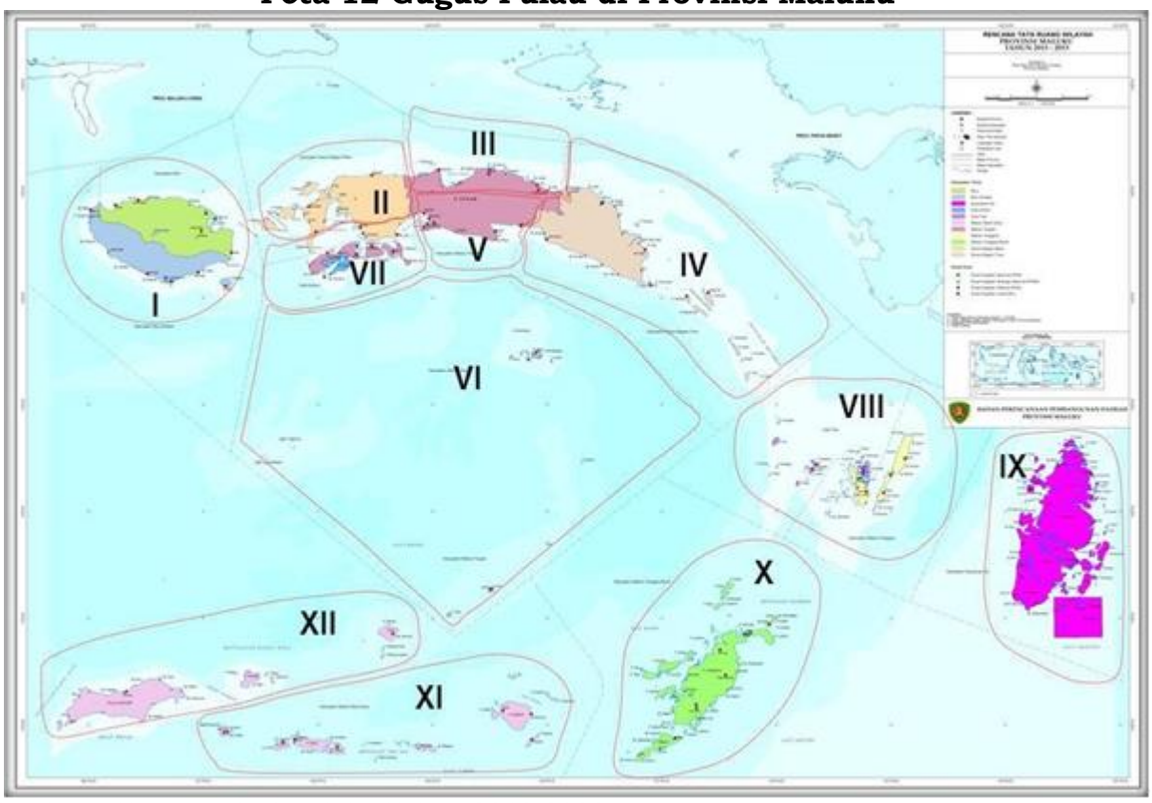
berkelanjutan berbasis pada perikanan (budidaya dan tangkap), pertanian (perkebunan rempah-rempah), pariwisata (pariwisata bahari, sejarah dan budaya) dan pertambangan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang Provinsi Maluku dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau dan Pintu Jamak *(Multy Gate)* yang diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku, yaitu:

a. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;
b. Gugus Pulau II meliputi Wilayah Seram Barat;
c. Gugus Pulau III meliputi Wilayah Seram Utara;
d. Gugus Pulau IV meliputi Wilayah Seram Timur;
e. Gugus Pulau V meliputi Wilayah Seram Selatan;
f. Gugus Pulau VI meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P. Teon, P. Nila dan P. Serua;
g. Gugus Pulau VII meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease;
h. Gugus Pulau VIII meliputi Wilayah Kepulauan Kei;
i. Gugus Pulau IX meliputi Wilayah Kepulauan Aru;
j. Gugus Pulau X meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar;
k. Gugus Pulau XI meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer;
l. Gugus Pulau XII meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.

Secara spasial yang ditunjukkan dengan peta, konsep pengembangan wilayah Maluku dengan gugus pulau dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.4
Peta 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku



Sumber: RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033

PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Maluku. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Provinsi Maluku meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Provinsi Maluku mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

Tabel II.17.
Sistem Perkotaan di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
1	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	-	-	Saumlaki
2	Maluku Barat Daya	-	Tiakur dan Wonreli	Ilwaki
3	Maluku Tenggara	-	Langgur	-
4	Maluku Tengah	-	Masohi dan Wahai	-
5	Buru	-	Namlea	-
6	Buru Selatan	-	Kepala Madang dan	-

No	Kabupaten/Kota	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
			Namrole	
7	Kep. Aru	-	-	Dobo
8	Seram Bagian Barat	-	Kairatu dan Dataran Honipopu	-
9	Seram Bagian Timur	-	Werinama, Bula dan Dataran Hunimua	-
10	Ambon	Ambon	-	-
11	Tual	-	Tual	-

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Maluku yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Yamtel, Namsel, Tubyal, Waenetat, Ilath, Waplau, Airbuaya, Sawa, Wamlana, Kubalahin, Basalale, Kayeli, Teluk Bara, Leksula, Waisama, Wailua, Biloro, Elfule, Fena Fafan, Taniwel, Waisala, Hunitetu, Latu, Kamal, Luhu, Tomalehu Timur, Dan Uwen Pantai, Amahai, Banda Naira, Sahulau, Saparua, Pelauw, Hila, Ameth, Laimu, Tehoru, Tulehu, Kobisonta, Makariki, Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru, Weiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau Panjang, Miran, Elat, Weduar, Holath, Ohoira, Rumat, Larat, Adaut, Lorulung, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo, Tutukembong, Weet, Wulur, Tepa, Letwurung, Serwaru, Lelang, Jerol, Benjina, Marlasi, Batulei, Koijabi, Longgar, Meror.

Tabel II.18.
Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1.	Maluku Tengah	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Pulau Ambon-Seram
2.	Maluku Tenggara	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional WS Provinsi Kepulauan Kei-Aru WS Provinsi
3.	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Nasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Yamdena-Wetar
4.	Buru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategi Nasional Pulau Buru WS Provinsi

No.	Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
		Nasional		
5.	Seram Bagian Timur	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
6.	Seram Bagian Barat	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram
7.	Kepulauan Aru	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional WS Provinsi Kepulauan Kei-Aru
8.	Maluku Barat Daya	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Yamdena-Wetar
9.	Buru Selatan	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Buru WS Provinsi
10.	Ambon	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Kolektor Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional - Pelabuhan Internasional - Bandar Udara Tersier	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Pulau Ambon- Seram
11.	Tual	- Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer - Jaringan Jalan Strategis Nasional	- Jaringan Terestrial - Jaringan Satelit	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru WS Provinsi

Sumber : RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sebagai upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional, Provinsi Maluku mengemban peran sebagai Provinsi yang Berciri Kepulauan didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan kolektor primer. Dua jaringan transportasi di Provinsi Maluku juga didukung oleh jaringan transportasi laut, pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit serta

peningkatan kualitas jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang merupakan WS strategis nasional di Maluku.

Tabel II.19.
Sistem Arahan Pola Ruang
Wilayah Nasional di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
1	Maluku Tengah	- Cagar Alam Tanjung Sial - Cagar Alam Laut Banda - Taman Nasional Manusela - Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo - Taman Wisata Alam Laut Banda	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata) - Kawasan Andalan Laut Banda (Perikanan, pertambangan, pariwisata)	- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram - Kawasan Laut Banda
2	Maluku Tenggara	- Cagar Alam Daab	- Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	
3	Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	- Suaka Margasatwa Tanimbar - Cagar Alam Pulau Nuswotar - Cagar Alam Pulau Larat - Cagar Alam Tafermaar	- Kawasan Kei sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri) - Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya (Perikanan laut, pertambangan, pariwisata)	Kawasan Perbatasan Laut RI
4	Buru	- Cagar Alam Masbait - Cagar Alam Masarete	- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
5	Seram Bagian Timur		- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
6	Seram Bagian Barat	- Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa - Cagar Alam Gunung Sahuwai - Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa - Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya	- Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Lindung Nasional	Kawasan Budidaya Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional
7	Kepulauan Aru	- Suaka Margasatwa Pulau Baun - Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara - Suaka Margasatwa Pulau Kobror	- Kawasan Kei Sampai Aru Pulau Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
8	Maluku Barat Daya	- Cagar Alam Bekau Huhun	- Kawasan Kei Sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau, Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	Kawasan Perbatasan Laut RI
9	Buru Selatan		- Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)	
10	Ambon	-	-	-
11	Tual		- Kawasan Kei sampai Aru, Pulau Wetar-Pulau, Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)	

Sumber: RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis. Kawasan perikanan dan pertanian yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian, tanaman pangan, komoditas padi dan sagu, kawasan berpotensi perkebunan cengkeh, pala, kelapa, kakao, pohon kayu putih, jambu mete, kopi, dan vanili. Sektor unggulan pertanian diarahkan pada kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Ambon, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan komoditas perikanan dengan pengembangan kawasan berpotensi perikanan budidaya dan pengembangan kawasan berpotensi perikanan tangkap dan Kawasan Pengembangan Pariwisata diarahkan pada 11 Kabupaten/Kota.

Pengembangan kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan pertanian, kawasan pengembangan

budidaya komoditas perkebunan unggulan, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan pengembangan komoditas perikanan diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energi sehingga peran dan fungsi Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dan sebagai Lumbung Ikan Nasional dapat terwujud. Kawasan yang berpotensi untuk diarahkan sebagai pengembangan komoditas pertambangan meliputi pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral Mangan dan Nikel diarahkan pada Kabupaten Maluku Tengah dan pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan kawasan pariwisata diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapatan masyarakat lokal yang diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan. Wilayah pesisir Provinsi Maluku mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Wilayah ini mengandung berbagai sumberdaya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan dan obyek wisata. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Maluku menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.1.1.4. Potensi Sumber Daya Alam

A. Perikanan

Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan yang cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dari 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 714, WPP 715 dan WPP 718, total potensi sumberdaya ikan Provinsi Maluku sebesar 4.669.390 ton per tahun (37,2% dari total potensi perikanan Nasional), dengan total Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan sebesar 3.735.225 ton per tahun. Namun hingga tahun 2018 produksi hasil perikanan Maluku baru mencapai 13,24% (618.016 ton) dari total potensi yang dimiliki atau 16,55% dari Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan.

Tabel II.20.
Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan & Tingkat Pemanfaatan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia		Jenis Ikan				Udang Panaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi	Total
		Pelagis Kecil	Pelagis Besar	Demersal	Karang						
WPP 714	Potensi (Ton)	165.944	304.293	98.010	145.530	3.180	724	1.145	1.669	68.444	788.939
	JTB (Ton)	132.755	243.435	78.408	116.424	2.544	579	916	1.335	54.755	631.151
	Tingkat Pemanfaatan	0,44	0,78	0,58	0,76	0,39	1,73	1,55	0,77	1,00	
		73.015	237.349	56.846	110.603	1.240	1.253	1.775	1.285	68.444	551.809
WPP 715	Potensi (Ton)	555.982	31.659	325.080	310.866	6.436	846	891	495	10.272	.242.527
	JTB (Ton)	444.786	25.327	260.064	248.693	5.149	677	712	396	8.217	994.021
	Tingkat Pemanfaatan	0,88	0,97	0,22	0,34	0,78	1,32	1,19	0,98	1,86	
		489.264	30.709	71.518	105.694	5.020	1.117	1.060	485	19.106	723.974
WPP 718	Potensi (Ton)	836.973	818.870	876.722	29.845	62.842	1.187	1.498	775	9.212	.637.924
	JTB (Ton)	669.579	655.096	701.378	23.588	50.274	950	1.198	620	7.370	.110.053
	Tingkat Pemanfaatan	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28	
		426.856	810.681	587.404	31.934	54.044	1.151	1.273	597	11.791	.925.732
									Maluku : 4.669.390 Nasional : 12.541.437 Persentasi : 37,2%		

Sumber : Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Maluku, 2018

B. Perkebunan

Provinsi Maluku memiliki 3 (tiga) komoditas unggulan perkebunan yakni cengkeh, pala dan kelapa yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi

Maluku. Komoditas kelapa dapat ditemui di semua kabupaten/kota dengan luas areal sebesar 114.634,44 Ha dengan total produksi tahun 2020 sebesar 105.036,35 Ton, dimana Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur merupakan kontributor utama produksi kelapa di Maluku. Untuk komoditas perkebunan cengkeh, Pada tahun 2021 Provinsi Maluku memiliki luas areal untuk tanaman cengkeh sebesar 44.566,89 Ha dengan produksi sebesar 20.769,60 ton. Sebaran tanaman cengkeh meliputi 9 kabupaten/kota yang di Maluku, kecuali Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru. Sementara itu, komoditas perkebunan pala dengan luas areal sebesar 35.358,06 Ha pada tahun 2021, produksi pala di Maluku sebesar 5.574,00 ton. Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah merupakan kabupaten-kabupaten dengan produksi pala terbesar di Maluku.

Tabel II.21.
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Maluku
Tahun 2021

Kabupaten / Kota	Luas Areal (Ha)			Produksi (Ton)		
	Kelapa	Cengkeh	Pala	Kelapa	Cengkeh	Pala
Kepulauan Tanimbar	17.245,47	-	13,00	19.136,90	-	1,65
Maluku Tenggara	22.970,18	20,45	2.969,60	20.999,60	7,08	419,05
Maluku Tengah	20.905,83	18.746,47	11.941,50	19.540,20	9.634,10	2.463,40
Buru	4.929,85	1,226.41	1.335,34	3.732,40	435,00	100,75
Kepulauan Aru	3.066,98	0,34	23,00	1.760,00	-	3,95
Seram Bagian Barat	8.271.10	7.135,55	2.879,50	7.844,00	3.011,00	257,60
Seram Bagian Timur	18.268,39	10,074.50	9.685,39	16.755,70	4.990,00	1.292,10
Maluku Barat Daya	6.301,20	218,38	1.515,96	5.506,55	56,52	169,90
Buru Selatan	9.424,00	5.607,70	2.954,30	7.847,00	2.274,60	515,85
Kota Ambon	2.311,70	1.501,00	1.763,00	1.594,00	349,40	329,80
Kota Tual	949,74	36,09	97,47	320,00	11,90	19,95
Maluku	**114.634,44**	**44.566,89**	**35.358,06**	**105.036,35**	**20.769,60**	**5.574,00**

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku, 2021

C. Pariwisata

Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia memiliki berbagai keistimewaan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari segi aspek historis yang dimilik tetapi juga berbagai keindahan alam serta keunikan lokal baik tradisi, budaya serta masyarakatnya.

Potensi daya tarik wisata Provinsi Maluku dalam keseluruhan area atau lingkup kabupaten yang ada beranekaragam. Potensi obyek dan daya tarik Maluku yang menjadi andalan sampai saat ini serta dikenal luas adalah obyek dan daya tarik alam dan budaya serta peninggalan sejarah. Obyek tersebut berupa pulau-pulau kecil dan pantai eksotik yang indah serta bangunan peninggalan kebudayaan di masa lalu. Obyek dan daya tarik wisata budaya

tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota. Kondisi daya tarik wisata budaya dan sejarah sampai saat ini sudah beberapa yang dikembangkan. Untuk lebih Jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.22.
Perkembangan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi Maluku

NO	LOKASI	POTENSI WISATA				JUMLAH
		BAHARI	ALAM	SEJARAH/ BUDAYA	BUATAN	
1.	Kota Ambon	40	13	50	-	103
2.	Kab. Maluku Tengah	53	12	50	1	116
3.	Kab. Maluku Tenggara	36	12	28	-	76
4.	Kab. MTB	18	6	16	-	40
5.	Kab. Kepulauan Aru	25	26	30	6	87
6.	Kab. Seram Bagian Barat	32	45	47	-	124
7.	Kab. Seram Bagian Timur	17	16	10	-	43
8.	Kab. Buru	17	9	18	6	50
9.	Kab. Buru Selatan	7	2	6	-	15
10.	Kab. MBD	19	48	98	-	165
11.	Kota Tual	16	2	6	1	25
JUMLAH		**280**	**191**	**359**	**14**	**844**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Maluku, 2019

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Maluku digambarkan sebagai berikut:

1. Ketenagalistrikan

- Sistem ketenagalistrikan di Provinsi Maluku terdiri dari 8 sistem kelistrikan dengan beban di atas 2 MW adalah Sistem Ambon – 53 MW, Sistem Masohi-Waipia-Liang – 6,4 MW, Sistem Kairatu-Piru – 2,2 MW, Sistem Namlea-Mako – 7,5 MW, Sistem Saparua – 1,5 MW, Sistem Langgur – 7,6 MW, Sistem Dobo – 3,1 MW, Sistem Saumlaki 2,8 MW.
- Jumlah desa yang belum berlistrik sebanyak 228 desa dari total jumlah desa di Provinsi Maluku sebanyak 1242 desa.
- Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik bagi industri serta pemenuhan rasio ketersediaan daya listrik masih diperlukan pembangunan pembangkit baru.

2. Energi Baru Terbarukan

Provinsi Maluku memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, panas

bumi, biomassa dan gelombang laut. Berdasarkan inventarisasi, potensi tersebut adalah sebagai berikut :

Energi Air : Potensi energi air terinventarisasi di Pulau Seram sebesar 217,4 MW, Pulau Buru sebesar 15 MW. Potensi ini perlu dikaji lebih jauh untuk mendapatkan data lengkap dan detail, sehingga dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Tabel II.23.
Data Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Maluku

NO	SUMBER AIR		LOKASI			PERKIRAAN DAYA (KW)
	NAMA SUNGAI	INDUK SUNGAI	DESA	KEC.	KAB.	
1	WAE MALA	WAE MALA	MASOHI	AMAHAI	MALTENG	2.100
2	WAE PIA	WAE PIA	MASOHI	AMAHAI	MALTENG	3.300
3	NUA - 1	NUA	MASOHI	AMAHAI	MALTENG	3.500
4	NUA - 2	NUA	MASOHI	AMAHAI	MALTENG	5.500
5	WAE TALA	WAE TALA	MASOHI	AMAHAI	MALTENG	21.300
6	MALA - 1	WAE MALA	KAIRATU	KAIRATU	SBB	14.600
7	MALA - 2	WAE MALA	KAIRATU	KAIRATU	SBB	7.500
8	LIOCOPA	WAE MALA	KAIRATU	KAIRATU	SBB	1.500
9	RIVAPA - 2	WAE MALA	KAIRATU	KAIRATU	SBB	1.900
10	NALA	WAE MALA	KAIRATU	KAIRATU	SBB	2.800
11	KAWANENU	WAE MALA	KAIRATU	KAIRATU	SBB	2.400
12	ARU	WAE MALA	KAIRATU	KAIRATU	SBB	1.800
13	KUKUREHA	WAE MALA	PIRU	PIRU	SBB	600
14	ETI	WAE MALA	PIRU	PIRU	SBB	2.400
15	ISAL - 1	ISAL	WAHAI	WAHAI	MALTENG	9.900
16	ISAL - 2	ISAL	WAHAI	WAHAI	MALTENG	60.000
17	ISAL - 3	ISAL	WAHAI	WAHAI	MALTENG	4.300
18	W. TOEN	W. TOEN	TEHORU	TEHORU	MALTENG	5.100
19	W. LASA	W. LASA	TEHORU	TEHORU	MALTENG	5.700
20	W. KAWA - 1	W. KAWA	TEHORU	TEHORU	MALTENG	12.300
21	NAPUSU LOKU	NAPUSU LOKU	TEHORU	TEHORU	MALTENG	13.300
22	JAHE	JAHE	TEHORU	TEHORU	MALTENG	4.600
23	WALALA - 1	WALALA	TEHORU	TEHORU	MALTEG	3.500
24	LAU	LAU	TEHORU	TEHORU	MALTENG	12.400
25	NASULU - 1	NASULU	TEHORU	TEHORU	MALTENG	5.700
26	NASULU - 2	NASULU	TEHORU	TEHORU	MALTENG	4.000
27	WALALA - 2	WALALA	TEHORU	TEHORU	MALTENG	5.400
28	WAETINA	WAETINA	WAETINA	NAMROLE	BURU SELATAN	12.000

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019

Energi Surya : Berdasarkan letak geografis dan strategis, hampir seluruh daerah di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan PLTS dengan daya mencapai 4 kWh/m2. Kawasan timur Indonesia berpotensi penyinaran sekitar 5,1 kWh/m2/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan baik dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik energi surya.

Energi Bayu : Berdasarkan analisis potensi angin dan pemetaan energi angin yang telah dilakukan oleh kementerian ESDM di wilayah kawasan

timur Indonesia termasuk wilayah Maluku terinventarisir diantaranya di Ambon (15 MW), Kei Kecil (5 MW) dan Saumlaki (5 MW) Di lokasi Ambon sedang dilakukan pengembangan oleh pengembang listrik swasta dengan daya 17 MW.

Energi Panas Bumi : Potensi energi panas bumi di Maluku telah teridentifikasi yaitu di daerah Waisekat (14 MWe), Wapsalit –Waeapo (30 MWe), Batabual (25 MWe), Larike (25 MWe), Tawiri (25 MWe), Tulehu (100 MWe), Oma – Haruku (30 MWe), Saparua (25 MWe), Nusalaut (25 MWe), Tehoru (35 MWe), Banda Naira (33MWe), Pohon Batu (50 MWe), Kelapa Dua (25 MWe), Warmong (30 MWe) dan Esulit (25MWe). Lokasi yang telah memiliki izin adalah Tulehu (2 x 10 MW) yang sekarang telah memasuki tahap pengembangan.

Energi Arus Laut : Potensi energi arus laut teridentifikasi di tiga lokasi di Kabupaten Kepulauan Aru dan satu lokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel II.24.
Data Lokasi Potensi Energi Arus Laut di Provinsi Maluku

No	Lokasi Potensi	Kecamatan	Kabupaten
1	Selat Manumbai	Aru Tengah	Kepulauan Aru
2	Selat Barakai	Aru Tengah	Kepulauan Aru
3	Selat Sir - Sir	Aru Tengah	Kepulauan Aru
4	Haya Pulau	Waesela	Seran Bagian Barat

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019

3. Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan bahan galian meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Maluku, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada maraknya pertambangan tanpa izin. Penertiban area penambangan liar sampai dengan akhir Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.25.
Data Area Penambangan Liar di Provinsi Maluku Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah Lokasi	Luas (Ha)
1.	Area Penambangan Liar	4	460
2.	Area Penambangan Liar Yang Ditertibkan	2	110
3.	Area Penambangan Liar Yang Belum Ditertibkan	2	350

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi Maluku, 2019

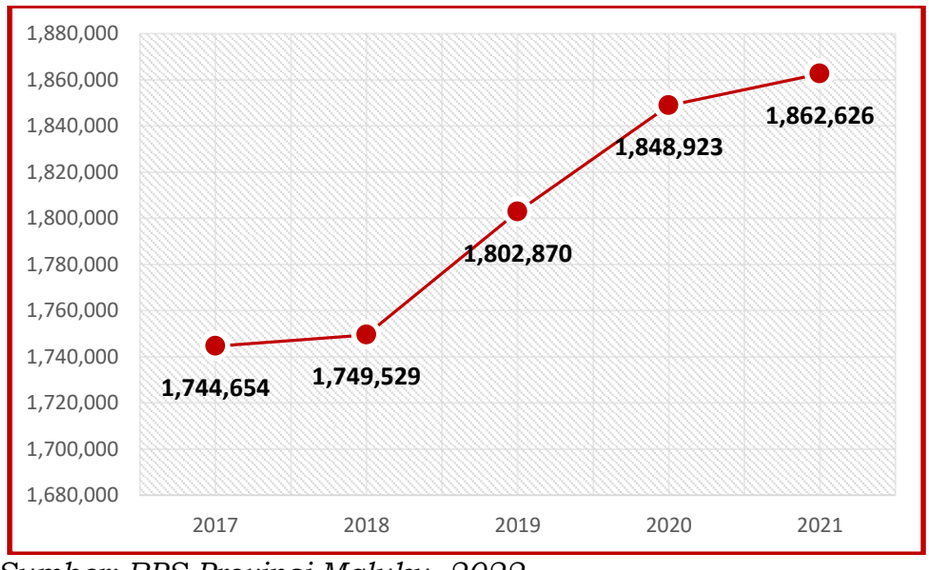
4. Minyak dan Gas

Upaya pengembangan potensi sumber daya minyak dan gas (migas) di Provinsi Maluku terus dilaksanakan. Terdapat tiga wilayah kerja migas di Maluku yakni wilayah kerja Bula, Non Bula dan Masela. Pengembangan ini tentu menjadi salah satu penyumbang terhadap perekonomian di Maluku mengingat pemerintah daerah memiliki kesempatan mengelola *Participating Interest* (PI) sebesar 10 persen dari blok migas di wilayah Maluku.

2.1.1.5. Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Gambar II.5
Perkembangan Jumlah Penduduk
di Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Penambahan jumlah penduduk di Maluku cukup signifikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 1.744.654 jiwa dan meningkat hingga mencapai 1.862.626 jiwa pada tahun 2021. Dari keseluruhan total penduduk di Maluku, sebagian besar tinggal di Kabupaten

Maluku Tengah yang mencapai 424.730 jiwa atau sekitar 22,80 persen. Adapun ibukota Maluku yakni Kota Ambon memiliki jumlah penduduk sebanyak 347.644 jiwa atau sekitar 18,66 persen.

Jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya, maka pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku selama setahun terakhir (2020-2021) mencapai 0,99 persen dimana pertumbuhan penduduk tertinggi dialami oleh Kota Tual dengan capaian 3,1 persen disusul oleh Kabupaten Buru Selatan sebesar 2,31 persen.

Provinsi Maluku memiliki kepadatan penduduk mencapai 40 penduduk per km^2. Sebagai ibukota provinsi, Kota Ambon memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni 1.164 penduduk per km^2 disusul Kota Tual yang mencapai 355 penduduk per km^2. Adapun *sex ratio* Maluku mencapai 103 yang mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Namun pola ini tidak berlaku pada Kabupaten Maluku Tenggara dimana *sex ratio* berada di bawah angka 100 yang mengindikasikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel II.26.
Indikator Kependudukan di Provinsi Maluku Tahun 2021

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk 2020-2021	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
Kepulauan Tanimbar	124.075	0,54	6,66	28	102
Maluku Tenggara	122.640	1,24	6,58	119	99
Maluku Tengah	424.730	0,52	22,80	53	103
Buru	136.393	1,14	7,32	28	105
Kepulauan Aru	102.916	0,89	5,53	13	107
Seram Bagian Barat	214.733	1,47	11,53	43	105
Seram Bagian Timur	140.271	2,23	7,53	22	104
Maluku Barat Daya	82.187	0,42	4,41	18	105
Buru Selatan	76.715	2,31	4,12	20	105
Ambon	347.644	0,14	18,66	1.164	100
Tual	90.322	3,10	4,85	355	100
MALUKU	**1.862.626**	**0,99**	**100,00**	**40**	**103**

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Jika dilihat dari kelompok umur, maka terlihat bahwa penduduk terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 180.165 jiwa dan disusul oleh kelompok umur di atasnya (20-24 tahun) sebanyak 177.653 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 29.617 jiwa dan disusul oleh penduduk berumur 75 tahun ke atas sebanyak 30.393 jiwa.

Tabel II.27.
Jumlah Penduduk Menurut Umut di Provinsi Maluku Tahun 2021

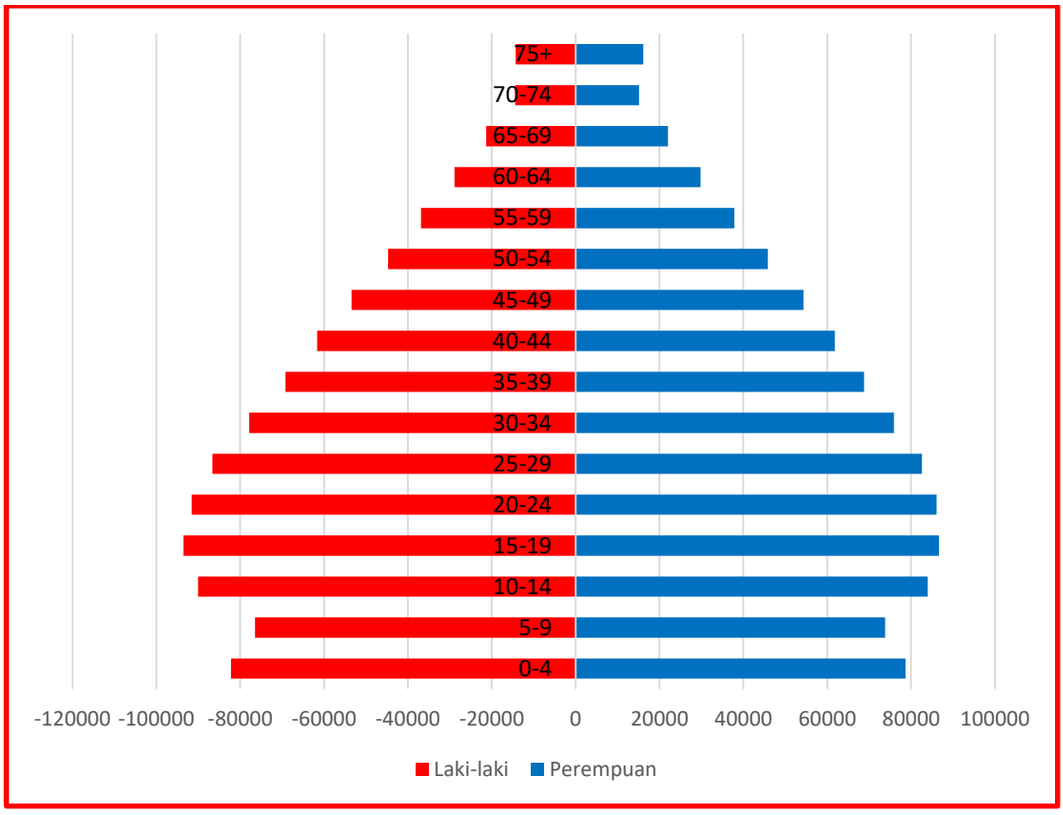
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	82.229	78.714	160.943
5-9	76.441	73.780	150.221
10-14	90.067	83.987	174.054
15-19	93.521	86.644	180.165
20-24	91.576	86.077	177.653
25-29	86.601	82.596	169.197
30-34	77.843	75.906	153.749
35-39	69.183	68.835	138.018
40-44	61.623	61.864	123.487
45-49	53.417	54.337	107.754
50-54	44.755	45.866	90.621
55-59	36.868	37.846	74.714
60-64	28.909	29.797	58.706
65-69	21.316	22.018	43.334
70-74	14.460	15.157	29.617
75+	14.264	16.129	30.393
Total	**943.073**	**919.553**	**1.862.626**

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

Jika dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, terlihat bentuk ekspansif pada piramida penduduk Maluku. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk pada usia muda cukup banyak, dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan (utamanya jangka panjang).

Gambar II.6
Piramida Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Provinsi Maluku utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Provinsi Maluku. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

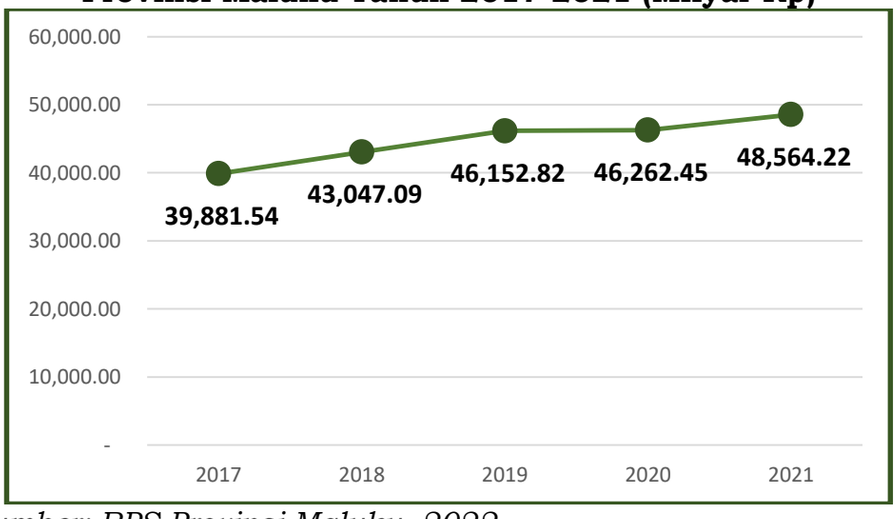
Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Maluku antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Gambar II.7
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021 (Milyar Rp)



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Pada tahun 2017, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 39,88 trilyun rupiah dan meningkat cukup signifikan hingga mencapai lebih dari 48,56 trilyun rupiah pada tahun 2021. Peningkatan ini tentu saja merupakan progress positif pada pembangunan ekonomi Maluku sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika melihat struktur ekonomi Provinsi Maluku, maka akan terlihat dominasi sektor pembangunan perekonomian daerah adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 23,23 persen pada tahun 2021; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 22,86 persen dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,37 persen. Sedangkan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah pada perekonomian maluku adalah kategori pengadaan listrik dan gas (0,10%) dan kategori real estate (0,29%).

Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, terlihat dari dominasi lapangan usaha, bahwa sektor unggulan yang berkontribusi cukup penting bagi perekonomian daerah adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selain dominasi lapangan usaha, potensi pada ketiga kategori tersebut cukup menjanjikan dalam pengelolaan pembangunan ekonomi wilayah ke depan, sehingga perlu kebijakan yang relevan dan khusus untuk mengembangkannya.

Tabel II.28.
Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,80	23,33	23,35	24,00	23,23
B	Pertambangan dan Penggalian	2,29	2,56	2,29	2,20	2,42
C	Industri Pengolahan	5,33	5,35	5,19	5,11	4,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,43	0,41	0,41	0,41	0,42
F	Konstruksi	7,54	7,65	7,80	7,85	7,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,60	13,50	13,71	13,23	13,37
H	Transportasi dan Pergudangan	5,22	5,19	5,25	4,53	4,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,71	1,69	1,70	1,57	1,54
J	Informasi dan Komunikasi	3,07	3,02	2,98	3,04	3,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,76	3,86	3,86	4,13	4,28
L	Real Estate	0,31	0,30	0,28	0,28	0,29
M,N	Jasa Perusahaan	0,99	0,99	0,98	0,97	0,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,25	22,53	22,56	22,86	22,86

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	5,77	5,72	5,75	5,81	5,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,16	2,13	2,14	2,25	2,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,67	1,67	1,66	1,64	1,61
PDRB		100,0	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya perekonomian di Provinsi Maluku tumbuh stabil dengan capaian di kisaran 5 persen pada tahun 2017-2019. Namun dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang mulai muncul pada semester pertama tahun 2020, maka hal tersebut mengganggu kestabilan perekonomian baik skala mikro maupun makro. Hal ini sangat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Maluku yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 dengan capaian -0,92 persen.

Pada kondisi pembangunan 2021, melalui berbagai program dan kebijakan pemulihan dan penanganan pandemi COVID-19, maka perekonomian daerah berangsur membaik. Hal ini terlihat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi baik sektoral maupun secara keseluruhan dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,04 persen. Adapun sektor yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi adalah Kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan ekonomi hingga -2,26 persen.

Tabel II.29.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

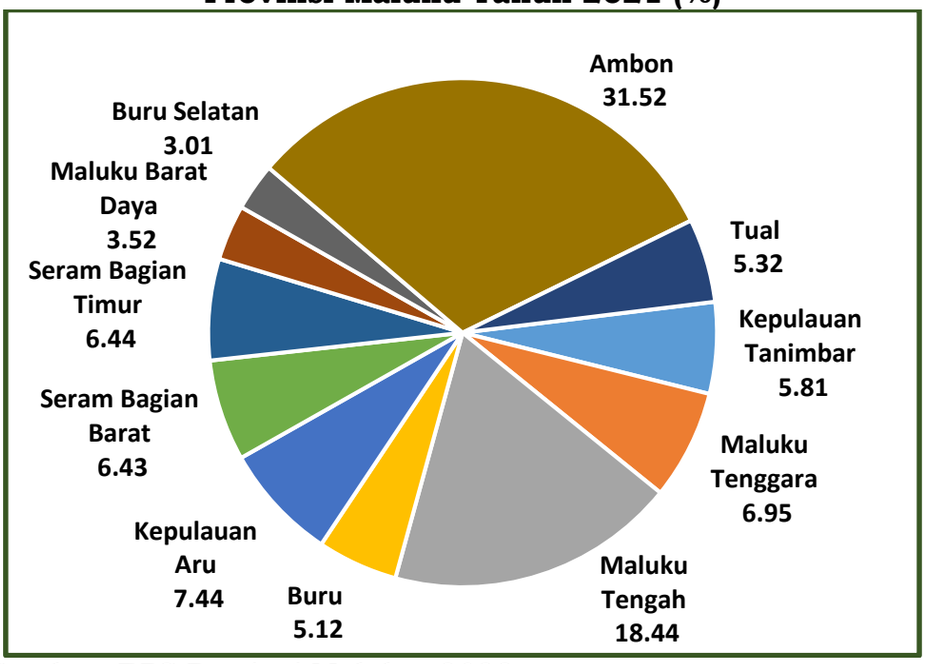
Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,99	4,57	5,42	1,71	0,75
B	Pertambangan dan Penggalian	0,21	-7,36	- 4,50	-0,78	-2,26
C	Industri Pengolahan	4,76	7,28	2,69	-2,31	0,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,48	4,69	1,26	6,18	6,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,43	3,53	4,62	1,22	4,04
F	Konstruksi	5,69	7,93	7,54	-0,72	4,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,12	6,00	6,84	-4,41	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan	3,88	6,02	5,16	-13,36	6,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,28	4,90	5,66	-7,69	2,01
J	Informasi dan Komunikasi	6,08	5,18	3,76	1,04	6,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	7,14	5,61	7,57	3,54
L	Real Estate	2,68	2,26	1,49	-0,22	4,88
M,N	Jasa Perusahaan	4,93	5,57	5,09	-1,21	4,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,87	8,26	5,69	-0,04	3,48
P	Jasa Pendidikan	5,62	6,57	6,61	-0,04	3,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,41	5,52	5,92	4,46	5,61

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,27	6,58	5,37	-2,21	1,91
PDRB		5,82	5,91	5,41	-0,92	3,04

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Terlihat dominasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dalam pembentukan struktur ekonomi Provinsi Maluku. Kota ambon memiliki kontribusi terhadap perekonomian Maluku sebesar 31,52 persen dengan nilai PDRB hampir mencapai 15,54 trilyun rupiah dan Kabupaten Maluku Tengah berkontribusi sebesar 18,44 persen dengan nilai PDRB sebesar 9,09 trilyun rupiah. Dominasi ini cukup beralasan mengingat Kota Ambon merupakan barometer pembangunan di Maluku sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat pemerintahan.

Gambar II.8
Struktur Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Tahun 2021 (%)



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

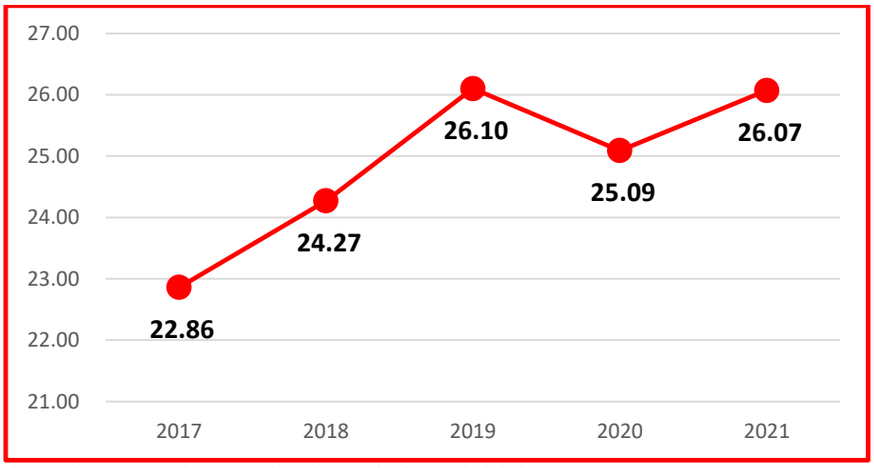
b. PDRB per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena pembagian nilai tambah secara langsung dengan jumlah penduduk, namun indikator ini dapat

memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Peningkatan PDRB per kapita secara umum menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat secara makro meningkat meskipun pemerataannya masih belum bisa diperkirakan. Namun pola kenaikan ini mengalami kontraksi dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per Kapita dari 26,10 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 25,09 juta rupiah pada tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh Indonesia mulai Maret 2020 silam. Adapun melalui berbagai kebijakan pemulihan dan penanganan pandemi COVID-19, maka perekonomian Maluku semakin membaik dimana PDRB per Kapita kembali meningkat menjadi 26,07 juta rupiah.

Gambar II.9
PDRB per Kapita
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021 (Juta Rp.)



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

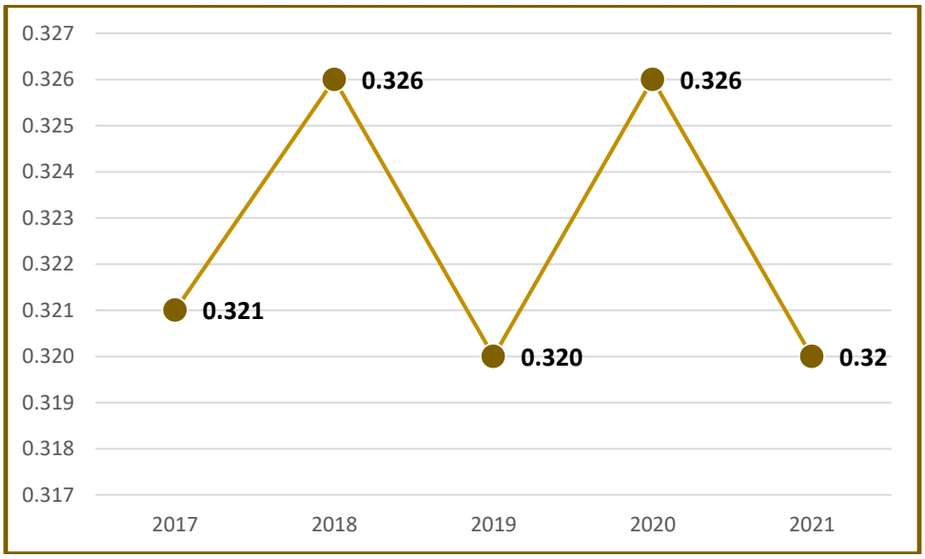
c. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Maluku adalah sulitnya kondisi geografis wilayah, terlebih cukup banyaknya pulau-pulau yang berpenghuni.

Pola fluktuatif capaian indeks gini terjadi semenjak tahun 2017 dimana indeks gini saat itu sebesar 0,321. Seiring pelaksanaan pembangunan daerah, indeks gini mengalami fluktuasi hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019 dan tahun 2021 dengan capaian sebesar 0,320. Pada tahun 2020, terjadi

kenaikan kembali indeks gini yang mencapai 0,326 dimana Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan masyarakat meningkat. Meskipun begitu, capaian ini berada pada kategori sedang sehingga pemerintah masih perlu merumuskan kebijakan strategis untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan/ketimpangan wilayah.

Gambar II.10
Indeks Gini
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



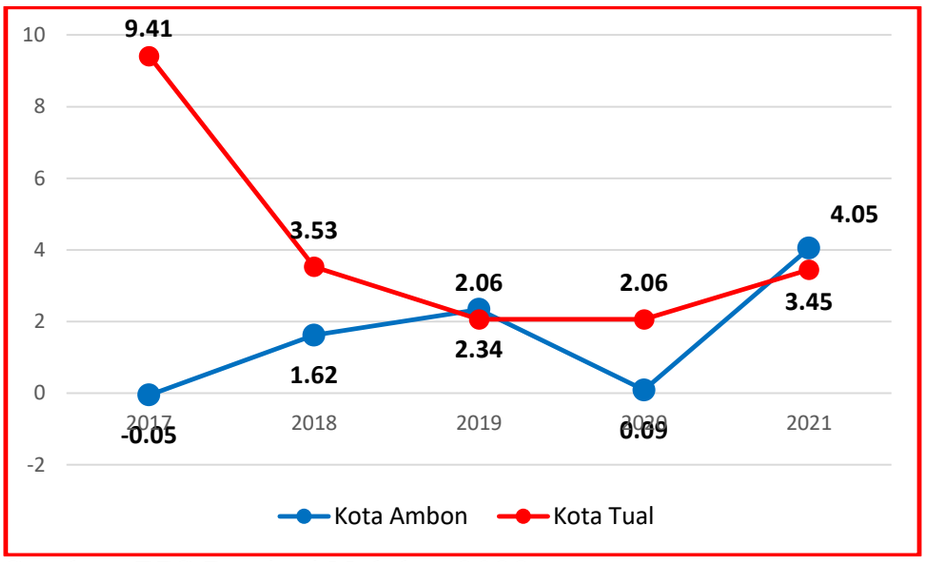
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

d. Laju Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan satu daerah atau wilayah. Dengan inflasi dapat diukur persentase kenaikan harga barang/jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat sehingga perlu adanya kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah.

Di Provinsi Maluku, laju inflasi dihitung oleh dua wilayah yakni Kota Ambon dan Kota Tual. Inflasi di Kota Ambon relatif stabil dimana laju inflasi selama lima tahun terakhir berada pada kisaran deflasi 0,05 persen hingga inflasi 4,05 persen. Sedangkan Kota Tual mengalami inflasi yang tidak stabil dikarenakan sempat mengalami kenaikan signifikan hingga 9,41 persen pada tahun 2017, meskipun pada empat tahun selanjutnya inflasi relatif terkendali.

Gambar II.11
Laju Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

e. Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Provinsi Maluku tergolong tinggi dimana angka kemiskinan mencapai 16,30 persen pada tahun 2021. Penurunan angka kemiskinan hingga tahun 2019 memiliki progress positif dimana terjadi penurunan di setiap tahun yang mengimplementasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan. Namun, dikarenakan Pandemi COVID-19 pada September 2020, angka kemiskinan mengalami kenaikan hingga mencapai 17,99 persen dengan angka absolut jumlah penduduk miskin sebanyak 322,40 ribu jiwa. Namun adanya berbagai kebijakan termasuk bantuan sosial kepada masyarakat maupun pelaku usaha mampu menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2021 menjadi sebesar 16,30 persen.

Tabel II.30.
Indikator Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	461.552	484.316	545.855	573.685	605,909
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	320,42	317,84	319,51	322,40	294,97
Tingkat Kemiskinan (Maret)	18,29	17,85	17,65	17,99	16,30

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Maluku dapat dilihat dari beberapa aspek, namun dari seluruh aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Provinsi Maluku.

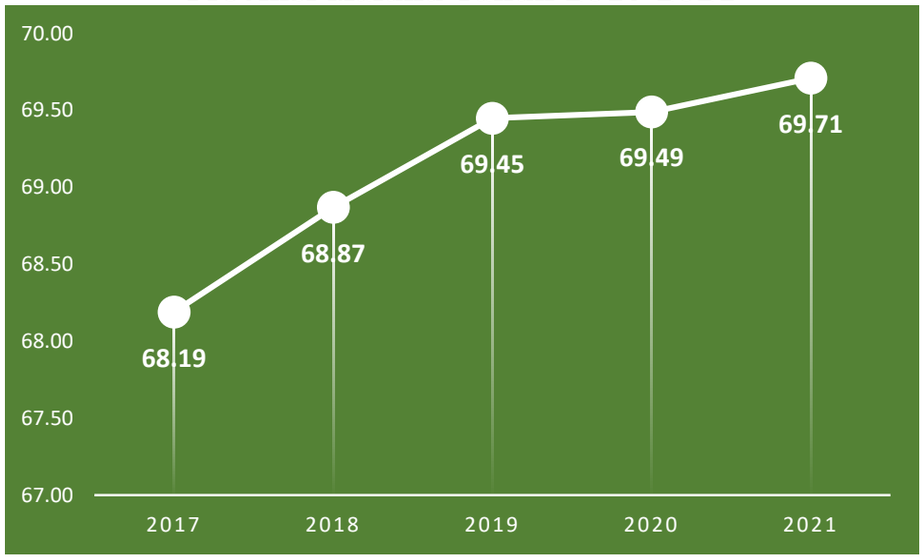
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Peningkatan perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan capaian kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM merupakan indikator yang disusun oleh Angka Harapan Hidup sebagai Indeks Kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan dan Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebagai Indeks Hidup Layak.

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku mengalami peningkatan pada kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2017 IPM Maluku sebesar 68,19 dan meningkat menjadi 69,71 pada tahun 2021. Pola kenaikan yang linier terlihat pada IPM tahun 2017-2019, namun pada tahun 2020 kenaikan lebih landai yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga salah satu komponen yakni pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami penurunan.

Gambar II.12
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Untuk lebih melihat secara rinci angka Indeks Pembangunan Manusia beserta komponen penyusunnya, maka disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.31.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Penyusunnya
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	**-**	**68,19**	**68,87**	**69,45**	**69,49**	**69,71**
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,38	9,58	9,81	9,93	10,03
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,91	13,92	13,94	13,96	13,97
Indeks Pendidikan	-	0,699	0,706	0,714	0,719	0,722
Angka Harapan Hidup	Tahun	65,4	65,59	65,82	65,98	66,09
Indeks Kesehatan	-	0,698	0,701	0,705	0,707	0,709
Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/ Kapita/Th	8433	8721	8887	8732	8.770
Indeks Pengeluaran	-	0,649	0,660	0,665	0,660	0,661

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

b. Pendidikan

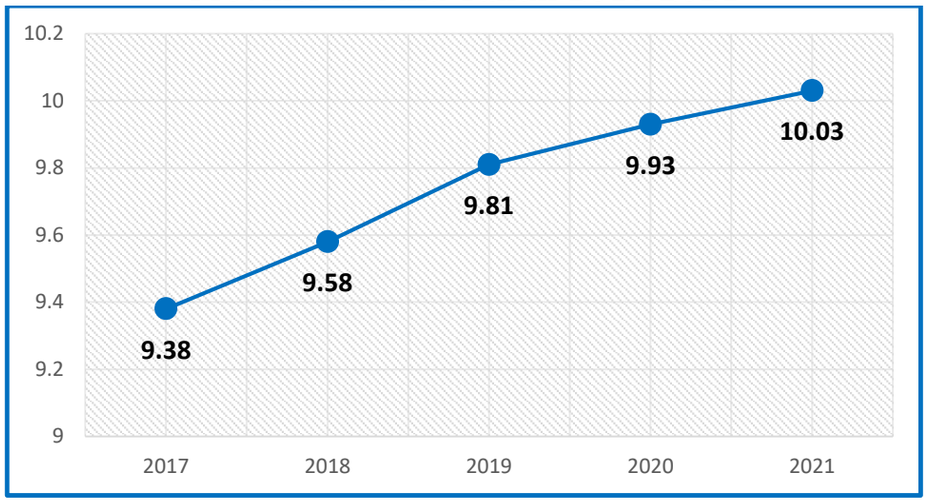
Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

  Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

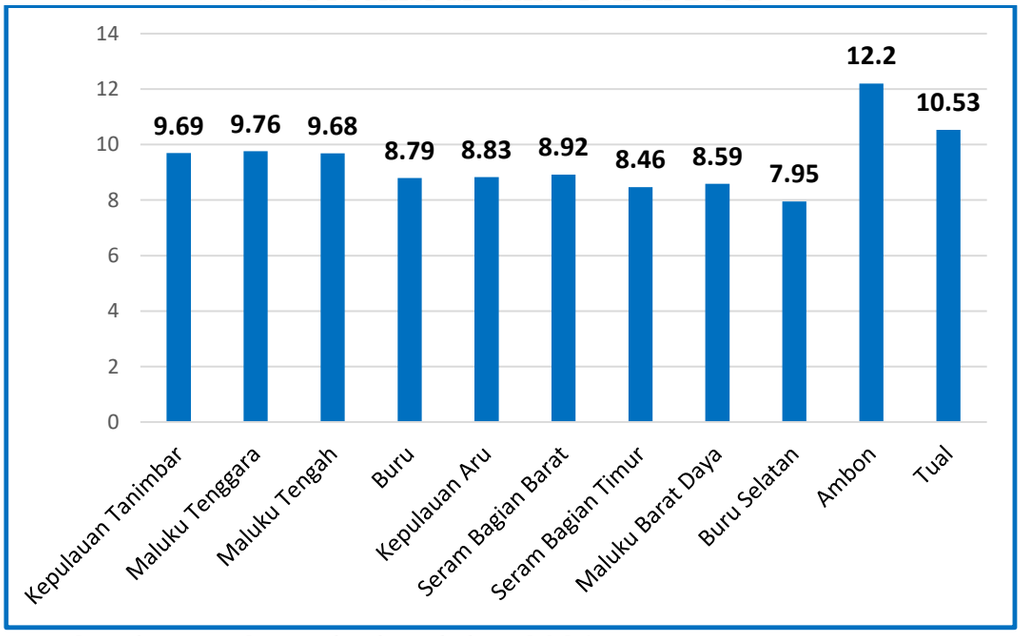
Gambar II.13
Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Maluku mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah sebesar 9,38 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 10,03 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, sempat mengenyam bangku pendidikan hingga 10,03 tahun atau secara rata-rata telah menduduki jenjang pendidikan hingga SMA kelas 2 Semester pertama. Angka rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 12,20 tahun dan Kota Tual yang mencapai 10,53 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah berada di Kabupaten Buru Selatan dengan capaian hanya 7,95 tahun.

Gambar II.14
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Maluku Tahun 2021



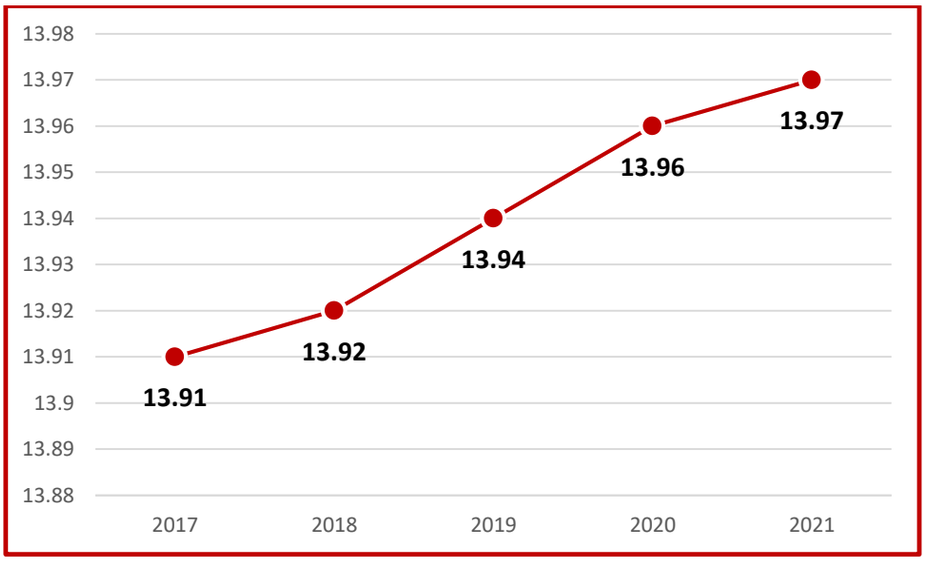
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, capaian harapan lama sekolah juga mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya meskipun lebih landau pergerakannya. Pada tahun 2017, harapan lama sekolah di Maluku sebesar 13,91 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,97 tahun pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 13,97 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester ke empat.

Gambar II.15
Harapan Lama Sekolah
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021

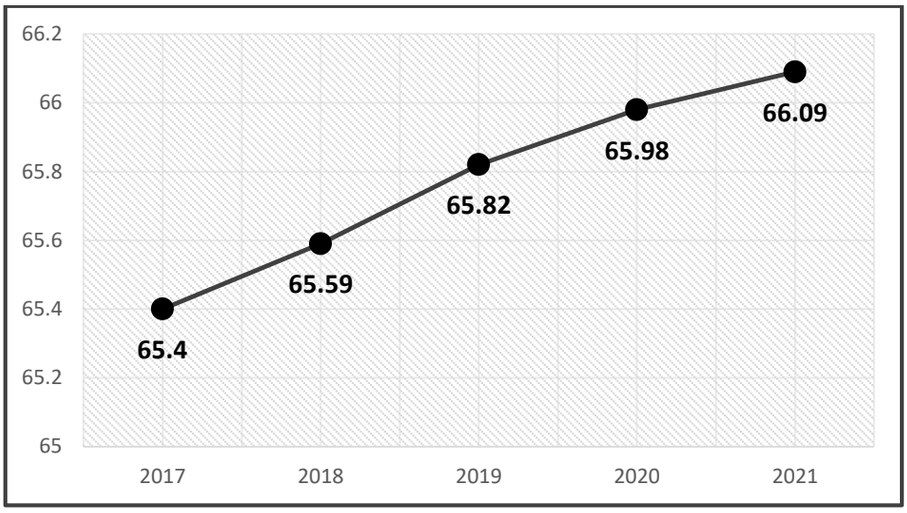
c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dari capaian angka harapan hidup Maluku terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Maluku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini harus terus diupayakan program strategis pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal cakupan dan pemerataan layanan kesehatan. Angka harapan hidup Maluku meningkat hingga mencapai 66,09 tahun pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2020, akan memiliki kesempatan hidup hingga berumur 66 tahun.

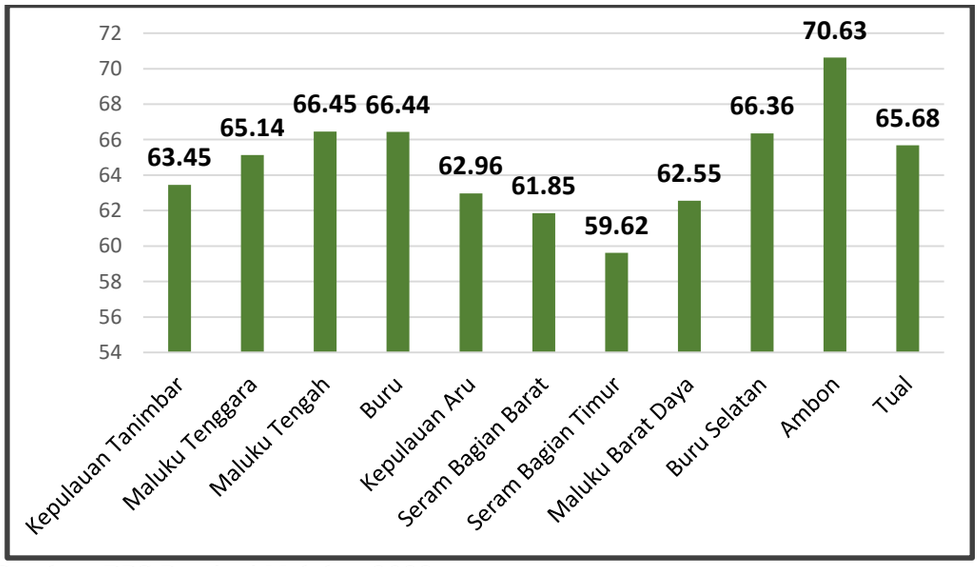
Jika melihat perbandingan antar kabupaten/kota, maka terlihat bahwa angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Ambon yang mencapai 70,63 tahun dan diikuti oleh Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru dengan masing-masing capaian angka harapan hidup sebesar 66,45 tahun dan 66,44 tahun. Adapun angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan capaian sebesar 59,62 tahun.

Gambar II.16
Angka Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Gambar II.17
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Maluku Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Sampai tahun 2018, di Provinsi Maluku jumlah sanggar seni yang aktif sebanyak 43 sanggar. Untuk mendukung aktivitas sanggar seni, sarana pendukung kesenian di tahun 2017 berjumlah 6 gedung yaitu : 3 (tiga) Gedung Teater untuk penyelenggaraan seni pertunjukan; 1 (satu) Gedung Pameran; 1 (satu) Gedung Sanggar Tari (untuk seniman berlatih); dan 1 (satu) Gedung Musik.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

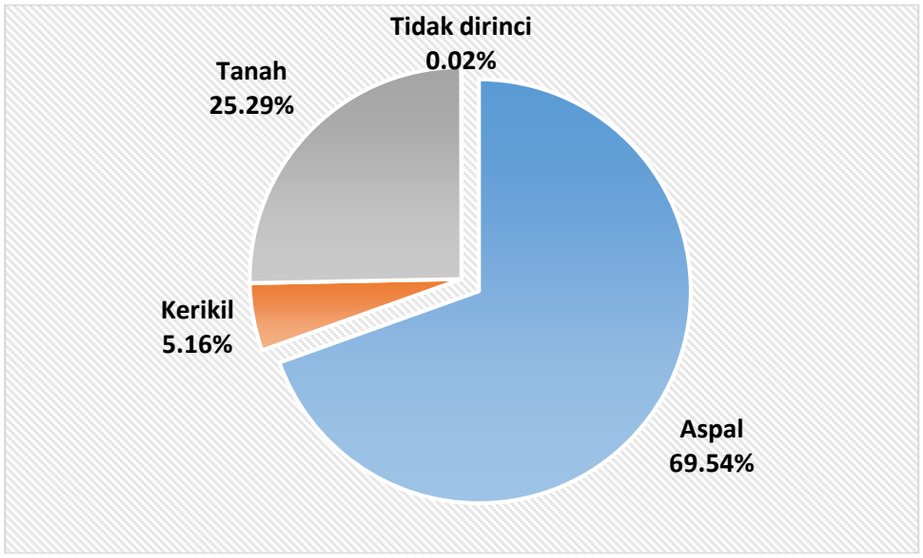
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Provinsi Maluku yang berhubungan dengan penentuan permasalahan pembangunan hingga kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasinya.

a. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur di Provinsi Maluku sendiri masih belum optimal kesediaannya. Hal ini menjadikan hambatan tersendiri bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

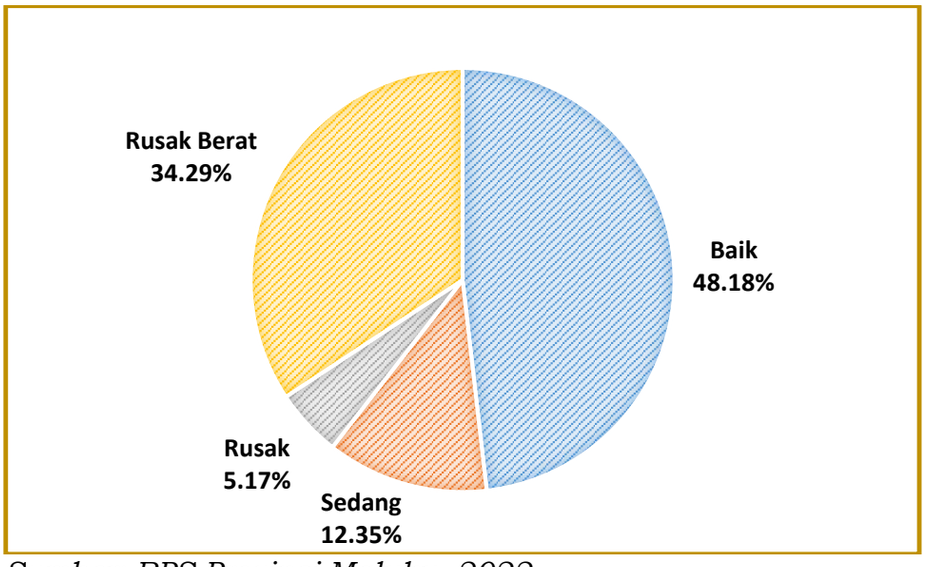
Sebagai wilayah kepulauan, konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga capaian pembangunan terkait konektivitas wilayah ini dapat terus ditingkatkan. Hal ini juga terlihat dari cukup tingginya jenis permukaan jalan yang diaspal sepanjang 751,20 km atau 69,54 persen. Selain itu, kondisi panjang jalan dalam keadaan baik sepanjang 520,50 km atau 48,18 persen dari total panjang jalan, Namun masih terdapat panjang jalan dalam kondisi rusak berat (34,29%) dan rusak (5,17%).

Gambar II.18
Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
Provinsi Maluku Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Gambar II.19
Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
Provinsi Maluku Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

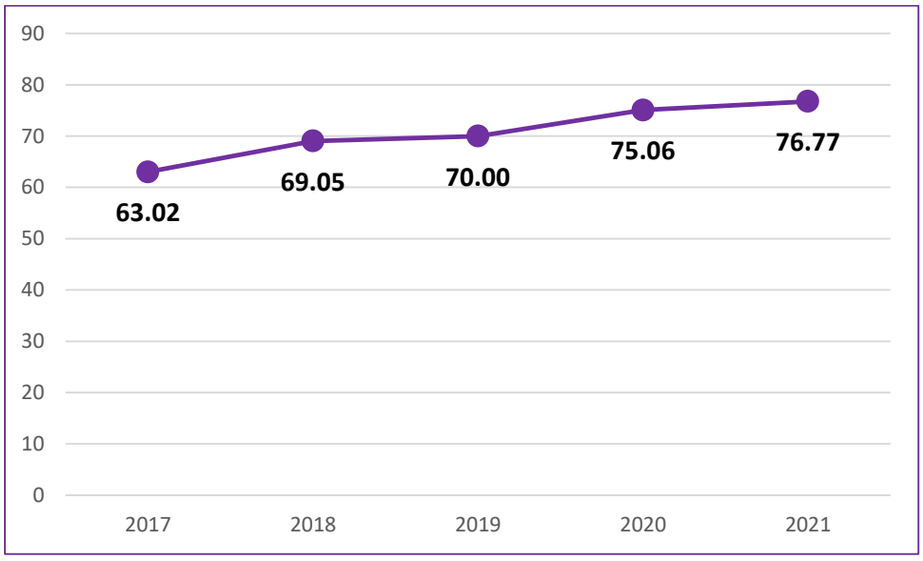
b. Perumahan dan Pemukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Provinsi Maluku adalah pemenuhan rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku terdapat permasalahan masih

banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tingginya luasan pemukiman kumuh.

Salah satu indikator penting dalam melihat kesehatan lingkungan, khususnya pada perumahan layak huni dan kawasan permukiman layak adalah adanya sanitasi yang layak bagi masyarakat. Secara umum, terjadi peningkatan cukup signifikan pada kurun waktu empat tahun terakhir dimana pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sebesar 63,02 persen dan meningkat cukup signifikan hingga mencapai 76,77 persen pada tahun 2021.

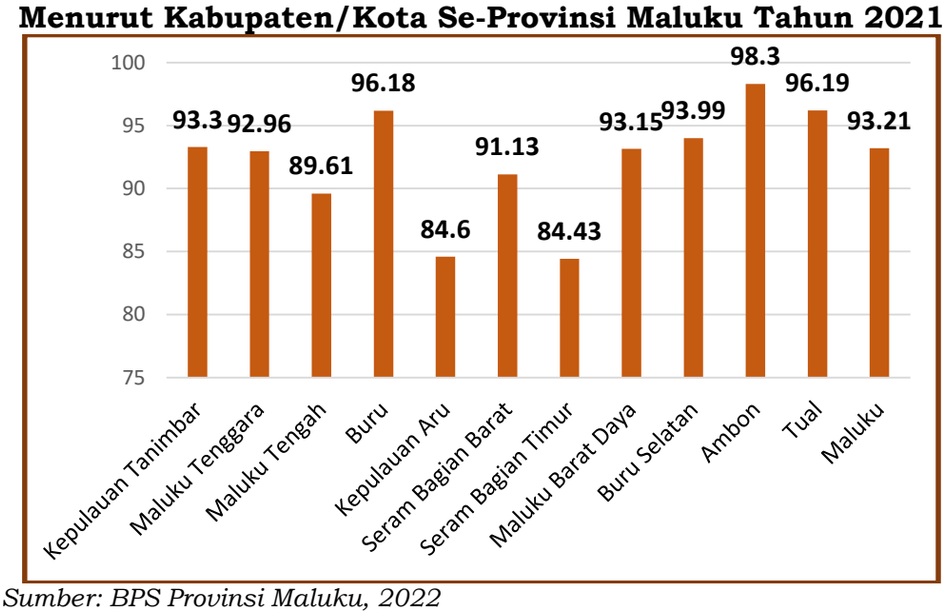
Gambar II.20
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Secara umum, akses kepada sumber air minum layak masih belum optimal dilakukan dalam perwujudan pembangunan Maluku. Terlihat capaian rumah tangga di Maluku yang memiliki akses air minum layak pada tahun 2021 hanya sebesar 93,21 persen. Adapun persebarannya terlihat bahwa Kabupaten Seram Bagian Timut merupakan wilayah yang memiliki rumah tangga dengan akses air minum bersih terendah dengan capaian 84,43 persen dan disusul oleh Kepulauan Aru sebesar 84,60 persen.

Gambar II.21
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Terlihat pula persebaran rumah tangga yang telah menikmati fasilitas listrik, khususnya dari PLN dimana secara umum di Provinsi Maluku sebanyak 91,83 persen rumah tangga yang telah menikmati fasilitas listrik PLN dan 4,32 persen listrik Non PLN. Wilayah yang paling banyak persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas listrik adalah Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 22,37 persen dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan capaian rumah tangga yang tidak menggunakan listrik sebesar 15,74 persen.

Tabel II.32.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Listrik Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
Kepulauan Tanimbar	91,12	8,55	0,33	100
Maluku Tenggara	97,13	0,96	1,91	100
Maluku Tengah	96,13	0,20	3,66	100
Buru	96,83	0,59	2,58	100
Kepulauan Aru	47,23	30,40	22,37	100
Seram Bagian Barat	94,90	2,40	2,69	100
Seram Bagian Timur	74,46	9,80	15,74	100
Maluku Barat Daya	73,53	21,29	5,28	100
Buru Selatan	87,98	4,43	7,58	100
Ambon	99,75	0,16	0,09	100
Tual	86,89	11,47	1,64	100
Maluku	**91,83**	**4,32**	**3,85**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

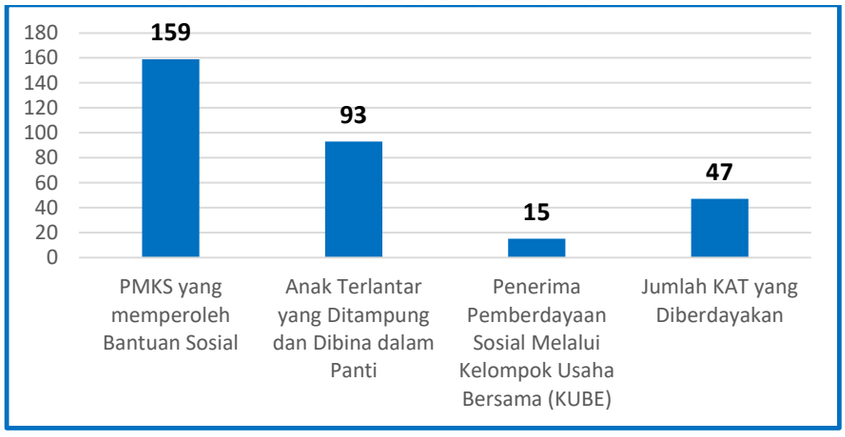
c. Sosial

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku, pemerintah daerah melalui stakeholder terkait berupaya untuk memberikan

bantuan secara merata dan berkualitas terhadap masyarakat yang layak menerima bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan guna memberi kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk lebih berdaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terlihat dari gambar di bawah ini bahwa terdapat 159 PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2020. Selain itu terdpaat 93 anak terlantar yang ditampung dan dibina di dalam panti sehingga akan memiliki kesempatan lebih baik bagi masa depannya. Adapun jumlah KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan sebanyak 47 komunitas dan terdapat pula 15 penerima pemberdayaan sosial melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

Gambar II.22
Jumlah Penerima Bantuan/Pemberdayaan Sosial
Provinsi Maluku Tahun 2020



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku, 2021

Dari sisi kebencanaan, terlihat bahwa risiko bencana di Provinsi Maluku cukup tinggi bahkan berada di atas rata-rata angka Nasional. Hal ini dikarenakan Provinsi Maluku memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi dengan 12 jenis potensi ancaman bencana yakni banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan teknologi. Meskipun begitu, berbagai program peningkatan ketahanan dalam menghadapi bencana terus dilaksanakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir korban akibat bencana yang terjadi.

Tabel II.33.
Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Risiko Bencana Provinsi Maluku	163,07	161,10	160,50	160,35	160,35
Indeks Risiko Bencana Nasional	150,58	148,82	145,85	144,02	141,65

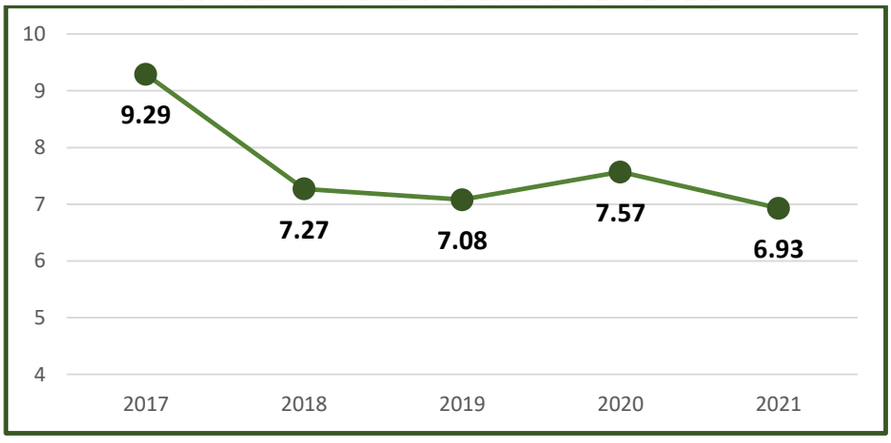
Sumber: BPBD Provinsi Maluku, 2021

d. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan melihat angka pengangguran di suatu wilayah.

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku cukup berfluktuasi dimana pada tahun 2017 sempat mencapai titik tertinggi yakni 9,29 persen dan menurun hingga 7,08 persen di tahun 2019. Namun pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 7,57 persen yang disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga terjadi gejolak perekonomian yang berujung pada pemberhentian pekerja maupun tutupnya usaha masyarakat. Dengan adanya berbagai kebijakan baik bantuan modal usaha maupun kartu pra kerja dari pemerintah, pengangguran kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 6,93 persen pada tahun 2021.

Gambar II.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

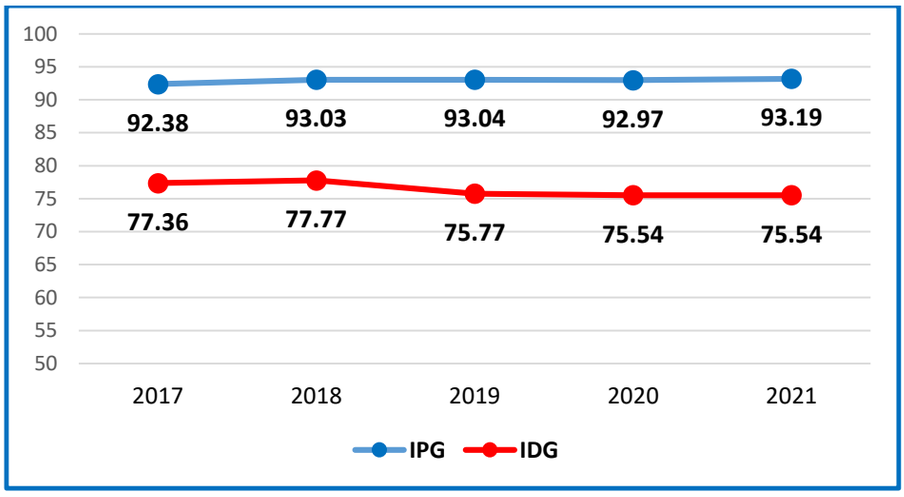
e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan antar wilayah, dan tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki- laki dan perempuan. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah akan tercermin apabila nilai IPG sama dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan kesetaraan gender. IPG Provinsi Maluku masih di atas rata-

rata Nasional, berarti kondisi cukup rendahnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender Maluku berada di atas angka 90 dimana pada tahun 2021 mencapai titik tertinggi sebesar 93,19. Pola Indeks Pembangunan Gender meningkat di setiap tahunnya, namun di tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender pernah mengalami penurunan menjadi sebesar 92,97 yang disebabkan adanya penurunan pengeluaran per kapita terpilah gender. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender mengalami pola sebaliknya dimana secara umum terjadi penurunan. Pada tahun 2016, Indeks Pemberdayaan Gender Maluku mencapai 78,87 dan menurun hingga mencapai 75,54 pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Gambar II.24
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

f. Lingkungan Hidup

Salah indikator urusan lingkungan hidup adalah presentase penegakan hukum lingkungan. Kegiatan penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan selama tahun 2014-2017 dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi kasus lingkungan di daerah kabupaten/kota di Maluku. Dari hasil identifikasi dan verifikasi di daerah kabupaten/kota memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan yang muncul ke permukaan dapat ditangani oleh kabupaten/kota melalui mediasi dan rapat dengan pihak pemrakarsa/penanggung jawab perusahaan, pihak lembaga terkait maupun masyarakat yang terkena dampak/pihak pelapor. Dan kasus lingkungan yang ada selama ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan belum sampai ke persidangan pengadilan.

Dalam hal kualitas lingkungan hidup, terjadi kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Maluku pada tahun 2020 yang mencapai 76,86 dimana angka ini merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, penurunan emisi gas rumah kaca juga mengalami kenaikan dimana tahun 2020 sebesar 24,99 persen dan mencapai 27,10 persen pada tahun 2019.

Tabel II.34.
Indikator Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	17,74	18,48	19,3	27.10	24.99
Laporan inventarisasi GRK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,74	68,12	75,9	74,34	76,86

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021

g. Penanaman Modal

Pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas antara lain didukung dengan perkembangan investasi yang positif, pada tahun 2016 jumlah proyek investasi PMDN di Maluku sebanyak 4 proyek meningkat 1.953 proyek di tahun 2020. Sementara nilai investasi PMDN yang telah direalisasikan pada tahun 2016 sebesar 11,38 milyar rupiah dan meningkat menjadi 6,56 Triliun rupiah pada tahun 2020. Nilai investasi PMDN meningkat pada tahun 2020 dibandingkan dengan PMA (asing), dimana proyek investasi yang telah direalisasikan sejak tahun 2016-2020 yang mencapai 1.953 proyeksebagaimana tabel dibawah ini,

Tabel II.35.
Jumlah Realisasi Proyek dan Investasi
Provinsi Maluku Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Realisasi Proyek PMDN	4	9	25	23	1.953
Jumlah Realisasi Proyek PMA	31	39	10	16	24
Realisasi Investasi PMDN (Juta Rp)	11.380,9	50.917	1.013.489	283.166	6.560.765
Realisasi Investasi PMA (Juta Rp)	1.385.532	2.840.175,56	106.942	495	2.198.878

Sumber: Dinas PMPTSP Provinsi Maluku Tahun 2021

h. Kepemudaan dan Olah Raga

Untuk mendukung perkembangan olahraga di Maluku, maka ketersediaan sarana dan prasarana olahraga menjadi hal yang penting,

perkembangan sarana prasarana olah raga selama kurun waktu 2016 – 2020 cenderung konstan, dimana jumlah stadiun sepak bola sebanyak 3 unit, stadiun atletik 1 unit, lapangan bulu tangkis sebanyak 5 unit, gedung olahraga sebanyak 8 unit, kolam renang mencapai 2 unit dan sasana tinju 5 unit. Pemuda merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan, jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi hingga tahun 2020 telah mencapai 451 lembaga/ organisasi, sehingga masih memiliki potensi yang besar untuk berperan aktif dalam pembangunan.

i. Pariwisata

Kharakteristik wilayah yang sebagian besar berupa kepulauan, Provinsi Maluku memiliki potensi pariwisata yang cukup kaya dan sangat beranekaragam jenisnya, kekayaan alam, adat istiadat dan budaya yang beragam yang secara potensial menjadi daya tarik sebagai daerah dengan tujuan wisata. Dalam upaya meningkatkan Maluku sebagai daerah wisata pemerintah Provinsi Maluku melakukan berbagai langkah strategis seperti pengembangan dan pemasaran pariwisata Maluku. Pengembangan dan pemasaran serta adanya beberapa even penyelenggara kegiatan nasional di Maluku telah mendorong masuknya wisatawan mancanegara. Hal ini bertujuan agar pariwisata Maluku dapat menjadi andalan di masa mendatang serta memberi kontribusi terhadap ekonomi daerah termasuk juga pariwisata nasional.

Terjadi fluktuasi kunjungan wisata di Provinsi Maluku baik wisatawan mancanegara, nusantara maupun lokal. Namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan pada tahun 2020 dan tahun 2021 menurun yang dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 sehingga beberapa Negara menerapkan *travel warning*. Selain itu juga keterbatasan transportasi memperparah kunjungan wisatawan yang menurun, khususnya wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Tabel II.36.
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

Wisatawan	2017	2018	2019	2020	2021
Mancanegara	17.346	7.341	13.153	2.010	1.450
Nusantara	111.332	105.001	76.842	41.188	93.321
Lokal	105.001	157.855	147.434	173.110	113.300
Jumlah	**233.679**	**270.197**	**237.429**	**216.308**	**208.071**

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

j. Perikanan dan Kelautan

Produksi dan nilai produksi perikanan Provinsi Maluku mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun terakhir yakni tahun 2020, terjadi penurunan produksi ikan baik budidaya maupun perikanan tangkap. Penurunan ini cukup signifikan dimana mempengaruhi nilai produksi pada masing-masing kategori perikanan tersebut.

Terlihat dari tabel di bawah ini, bahwa jumlah produksi perikanan budidaya mengalami penurunan menjadi 294,23 ribu ton pada tahun 2021 dimana pada tahun 2019 sebanyak 620,84 ribu ton. Bahkan pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya ini mencapai 817,33 ton yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Adapun pada perikanan tangkap juga memiliki pola yang sama dimana pada tahun 2021 terdapat 523,261 ribu ton ikan didapatkan menurun dari tahun 2019 yang mencapai 542,443 ribu ton. Hal ini memicu penurunan nilai produksi perikanan yang didapatkan hingga mencapai 12,73 trilyun rupiah pada tahun 2021.

Tabel II.37.
Produksi Perikanan
Provinsi Maluku Tahun 2016-2021

No	Uraian	Sat	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.	Jumlah Produksi Ikan Budidaya	000 Ton	604,00	817,33	667,56	620,84	200,81	294,23
b.	Nilai Produksi Ikan Budidaya	Juta Rp	1.429,90	2.624,81	3.144,76	1.815,40	948,40	679,97
c.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	000 Ton	582,583	600,060	543,447	557,530	523,261	542,443
d.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Milyar Rp	5.926,943	6.104,751	8.313,743	6.165,599	5.572,388	12.734,062

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku, 2021

k. Pertanian

Komoditas unggulan pada subsektor pertanian adalah pertanian tanaman pangan dan pertanian perkebunan. Pertumbuhan ekonomi pada kedua subsektor ini cukup fluktuatif di mana pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian tanaman pangan mengalami kontraksi di tahun 2021 hingga mencapai -6,73 persen dan pertanian tanaman perkebunan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,21 persen. Capaian terendah selama lima tahun terakhir ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 khususnya gelombang kedua di mana perekonomian bergejolak, bahkan sebagian besar wilayah dan sektor pembangunan mengalami kontraksi. Sedangkan jika dilihat dari sisi kontribusi perekonomiannya, kedua sektor tersebut cukup stabil meskipun pola kontribusi pertanian tanaman pangan dan perkebunan mengalami penurunan.

Tabel II.38.
Komoditi Unggulan Subkategori Pertanian
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral					
	a. Tanaman Pangan	7,97	1,68	3,75	0,90	-6,73
	b. Tanaman Perkebunan	8,20	7,46	7,12	5,13	2,31
2	Kontribusi Perekonomian					
	a. Tanaman Pangan	5,78	5,49	5,41	5,52	4,81
	b. Tanaman Perkebunan	3,47	3,49	3,51	3,68	3,66

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

l. Industri Pengolahan

Salah satu potensi perekonomian di Maluku adalah sektor industri pengolahan dimana kontribusinya mengalami penurunan di setiap tahunnya dengan pertumbuhan ekonomi sektoral yang fuktuatif. Kontribusi perekonomian sektor industri pengolahan dari tahun 2017-2021 berada pada kisaran 5 persen dimana pada tahun 2021 merupakan capaian terendah selama lima tahun terakhir yang mencapai 4,96 persen. Adapun pertumbuhan ekonominya cukup fluktuatif di mana sempat mencapai 7,28 persen pada tahun 2018 namun menurun kembali di tahun 2019 menjadi sebesar 2,69 persen. Adapun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sektor tersebut mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,31 persen yang disebabkan adanya Pandemi COVID-19. Dengan beberapa upaya pemulihan ekonomi di tahun 2021, industri pengolahan dapat tumbuh meskipun masih tipis dengan kisaran 0,47 persen.

Tabel II.39.
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Industri Pengolahan Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	4,76	7,28	2,69	-2,31	0,47
2	Kontribusi Perekonomian Kategori Industri Pengolahan	5,33	5,35	5,19	5,11	4,96

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

m. Perdagangan

Perdagangan merupakan kategori terbesar ketiga dalam dominasi terhadap struktur ekonomi Maluku setelah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Distribusi kategori ini berada pada kisaran angka 13 persen dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,23 persen. Penurunan ini juga terlihat dari adanya kontraksi negatif pada tahun 2020 sebesar -4,41 persen. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada tahun 2021 mengalami pemulihan sebagai dampak positif kebijakan yang dijalankan dalam memperbaiki perekonomian akibat Pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,41 persen dengan kontribusi terhadap struktur ekonomi sebesar 13,37 persen.

Tabel II.40.
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kontribusi Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	9,12	6,00	6,84	-4,41	4,41
2	Kontribusi Perekonomian Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	13,60	13,50	13,71	13,23	13,37

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Secara umum, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan baik pengeluaran makanan maupun non makanan. Namun pola yang terlihat, konsumsi masyarakat terhadap kelompok makanan lebih tinggi dibandingkan kelompok non makanan sehingga dapat diasumsikan masyarakat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer.

Tabel II.41.
Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan
Provinsi Maluku Tahun 2017-2021

No	Rata-rata Pengeluaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Makanan	588.565	491.426	507.218	532.135	536.327
2	Non Makanan	452.624	474.411	495.021	551.786	576.419
	Total Pengeluaran	1.041.189	965.837	1.002.239	1.083.921	1.112.746
3	Persentase Makanan	56,53	50,88	50,61	49,09	48,20
4	Persentase Non Makanan	43,47	49,12	49,39	50,91	51,80

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan indikator yang memberikan gambarann bagaimana kehidupan petani ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai Tukar Petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu sisi pendapatan yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya dan sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) > 100 menunjukan petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya jika NTP <100 menunjukan petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. NTP=100 menunjukan petani

mengalami impas, dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, pendapatan petani sama besar dengan pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Maluku dari tahun 2017–2019 selalu mencapai angka di atas 100, namun NTP semakin menurun dimana tahun 2020 hanya mencapai 98,56 dan tahun 2021 sebesar 97,53. Penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian (It) yang tercatat menurun 0,39 persen dan peningkatan harga yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga serta biaya produksi (Ib) sebesar 0,29 persen.

Penurunan NTP pada Februari 2021 disumbangkan oleh penurunan NTP di tiga subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, dan subsector tanaman perkebunan rakyat. Penurunan NTP tertinggi dialami oleh subsektor hortikultura sebesar 2,22 persen diikuti oleh subsektor tanaman pangan sebesar 2,20 persen dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,09 persen. Sementara itu, untuk dua subsektor lainnya, yaitu subsektor peternakanan dan subsektor perikanan mengalami peningkatan NTP pada Februari 2021 dibandingkan dengan kondisi Januari 2021. NTP Provinsi Maluku Februari 2021 tanpa subsektor perikanan tercatat sebesar 97,53. Angka tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,95 persen jika dibandingkan dengan Januari 2021.

Pada Februari 2021, NTN naik sebesar 1,90 persen. Peningkatan NTN pada Februari 2021 disebabkan oleh kenaikan It sebesar 1,94 persen melampaui peningkatan Ib yang tercatat sebesar 0,04 persen. Peningkatan It disebabkan meningkatnya indeks harga pada kelompok perairan umum (khususnya komoditas kepiting air tawar) sebesar 1,91 persen, dan kelompok penangkapan laut (khususnya pada komoditas ikan tuna, cakalang, tongkol, lobster, kerapu, layang, tenggiri, ekor kuning, kuwe, tembang, dan selar) secara rata-rata naik sebesar 1,94 persen. Sementara itu, peningkatan Ib disebabkan oleh meningkatnya Indeks BPPBM sebesar 0,20 persen sedangkan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) menurun sebesar 0,04 persen.

Tabel II.42.
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Maluku
Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
NILAI TUKAR PETANI (NTP)	100,89	100,94	100,27	98,56	97,53
NILAI TUKAR NELAYAN	105,08	107,37	114,75	100,44	102,35

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Maluku,Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 2021

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, dan lain sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Jumlah tindak pidana kriminalitas dan penyelesaian tindak pidana kriminalitas di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel II.43.
Jumlah Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan
Provinsi Maluku Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian yang Dilaporkan			
	2018	2019	2020	2021
Res Kepulauan Tanimbar	234	263	112	137
Res Maluku Tenggara	440	393	291	370
Res Maluku Tengah	231	250	143	258
Res Buru	117	186	162	189
Res Kepulauan Aru	156	162	163	200
Res Seram Bagian Barat	171	247	200	320
Res Seram Bagian Timur	69	102	77	67
Res Maluku Barat Daya	105	129	116	194
Resta Ambon	1.681	1.903	1.882	1.195

Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2022

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian ini tentu saja menjadi salah satu poin penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya akan terjabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan di setiap perangkat daerah.

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Provinsi Maluku berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel II.44.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Maluku

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
I	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,91	5,11	6,41	4,73	6,24	-0,92	-	belum tercapai
1.2	Tingkat inflasi	%	3.25	0.78	3.35	2.08	3,66	1,69	46,17	belum tercapai
1.3a	PDRB ADHB	Juta Rp	37.054.407,62	39.881.545,4	43.047.090,66	46.151.913,88		46.263.797,67	na	na
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	21,60	22,86	24,27	25,6		25,26	na	na
1.4	Indeks gini	%	0,344	0,321	0,326	0,32	0,32	0,326	100,62	melampaui
1.5	Persentase Penduduk miskin	%	19,26	18,29	17.85	17,65	16,35	17,99	110,03	melampaui
1.6	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	na	na	na	na	na	na	na	na
1.7	Tingkat pengangguran Terbuka	%	7,05	9,29	7,27	7,08	6,93	7,57	90,76	belum tercapai
1.8	Pendapatan perkapita	Juta								na
1.9	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.686.469	1.744.654	1.773.776	1.802.870		1.848.923		na
1.10	Pengeluaran perkapita		na	na	na	na	na	na	na	na
1.11	IPM		67,6	68,19	68,87	69,45	68,7	69,49	101,15	melampaui
1.12	Nilai SAKIP	Indeks	na	na	na	na	na	na	na	na
1.13	Rasio Elektrifikasi	%	na	na	na	na	na	na	na	na
1.14	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Indeks	na	na	na	na	na	na	na	na
II	**Fokus Kesejahteraan Sosial**									
2.1	**Pendidikan**									
2.1.2	Angka melek huruf	%	na	na	99,41	99,56	na	99,56	na	na

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
2.1.3	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,27	9,38	9,58	9,81	9,9	9,93	100,30	melampaui
2.1.4a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	na	na	30,77	29,46	na	34,17	na	na
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	21,48	21,8	112,25	112,19	na	110,08	na	na
2.1.4c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	90,61	94,99	95,58	90,4	na	91,08	na	na
2.1.4d	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%	92,12	89,71	87,15	95,29	100	95,95	95,95	belum tercapai
2.1.4e	Angka Partisipasi Kasar Perguruan tinggi	%	46,38	47,39	48,42	47,65	na	48,62	na	na
2.1.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	94,5	95,5	95,71	96,21	na	96,85	na	na
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	73,4	73,99	74,08	75,54	na	75,15	na	na
2.1.5c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%	63,49	63,65	63,48	64,23	95,16	68,81	72,31	belum tercapai
2.1.5d	Angka Partisipasi Murni Perguruan tinggi	%	na	na	na	na	na	na	na	na
2.1.6	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,91	13,92	13,94	13,99	13,96	99,79	belum tercapai
2.2	**Kesehatan**									
2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	per 1.000 kelahiran	na	na	na	na	na	na	na	na
2.2.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,35	65,4	65,59	65,82	66	65,98	99,97	belum tercapai
2.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 KH	/1000 KH	6	2	5	na	na	na	na	na
2.2.4	Persentase Balita Gizi Kurang	%	5,5	8,33	5	na	na	na	na	na
2.2.5	Persentase Balita Gizi Buruk	%	na	na	na	na	na	na	na	na
2.2.6	Angka kematian ibu melahirkan	/1000 KH	na	na	na	na	na	na	na	na
2.2.7	Rata-rata Lama sakit	hari	na	na	na	na	na	na	na	na
2.2.8	Persentase perempuan Menurut Penolong Kelahiran Pertama									

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
	- Bidan	%			NA	48,77		52,22		na
	-Dukun	%			0,56	0,56		26,25		na
	-Tenaga Kesehatan Lainnya	%	na	na	31,79	31,79	na	1,18	na	na
	-Dokter kandungan	%	na	na	na	na	na	na	na	na
2.2.9	Jumlah Alat Kontrasepsi yang Digunakan oleh Penduduk	%	54,55	50.02	45,4	na	na	na	na	na
	-WOW/MOP/IUD/ Spiral		2.768	na	na	1.041	na	19.581	na	na
	Implant		10.028	na	na	3.969	na	28.585	na	na
	-Suntik		26.329	na	na	17.353	na	97.859	na	na
	-Pil		15.766	na	na	6.245	na	39.039	na	na
	-Kondom		3.703	na	na	1.289	na	3.609	na	na
2.2.10	Persentase Balita Yang Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi									
	-BCG	%	na	na	na	na	na	na	na	na
	-Campak/Morbili	%	na	68	na	66	na	69	na	na
	-DPT	%	na	na	na	na	na	na	na	na
	-Polio	%	na	na	na	na	na	na	na	na
	-Hepatitis B	%	na	na	na	na	na	na	na	na
2.3	**Ketenagakerjaan**									
2.3.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	92,95	90,71	92,73	92,92	93,07	92,43	99,31	belum tercapai
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	**Pendidikan**									
1	APK SMA/SMK Sederajat	Angka	na	na	99,91	99,79	100	99,87	99,87	belum tercapai
2	APM SMA/SMK Sederajat	Angka	na	na	93,88	94,51	95,16	95,10	99,94	belum tercapai
3	Persentase SMA yang memenuhi standar sarana prasarana	Persen	na	na	90,15	89,71	94,19	90,16	95,72	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
	(Sekolah Pendidikan SMA/SMK/SLB dengan Kondisi Bangunan Baik)									
4	Persentase Jumlah Penduduk Disabilitas Usia 4 -18 Tahun yang Berpartisipasi Pada Pendidikan Khusus	Persen	na	na	34,74	36,18	65,21	37,65	57,74	belum tercapai
5	Persentase Guru SMA/SMK yang Memenuhi Kompetensi	Persen	na	na	58,21	51,19	63,35	56,19	88,70	belum tercapai
6	Persentase Guru SLB yang Memenuhi Kompetensi	Persen	na	na	31,18	29,21	43,21	33,49	77,51	belum tercapai
2	**Kesehatan**									
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Per Kelahiran Hidup	Angka	na	138	132	114	125	149	80,80	belum tercapai
2	Persalinan difasilitas Kesehatan (PF)	Persen	na	na	45	30	51	38	74,51	belum tercapai
3	Cakupan Pelayanan ANC	Persen	na	na	68,28	46,4	77	47	61,04	belum tercapai
4	Cakupan Kunjungan Nifas	Persen	na	na	63,52	32	70	57	81,43	belum tercapai
5	Cakupan Penangan Komplikasi Obstetri	Persen	na	na	30,73	15	40	25	62,50	belum tercapai
6	Angka Kematian Neo Natal Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	na	4	4	4	4	3	125,00	melampaui
7	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	na	6	6	5	6	6	100,00	melampaui
8	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	na	7	7	1	7	6	114,29	melampaui
9	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL)	Persen	na	na	63	35	67	57	85,07	belum tercapai
11	Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal	Persen	na	na	30,27	17	33	23	69,70	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
12	Cakupan Kunjungan Balita	Persen	na	na	37,450	20	50	56	112,00	melampaui
13	Cakupan puskesmas mampu melaksanakan penjaringan kesehatan anak usia sekolah	Persen	na	na	70	23	76	67	88,16	belum tercapai
14	Cakupan puskesmas mampu pelayanan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Persen	na	na	55	15	65	65	100,00	melampaui
15	Cakupan puskesmas mampu pelayanan kekerasan terhadap anak	Persen	na	na	18	11	22	22	100,00	melampaui
16	Cakupan puskesmas yang mampu pelayanan kesehatan jiwa	Persen	na	na	n/a	39	8	39	487,50	melampaui
17	Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia	Persen	na	na	55	199	70	18	25,71	belum tercapai
18	Cakupan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	na	na	23	23	25	26	104,00	melampaui
19	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	na	na	8,5	5	7,5	5,7	124,00	melampaui
20	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	na	na	0,90	0,00	0,80	0,20	175,00	melampaui
21	Prevalensi Balita Stunting	Persen	na	na	34,00	18,00	24,00	15,00	137,50	melampaui
22	Cakupan vitamin A pada bayi dan balita	Persen	na	na	61,00	70,00	80,00	82,00	102,50	melampaui
23	Cakupan pelayanan balita (D/S)	Persen	na	na	55,00	60,00	67,00	58,00	86,57	belum tercapai
24	Cakupan ASI eksklusif	Persen	na	na	25,00	16,00	53,00	76,9	145,09	melampaui
25	Cakupan RT konsumsi garam beryodium	Persen	na	na	64,00	55,00	79,00	76,9	97,34	belum tercapai
26	Prevalensi ibu hamil dengan kekurangan energi kalori	Persen	na	na	18,50	20,00	17,00	26,40	44,71	belum tercapai
27	Prevalensi ibu hamil anemi	Persen	na	na	22,27	18,00	19,00	55,50	(92,11)	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
28	Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP)	Angka	na	na	14,00	1,24/100.000	≥ 2/100.000	1/100.000	50,00	belum Tercapai
29	Temuan Kasus Baru TB	Persen	na	na	61,00	51,00	75,00	11,00	185,33	melampaui
30	Success Rate	Persen	na	na	45,00	59,00	90,00	19,00	21,11	belum tercapai
31	Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	na	na	66,90	77,4	93,50	76,5	81,82	belum tercapai
32	Campak Dosis Kedua	Persen	na	na	45,70	45,90	56,50	60,20	106,55	melampaui
33	Desa UCI	Persen	na	na	66,90	60,00	70,60	42,90	60,76	belum tercapai
34	Sistem Kewaspadaan Dini	Persen	na	na	53,20	94,27	80,00	87,10	108,88	melampaui
35	Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 Jam	Persen	na	na	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	sesuai
36	Krisis Kesehatan	Persen	na	na	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	sesuai
37	Annual Paracite Incidence (API)	Persen	na	na	1,02	0,84	1,15	0,47	40,87	belum tercapai
38	Slide Positivity Rate (SPR)	Persen	na	na	< 5%	< 5%	5,00	1,94	38,80	belum tercapai
39	Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana program ISPA sesuai standar	Persen	na	na	n/a	36,36	60,00	30,10	50,17	belum tercapai
40	Prevalensi HIV dan AIDS dari total populasi	Persen	na	na	<0,2%	<0,2%	< 0.2%	<0,2%	100,00	sesuai
41	ODHA yang mendapat pengobatan ARV	Persen	na	na	31,00	18,48	55,00	211,70	384,91	melampaui
42	Persentase Merokok pada Penduduk Usia 10 - 18 Tahun	Persen	na	na	9,10	8,8	9,10	8,8	103,30	melampaui
43	Cakupan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang menyelenggarakan	Persen	na	na	na	-	36,36	0,00	-	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
	layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)									
44	Cakupan Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Persen	na	na	na	4,00	36,36	1,00	2,75	belum tercapai
45	Cakupan Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker	Persen	na	na	na	na	36,36	4,00	11,00	belum tercapai
46	Cakupan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera	Persen	na	na	na	na	36,36	2,00	5,50	belum tercapai
47	Cakupan Kabupaten/Kota dengan cakupan deteksi dini Faktor Risiko PTM	Persen	na	na	na	na	36,36	0,00	0,00	belum tercapai
48	Pertumbuhan Jumlah Puskesmas dengan Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan	Persen	na	na	na	226,00	250,00	236,00	94,40	belum tercapai
49	Pertumbuhan Jumlah Puskesmas Pembantu dengan Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan	Persen	na	na	na	524,00	520,00	497,00	95,58	belum tercapai
50	Sarana Prasarana Alat Kesehatan	Persen	na	na	60,00	68,01	80,00	58,82	73,53	belum tercapai
51	Pertumbuhan Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Madia	Persen	na	na	0,00	54,00	0,00	0,00	100,00	sesuai
52	Sarana Prasarana Alat kesehatan di Fasyankes	Persen	na	na	60,00	68,01	80,00	58,82	73,53	belum tercapai
53	Ketersediaan Obat dan Vaksin	Persen	na	na	95,00	92,00	92,00	92,00	100,00	sesuai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
54	Pengunaan obat generik di Puskesmas	Persen	na	na	95,00	95,00	96,00	96,00	100,00	sesuai
55	Pengunaan obat generik di Rumah Sakit	Persen	na	na	67,00	71,00	72,00	72,00	100,00	sesuai
56	Pelayanan kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap	Persen	na	na	32,00	35,00	37,50	38,00	101,33	melampaui
57	Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit	Persen	na	na	45,00	46,00	47,50	48,00	101,05	melampaui
58	Penggunaan Obat Rasional	Persen	na	na	70,00	71,00	73,00	73,00	100,00	sesuai
59	Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000	na	na	15,9	17,3	36	32,9	91,39	belum tercapai
60	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	per 100.000	na	na	2,65	2,85	11	4,2	38,18	belum tercapai
61	Rasio Bidan per satuan penduduk	per 100.000	na	na	78	96,1	96	133,6	139,17	melampaui
62	Rasio Perawat per satuan penduduk	per 100.000	na	na	217	204,9	220	329,8	149,91	melampaui
63	Rasio Apoteker per satuan penduduk	per 100.000	na	na	14,88	8,9	15	12,9	86,00	belum tercapai
64	Rasio Sarjana Kesmas per satuan penduduk	per 100.000	na	na	23	31,15	35	32,3	92,29	belum tercapai
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	na	na	46,1	46,6	50,1	60,58	120,92	melampaui
2	Akses sanitasi layak	Persen	na	68,46	69,88	73,73	76,52	82,87	108,30	melampaui
3	Akses Air Minum Layak	Persen	na	72,60	76,16	77,67	80	86,74	108,43	melampaui
4	Luas Layanan Irigasi	Hektar	na	na	7639	7.639	7894	5447	69,00	belum tercapai
5	Persentase BUJK Profesional	Persen	na	na	15	13	20	21	105,00	melampaui
6	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Tata Ruang Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	na	na	100	100	100	100	100,00	sesuai
7	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	Persen	na	na	100	65,80	100	65,80	65,80	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	na	na	73,91	73,97	73,95	74,01	100,08	melampaui
2	Cakupan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang Tertangani (PSU)	Persen	na	na	7,28	10,70	14,43	11,12	77,06	belum tercapai
3	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman kumuh	Persen	na	na	58,65	63,45	67,67	63,68	94,10	belum tercapai
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
1	Nilai tolerasi dan kerukunan umat beragama	Skor	na	na	na	na	A	na	na	na
2	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satpol PP Provinsi Maluku dalam penegakan Perda	Persen	na	na	40	na	60	na	na	na
3	Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana	Level	na	Level 2 (Rendah)	Level 2 (Rendah)	Level 3 (Sedang)	Level 3 (Sedang)	Level 3 (Sedang)	100,00	sesuai
4	Indeks Kerentanan Bencana	Tingkat	na	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00	sesuai
5	Indeks Bahaya Bencana	Tingkat	na	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00	sesuai
6	**Sosial**									
1	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Orang	na	100	150	na	250	159	63,60	belum tercapai
2	Anak Terlantar yang Ditampung dan Dibina dalam Panti	Orang	na	na	50	na	150	93	62,00	belum tercapai
3	Pendidikan dan Pelatihan bangi Penyandang Cacat dan Ektrauma	Orang	na	na	190	na	210	na	na	belum tercapai
4	Penerima Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok	KK	na	100	150	na	250	15	6,00	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
	Usaha Bersama (KUBE)									
5	Jumlah KAT yang Diberdayakan	KK	na	50	50	na	100	47	47,00	belum tercapai
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1	**Tenaga Kerja**									
1	Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Berbasis Kompetensi	Persen	na	na	53,23	100	36,71	30,76	83,79	belum tercapai
2	Persentase perusahaan yang diawasi	Persen	na	49,33	22,41	17,11	33,84	26,74	79,02	belum tercapai
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkkan	Persen	na	2,83	2,83	8,76	3,00	4,45	148,33	melampaui
4	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	Persen	na	54	82,5	57,5	64,32	72,30	112,41	melampaui
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Persen	na	na	na	11,32	30	5,06	16,87	belum tercapai
6	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Menerapkan UU Ketenagakerjaan	Persen	na	100	100	100	100	100	100,00	sesuai
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
1	Cakupan Kab/Kota yang memenuhi kualifikasi Kab/Kota Layak Anak	Persen	na	9,09	18,18	27,27	45,45	27,27	59,99	belum tercapai
2	Rasio KDRT	Persen	na	n/a	0,37	0,31	0,37	0,44	81,08	belum tercapai
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan	Persen	na	52	52	30,01	57,00	29,97	52,58	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
	terhadap perempuan dan anak									
4	Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender	Persen	na	63,64	72,73	36,00	90,91	36,00	39,60	belum tercapai
5	Cakupan perempuan di legislatif	Persen	na	30	30	10,68	30,00	10,68	35,60	belum tercapai
6	Presentasi partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	Persen	na	48,33	56,88	41,00	50,00	41,00	82,00	belum tercapai
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Persen	na	na	30	0,13	35,00	0,12	0,34	belum tercapai
8	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	na	na	30	0,031	45,00	0,024	0,05	belum tercapai
9	Cakupan Kab/Kota pengelola sistem data gender dan anak	Persen	na	63,64	72,73	-	81,82	-	-	belum tercapai
10	Persentase perempuan dalam bidang usaha ekonomi kreatif	Persen	na	na	30	0,054	30,00	0,043	0,14	belum tercapai
3	**Pangan**									
1	Angka PPH Ketersediaan	Angka	na	79,82	80,00	70,00	83,00	86,52	104,24	melampaui
2	Angka PPH Konsumsi	Angka	na	80,6	84,60	86,00	86,50	81,38	94,08	belum tercapai
3	Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu	Persen	na	44	46	46	55	55	100,00	sesuai
4	Stabilitas Harga Pangan	Persen	na	na	< 3	0	< 3	0,21	100,00	sesuai
4	**Pertanahan**									

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	Presentase Penyelesaian Kasus Tanah	Persen	na	76,5	na	na	100	na	na	na
5	**Lingkungan Hidup**									
1	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Maluku	Dokumen	na	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	0,00	belum tercapai
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	na	85,64	84,99	88,72	82,97 - 85,50	90,41	106,91	melampaui
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	na	71,33	67,40	56,67	67,93 - 71,82	58,75	81,80	belum tercapai
4	Indeks Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	na	70,08	88,78	89,17	75,50 - 88,90	89,17	100,30	melampaui
5	Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	na	na	18	19,99	22	17,81	80,95	belum tercapai
6	**Kependudukan dan Catatan Sipil**									
1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	na	na	0,62	0,79	0,7	0,91	130,00	melampaui
2	Rasio pasangan ber-Akte Nikah	Persen	na	na	0,15	100,00	0,25	100,00	40.000,00	melampaui
3	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Jiwa	na	na	0,72	0,67	0,80	0,82	102,50	melampaui
4	Ketersediaan database kependudukan Skala Provinsi	Ada	na	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	sesuai
5	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jiwa	na	na	61,91	79,80	70,00	91,98	131,40	melampaui
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
1	Persentase Desa Maju	Persen	na	0	0.33	7,06	2,33	12,44	533,91	melampaui
2	Persentase Jumlah Bumdes yang Berkembang	Persen	na	53.92	53.92	48,29	57	59,72	104,77	melampaui

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
3	Persentase Jumlah Bumades yang Berkembang	Persen	na	na	na	35,71	38	42,86	112,79	melampaui
4	Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Berkembang	Persen	na	na	na	44,44	42	40	95,24	belum tercapai
5	Cakupan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	na	29.38	29.38	63,19	33	63,19	191,48	melampaui
6	Persentase Kepala/Perangkat Desa yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Majamen Pemerintahan Desa	Persen	na	19.15	22.61	55,68	28	55,68	198,86	melampaui
7	Persentase Jumlah Kepala Desa Definitif	Persen	na	n/a	n/a	53,09	58	53,01	91,40	belum tercapai
8	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif Menjalankan fungsinya	Persen	na	58	60	64,52	64	66,59	104,05	melampaui
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	na	1,67	1,66	0,67	1,65	0,58	164,85	melampaui
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	na	3,3	2,54	3,10	2,93	3,16	92,15	belum tercapai
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	na	22,18	18,48	16,72	13,68	14,28	95,61	belum tercapai
4	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun	Persen	na	47	45,2	73,62	45,70	75,45	165,10	melampaui
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi modern/mCPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun	Persen	na	na	na	28,99	45,42	36,6	80,58	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	Persen	na	19,0	19,0	17,20	13,68	33,4	244,15	melampaui
7	Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana	Persen	na	na	51,64	58,00	65,00	80,00	123,08	melampaui
9	**Perhubungan**									
1	Tingkat Keselamatan Transportasi	Persen	na	na	na	100	100	100	100,00	sesuai
2	Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan	Persen	na	na	na	22,49	48,48	-12,3	225,37	melampaui
3	Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun	Persen	na	45,45	45,45	47,00	100,00	50,00	50,00	belum tercapai
4	Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberang	Persen	na	na	3,70	6,7	4,84	4,7	97,13	belum tercapai
5	Persentase Pelabuhan Laut yang Terbangun	Persen	na	51,52	51,52	50,7	51,52	50,7	98,42	belum tercapai
6	Pertumbuhan Ketersediaan Tambatan Perahu	Persen	na	na	14,29	59,38	11,11	59,38	534,42	melampaui
10	**Komunikasi dan Informatika**									
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	POIN	na	na	0,9	191	2	0	0	belum tercapai
2	Persentase penyelesaian sengketa informasi	Persen	na	100	100	100	100	100	100,00	sesuai
3	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	Persen	na	na	na	na	20	32	160,00	melampaui
11	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**									
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	na	72,00	64,34	67,57	65,64	67,08	102,19	melampaui
2	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	na	n/a	n/a	56,88	57,92	91,22	157,49	melampaui
3	Persentase Koperasi berkualitas	Persen	na	18,14	16,58	0,47	17,26	2,84	16,45	belum tercapai
12	**Penanaman Modal**									
1	Laju Pertumbuhan Investasi PMDN	Persen	na	347	1890	570	≥ 10	-2,81	-	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
2	Laju Pertumbuhan Investasi PMA	Persen	na	105	-96	370	≥ 10	343,51	100,00	sesuai
3	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	na	na	1,17	7,25	1,42	8,76	618,78	melampaui
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan investasi	Poin	na	na	84,75	90	86,5	92	106,36	melampaui
13	**Kepemudaan dan Olahraga**									
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	na	n/a	81.37	81,37	82,28	81,40	98,93	belum tercapai
2	Pertumbuhan Pemuda Yang Aktif Dalam Kepeloporan, Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda	Persen	na	0,00	0,00	126	329	114	34,65	belum tercapai
3	Persentase Wirausaha muda Yang Difasilitasi	Persen	na	n/a	0	0	2	1,98	99,00	belum tercapai
4	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina Dalam Masyarakat	Cabang Olahraga	na	7	7	7	13	17	130,77	melampaui
5	Pertumbuhan Atlet Berprestasi	Persen	na	0,00	0,00	24	25	7	28,00	belum tercapai
6	Presentase Tenaga/Pelatih Olahraga yang Bersertifikasi	Persen	na	39	39	39	47	40,73	86,66	belum tercapai
7	Pertumbuhan Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Memadai	Persen	na	0,00	0,00	375	475	375	78,95	belum tercapai
14	**Statistik**									
1	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersedia	Persen	na	n/a	n/a	-	26,92	11,54	42,86	belum tercapai
15	**Persandian**									
1	Persentase Aplikasi Yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi	Persen	na	na	33,33	na	4,65	8,14	175,01	melampaui

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
2	Indeks Keamaanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	na	na	Kurang	na	Kurang	na	na	na
16	**Kebudayaan**									
1	Pertumbuhan Penyelenggaraan Event Seni Daerah	Persen	na	na	20,00	na	19,57	na	na	na
2	Pertumbuhan Pelestarian Cagar Budaya Tak Benda dan Benda	Persen	na	0	2	na	2	na	na	na
17	**Perpustakaan**									
	Cakupan Kabupaten/Kota yang Tertingkat budaya baca masyarakat dan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah	Persen	na	100	100	32,77	100	52,90	52,90	belum tercapai
18	**Kearsipan**									
1	Persentase Kabupaten/kota yang tertingkat pengetahuan dan terawatnya arsip/dokumen	Persen	na	18,18	27,27	0,00	54,55	39,98	73,30	belum tercapai
2	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Standar Baku Kearsipan/Tata Naskah Dinas	Persen	na	100	100	0	100	0	0	belum tercapai
	URUSAN PILIHAN									
1	**Kelautan dan Perikanan**									
1	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	na	na	12,42	12,53	12,66	12,84	101,42	melampaui
2	Volume Eksport	Ton	na	na	na	1.747,26	1.797	8.017,56	446,16	melampaui
3	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Poin	na	105,08	107,37	101,91	107,74	101,27	93,99	belum tercapai
4	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Poin	na	na	na	109,52	99,52	97,09	97,56	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
5	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	na	na	67,34	67,34	68,01	72,76	106,98	melampaui
6	Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola secara Berkelanjutan	Ha	na	150.000	150.000	150.000	150.000	159.000,87	106,00	melampaui
7	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	na	na	na	99,85	45,00	95,01	211,13	melampaui
2	**Pariwisata**									
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	na	18.075	18.979	13.153	21.000	2.010	9,57	belum tercapai
2	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	na	111.332	116.899	76.842	131.250	55.517	42,30	belum tercapai
3	Lama Kunjungan Wisatawan :									
	- Wisatawan Nusantara	Hari	na	5	5	6	5	2	40,00	belum tercapai
	- Wisatawan Mancanegara	Hari	na	10	10	8	10	2	20,00	belum tercapai
4	Nilai Pengeluaran Wisatawan (Devisa)	Rp (Juta)	na	203.704	213.891	337.173	236.906	123.424	52,10	belum tercapai
3	**Pertanian**									
1	Konribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	na	10,15	10,21	10,31	10,32	10,47	101,45	melampaui
2	Nilai Tukar Petani	Poin	na	100,89	100,94	99,01	101,7	97,68	96,05	belum tercapai
4	**Kehutanan**									
1	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	Persen	na	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	100,00	sesuai
2	RHL lahan kritis	Ha	na		252	820	1000	176,20	17,62	belum tercapai
3	Pemberdayaan Masyarakat	KTH	na	6	10	10	13	6	46,15	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	Peningkatan kualitas Hutan melalui tutupan lahan	Persen	na	64	65	66	67	65	97,01	belum tercapai
5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**									
1	BBM Satu Harga	Ya/Tidak	na	Tidak	Tidak	6 Lokasi	Ya	8 Lokasi	100,00	sesuai
	Konsumsi listrik perkapita	KWh	na	206,76	312,32	0,00	364,00	0,00	na	na
	Kapasitas pembangkit listrik	MW	na	151,40	179,40	0	241,00	0,00	na	na
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	na	85,24	91,10	92,30	95,00	95,58	100,61	melampaui
3	Porsi EBT dalam bauran energi	Persen	na	n/a	n/a	2,5	13,40	4,00	29,85	belum tercapai
4	Persentase Pertambangan Tanpa ijin	Persen	na	n/a	n/a	4	< 5	3	100,00	sesuai
6	**Perdagangan**									
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Persen	na	10,2	5,19	4	5	18,3	366,00	melampaui
2	Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok (Bapok)	Persen	na	3,38	3,8	3,5 - 4	3,5	4,19	80,29	belum tercapai
3	Nilai Ekspor Non Migas	US$ (Juta)	na	1,2	10,8	11,8	13	45,12	347,08	melampaui
4	Persentase Barang Beredar yang sesuai dengan Ketentuan	Persen	na	25	30	45	55	46	83,64	belum tercapai
7	**Perindustrian**									
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	na	25,29	32,88	42,74	45,26	58,32	128,86	melampaui
2	Laju Pertumbuhan Industri	Persen	na	0,56	0,56	0,65	0,65	0,93	143,08	melampaui
8	**Transmigrasi**									
1	Persentase pembinaan di permukiman transmigrasi untuk peningkatan kesejahteraan	Persen	na	50	90	100	91,67	91,67	100,00	sesuai
	PENUNJANG URUSAN									
1	**Perencanaan Pembangunan**									
1	Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan	Ya/Tidak	na	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
	Evaluasi Pembangunan yang Tepat Waktu									
2	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Provinsi Maluku	Persen	na	60	60	100	100	100	100,00	sesuai
3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	na	20	30	0	> 50	75	100,00	sesuai
4	Indeks Daya Saing Daerah	Level	na	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	50,00	belum tercapai
2	**Keuangan**									
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	na	na	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	sesuai
2	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	na	na	75%	98%	83%	103,5%	124,70	melampaui
3	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	Persen	na	na	75%	88,35%	83%	82%	98,80	belum tercapai
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	na	-7,58	8,29	14,39	> 6	13,12	100,00	sesuai
3	**Pengawasan**									
1	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Nilai	na	na	60,04	59,34	> 60 - 70	na	na	na
2	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya adalah ≥ BB	Persen	na	na	na	72,73	54,55	na	na	na
3	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Maluku	Opini	na	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	sesuai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang opini atas LKPD adalah WTP	Persen	na	63,64	72,73	54,54	90,91	0,00	na	na
5	Level Maturitas SPIP	Level	na	na	level 3	level 3	level 3	level 3	100,00	sesuai
6	Level Kapabilitas APIP	Level	na	na	na	Level 2	Level 2	Level 2	100,00	sesuai
7	Persentase Penyelesaian TLHP	Persen	na	na	75	74,64	85	66,13	77,80	belum tercapai
4	**Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**									
1	Presentase Kinerja ASN	%	na	na	>90	87,70	>90	90,92	100,00	sesuai
2	Presentase Disiplin ASN	%	na	na	>90	77,88	>90	68,16	75,73	belum tercapai
3	Persentase Proper Yang Ditindaklanjuti	Persen	na	na	7,65	4,40	8,40	80,40	100,00	sesuai
4	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	na	na	na	44,12	>80	>80	100,00	sesuai
5	**Fungsi Lainnya**									
1	Persentase tingkat fasilitasi pelaksanaan peran dan fungsi legislasi dan pengawasan	Persen	na	na	na	95,9	100	94,10	94,10	belum tercapai
2	Persentase Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	na	na	na	0,00	100	63	63,00	belum tercapai
3	Persentase Dokumen Persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yang dianalisis	Persen	na	na	na	100	50	100	200,00	melampaui
4	Presentase Penyerahan/ Pelimpahan P3D	Persen	na	na	na	100	70	100	142,86	melampaui
5	Persentase Kabupaten/Kota Yang dibina dalam Penerapan PATEN	Persen	na	na	9,09	100,00	18,18	0,00	0,00	belum tercapai
6	Persentase Fasilitasi Penyusunan	Persen	na	na	na	100	100	90	90,00	belum tercapai

NO.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
	Rancangan Produk Hukum Daerah									
7	Persentase Perda Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Kepentingan Umum	Persen	na	na	na	100	100	100	100,00	sesuai
8	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persen	na	na	na	100	100	100	100,00	sesuai
9	Cakupan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	Persen	na	na	100	0	100	0	0,00	belum tercapai
10	Persentase Usaha Daerah/BUMD yang sehat dan Profitabel	Persen	na	na	25	25	25	25	100,00	sesuai
11	Cakupan koordinasi, fasilitasi, pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah	Persen	na	na	100	100	100	0	0,00	belum tercapai
III	**ASPEK DAYA SAING**									
1	Persentase pengeluaran rata-rata perkapita per bulan									
	- Makanan	Persen	na	55,21	50,29	49,39	50	50,91	101,81	melampaui
	- Non Makanan	Persen	na	44,79	49.71	50,61	50	49,09	98,19	belum tercapai
2	Rasio Ketergantungan	Persen	na	67,17	61,07	na	61,01	na	na	na

Tabel II.45.
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 (sesuai Permendagri 18 Tahun 2020)

No	IKK Outcome	2019	2020
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			
Pendidikan			
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	56,82%	84,84%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus		36,67%
Kesehatan			
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,00%	0
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	0%	33%
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	49%	100%
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100%	100%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	26,17%	41,16%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	28%	56,90%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	33,85%	5369%
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0%	0
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0%	0
6	Rasio kemantapan jalan	46,60%	60,58%
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	11,54%	543701%
Perumahan Rakyat			
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0,00%	0,14%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	8,202%

No	IKK Outcome	2019	2020
3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	3,50%	0,23%
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	48,00%	0,423%
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	0,00%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1%	100%
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	69,91%	78,13%
4	Persentase penanganan pra bencana	40,46%	50,37%
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	84,23%	69,77%
Sosial			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	45,00%	0%
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	33%	62%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	4,17%	80%
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	5	0%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	48%	32%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
Tenaga Kerja			
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100%	54,54%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	6%	525976%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0%	-
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	86%	974.93%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	15%	63069%
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	66%	36,588%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0%	0
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	0%	1,94%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2%	
Pangan			
1	Persentase cadangan pangan	3,28%	67,3
Pertanahan			
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	50%	38%

No	IKK Outcome	2019	2020
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	0%	0
Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	74,34	76,86
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	60,52%	44,20%
Administrasi Kependudukan			
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun		100%
2	Pemanfaatan data kependudukan		0
Pemberdayaan Masyarakat			
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	16%	13,966%
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	3%	2,66%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	3,1	3.16
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	30,70%	75,79%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,72	14,28
Perhubungan			
1	Rasio konektivitas Provinsi	82,50%	2085
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi		7,09%
Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	26%	28,30%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	46%	100%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	0%	26501%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	95%	2,84%
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	23%	1,51%
Penanaman Modal			
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	44%	20,89%
Kepemudaan dan Olahraga			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0%	0,01%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1%	0.141%
3	Peningkatan prestasi olahraga		7 Medali
Statistik			

No	IKK Outcome	2019	2020
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	25%	100%
Persandian			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	7%	0
Kebudayaan			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	2%	118,95%
Perpustakaan			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		52,9
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		17,51
Kearsipan			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	6,50%	0%
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,30%	0%
Urusan Pilihan			
Kelautan Perikanan			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)		
	a. Perikanan Tangkap	47,31%	72,77%
	b. Perikanan Budidaya	52,69%	27,73%
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	45,00%	45,95%
Pariwisata			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0,69%	-84,71%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	73,18%	-27,75%
3	Tingkat hunian akomodasi	0,00%	0%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2%	0%
Pertanian			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	26%	404,23%
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	99%	-66,91%

No	IKK Outcome	2019	2020
Kehutanan			
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100,00%	46,00%
2	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,27%	0.06%
3	Persentase jumlah produk unggulan KPH yang dikembangkan	na	na
Energi Sumber Daya Mineral			
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	81,39%	82,24%
Perdagangan			
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas		305,09%
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	98%	63,64%
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	0%	0
4	Tertib Usaha	0%	0
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	0%	0
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	97%	16,37%
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5074%	6,08%
Perindustrian			
1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi		0
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	50%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	0%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	0%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	0%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		0%
Transmigrasi			
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
Perencanaan dan Keuangan			
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	7%	0,13%
2	Rasio PAD	1%	12.760.961,30
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66%	36,88%
4	Opini Laporan Keuangan		WTP

No	IKK Outcome	2019	2020
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 3
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 2
Pengadaan			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	9%	65,95%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	60%	7,47%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	38%	0.942
Kepegawaian			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		144%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	85%	27,10%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27%	0
Manajemen Keuangan			
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	92%	0%
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		0%
3	Assets management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya
4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5%	0,04%
Transparansi dan Partisipasi Publik			
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	111%	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)		

2.3. CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI MALUKU

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan,

keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Maluku disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.46.
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Provinsi Maluku Tahun 2020

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output	Target	Realisasi (2020)		
			Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Prosentase
URUSAN PENDIDIKAN						
1.	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah warga negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Atas	85.806	71.645	14.161	82,33
2.	Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah warga negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Kejuruan	85.806	22.440	63.366	75,61
3.	Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	26.510	1.112	25.398	78,08
URUSAN KESEHATAN						
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	1.842.910	1.842.910	0	66,67
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	113.012	113.012	0	100

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output	Target	Realisasi (2020)		
			Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Prosentase
URUSAN PEKERJAAN UMUM						
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota	0	0	0	10,7
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten /kota	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	0	0	0	0
URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah rumah korban yang berhak memperoleh rumah layak huni	23	23	0	50
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Provinsi	49	49	0	50
URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	1	1	0	50
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai mutu	10	4	6	40
URUSAN SOSIAL						
1.	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	265	0	265	0

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output	Target	Realisasi (2020)		
			Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Prosentase
	Terlantar di dalam Panti Sosial					
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	150	93	57	52,13
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	52	48	67,29
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50	0	50	0
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50	16	34	32,8

2.4. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI MALUKU

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola. Provinsi Maluku dalam proses perumusan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, maka perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan daerah. Capaian indikator target pembangunan berkelanjutan akan memperlihatkan fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku selama ini, dimana capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.47.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Maluku Tahun 2016-2020

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki- laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	19,18	18,45	18,12	17,69	17,99
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.			1	1	1
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. (Persentase Penanganan	6,09	6,12	6,2	6,97	6,8

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)					
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	62741	62741	89198	90588	92239
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	3,15%	5,75%	8,40%	5,17%	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	65,62		45,18	50,81	47,1
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	67,6	0,73	53,6	67,2	60,2
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	67,2		53,36	50,05	48,21
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	66,81	63,29			71,16
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.			51,6	40,28	53

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (Pengurangan Kawasan Kumuh dalam Hektar)	62,6	11,2	tidak ada data	63,45	63,68
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	0,9126	0,9379	0,9388	0,9451	0,951
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	72,56	75,72	73,59	78,66	80,04
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	16494		1808	103492	2933
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.				1	2
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	Ada	Ada	
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. (Kegiatan)	30	8	0	0	Baru akan kembali dilaksanakan pada
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.			160,5	160,35	160,35
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)		36,84%	32,08%	36,37%	

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		sebagai persentase dari total belanja pemerintah.					
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).			258000000	258000000	258000000
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).		8,26	7,95	7,66	Data BPS (Belum
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	18,2	18,1	10,8	11,1	10,1
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori		20,99%	25,86%	29,06%	Belum Publish

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
		minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari					
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (Skala pada FSVA)	Prioritas 4 = 48.3% Prioritas 3 =16.7% Prioritas 2 =27.1% Prioritas 1 = 7.9%				
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	29	30	23	18	15
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	24,5	20,1	21	17,3	11,92
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	1,84	4	22,7	18	55,5
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	24	30	25	16	76,9
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	78,3	80,4	80,6	84,6	70,4

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).			0,8041	0,8087	0,7712
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.			80,41%	80,87%	77,12%
Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.			22,00%		
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	81,4	82	90	92	92

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			4,11	4,99	5,63
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15- 49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	14,8	12,5	51,6	40,28	53
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	69,19	67,01	51,6	40,28	53
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.			9	18	8
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	165	138	132	114	149

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	67,64		45,18	50,81	47,1
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	67,64	63,19	63,52	30	38
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	8	7	2	1	6
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	62	73		4	3
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6	5	6	5	6
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	67,6	73	72,7	45,5	36,4
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.			62%	62%	19%
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi	4,3	2,95	1,25	0,71	0,61

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
		malaria. (Menurunnya jumlah kasus)					
	3.3.3*	Kejadian Malaria per	8801	4808	2282	990	913
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.				72,7	81,8
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).			451	477	396
	3.3.5.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta.	0	0	0	0	0
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	0	1	0	0	0
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.			1	1	1
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	7,2	7,2	7,2	8,8	8,8
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	15,4	15,4	19,9		
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	25,8	25,8	29		

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	0,9824	0,9983	0,9991	0,9979	0,9987
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	9,27	9,31	9,32	10,06	10,1
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	59,18%	60,12%	60,78%	61,19%	62,01%
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(a)	Angka Partisipas i Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	0,9824	0,9983	0,9991	0,9979	0,9987
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	0,9824	0,9983	0,9991	0,9979	0,9987
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar	0,9247	0,9657	0,9388	0,9451	0,951

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.		(APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. (APM SD)					
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	98,94	99,19	99,47	100	100
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,81	99,99	99,47	100	100
Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas,(e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	0,56	0,65	0,6018	0,6119	0,6421
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.			0,4711	0,4784	0,4819

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	3	3	3	3	3
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.			0,0151	0,0064	0,0076
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.			0,00013	0,00014	0,00013
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	24,73	68,55	36,36	38,1	42,86
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			0,25	0,31	0,222

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	28,88	28,88	28,88	28,88	23,25
Menghapuskan segala bentukkekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.			0,03	0,032	0,048
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	0,9824	0,9983	0,9991	0,9979	0,9987
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan							
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.			53,36	50,05	48,21
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	65,01	64,87	72,19	73,17	73,59
Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	728.776	728.776	263.704	263.704	263.704

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. (Jumlah HHBK Dalam Satuan Ton)	62.794	92.142	78.911	68.598	110.142
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.				1 BWS	1 BWS
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air				ada	ada
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).			3 DAS Prioritas Wae Hatu Merah, Wae	3 DAS Prioritas Wae Hatu Merah, Wae	3 DAS Prioritas Apu, Wae Manumbai
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	4	6	8		
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	0,08	0,08		0,1343	
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).			65	85	155

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).			439	680	803
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	42,94				
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	66,81	63,29			71,16
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	4	5	7		
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	42,5	49,5	49,65	56,67	58,75
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	ada	ada	ada	ada	ada

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
yang menderita akibat kelangkaan air.							
Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	3	3	3	3	3
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga. (data BPS pusat)	0,65		0,44	0,75	0,89
	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	85,24	86,18	90,84	92,3	95,58
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	281,7	206,76	312,32	349,99	364,1
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHK) ribu rupiah		15.942.000	16.607.000	17.222.000	16.794.000
	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita. (ADHK)	5,73	5,82	5,91	5,41	-0,92
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.		13,85	-2,87	3,09	-8,57

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	10260	11127	12845	13876	15057
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	34,46%	34,65%	29,88%	28,62%	35,57%
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	7,05	9,29	7,27	7,08	7,57
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	12,9	15,4			
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	0,6076	0,6248	0,6319	0,6551	0,6601
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	0,2282	0,36	0,368	0,3224	0,3875
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	35,75%	37,17%	35,87%	38,34%	33,43%
Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).			12,47		
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	15.015	18.075	19.508	13.153	2.010

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	103.947	111.332	105.001	76.842	55.517
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.				337.000.000	123.000.000
	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	2	1,71	1,69	1,7	1,57
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. (Total Kredit KUR)			5,4846E+11	6,2503E+11	6,2271E+11
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	mendekat	mendekat	menjauh	-	menjauh
	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	170	183	172		170
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing- masing.	9.4.1(a)	Jumlah emisi gas rumah kaca/tahun	-7943,7	-7493,23	7081,56	-7512,29	
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	20,41	24,42	29,79	33,89	tidak ada data
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.			1	1	1

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	8,25%	8,05%	8,46%	9,08%	11,02%
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	4,4	4,64	7,28	2,69	-2,31
	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. (Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB)		3,64	5,35	5,19	5,11
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. (Penambahan Jumlah Industri Skala Mikro dan Kecil)			267	252	270
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara							
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.			0,326	0,324	0,326
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	5,69	5,66	6,25	6,39	Untuk Tahun 2020, belum tersedia data yang valid dikarenakan masih
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	8	8	8	8	6

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	19,18	18,45	18,12	17,69	17,99
Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		81,78	81,38	87,06	
Mengadopsi kebijakan,terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	3,15%	5,75%	8,40%	5,17%	
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	16494		1,808	103,492	2,933
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. (Jumlah Desa)			26	29	35
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.			4	4	4

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).			145,85	144,02	141,65
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada			
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak,	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	0,46	0,57			

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
penyandang difabilitas dan orang tua.							
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Kota Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Kota Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.			10	15	21
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada (ambon)	ada (ambon)	ada (ambon)	ada (ambon)	ada (ambon)
Pada tahun 2030,mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		75,00%		81,40%	72,46%
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di	1	1	1		

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.		kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.					
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (dalam ton)		21,48		648,33	960,15
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	41,04			15,34	61,09
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	ada		ada	ada	ada
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Ada	-	-	-

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	16494		1808	103492	2933
14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							
Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	3	3	3	3	3
Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.			95,32	99,85	95,01

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
pada the World Trade Organization.							
Menyediakan akses untuknelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Penetapan Peraturan Presiden	Peraturan Gubernur Maluku		Perda Maluku No. 11 tahun	
	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi (kelompok nelayan).	9	0	4	1	
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	65,50	65,70	65,70	66,36	65,94
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	22	22	11	11	11
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	20	15	10	15	10
	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	na	na	na	na	na

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0,06	0,08	0,01	0,018	0,004
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	ada	ada	ada	ada
Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		ada	ada	ada	ada
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).			0,25	0,31	0,222

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	7	11			8
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. (jumlah seluruh kejahatan)	661	710	3204	3628	2274
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		3,71	3,66	3,7	3,84
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	28,88	28,88	28,88	28,88	23,25
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten /Kota).	WTP	WTP	WDP	WTP	
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan.	NA	NA	NA	NA	1
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		0,8909	0,8798	0,9269	

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).				83,41	83,41
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			51,49	45,31	
Menghentikan perlakuan kejam eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.,	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki- laki dan anak perempuan.	0,0102	0,072	0,0905	0,0098	0,0134
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0,46%	0,91%	1,20%	4,10%	4,00%
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. (Jumlah Kasus)	66	139	84	53	85
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
Meningkatkan kerjasama Utara- Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband (Perdesaan)	14,76	58,1			tidak ada data

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.			100% (Aru, Tanimbar, MBD, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru Selatan)	100% (Aru, Tanimbar, MBD, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru Selatan)	100% (Aru, Tanimbar, MBD, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru Selatan)
	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	20,41	24,42	29,79	33,89	
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	24	14	24	54	54
	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas			98,6	100	86,05

Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		dengan kualitas data statistik.					
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.			92,96	96	81,94
Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		23846	30286	25379	44047
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).			99,3	99,67	78,77
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyebaran Covid-19 strain baru semakin meluas, kini semakin banyak negara yang mengalami lonjakan kasus baru. Kondisi ini dapat menahan pemulihan ekonomi global terutama pada triwulan II tahun 2021. Namun, indeks PMI masih menunjukkan perkembangan yang baik. Selain itu, harga komoditas internasional juga masih melanjutkan penguatan. Indeks PMI Indonesia pada bulan Mei juga mengindikasikan kinerja industri yang semakin baik. Inflasi *month-to-month* menunjukkan peningkatan meskipun masih tetap rendah, didorong oleh permintaan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Dari sisi eksternal, neraca perdagangan kembali surplus meskipun kinerja ekspor dan impor turun seiring dengan pola musiman. Nilai tukar menguat, sementara cadangan devisa turun tipis. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara masih belum menunjukkan peningkatan.

Pada akhir triwulan II tahun 2021, kasus Covid-19 makin meningkat di Indonesia yang diiringi dengan melonjaknya tingkat keterisian fasilitas kesehatan, bahkan di beberapa daerah telah mencapai 90 persen. Seiring dengan peningkatan kasus, ekspansi sektor manufaktur melambat sebagai akibat dari turunnya permintaan baru dan permintaan ekspor. Perkembangan harga di pasar domestik juga mengalami deflasi sebagai imbas dari penurunan permintaan paska Ramadan dan Idul Fitri. Nilai tukar rupiah sepanjang bulan Juni melemah dan cadangan devisa menurun. Namun, neraca perdagangan bulan Juni tetap surplus meskipun lebih kecil dari bulan sebelumnya. Sementara itu, persentase penduduk miskin per Maret 2021 sebesar 17.87 persen, meningkat dibandingkan Maret 2020. Di sisi lain, ketimpangan semakin melebar dibandingkan kondisi pada periode yang sama tahun 2020.

Dinamika perekonomian saat ini menyulitkan APBN terutama tahun 2021 dan 2022, sebagai instrumen utama kebijakan fiskal untuk mampu menyesuaikan diri dengan arus ketidakpastian yang

masih akan terus berlangsung. Berbagai skenario yang dirumuskan, temasuk postur dan alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam APBN ke depan masih terfokus pada pemulihan perekonomian yang kemungkinan mulai berangsur normal mulai tahun 2023. Merujuk pada kondisi tersebut, pemerintah menyesuaikan semua asumsi dan target ekonomi baik di level pusat, level pemerintah provinsi, maupun level pemerintah kabupaten/kota secara lebih relevan.

Kondisi perekonomian yang belum normal dan terfokus pada pemulihan ekonomi diyakini memberi dampak kepada keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku disebabkan masih bergantung pada dana transfer. Berdasarkan hal ini, upaya penyesuaian kebijakan sangat urgen untuk dilakukan melalui revisi target keuangan atau APBD Provinsi Maluku selama beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pengelolan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah harus dioptimalkan khususnya pada masa-masa resesi ekonomi (mikro) saat ini. Pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Maluku harus mengedepankan asas efisiensi, efektivitas dan fokus pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Berbagai rumusan kebijakan ekonomi daerah perlu diakselerasi dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Beberapa kebijakan ekonomi daerah yang dapat menarik dan meningkatkan penerimaan daerah perlu dioptimalkan.

Bersamaan dengan optimalisasi sumber potensial penerimaan daerah, kebijakan belanja dan pembiayaan juga perlu dikelola dengan cermat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang baik melalui manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan masa lalu harus diperhatikan. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang-kurangnya dalam jangka 5 (lima) tahun ke belakang yang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan untuk dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan selanjutnya.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan, sedangkan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah masa lalu, perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana ketersediaan kemandirian pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuatnya kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Provinsi Maluku berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami fluktuasi penurunan. DOFD Provinsi Maluku di tahun 2016 mencapai 18,3% kemudian turun di tahun 2017 menjadi 15,3% dan kemudian naik hingga mencapai 17,9% pada tahun 2020. Kemudian turun kembali jika dilihat dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 16,9%. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi PAD dalam lima tahun terakhir, terutama pada komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Jika dilihat secara spesifik, Provinsi Maluku terjadi tren peningkatan PAD mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan namun kinerja/akselerasinya masih cukup rendah dibanbingkan sumber pendapatand daerah lainnya terumata dari pendapatan transfer pemerintah pusat.

Berdasarkan klasifikasinya, nilai rata-rata DOFD Provinsi Maluku sebesar 16,5% masih masuk kategori **kurang** karena berada di antara 10,01%-20,00%. Agar dapat meningkatkan tingkat kemandirian fiskal dan masuk ke kategori sedang, maka Pemerintah Provinsi Maluku harus menggali sumber-sumber keuangan daerah dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Adapun perkembangan DOFD Provinsi Maluku periode tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Maluku, Tahun 2016-2021

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2016	2.547.550.608.748	466.208.198.073	18,3%
2017	2.817.045.157.655	430.866.044.123	15,3%
2018	3.074.744.815.076	465.916.419.217	15,2%
2019	3.108.914.880.042	482.805.590.254	15,5%
2020	3.045.825.245.458	545.752.866.622	17,9%
2021	3.269.499.784.067	552.191.503.653	16,9%
Rata – Rata			**16,5%**

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

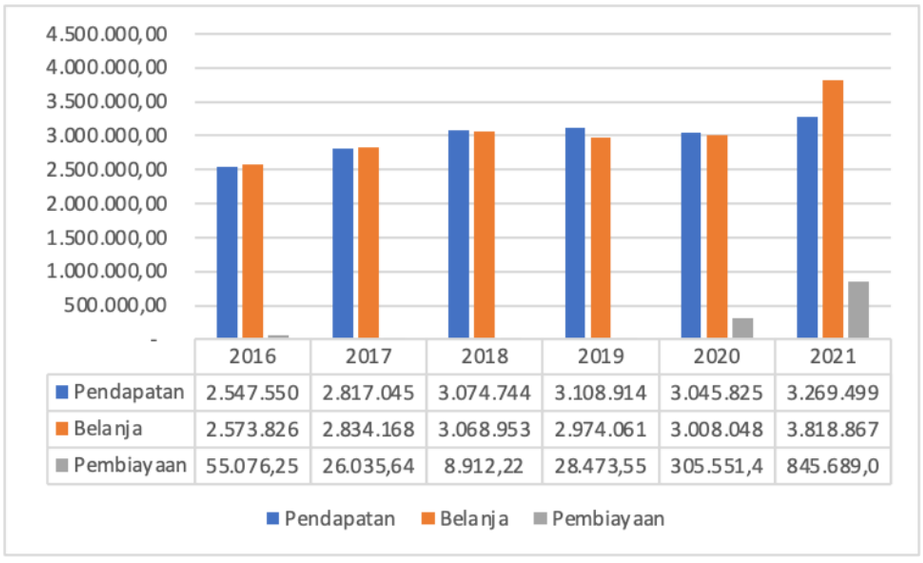
Kinerja keuangan merupakan prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Informasi kinerja keuangan diperlukan dalam menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD berdasarkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kinerja pelaksanaan APBD menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Perkembangan pendapatan Provinsi Maluku dalam rentang 2016-2020 mengalami tren fluktuatif namun cenderung naik di mana pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. Rp. 2.547 Milyar menjadi Rp. 3.045 Miliar pada tahun 2020 dan naik pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 3,269 milyar. Penurunan terjadi di tahun 2020 disebabkan Covid-19 yang menyebabkan penurunan dana transfer. Secara umum kenaikan pendapatan pada tahun 2020 meningkatkan kemampuan belanja daerah yang realisasinya mengalami kenaikan dari Rp. 2,573 Miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 3,008 Miliar pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 3.818 miliar. Adapun pada komponen Pembiayaan, Provinsi Maluku juga mempunyai tren fluktuatif akibat dinamika SiLPA yang naik pada tahun 2020. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah.

Gambar III. 1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (dalam juta)



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	2.547.550	2.817.045	3.074.744	3.108.914	3.045.825	3.269.499
Belanja	2.573.826	2.834.168	3.068.953	2.974.061	3.008.048	3.818.867
Pembiayaan	55.076,25	26.035,64	8.912,22	28.473,55	305.551,4	845.689,0

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

1. Pendapatan Daerah

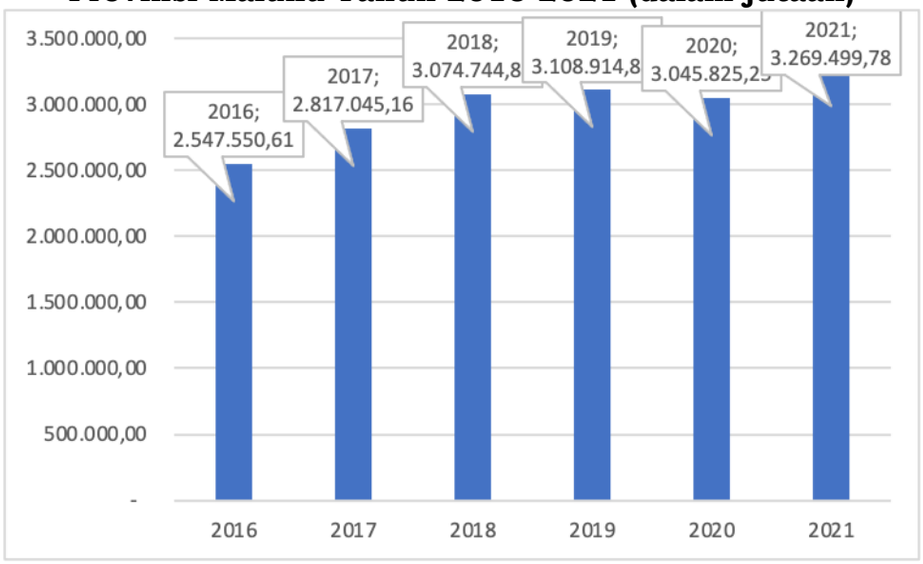
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan strukur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu kebijakan pendapatan daerah harus mampu mencipatakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun kestensifikasi.

Pendapatan daerah Provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,57% pertahun dari Rp. 2,547 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 3,045 miliar ditahun 2020 dan naik kembali menjadi Rp. 3,269 pada tahun 2021. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Gambar III. 2
Perkembangan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (dalam jutaan)



Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam, hampir semua komponen pendapatan nilainya naik. PAD mengalami kenaikan sebesar 4,02% pertahun dari Rp. 466 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 545 miliar ditahun 2020. Pada Pendapatan Transfer juga mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,68% pertahun dari Rp. 2,081 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 2,498 miliar ditahun 2020. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 yang pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,622 Milyar menjadi Rp. 2,498 Milyar pada tahun 2020.

Pertumbuhan negatif dari transfer pemerintah pusat lainya yang bersumber dari dana penyesuaian di mana di tahun 2016 mencapai Rp. 443 miliar kemudian turun menjadi Rp. 9,125 miliar di tahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 0. Sedangkan pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah tercatat naik hingga 49,95% pertahun dari Rp. 239 juta di tahun 2016, meningkat hingga Rp 1,207 miliar di tahun 2020.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan di antaranya adalah pendapatan pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,26% per tahun, pendapatan retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,51% per tahun dan lain-lain PAD yang sah dengan kenaikan rata-rata dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 8,41%. Berlawanan dengan pendapatan pajak, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, komponen pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan justru mengalami penurunan dengan dengan rata-rata penurunan sebesar -2,14% per tahun.

Jika ditelaah lebih detil secara umum, kontribusi terbesar terhadap kenaikan PAD dalam kurun waktu 2016-2020 berasal dari Pendapatan Pajak Daerah dengan kontribusi Rp 45,99 miliar, kemudian Pendapatan Retribusi Daerah dengan kontribusi sebesar Rp. 28,669 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan kontribusi sebesar Rp. 8,401 miliar. Untuk Provinsi Maluku, sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan dan dana penyesuaian.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat merupakan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang terdiri atas dana transfer umum (DBH dan DAU) dan dana transfer khusus (DAK). Untuk DBH bersumber dari pajak dan penerimaan sumber daya alam. Sumber pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Untuk DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana transfer khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang rata-rata kontribusinya mencapai 95,6% pertahun. Secara agregat nilai pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,14%. Komponen di dalamnya yaitu DBH, DAU dan DAK seluruhnya mempunyai tren kenaikan di mana rata-rata kenaikannya secara berturut-turut sebesar 7,21%, 4,86% dan 29,53%. Untuk pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana penyesuaian hanya berkontribusi di tahun 2016, 2017 dan 2018 dangan nilai

kontribusi secara berturut-turut sebesar Rp. 443,089 miliar, Rp. 7,5 miliar dan Rp. 9,125 miliar.

Untuk Lain-Lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dari sumber pendapatan hibah di mana pada tahun 2016 sebesar Rp. 238 juta menjadi Rp. 1,207 miliar di tahun 2020. Adapun Lain-Lain pendapatan yang sah lainnya tercatat hanya masuk di tahun 2017 sebesar Rp. 8 miliar. Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (juta rupiah)

No	Uraian	Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.547.550,61**	**2.817.045,16**	**3.074.744,82**	**3.108.914,88**	**3.045.825,25**	**3.269.499,78**	5,23%
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**466.208,20**	**430.866,04**	**465.916,42**	**482.805,59**	**545.752,87**	**552.191,50**	3,68%
	Pajak Daerah	336.367,84	329.090,44	363.950,50	361.093,16	382.358,28	414.045,98	4,36%
	Retribusi Daerah	65.411,34	74.118,05	79.893,99	79.640,68	94.079,86	29.668,99	-5,91%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.406,68	946,20	250,00		38.891,79	40.549,37	-66,77%
	Lain-Lain PAD yang Sah	22.022,34	26.711,36	21.821,92	42.071,75	30.422,94	67.927,17	38,27%
1,2	**Pendapatan Transfer-LRA**	**2.081.103,61**	**2.377.629,51**	**2.608.564,40**	**2.622.545,72**	**2.498.865,07**	**2.715.750,13**	5,69%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.638.014,25**	**2.370.129,51**	**2.599.439,40**	**2.622.545,72**	**2.498.865,07**	**2.711.163,63**	11,81%
	Dana Bagi Hasil Pajak	55.239,20	60.545,83	40.626,37	28.272,21	45.254,59	98.590,69	24,84%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.073,21	20.650,99	38.549,99	51.099,28	31.781,59	-	110,68%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.260.897,99	1.555.603,05	1.670.234,40	1.699.714,81	1.524.466,22	1.523.748,76	4,43%

No	Uraian	Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Dana Alokasi Khusu (DAK)	318.803,86	733.329,64	850.028,63	843.459,43	897.362,67	1.088.824,18	34,58%
	Dana Insentif Daerah						4.586,51	
	Pend. Transfer Pem. Pusat - Lainnya - LRA	443.089,36	7.500,00	9.125,00	-	-	-	-58,88%
	Dana Penyesuaian - LRA	443.089,36	7.500,00	9.125,00	-	-	-	-58,88%
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**238,80**	**8.549,60**	**264,00**	**3.563,57**	**1.207,31**	**1.558,15**	919,22%
	Pendapatan Hibah	238,80	549,60	264,00	3.563,57	1.207,31	1.558,15	258,19%
	Dana Bagi Hasil dari Pedapatan Lainnya	-	8.000,00	-	-	-	-	

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 realisasi belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,97% pertahun dari Rp. 2,573 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 3,008 miliar di tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 3,818 miliar. Kenaikan belanja tersebut seirama dengan kenaikan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum hampir seluruh jenis belanja daerah mengalami peningkatan kecuali Belanja Modal.

Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan mencapai 9,77% pertahun dari Rp. 1,646 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 2,095 miliar di tahun 2020 dan menjadi Rp. 2,532 miliar pada 2021. Peningkatan belanja operasi sangat dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai sebesar 18,25% pertahun dari Rp. 485 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 948 miliar ditahun 2020. Sedangkan belanja hibah mengalami fluktuasi dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,57% pertahun dari Rp. 475 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 571 miliar di tahun 2021. Selain belanja pegawai, jenis belanja operasi yang juga mengalami peningkatan adalah belanja bunga yang secara rata-rata meningkat 122% pertahun dari Rp. 557,95 juta di tahun 2016 menjadi Rp.8,125 miliar di tahun 2021. Meskipun secara keseluruhan belanja operasi mengalami peningkatan, namun terdapat komponen belanja operasi yang mengalami tren menurun yaitu belanja belanja barang dan jasa (rata-rata penurunan sebesar -0,2% pertahun) dari Rp. 678 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 673 miliar di tahun 2020. Sedangkan belanja hibah rata-rata mengalami penurunan sebesar -0,24% pertahun dari 475,958 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 471,393 miliar di tahun 2020. Adapun belanja bantuan sosial juga menurun -36,56% pertahun dari Rp. 6,67 miliar menjadi Rp. 1,08 miliar di tahun 2020.

Belanja Tak Terduga (BTT) meningkat sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 722% pertahun dari Rp. 2,127 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 93,681 miliar di tahun 2020 dan turun menjadi Rp. 63 miliar pada tahun 2021. Peningkatan pada tahun 2020 dipicu adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 di mana ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga pos belanjanya diletakkan di BTT.

Belanja Tranfer secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 5,69% pertahun dari Rp. 171 miiliar di tahun 2016 menjadi Rp. 227,23 miliar di tahun 2020 dan turun sedikit menjadi Rp. 219 miliar pada tahun 2021. Peningkatan belanja transfer tersebut selain disebabkan oleh meningkatkan belanja transfer bagi hasil pajak daerah yang meningkat 5,61% pertahun juga disebabkan oleh meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah yang rata-ratamengalami peningkatan 35,51% pertahun.

Belanja Modal secara agregat juga mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,28% pertahun dari Rp. 753 miliar

(2016) menjadi Rp. 1.003 miliar (2021). Dari tahun 2019 hingga 2020, hampir semua komponen belanja modal mengalami penurunan kecuali Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung dan Belanja Aset Tetap lainnya. Belanja Peralatan dan Mesin naik mencapai 101,80% dari Rp. 70 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 142 miliar di tahun 2020. Begitu juga Belanja Bangunan dan Gedung yang mengalami peningkatan sebesar 3,82% dari Rp. 147,419 miliar ditahun 2019 menjadi Rp. 153,051 miliar di tahun 2020. Untuk belanja Aset Tetap lainnya meningkat 299% dari Rp. 9,41 miliar di tahun 2019 menjadi Rp. 37,628 miliar di tahun 2020. Adapun belanja modal yang mengalami penurunan adalah belanja tanah dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja tanah menurun sebesar -49,37% dari Rp. 16,45 miliar di tahun 2019 menjadi Rp. 8,329 miliar di tahun 2020. Sedangkan belanja tanah dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan turun signifikan mencapai -16,62% pertahun dari Rp. 300 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 250 miliar di tahun 2020.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Provinsi Maluku tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2	**BELANJA**	**2.573.826,90**	**2.834.168,58**	**3.068.953,73**	**2.974.061,95**	**3.008.048,65**	**3.818.867,10**	8,68%
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.646.859,55**	**2.105.974,97**	**2.292.420,55**	**2.212.673,00**	**2.095.676,28**	**2.532.850,64**	9,77%
02.01.01	Belanja Pegawai	485.331,86	963.439,96	960.137,29	959.658,39	948.885,40	953.797,76	19,50%
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	678.333,53	707.845,90	678.547,86	714.673,68	673.020,75	995.571,81	9,53%
02.03.03	Belanja Bunga	557,95	228,77	-	-	1.295,00	8.128,61	122,90%
02.04.04	Belanja Subsidi						323,59	
02.05.05	Belanja Hibah	475.958,78	434.460,34	653.735,39	538.310,92	471.393,32	571.365,27	6,57%
02.06.06	Belanja Bantuan Sosial	6.677,44	-	-	30,00	1.081,81	3.663,61	1214,90%
02.02	**BELANJA MODAL**	**753.758,99**	**545.780,53**	**601.514,66**	**543.819,81**	**591.452,18**	**1.003.241,93**	10,28%
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.127,60**	**4.488,05**	**5.145,70**	**2.551,25**	**93.681,26**	**63.047,80**	722,89%
02.03.01	Belanja Tak Terduga	2.127,60	4.488,05	5.145,70	2.551,25	93.681,26	63.047,80	722,89%
02.04	**TRANSFER**	**171.080,76**	**177.925,04**	**169.872,82**	**215.017,90**	**227.238,93**	**219.726,74**	5,69%
02.04.01	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	**165.079,27**	**172.394,16**	**168.395,57**	**209.617,27**	**205.330,03**	**212.850,34**	5,64%
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	165.079,27	172.394,16	168.395,57	209.617,27	205.330,03	212.850,34	5,64%
02.04.02	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**6.001,49**	**5.530,88**	**1.477,25**	**5.400,63**	**21.908,90**	**6.876,40**	84,30%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	6.001,49	5.530,88	1.477,25	5.400,63	20.237,20	6.876,40	78,63%

No	Uraian	Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	-	-	-	-	1.671,70	-	-100,00%
	Transfer Bantuan Keu. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: *BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)*

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara umum penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan pembiayaan (netto) Provinsi Maluku dari tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi yang disebabkan menurunnya penerimaan dari SiLPa di tahun 2018, namun meningkat kembali pada tahun 2019 dan 2020. Secara rata-rata penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 55,54% dari tahun 2016 sebesar Rp. 57 miliar turun menjadi 8 milyar di tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 menjadi 305 miliar dan 845 miliar. Pencairan dana cadangan hanya diterima di tahun 2016 sebesar Rp. 36 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 175 miliar di tahun 2020 dan 508,36 miliar di tahun 2021.

Adapun Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembayaran cicilan pokok utang di tahun 2016 dan 2017 dan dari penyertaan modal pemerintah di tahun 2020 sebesar Rp. 32,775 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp.6.00 miliar. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan APBD Provinsi Maluku tahun 2016-2021 berikut,

Tabel III.5
Rata-Rata Pertumbuhan APBD
Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.547.550,61**	**2.817.045,16**	**3.074.744,82**	**3.108.914,88**	**3.045.825,25**	**3.269.499,78**	**5,23%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**466.208,20**	**430.866,04**	**465.916,42**	**482.805,59**	**545.752,87**	**552.191,50**	**3,68%**
	Pajak Daerah	336.367,84	329.090,44	363.950,50	361.093,16	382.358,28	414.045,98	4,36%
	Retribusi Daerah	65.411,34	74.118,05	79.893,99	79.640,68	94.079,86	29.668,99	-5,91%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.406,68	946,20	250,00		38.891,79	40.549,37	-66,77%
	Lain-Lain PAD yang Sah	22.022,34	26.711,36	21.821,92	42.071,75	30.422,94	67.927,17	38,27%
1,2	**Pendapatan Transfer-LRA**	**2.081.103,61**	**2.377.629,51**	**2.608.564,40**	**2.622.545,72**	**2.498.865,07**	**2.715.750,13**	**5,69%**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.638.014,25**	**2.370.129,51**	**2.599.439,40**	**2.622.545,72**	**2.498.865,07**	**2.711.163,63**	**11,81%**
	Dana Bagi Hasil Pajak	55.239,20	60.545,83	40.626,37	28.272,21	45.254,59	98.590,69	24,84%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.073,21	20.650,99	38.549,99	51.099,28	31.781,59	-	110,68%
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.260.897,99	1.555.603,05	1.670.234,40	1.699.714,81	1.524.466,22	1.523.748,76	4,43%
	Dana Alokasi Khusu (DAK)	318.803,86	733.329,64	850.028,63	843.459,43	897.362,67	1.088.824,18	34,58%
	Dana Insentif Daerah						4.586,51	
	Pend. Transfer Pem. Pusat - Lainnya - LRA	443.089,36	7.500,00	9.125,00	-	-	-	-58,88%
	Dana Penyesuaian -	443.089,36	7.500,00	9.125,00	-	-	-	-58,88%

No	Uraian	Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	LRA							
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**238,80**	**8.549,60**	**264,00**	**3.563,57**	**1.207,31**	**1.558,15**	**919,22%**
	Pendapatan Hibah	238,80	549,60	264,00	3.563,57	1.207,31	1.558,15	258,19%
	Dana Bagi Hasil dari Pedapatan Lainnya	-	8.000,00	-	-	-	-	
2	**BELANJA**	**2.573.826,90**	**2.834.168,58**	**3.068.953,73**	**2.974.061,95**	**3.008.048,65**	**3.818.867,10**	**8,68%**
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.646.859,55**	**2.105.974,97**	**2.292.420,55**	**2.212.673,00**	**2.095.676,28**	**2.532.850,64**	**9,77%**
02.01.01	Belanja Pegawai	485.331,86	963.439,96	960.137,29	959.658,39	948.885,40	953.797,76	19,50%
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	678.333,53	707.845,90	678.547,86	714.673,68	673.020,75	995.571,81	9,53%
02.03.03	Belanja Bunga	557,95	228,77	-	-	1.295,00	8.128,61	122,90%
02.04.04	Belanja Subsidi						323,59	#DIV/0!
02.05.05	Belanja Hibah	475.958,78	434.460,34	653.735,39	538.310,92	471.393,32	571.365,27	6,57%
02.06.06	Belanja Bantuan Sosial	6.677,44	-	-	30,00	1.081,81	3.663,61	1214,90%
02.02	**BELANJA MODAL**	**753.758,99**	**545.780,53**	**601.514,66**	**543.819,81**	**591.452,18**	**1.003.241,93**	**10,28%**
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.127,60**	**4.488,05**	**5.145,70**	**2.551,25**	**93.681,26**	**63.047,80**	**722,89%**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	2.127,60	4.488,05	5.145,70	2.551,25	93.681,26	63.047,80	722,89%
02.04	**TRANSFER**	**171.080,76**	**177.925,04**	**169.872,82**	**215.017,90**	**227.238,93**	**219.726,74**	**5,69%**
02.04.01	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	**165.079,27**	**172.394,16**	**168.395,57**	**209.617,27**	**205.330,03**	**212.850,34**	**5,64%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	165.079,27	172.394,16	168.395,57	209.617,27	205.330,03	212.850,34	5,64%
02.04.02	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**6.001,49**	**5.530,88**	**1.477,25**	**5.400,63**	**21.908,90**	**6.876,40**	**84,30%**

No	Uraian	Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	6.001,49	5.530,88	1.477,25	5.400,63	20.237,20	6.876,40	78,63%
	Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	-	-	-	-	1.671,70	-	-100,00%
	Transfer Bantuan Keu. Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(26.276,29)**	**(17.123,42)**	**5.791,09**	**134.852,93**	**37.776,59**	**(549.367,32)**	**86,75%**
	PEMBIAYAAN	**55.076,25**	**26.035,64**	**8.912,22**	**28.473,55**	**305.551,48**	**845.689,06**	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**57.812,13**	**28.766,32**	**8.912,22**	**28.473,55**	**338.326,48**	**851.689,06**	**268,04%**
	Penggunaan SiLPA	20.840,46	28.766,32	8.912,22	28.473,55	163.326,48	343.328,07	154,46%
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	175.000,00	508.360,99	190,49%
	Pencairan Dana Cadangan	36.715,62	-	-	-	-	-	-100,00%
	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir	256,05	-	-	-	-	-	-100,00%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.735,89**	**2.730,68**	**-**	**-**	**32.775,00**	**6.000,00**	**-50,10%**
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	32.775,00	6.000,00	-81,69%
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.735,89	2.730,68	-	-	-	-	-50,10%
	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	**55.076,25**	**26.035,64**	**8.912,22**	**28.473,55**	**305.551,48**	**845.689,06**	**250,17%**

Sumber: *BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)*

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Provinsi Maluku dari tahun 2016-2021 relatif mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan mencapai 5,62% pertahun. Tercatat jumlah aset Provinsi Maluku pada tahun 2016 senilai Rp. 4,661 triliun dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 5,799 triliun.

Jika dilihat lebih rinci, jenis aset yang mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar mengalami kenaikan 62,34% pertahun dari Rp. 57,646 miliar menjadi Rp. 400 miliar di tahun 2020. Sedangkan aset tetap meningkat sangat signifikan dari Rp. 3,047 triliun di tahun 2016 menjadi Rp. 4,035 triliun di tahun 2020 atau rata-rata tumbuh 7,27% pertahun. Adapun investasi jangka panjang meningkat 11,71% pertahun dari Rp. 414,587 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 645,669 miliar di tahun 2020. Sementara dana cadangan dan aset lainnya mengalami penurunan di

mana secara berurutan rata-rata penurunannya sebesar -100% pertahun dan -10.94% pertahun.

2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Provinsi Maluku berupa kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut relatif terus meningkat pesat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,10% pertahun dari Rp. 110 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 119 miliar pada tahun 2020. Sedangkan kewajiban jangka panjang jumlahnya juga meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 29,75% dari tahun 2016 sebesar 61 miliar menjadi 175 miliar pada tahun 2020.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -42,12% pertahun dimana pada tahun 2016 sebesar 4,5 Triliun menjadi 505 miliar ditahun 2020. Melihat nilai ekuitas dana dalam Neraca Provinsi Maluku yang relatif menurun menunjukkan bahwa selisih antara aset dan kewajiban yang semakin kecil. Meskipun penurunan selisihnya relatif kecil namun tetap perlu menjadi perhatian lebih agar selisih atau

jarak amannya tetap terkendali/terencana. Secara keseluruhan Neraca Provinsi Maluku disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016–2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET							
ASET LANCAR							
Kas di Kas Daerah	13.511.234.233	19.111.203	1.774.647.832	132.349.107.774	322.528.844.257		121,04
Kas di Bendahara Penerimaan	3.898.138	608.809.706	27.715.777	16.022.527	2.031.500		-15,04
Kas di Bendahara Pengeluaran	785.317.371	1.129.517.395	935.852.473	2.122.341.593	585.779.171		-7,07
Kas di BLUD	3.747.656.945	6.699.278.909	7.414.112.823	12.282.043.571	13.951.954.280		38,91
Kas di Bendahara FKTP							
Kas di Bendahara BOS		19.068.555.571	18.478.261.736	16.691.963.040	6.324.513.403		-30,78
Kas Lainnya	32.829.572	274.890.000	1.039.613.147	371.680.000	2.198.007.719		186,05
Setara Kas							
Investasi Jangka Pendek							
Piutang Pendapatan	30.938.866.124	43.223.221.593	50.517.209.174	48.340.461.925	41.554.387.506		7,65
Piutang Lainnya							
Penyisihan Piutang							
Beban Dibayar Dimuka	44.437.767	39.161.250	108.883.613	1.657.924.312	1.359.769.167		135,20
Persediaan	8.582.615.342	13.861.332.039	33.542.707.393	12.520.890.663	11.878.117.743		8,46
Jumlah Aset Lancar	**57.646.855.492**	**84.923.877.667**	**113.839.003.967**	**226.352.435.405**	**400.383.404.746**	**377.506.066.718**	**62,34**
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Non Permanen	-	-	-	-			
Investasi Non Permanen Lainnya	34.435.353.821	34.603.438.701	32.825.683.021	31.331.076.172	7.760.316.524	675.223.349.219	(31)
Jumlah Investasi Non Permanen	**34.435.353.821**	**34.603.438.701**	**32.825.683.021**	**31.331.076.172**	**7.760.316.524**		**-31,10**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
Investasi Permanen							
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	80.152.401.561	557.336.588.078	545.138.055.608	639.220.795.111	637.909.463.346		13,82
Jumlah Investasi Permanen	**380.152.401.561**	**557.336.588.078**	**545.138.055.608**	**639.220.795.111**	**637.909.463.346**		**13,82**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**414.587.755.382**	**591.940.026.779**	**577.963.738.629**	**670.551.871.283**	**645.669.779.870**	**675.223.349.219,00**	**11,71**
ASET TETAP							
Tanah	472.566.018.727	911.075.455.637	932.329.523.037	935.295.109.780	975.282.109.780		19,86
Peralatan dan Mesin	454.101.863.798	592.024.736.150	624.056.629.740	667.950.376.640	803.609.285.146		15,34
Gedung dan Bangunan	828.236.023.899	1.003.041.625.129	1.062.564.298.572	1.088.800.222.744	1.214.399.118.665		10,04
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.810.866.924.879	2.938.278.300.757	3.329.251.939.040	3.390.552.404.542	3.524.738.240.712		5,82
Aset Tetap Lainnya	15.393.053.976	16.717.763.676	17.434.100.376	23.464.291.297	21.764.468.400		9,05
Konstruksi dalam Pengerjaan	87.576.299.561	37.280.664.191	24.994.919.845	33.583.160.099	130.770.613.048		10,54
Akumulasi Penyusutan	(1.621.495.693.238)	(1.812.525.568.275)	(2.100.460.582.091)	(2.482.668.991.953)	(2.635.145.824.788)		12,91
Jumlah Aset Tetap	**3.047.244.491.602**	**3.685.892.977.266**	**3.890.170.828.518**	**3.656.976.573.150**	**4.035.418.010.964**	**4.768.030.755.525,69**	**7,27**
DANA CADANGAN							
Dana Cadangan	10.059.075	10.182.116	10.284.405	-	-	-	-100,00
Jumlah Dana Cadangan	**10.059.075**	**10.182.116**	**10.284.405**	**-**	**-**		**-100,00**
ASET LAINNYA							
Tagihan Penjualan Angsuran	6.227.357.080,77	2.992.170.165	-	-	-		-100,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		2.280.008.000	2.280.008.000	2.280.008.000	2.280.008.000		0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga							
Aset Tak Berwujud							

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
Amortisasi Aset Tak Bewujud		59.400.000,00	59.400.000	840.800.000	2.022.207.000		224,10
Aset Lain-Lain	1.135.329.871.087,73	178.441.649.128,13	449.698.707.948	631.781.649.496	713.965.199.477		-10,95
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain							
Jumlah Aset Lainnya	**1.141.557.228.169**	**183.773.227.293**	**452.038.115.948**	**634.902.457.496**	**718.267.414.477**		**-10,94**
JUMLAH ASET	**4.661.046.389.720**	**4.546.540.291.121**	**5.034.021.971.468**	**5.188.783.337.333**	**5.799.738.610.056**	**6,511.969.943.448.61**	**5,62**
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	778.928.661	1.169.956.923	538.799.343	506.680.414	140.012.475		-34,89
Utang Bunga	237.999.560		-	-	-		-100,00
Pendapatan Diterima Dimuka							
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.735.885.431	11.666.667	-	-	-		-100,00
Utang Beban	92.746.040.529	2.735.885.431	146.485.676.469	88.123.260.475	117.241.108.204		6,03
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.597.820.390	120.128.779.538	143.890.910.204	48.543.070.755	2.242.316.719		-36,28
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka							
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**110.096.674.571**	**124.046.288.560**	**290.915.386.016**	**137.173.011.643**	**119.623.437.399**	**169.240.114.795,89**	**2,10**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Utang Dalam Negeri	61.742.795.283	56.291.441.132	59.027.326.563	59.027.326.563	175.000.000.000		29,75

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank							
Utang Dalam Negeri - Obligasi							
Utang Jangka Panjang Lainnya							
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**61.742.795.283**	**56.291.441.132**	**59.027.326.563**	**59.027.326.563**	**175.000.000.000**	**660,582,291,758**	**29,75**
JUMLAH KEWAJIBAN	**171.839.469.854**	**180.337.729.691**	**349.942.712.579**	**196.200.338.206**	**294.623.437.399**	**829,822,406,553.89**	**14,43**
EKUITAS							
EKUITAS							
Equitas	4.500.704.060.671	4.254.535.026.894	4.683.996.758.889	4.992.466.387.753	505.040.254.218		-42,12
Sisa Kas BLUD							
Sisa Kas JKN							
JUMLAH EKUITAS	**4.500.704.060.671**	**4.254.535.026.894**	**4.683.996.758.889**	**4.992.466.387.753**	**5.505.040.254.218**	**5.682.147.536.894,72**	**-42,12**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**4.672.543.530.526**	**4.434.872.756.585**	**5.033.939.471.468**	**5.188.666.725.959**	**799.663.691.617**		**-35,68**

Sumber: *BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)*

4. Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Provinsi Maluku periode tahun 2016-2020 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 rasio lancar Pemerintah Provinsi Maluku sangat berfluktuasi namun mempunyai tren yang relatif fluktuatif cenderung meningkat. Rasio lancar Pemerintah Provinsi Maluku ditahun 2016 sebesar 0,34. Artinya Provinsi Maluku di tahun 2016 mempunyai kemampuan menutup hutang jangka pendeknya hanya 0,34 dari total kewajban jangka pendeknya. Tahun 2017 rasio lancarnya meningkat menjadi sebesar 0,47. Sedangkan di tahun 2018 kembali menurun menjadi 0,33 dan setelahnya terus meningkat hingga mecapai 1,36 dari dan kembali turun menjadi 0,48 di tahun 2021 dari total kewajiban lancar yang ada. Jika dilihat dari perkembangan rasio lancar diperlukan kewaspadaan terutama jika rasionya dibawah angka 1. Pemerintah Provinsi Maluku harus menjaga agar jumlah kewajiban yang dimiliki tidak melebihi aset lancar. Berikut

ini penjabaran fluktuatif rasio lancar Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2021 (dalam Jutaan).

Tabel III.7
Rasio Lancar Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2021 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ASET LANCAR	57.647	84.924	113.839	226.352	400.383	400.383
KEWAJIBAN LANCAR	171.839	180.338	349.943	196.200	294.623	829.822
RASIO LANCAR	0,34	0,47	0,33	1,15	1,36	0,48

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui karena terkait dengan proses identifikasi kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman berdasarkan jumlah aktiva yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai sebagai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Provinsi Maluku dari tahun 2016-2021 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 0,038 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 0,146.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2016-2021 tidak pernah lebih dari 58% dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Provinsi Maluku cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Meskipun secara keseluruhan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Provinsi Maluku cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada namun melihat trennya yang terus mengalami peningkatan sangat perlu diwaspadai. Jangan sampai rasionya mencapai 1 (100%) atau bahkan lebih. Untuk itu ke depan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku perlu mengkalkulasi dan merencanakan besaran kewajiban-kewajiban yang ada agar rasionya semakin mengecil.

Tabel III.8
Rasio Hutang Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2021 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	171.839	180.338	349.943	196.200	294.623	829.822
EKUITAS	4.500.704	4.254.535	4.683.997	4.992.466	5.505.040	5.682.147
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,038	0,042	0,075	0,039	0,054	0,146

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Provinsi Maluku dari tahun 2016-2021 mengalami fluktuatif meningkat hingga di tahun 2020 mencapai angka 0,051. Yang merupakan rasiao tertinggi dalam kurun waktu 2016-2020. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2016-2020 tidak pernah lebih dari 0,05 (5,1%)

dari total aset yang ada yang terjadi di tahun 2020. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Provinsi Maluku. Meskipun begitu perlu diwaspadai tren peningkatan setiap tahunnya tersebut agar kemudian bisa ditekan atau bahkan terus diturunkan.

Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
KEWAJIBAN	171.839,47	180.337,73	349.942,71	196.200,34	294.623,44
AKTIVA	4.661.046,39	4.546.540,29	5.034.021,97	5.188.783,34	5.799.738,61
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,037	0,040	0,070	0,038	0,051

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

c. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maluku menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2016-2020 tren relatif fluktuatif namun agak menurun. Adapun rasio ditahun 2016 mencapai 0,15 dan menurun menjadi 0,13 ditahun 2020. Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunakan sumberdaya aset tetap ditahun 2020 yang senilai Rp. 4,035 Triliun, Pemerintah Provinsi Maluku hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 545 miliar. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Provinsi Maluku Tahun 2016 – 2020
(dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	466.208,20	430.866,05	465.916,41	482.805,59	545.752,87
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	3.047.244,49	3.685.892,98	3.890.170,83	3.656.976,57	4.035.418,01
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,1529934	0,1168960	0,1197676	0,1320232	0,1352407

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2016-2020 relatif berfluktuasi namun cenderung menurun. Rasio di tahun 2016 mencapai 0,1 dan menurun menjadi 0,09 di tahun 2020.

Secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 rata-rata nilai total aset daerah terbilang cukup masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah kedepannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Provinsi Maluku
Tahun 2016– 2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	466.208,20	430.866,05	465.916,41	482.805,59	545.752,87
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	4.661.046,39	4.546.540,29	5.034.021,97	5.188.783,34	5.799.738,61
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,100	0,095	0,093	0,093	0,094

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran, baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah**.**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku 2016-2021 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan, baik berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun meningkat dengan rasio rata-rata sebesar 29,78% pertahun. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2016 sebesar 18,84% dari total pengeluaran daerah dengan fluktuasi rasio hingga mencapai 31,20% di tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 24,94%. Rasio belanja pegawai masih perlu ditekan untuk meningkatkan ruang fiskal belanja publik. Berikut adalah rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Maluku:

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2016	485.331,86	2.576.562,80	18,84%
2	2017	963.439,96	2.836.899,27	33,96%
3	2018	960.137,29	3.068.953,72	31,29%
4	2019	959.658,39	2.974.061,95	32,27%
5	2020	948.885,40	3.040.823,65	31,20%
6	2021	953.797,76	3.8.24.867,00	24,94%
Rata-Rata		**2.158.726,45**	**7.248.650,70**	**29,78%**

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2016-2021 cenderung meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 11,62% pertahun dari Rp. 1,144 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 1,825 miliar di tahun 2021. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dan belanja transfer bagi hasil, yaitu belanja pegawai dalam kurun waktu 2016-2021 rata-rata meningkat 18,25% pertahun dari Rp. 485,331 miliar dan belanja transfer bagi hasil rata-rata meningkat 6% pertahun dari Rp. 165 miliar di tahun 2016 menjadi Rp. 212 miliar di tahun 2021.

Peningkatan Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas perlu disikapi mengingat peningkatan tersebut dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja publik. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.13
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi					2021
	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	**1.144.470,26**	**1.583.272,83**	**1.788.891,21**	**1.715.568,46**	**1.776.350,73**	**1.825.729,79**
BELANJA OPERASI	**968.526,02**	**1.398.129,07**	**1.613.872,69**	**1.497.999,32**	**1.422.655,54**	**1.536.955,25**
Belanja Pegawai	SELAM	963.439,96	960.137,29	959.658,39	948.885,40	953.797,76
Belanja Bunga	557,95	228,77	-	-	1.295,00	8.128,61
Belanja Hibah	475.958,78	434.460,34	653.735,39	538.310,92	471.393,32	571.365,27
Belanja Bantuan Sosial	6.677,44	-	-	30,00	1.081,81	3.663,61
BELANJA TAK TERDUGA	**2.127,60**	**4.488,05**	**5.145,70**	**2.551,25**	**93.681,26**	**63.047,80**
Belanja Tak Terduga	2.127,60	4.488,05	5.145,70	2.551,25	93.681,26	63.047,80
TRANSFER	**171.080,76**	**177.925,04**	**169.872,82**	**215.017,90**	**227.238,93**	**219.726,74**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**165.079,27**	**172.394,16**	**168.395,57**	**209.617,27**	**205.330,03**	**212.850,34**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	165.079,27	172.394,16	168.395,57	209.617,27	205.330,03	212.850,34
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**6.001,49**	**5.530,88**	**1.477,25**	**5.400,63**	**21.908,90**	**6.876,40**
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	6.001,49	5.530,88	1.477,25	5.400,63	20.237,20	6.876,40

Uraian	Realisasi					2021
	2016	2017	2018	2019	2020	
Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik	-	-	-	-	1.671,70	
Transfer Bantuan Keu. Lainnya	-	-	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.735,89**	**2.730,68**	**-**	**-**	**32.775,00**	**6.000,00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	32.775,00	6.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	2.735,89	2.730,68	-	-	-	-
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pata tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

perkembangan defisit riil anggaran tahun 2016-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dimana defisit tahun 2016 sebesar -Rp 29,012 miliar dan defisit tahun 2017 sebesar -Rp 19,854 miliar. Adapun tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi surplus rill anggaran dengan nilai sebesar Rp 5,791 miliar, Rp. 134,852 miliar dan Rp 37,776 miliar namun ditahun 2021 terjadi defisit riil anggaran sebesar -Rp549,36 miliar

Tabel III.14
Defisit Riil Anggaran
Provinsi Maluku Tahun 2016-2021 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,547,550.61	2,817,045.16	3,074,744.82	3,108,914.88	3,045,825.25	3,269,499,78
	dikurangi realisasi:						
2	Belanja Daerah	2,573,826.90	2,834,168.58	3,068,953.73	2,974,061.95	3,008,048.65	3,818,867,10
3	Pengeluaran Pembiayaan	2,735.89	2,730.68	-	-	32,775.00	6,000
	(Defisit Riil)	**(29,012.17)**	**(19,854.10)**	**5,791.09**	**134,852.93**	**37,776**	**(549,367,32)**

Jika dibandingkan antara defisit riil angggaran daerah dengan komponen penutupnya diketahui bahwa defisit riil anggaran yang terjadi ditahun 2016 tidak dapat ditutup dengan SiLPA yang dapat dimanfaatkan ditahun berkenaan. SiLPA yang dapat dimanfaatkan ditahun 2016 hanya sebesar Rp. 20,84 miliar sehingga masih menyisakan defisit Rp. 8,17 miliar. Kondisi defisit riil di tahun 2016 perlu menjadi perhatian ke depan agar tidak terjadi hal serupa. Adapun

defisit riil tahun 2017 yang sebesar Rp. 19,854 miliar dapat ditutup oleh SiLPA dimana SilPA yang dapat dimanfaatkan di tahun 2017 sebesar Rp. 28,766 miliar.

Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Maluku Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100%	100%	100%	100%	100%
Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pinjaman Daerah;	0%	0%	0%	0%	0%
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Provinsi Maluku dari tahun 2016-2020 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Provinsi Maluku.

Tabel III.16
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Maluku
Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	**20.840,46**	**100%**	**28.766,32**	**100%**	**8.912,22**	**100%**	**28.473,55**	**100%**	**163.326,48**	**100%**
Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah										
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	20.840,46	100%	28.766,32	100%	8.912,22	100%	28.473,55	100%	163.326,48	100%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2024. Dalam konteks pandemi global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPJMD kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih efektif dan efisien khusunya terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pada bagian kerangka pendaaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2022 hingga 2024.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan lainnya. Selain itu skenario proyeksi juga dibuat berdasarkan skenario moderat. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku ini bisa mendekati proyeksi yang logis dan tidak over expenditure dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai. Selain itu proyeksi yang dilakukan juga memperhatikan target keuangan daerah sebagaimana telah ditetapkan pada APBD 2021.

1. Proyeksi Pendapatan

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan melihat bahwa kondisi keuangan lokal secara umum di tahun 2022 diproyeksikan mulai membaik maka beberapa komponen PAD yang di tahun 2020 turun drastis dibandingkan tahun 2019 yaitu Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, maka di tahun 2022 dua komponen ini ditargetkan sudah bernilai normal sebagaimana kondisi tahun 2019. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar, baik dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditargetkan secara relatif tetap (flat) mengingat adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang memungkinkan berdampak pada keuangan negara hingga tahun 2023, sehingga berpotensi mengganggu kapasitas dana transfer pemerintah pusat yang dapat disalurkan ke daerah. Adapun proyeksi secara umum menggunakan tahun dasar realisasi 2020 dengan melihat target APBD 2021.

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022-2024 ditargetkan naik ± 4,57% pertahun dari tahun dasar 2020 yang hanya didongkrak oleh peningkatan PAD dan Transfer Pemrintah Pusat. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah ditargetkan naik 2,97% pertahun dan pendapatan transfer ditargetkan naik 0,15% pertahun. Adapun target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diproyeksikan turun hingga sebesar -24,13% per tahun.

PAD diproyeksikan naik 2,97% pertahun dari tahun dasar 2020 di mana pada tahun 2022 sebesar Rp. 590 miliar naik hingga Rp. 613 miliar di tahun 2024. Target pertumbuhan PAD tersebut didasarkan asumsi bahwa pendapatan pajak naik 2,22% pertahun, Pendapatan Retribusi Daerah naik 4,99% pertahun, begitu juga dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan naik 2,47% pertahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang ditargetkan naik 6,32% pertahun.

Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat terpetakan dan dapat dipungut. Dengan berlandaskan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 393 miliar di tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 417 miliar di tahun 2024. Sumber PAD lainnya yaitu pendapatan retribusi diproyeksikan terus meningkat pertahun dimana target pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 103 miliar meningkat menjadi Rp. 114 miliar di tahun 2024.

Untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik dimana target tahun 2022 sebesar Rp. 40,5 miliar dan meningkat menjadi Rp. 42,878 miliar di tahun 2024, sedangkan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di tahun 2022 sebesar Rp. 52 miliar turun menjadi Rp. 38 miliar di tahun 2024.

Proyeksi pendapatan transfer diperkirakan akan naik dengan kenaikan relatif kecil mencapai 0,15% pertahun dari Rp. 2,279 miliar ditahun 2022 menjadi Rp. 2,513 miliar di tahun 2024. Secara umum kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh relatif tetapnya penerimaan daerah dari transfer pemerintah pusat khususnya adanya penurunan dari dana perimbangan yang bersumber dari DAK.

Oleh karena adanya Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini sangat memungkinkan terjadinya gelombang infeksi global bisa kapan saja terjadi. Hal tersebut dapat berefek pada lesunya perekonomian nasional dan global yang mungkin dampaknya masih akan berlangsung sepanjang tahun 2022 hingga beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Dana Perimbangan:

- Nilai Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak meningkat nilainya 1,88% pertahun dimana pada tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp.

74 miliar naik menjadi Rp. 83 miliar pada tahun 2024. Target tahun 2022 relatih lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2020 mengingat tahun 2022 masih memungkinkan terjadinya gelombang pandemi baru akibat munculnya varian omicron maupun delta micron secara global dan grafiknya akan mulai normal di tahun 2023.

- Sebagaimana asumsi proyeksi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, proyeksi Dana Alokasi Khusus diproyeksikan menurun nilainya dari tahun dasar 2020 sebesar -4,62% pertahun dimana realisasi tahun 2020 mencapai Rp. 897,362 miliar sementara target tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 673 miliar dan kemudian naik bertahap hingga tahun 2024 menjadi Rp 742 miliar di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan akan masih ada refocusing anggaran Belanja Nasional yang umumnya akan diambil dari pos DAK.
- Nilai Dana Alokasi Umum diproyeksikan kenaikannya sebesar 2,49% dari tahun dasar 20201, dimana DAU di tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp. 1,525 miliar hingga tahun 2024 menjadi Rp 1,681 miliar. Nak nilainya relatif positif karena memang umumnya DAU ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Oleh karena itu pengurangan DAU umumnya menjadi opsi terakhir refocusing Anggaran Belanja Nasional.

Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan menurun hingga -24,13% pertahun di mana realisasi tahun 2020 mencapai Rp. 1,207 miliar sedangkan target tahun 2022 yaitu hanya senilai Rp 3,604 miliar dan menurun menjadi Rp. 400 juta pada tahun 2024. Penurunan tersebut didasarkan bahwa pendapatan hibah ke depan akan semakin kecil dan tidak bisa ditarget secara pasti karena sifatnya *granted*.

Adapun rincian perubahan proyeksi pendapatan Provinsi Maluku tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.17
Proyeksi Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2022-2024
(dalam jutaan)

No	Uraian	REALISASI		Proyeksi Pertumbuhan (%)	APBD	Proyeksi	
		2020	2021		2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**	**3.045.825,25**	**3.269.499,78**	**0,67**	**2.872.604,40**	**2.983.847,50**	**3.127.869,93**
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**545.752,87**	**552.191,50**	**2,97**	**590.037,88**	**589.605,38**	**613.543,20**
01.01.01	**Pendapatan Pajak Daerah**	382.358,28	414.045,98	**2,22**	393.104,88	405.669,00	417.495,00
01.01.02	**Pendapatan Retribusi Daerah**	94.079,86	29.668,99	**4,99**	103.963,67	107.277,00	114.298,00
01.01.03	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	38.891,79	40.549,37	**2,47**	40.549,37	40.836,38	42.878,20
01.01.04	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	30.422,94	67.927,17	**6,32**	52.419,96	35.823,00	38.872,00
01.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.498.865,07**	**2.715.750,13**	**0,15**	**2.279.591,49**	**2.393.892,12**	**2.513.926,73**
01.02.01	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**2.498.865,07**	**2.711.163,63**	**0,15**	**2.279.591,49**	**2.393.892,12**	**2.513.926,73**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**2.498.865,07**	**2.711.163,63**	**0,09**	**2.273.759,88**	**2.387.768,93**	**2.507.497,38**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	77.036,18	98.590,69	1,88	74.670,13	78.724,69	83.000,93
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	1.524.466,22	1.523.748,76	2,49	1.525.401,86	1.601.671,95	1.681.755,55
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	897.362,67	1.088.824,18	-4,62	673.687,89	707.372,29	742.740,90
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	**-**	**4.586,51**	**-11,17**	5.831,61	6.123,19	6.429,35
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**1.207,31**	**1.558,15**	**-24,13**	**2.975,03**	**350**	**400**
01.03.01	**Pendapatan Hibah**	**1.207,31**	**1.558,15**	**-24,13**	2.975,03	350	400
01.03.02	**Pendatan Dana Darurat**	**-**		**0**	-	-	-
01.03.03	**Pendapatan Lainnya**	**-**		**0**	-	-	-

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

Seperti yang terlihat pada tabel III.18 di atas, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Provinsi Maluku pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Maluku, antara lain sebagai berikut:

a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan diantaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan.
b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat.
c. Pemberian Reward dan Punishment.

1) Pemberian Reward dapat berupa:
   - Penarikan Undian berhadiah PBB P2
   - Penetapan Wajib Pajak Daerah Terbaik
   - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/ penghapusan denda keterlambatan.
   - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada event- event yang digelar oleh Pemerintah Provinsi.
2) Pemberian Punishment, berupa sanksi bagi WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasive.

d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.
e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak.
g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD.
i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;

j. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil.
k. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya;
l. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah.

2. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Provinsi Maluku akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
    1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
    2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Maluku
e. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Maluku.

Perubahan anggaran belanja daerah Provinsi Maluku dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 yang berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai dengan tuntutan regulasi serta sesuai dengan kebutuhan Provinsi Maluku. Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran belanja Provinsi Maluku dianggarkan sebesar Rp 4,154

triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.2,556 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,285 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp 106 miliar dan belanja transfer sebesar Rp. 206 miliar. Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran belanja daerah Provinsi Maluku diproyeksikan mengalami penurunan dari tahun 2021 karena dampak pandemi covid dimana pada tahun 2024 belanja operasi menjadi sebesar Rp 1,852 triliun, belanja modal sebesar Rp. 824 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp. 123 miliar dan belanja transfer sebesar Rp. 226 miliar. Sehingga proyeksi total belanja pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 3,027 triliun. Hal ini dapat dilihat pada tabel III.19 di bawah ini.

Tabel III.18
Proyeksi Perubahan Belanja Provinsi Maluku Tahun 2021-2024

No	Uraian	REALISASI		Proyeksi Pertumbuhan (%)	APBD	Proyeksi	
		2020	2021		2022	2023	2024
2	**BELANJA**	**3.008.048,65**	**3.818.867,10**	**0,16**	**2.936.271,07**	**2.833.847,50**	**3.027.869,93**
02.01	**BELANJA OPERASI**	**2.095.676,28**	**2.532.850,64**	**-3,03**	**1.844.360,07**	**1.847.502,95**	**1.852.743,47**
02.01.01	Belanja Pegawai	948.885,40	953.797,76	7,42	1.202.548,47	1.232.612,18	1.263.427,49
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	673.020,75	995.571,81	-7,82	538.416,60	511.495,77	485.920,98
02.01.02	Belanja Bunga	1.295,00	8.128,61	0	1.295,00	1.295,00	1.295,00
02.01.04	Belanja Subsidi	-	323,59	3,8	600	600	600
02.01.05	Belanja Hibah	471.393,32	571.365,27	-32,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.081,81	3.663,61	8,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.02	**BELANJA MODAL**	**591.452,18**	**1.003.241,93**	**8,66**	**768.957,17**	**649.218,14**	**824.502,83**
02.02.01	Belanja Modal (Tanah)	8.329,00	33.977,68	8,66	10.828,68	9.142,48	11.610,89
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	142.270,43	158.549,63	8,66	184.968,24	156.165,70	198.329,43
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	153.051,64	200.748,94	8,66	198.985,07	167.999,89	213.358,77
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	250.172,22	607.004,43	8,66	325.253,21	274.606,04	348.747,90

No	Uraian	REALISASI		Proyeksi Pertumbuhan (%)	APBD	Proyeksi	
		2020	2021		2022	2023	2024
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	37.628,89	2.961,23	8,66	48.921,97	41.304,03	52.455,85
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**93.681,26**	**63.047,80**	**0**	**112.246,15**	**117.858,46**	**123.751,38**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	93.681,26	63.047,80	7,21	112.246,15	117.858,46	123.751,38
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**227.238,93**	**219.726,74**	**-0,04**	**210.707,68**	**219.267,95**	**226.872,25**
02.04.01	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**205.330,03**	**212.850,34**	**0**	**206.453,18**	**206.453,18**	**206.453,18**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	205.330,03	212.850,34	0,14	206.453,18	206.453,18	206.453,18
02.04.02	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**21.908,90**	**6.876,40**	-1,75	**4.254,50**	**12.814,77**	**20.419,07**
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	20.237,20	6.876,40	0,22	4.254,50	12.814,77	20.419,07
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.671,70		-100	-	-	-

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis proyeksi komponen Belanja Operasi, khususnya belanja pegawai ditargetkan naik ±7,42% pertahun. Kenaikan belanja pegawai tersebut bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Untuk belanja subsidi diproyeksikan naik sedikit dengan kenaikan 3,80% pertahun dari tahun dasar 2020. Adapun belanja hibah diproyeksikan turun 32,13% pertahun dan belanja bantuan sosial meningkat sebesar 8,51% pertahun yang sasarannya untuk kelompok miskin yang terdampak Covid-19.

Untuk belanja transfer tahun 2022-2024 diproyeksikan nilainya sedikit menurun dibandingkan realisasi 2020. Penurunan tersebut disebabkan dari berkurangnya porsi bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan belanja publik sektoral. Adapun belanja bagi hasil tahun 2022-2024 nilainya relatif tetap sebagaimana target 2021 yang sebesar Rp. 206 miliar tiap tahun.

Proyeksi belanja tak terduga yang nilainya diproyeksikan naik sebesar 7,21% pertahun dari tahun dasar 2020. Belanja tak terduga tersebut untuk mengantisipasi gelombang baru Covid-19. Berdasarkan bebeberapa hal di atas maka total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Provinsi Maluku tahun 2022-2024 secara berturut-turut sebesar, Rp. 1,715 triliun, Rp. 1,873 triliun dan Rp. 1,867 triliun. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Maluku tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.19
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI		Proyeksi Pertumbuhan (%)	APBD	Proyeksi	
		2020	2021		2022	2023	2024
2	**BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA**	**1.776.350,72**	**1.826.053,37**	**0,16**	**1.715.230,63**	**1.873.133,59**	**1.867.446,12**
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.422.655,53**	**1.537.278,83**	**-3,03**	**1.305.943,47**	**1.336.007,18**	**1.366.822,49**
02.01.01	Belanja Pegawai	948.885,40	953.797,76	7,42	1.202.548,47	1.232.612,18	1.263.427,49
02.01.02	Belanja Bunga	1.295,00	8.128,61	0	1.295,00	1.295,00	1.295,00
02.01.04	Belanja Subsidi	-	323,59	3,8	600	600	600
02.01.05	Belanja Hibah	471.393,32	571.365,27	-32,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1.081,81	3.663,61	8,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**93.681,26**	**63.047,80**	**0**	**112.246,15**	**117.858,46**	**123.751,38**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	93.681,26	63.047,80	7,21	112.246,15	117.858,46	123.751,38
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**227.238,93**	**219.726,74**	**-0,04**	**210.707,68**	**219.267,95**	**226.872,25**
02.04.01	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**205.330,03**	**212.850,34**	**0**	**206.453,18**	**206.453,18**	**206.453,18**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	205.330,03	212.850,34	0,14	206.453,18	206.453,18	206.453,18
02.04.02	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**21.908,90**	**6.876,40**	-1,75	**4.254,50**	**12.814,77**	**20.419,07**
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	20.237,20	6.876,40	0,22	4.254,50	12.814,77	20.419,07

No	Uraian	REALISASI		Proyeksi Pertumbuhan (%)	APBD	Proyeksi	
		2020	2021		2022	2023	2024
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.671,70		-100	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**32.775**	**6.000**		**86.333**	**200.000**	**150.000**
	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-		-	23.333,33	140.000,00	140.000,00
	Penyertaan modal daerah;	32.775,00	6.000,00	-25,68	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan;	-		-	50.000,00	50.000,00	-

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

Sedangkan arah kebijakan pada perubahan belanja daerah pada tahun 2022-2024, meliputi:

a. Penanganan Covid-19 berikut dampak sosialnya;
b. Pemenuhan SPM dan SDG's;
c. Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian;
d. Prioritas belanja untuk mendukung visi, misi dan program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur;
e. Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
f. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
g. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
h. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
i. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

3. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, pengembalian investasi non permanen, maupun pencairan dana cadangan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah penyertaan modal, pengembalian pokok hutang dan Pembentukan Dana Cadangan.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan proyeksi pembiayaan Provinsi Maluku tahun 2022-2024 ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar Rp. 150 miliar turun menjadi Rp. 50 miliar pada tahun 2024 dan direncanakan berasal dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah tahun sebelumnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Maluku

Tahun 2022-2024 antara lain dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 50 miliar pada tahun 2022 dan 2023 digunakan untuk persiapan pemilu 2024, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Provinsi, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit sarta penekanan efisiensi belanja program. Sehingga untuk menutup defisit maka akan dilakukan pertama adalah efisiensi dan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.20
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Provinsi Maluku Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi		APBD	Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**338,326.48**	**851.689,06**	**150,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
	Penggunaan SiLPA	163,326.48	343.328,07	150,000.00	50,000.00	50,000.00
	Pinjaman Daerah	175,000.00	508.360,99			
	Pengembalian investasi non permanen					
	Pencairan Dana Cadangan					
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**32,775.00**	**6.000,00**	**86,333.33**	**200,000.00**	**150,000.00**
	Penyertaan Modal	32,775.00	6.000,00	13,000.00	10,000.00	10,000.00
	Pengembalian pokok hutang			23,333.33	140,000.00	140,000.00
	Pembentukan dana cadangan			50,000.00	50,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**305,551.48**	**845.689,06**	**63,666.67**	**(150,000.00)**	**(100,000.00)**

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Provinsi Maluku dari tahun 2022 hingga 2024 diproyeksi dengan tren relatif meningkat namun landai. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.21
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi		APBD	Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	3.045.825,25	3.269.499,78	2.872.604,40	2.983.847,50	3.127.869,93
Penerimaan Pembiayaan	338.326,48	851.689,06	150.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PENERIMAAN					
(***Dikurangi***):					
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.776.350,72	1.826.053,37	1.715.230,63	1.873.133,59	1.867.446,12
Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.607.801,01	2.295.135,48	1.307.373,77	1.160.713,91	1.310.423,81

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2022 (diolah)

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan

Kepmendagri 050-3708 tahun 2020, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagai dasar penentuan plafon anggaran program seluruh OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.22
Perubahan Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Provinsi Maluku
Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi		APBD	Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	3.045.825,25	3.269.499,78	2.872.604,40	2.983.847,50	3.127.869,93
Penerimaan Pembiayaan	338.326,48	851.689,06	150.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PENERIMAAN	**3.384.151,73**	**4.121.188,85**	**3.022.604,40**	**3.033.847,50**	**3.177.869,93**
(***Dikurangi***):					
Belanja Transfer	227.238,93	219.726,74	210.707,68	219.267,95	226.872,25
Belanja Tak Terduga	93.681,26	63.047,80	112.246,15	117.858,46	123.751,38
Pengeluaran Pembiayaan	32.775,00	6.000,00	86.333,33	200.000,00	150.000,00
Kapasitas Riil Pagu OPD	**3.030.456,54**	**288.774,54**	**2.613.317,24**	**2.496.721,09**	**2.677.246,30**

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

Dengan kapasitas riil yang tersedia sebagaimana tabel di atas maka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
2. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
3. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.23
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
(dalam jutaan)

No	Uraian	Realisasi		APBD	Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	3.030.456,54	2.295.135,48	2.613.317,24	2.496.721,09	2.677.246,30
2	Prioritas I	1.006.959,75	953.797,76	895.512,35	801.240,81	907.402,43
3	Prioritas II	999.361,64	1.341.337,72	823.502,85	807.646,04	821.679,05
4	Prioritas III	1.024.135,15		894.302,04	887.834,25	948.164,82
	JUMLAH	3.030.456,54	2.295.135,48	2.613.317,24	2.496.721,09	2.677.246,30

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Proses perencanaan pembangunan adalah upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan secara *bottom up* dan *top down* dengan mengacu pada arah pembangunan nasional dengan memperhatikan orientasi pembangunan regional. Untuk itu tahapan perencanaan pembangunan daerah dari awal dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan berkontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan di daerah khususnya dan berkontribusi pada pembangunan regional dan nasional.

Perencanaan pembangunan Provinsi Maluku yang dirumuskan, akan memberikan jalan bagi kepala daerah terpilih dalam mewujudkan kesejahteraan daerah melalui koridor janji politik yang telah ditetapkan sehingga dokumen perencanaan tersebut akan menjadi pengejawantahan setiap langkah kebijakan kepala daerah terpilih. Tak terkecuali pada rumusan perubahan perencanaan jangka menengah, kebijakan yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah nantinya harus didasari berbagai permasalahan dan isu strategi pembangunan yang relevan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan mampu menjawab problematika pelaksanaan pembangunan selama ini.

Perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah permasalahan pada masing-masing bidang urusan pembangunan daerah. Alhasil, jika poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan Provinsi Maluku pada periode pembangunan berkenaan.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional, maupun internasional merupakan suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat. Setiap peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku selama periode pembangunan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perubahan perencanaan kebijakan pembangunan, permasalahan pembangunan Provinsi Maluku memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Provinsi Maluku sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan.

Dari hasil evaluasi RPJMD Provinsi Maluku, diindikasikan sebagian permasalahan belum dapat diatasi maupun timbul dikarenakan situasi dari penyebaran COVID-19 di tahun 2020. Penyebaran Covid-19 menjadikan Pemerintah Daerah mengalihkan perhatian utamanya untuk penanganan Covid-19 terutama penanganan Kesehatan dan upaya mempertahankan perekonomian masyarakat akibat dari pandemi ini.

Pada tahun 2020 terdapat 10 Indikator Kinerja Utama pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 yang belum tercapai, 6 indikator capaiannya melampaui target, 2 indikator tercapai dan non available sebanyak 10 indikator dikarenakan tidak tersedia data realisasinya. Belum optimalnya capaian ini tentu saja harus dikaji permasalahannya sehingga pada perubahan RPJMD ini mampu menyelesaikan pembangunan dan mencapai visi Maluku di tahun 2024.

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Provinsi Maluku, yakni: “Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Maluku”.

Permasalahan utama pembangunan Provinsi Maluku tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Maluku;
5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
6. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya; dan
7. Belum optimalnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Provinsi Maluku dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar IV.1.
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024



Dalam melihat lebih dalam terkait permasalahan pokok, maka perlu dijabarkan analisis kajiannya sesuai data dan informasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability, transparancy, predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku yang belum sepenuhnya terwujud, beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

Beberapa indikator yang memperlihatkan kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku seperti belum tercapainya persentase peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah yang hanya mencapai 73,85 persen. Kondisi inipun merupakan penurunan dari capaian 2019 yang sempat mencapai 88,35 persen. Selain itu juga persentase peningkatan kemampuan

dan transparansi evaluasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota hanya sebesar 46,51 persen.

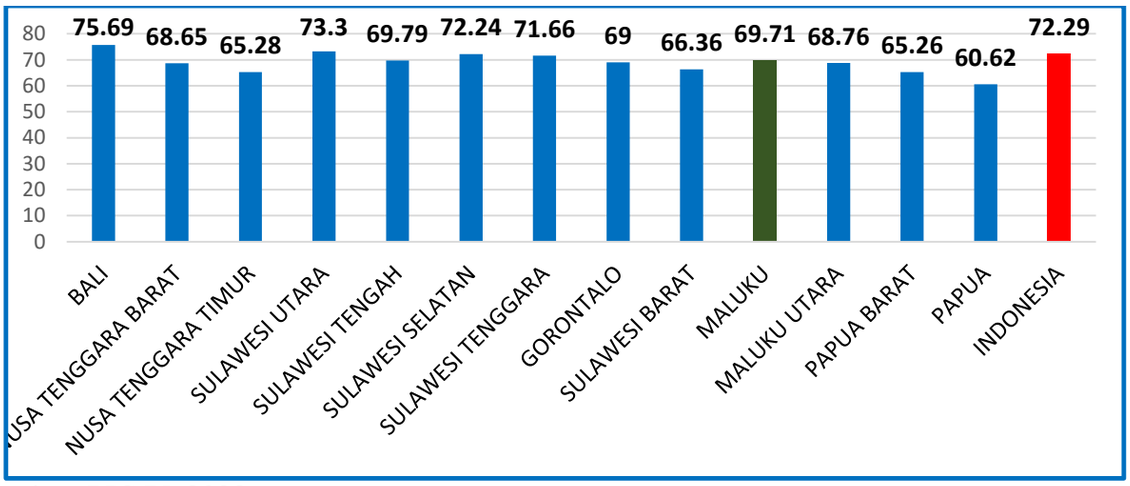
Dari sisi hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 terhadap LKPD Provinsi Maluku, maka memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas laporan Pemerintah Provinsi Maluku. Begitu pula terkait kinerja atas efektivitas program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan dalam rangka pemenuhan target kemantapan jalan tahun 2020, pemerintah daerah telah melakukan peminjaman sebanyak 700 Milyar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan dan pengembangan jalan.

2. Belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Maluku (69,71) masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 72,29. Jika dibandingkan dengan wilayah di Indonesia Timur lain, maka IPM Maluku masih berada juga di bawah Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

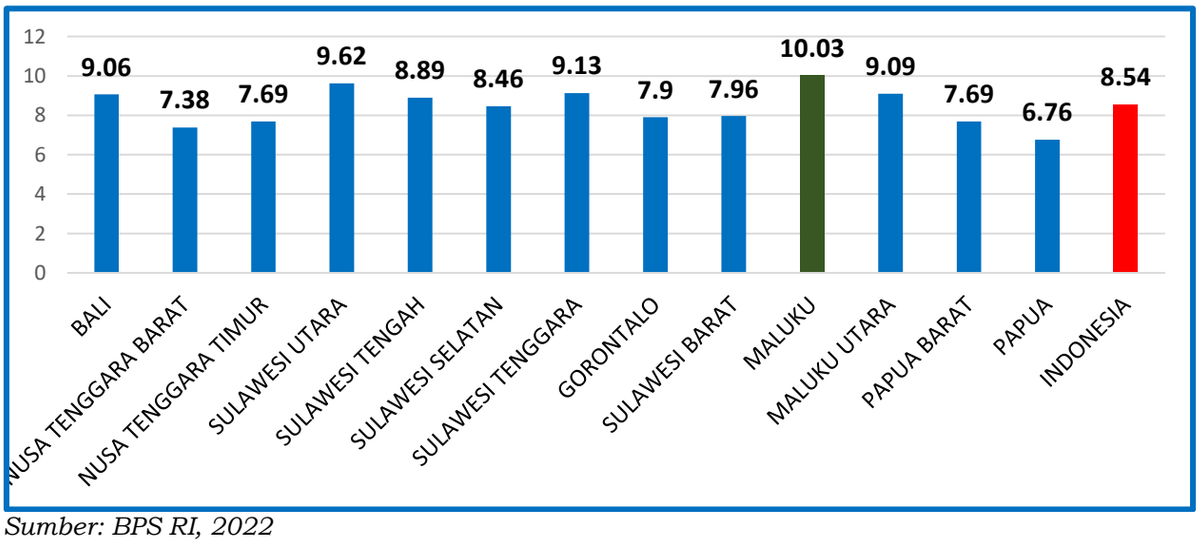
Gambar IV.2.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021



Sumber: BPS RI, 2022

Sebagai salah satu penyusun IPM, indeks pendidikan memiliki nilai strategis karena dirumuskan berdasarkan dua indikator pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dari data yang telah dirilis maka didapatkan bahwa rata-rata lama sekolah Maluku sudah berada di atas rata-rata lama sekolah secara nasional, bahkan jika dibandingkan di seluruh wilayah Indonesia Timur, rata-rata lama sekolah Maluku menduduki peringkat tertinggi. Hal ini juga berlaku pada harapan lama sekolah di Maluku yang mencapai 13,97 tahun yang lebih tinggi dari capaian nasional dan menduduki peringkat pertama di wilayah Indonesia Timur pada Tahun 2021.

Gambar IV.3.
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021

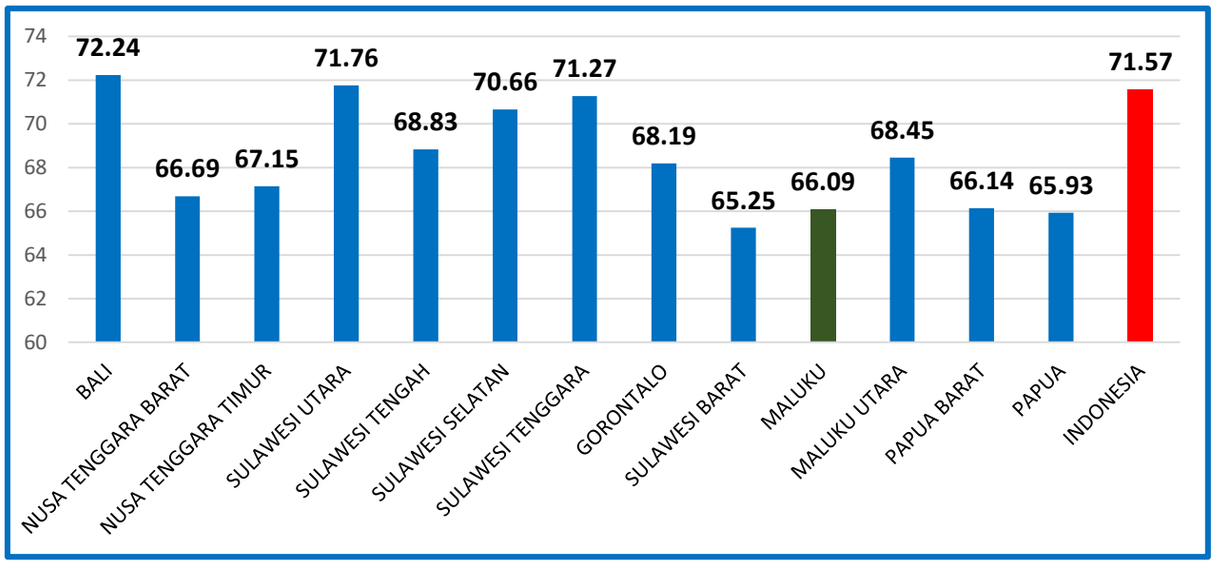


Sumber: BPS RI, 2022

Namun jika dilihat dari segi kesehatan, maka capaian pembangunan kesehatan Maluku berbanding terbalik dengan kondisi pendidikannya. Angka

indeks kesehatan yang merupakan penyusun dari rumusan IPM diformulasikan dari angka harapan hidup dimana Angka Harapan Hidup Maluku (66,09 tahun) berada jauh di bawah angka Nasional yang mencapai 71,57 tahun. Selain itu, jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur, maka angka harapan hidup Maluku termasuk rendah di atas capaian Sulawesi Barat (65,25 tahun) dan Papua (65,93 tahun).

Gambar IV.4.
Perbandingan Angka Harapan Hidup (Tahun)
Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021



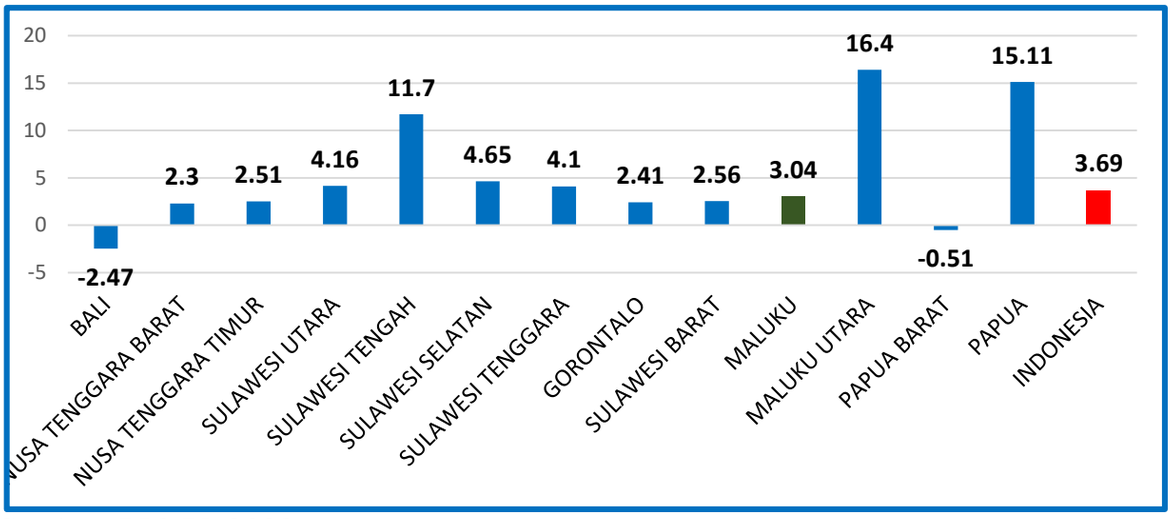
Sumber: BPS RI, 2022

3. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan guna menyejahterakan masyarakat Indonesia tanpa mengorbankan keberlangsungan generasi masa mendatang. Oleh karena itu, sebagai provinsi yang memiliki sektor unggulan pada sumber daya alam hayati, penting adanya penjagaan dan pengawasan untuk mempertahankan ekosistem lingkungan hidup yang telah ada.

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Provinsi Maluku dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Gambar IV.5.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021



Sumber: BPS RI, 2022

Pertumbuhan ekonomi Maluku mengalami kontraksi pada tahun 2020 yang juga kondisi tersebut dialami oleh nasional dan 9 kabupaten/kota lainnya. Hal ini dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya efek negatif pada perekonomian baik nasional hingga internasional. Berbagai kebijakan pemulihan perekonomian sebagai dampak negatif dari Pandemi Covid-19 menjadikan pembangunan perekonomian di hampir seluruh wilayah NKRI mengalami peningkatan. Khusus daerah timur, pembangunan perekonomian pada sebagian besar daerah menjadi lebih baik, namun masih terdapat dua provinsi yang mengalami kontraksi yakni Bali dan Papua Barat. Adapun Maluku berada di *middle rank* dengan capaian 3,04 persen pada tahun 2021 dibawah dari angka nasional (3,69%).

Beberapa sektor unggulan di Provinsi Maluku adalah perikanan, pertanian, pariwisata dan ESDM di mana permasalahan pada urusan pemerintahan tersebut harus menjadi perhatian bagi *stakeholder* bersangkutan. Pada sektor perikanan di mana Maluku kaya akan sumber daya laut, namun masih memiiki kendala yakni dalam pengolahan dan pemasaran hasil ikan serta ketersediaan sarana prasarana memadai bagi nelayan. Hal ini tentu saja menjadikan kesejahteraan nelayan tidak maksimal pencapaiannya. Adapun hal yang sama juga dialami oleh sektor pertanian dengan permasalahan pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah beserta pemasarannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya hilirisasi sehingga terwujud integrasi antara sektor industri dengan pertanian maupun perikanan.

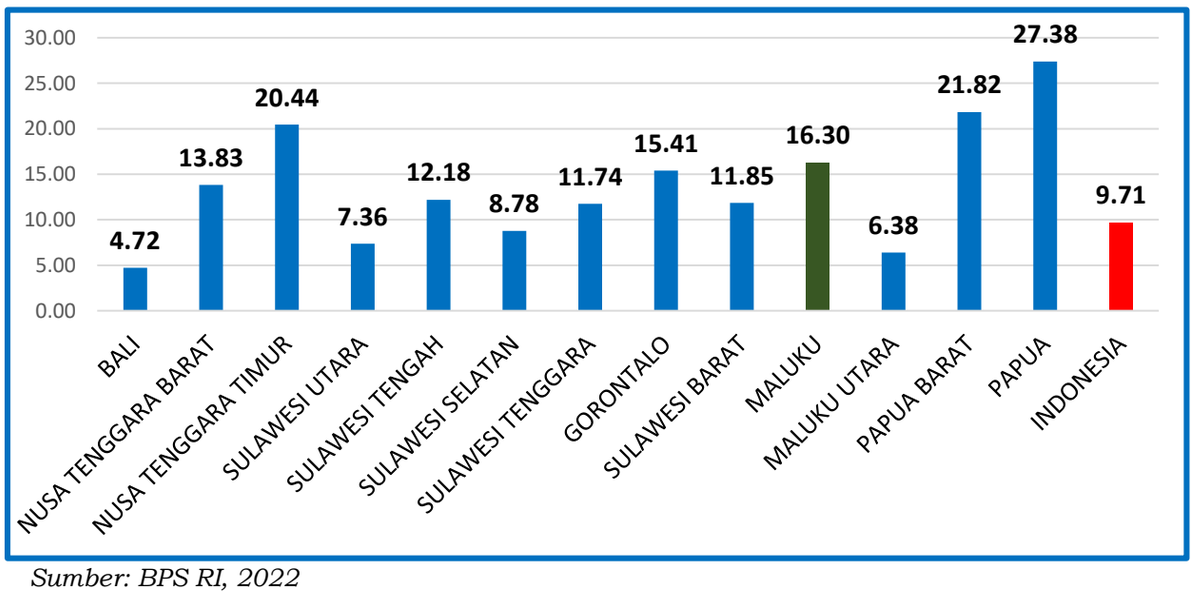
Kekayaan alam yang dimiliki Maluku menciptakan tumbuhnya destinasi wisata yang melimpah. Namun kendala infrastruktur serta pengelolaan yang kurang memadai menjadikan destinasi wisata atau daerah potensi wisata tersebut kurang berkembang dan hanya dinikmati oleh masyarakat lokal saja. Selain itu, permasalahan dari sisi energi adalah masih belum optimalnya cakupan listrik secara merata di seluruh Maluku. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah daerah mengingat kondisi geografis Maluku cukup sulit terjangkau.

4. Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Maluku

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Angka kemiskinan di Maluku (16,30%) tergolong tinggi di mana angka ini jauh berada di atas angka kemiskinan Nasional yang mencapai 9,71 persen. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia Timur, maka angka kemiskinan di Maluku juga termasuk tinggi di mana kemiskinan Maluku berada di peringkat keempat terbawah setelah Papua (27,38%), Papua Barat (21,82%), dan Nusa Tenggara Timur (20,44%).

Gambar IV.6.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (September) (%)
Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021



Sumber: BPS RI, 2022

5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam suatu wilayah. Hal tersebut menjadi suatu "pekerjaan rumah" bagi Pemerintah Provinsi Maluku mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, khususnya daerah terpelosok/terpencil.

Salah satu kendala pembangunan Provinsi Maluku yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah termasuk penyediaan infrastruktur prasarana sarana utilitas umum. Masih minimnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Maluku menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, aksesibilitas keluar daerah juga masih belum optimal dikarenakan permasalahan kondisi geografis.

Salah satu tugas pokok aparatur pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti: pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan hingga pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ada pula kinerja pelayanan aparatur pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain: kinerja dalam perencanaan pembangunan, administrasi keuangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Segala bentuk kinerja aparatur tersebut akan membuahkan hasil optimal manakala terdapat ketersediaan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan merata ke seluruh wilayah Maluku sebagai wilayah kepulauan.

Capaian infrastruktur terkait perumahan dan permukiman masih belum optimal diwujudkan di Maluku. Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak maluku (76,77%) berada di bawah angka Nasional yang mencapai 80,29 persen pada tahun 2021. Selain itu, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau juga berada di bawah angka Nasional yang mencapai 60,69 persen. Secara umum, akses terhadap sanitasi layak dan hunian layak di Maluku di bawah rata-rata waedah Indonesia Bagian Timur, namun sumber air minum layak di Maluku sudah cukup baik dibandingkan wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman layak penting kiranya menjadi salah satu *concern* dalam menentukan kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tabel IV.1
Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak, Sumber Air Minum Layak dan Hunian Layak dan Terjangkau Wilayah Indonesia Timur
Tahun 2021

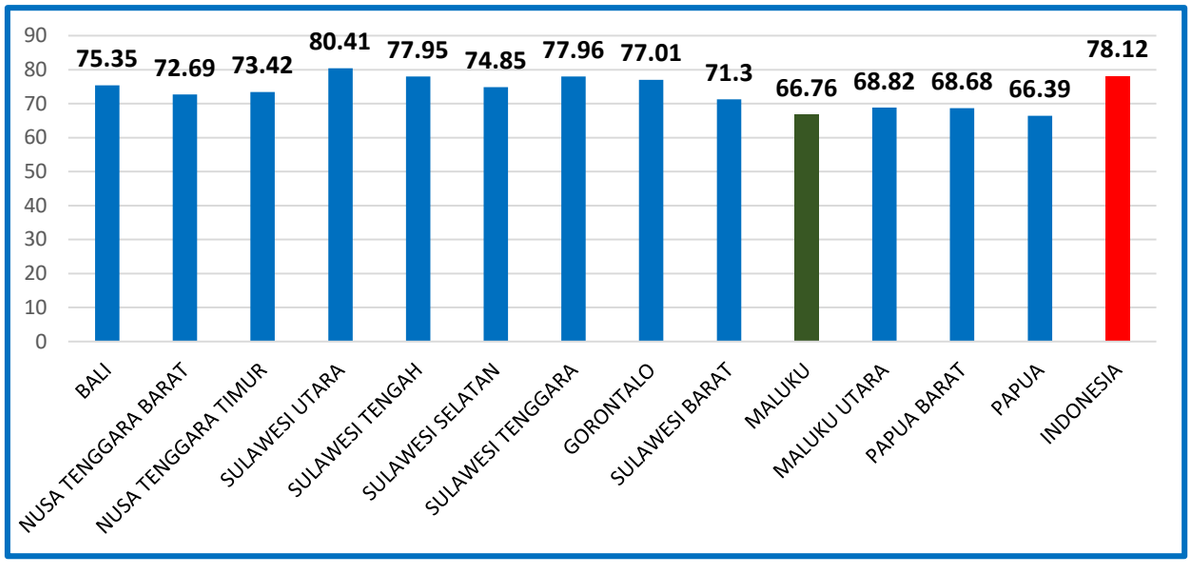
Provinsi	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)	Persentase Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak (%)	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)
Bali	95,95	97,56	78,47
Nusa Tenggara Barat	82,85	94,60	62,90
Nusa Tenggara Timur	73,36	85,40	40,41
Sulawesi Utara	84,85	91,65	69,50
Sulawesi Tengah	76,06	88,51	62,70
Sulawesi Selatan	91,57	91,18	69,11
Sulawesi Tenggara	85,62	91,94	70,45
Gorontalo	78,58	94,57	67,28
Sulawesi Barat	80,12	78,35	57,26
Maluku	76,77	93,21	60,69
Maluku Utara	77,11	88,66	63,85
Papua Barat	77,89	81,68	57,90
Papua	40,81	64,92	28,92
Indonesia	80,29	90,78	60,90

Sumber: BPS RI, 2021

6. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya

Perwujudan kondusivitas pembangunan perlu menjadi perhatian mengingat berbagai hal dalam pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh keamanan dan ketertiban wilayah. Selain itu, penting kiranya kondusivitas terwujud untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan kebudayaan Maluku. Beberapa permasalahan yang perlu digarisbawahi untuk penyusunan kebijakan pembangunan seperti tingginya potensi degradasi nilai-nilai agama dan kebudayaan daerah, belum optimalnya daya dukung penanaman modal daerah yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian wilayah, dan belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata termasuk infrastruktur penunjangnya.

Gambar IV.7.
Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021



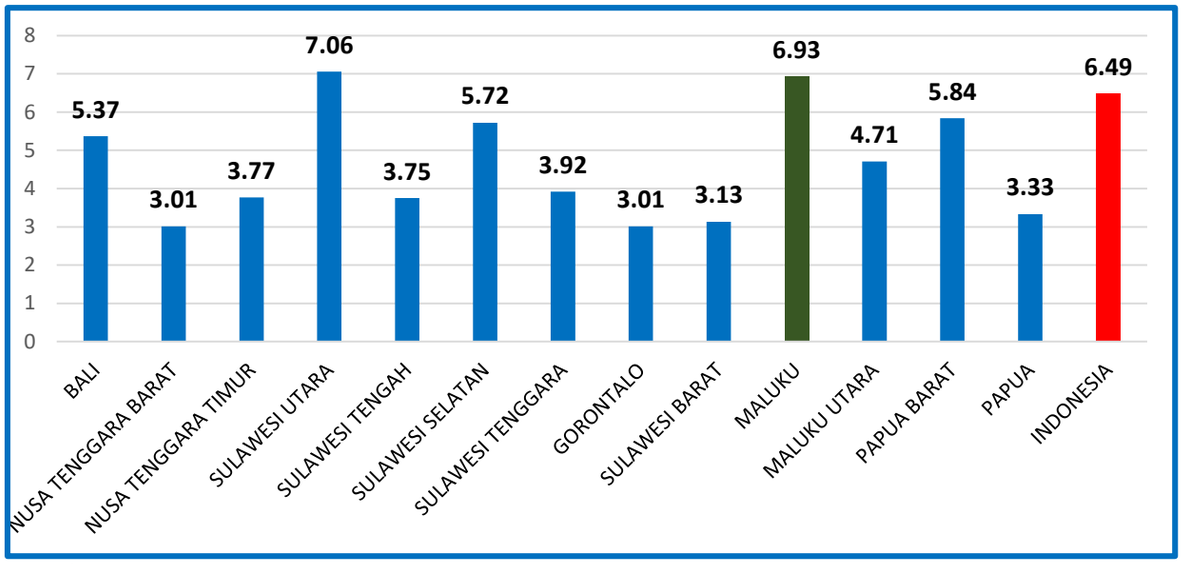
Sumber: BPS RI, 2022

Salah satu indikator yang memperlihatkan kondusivitas wilayah adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. IDI Provinsi Maluku (66,76) mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya dan masih berada di bawah angka Nasional yang mencapai 78,12. Selain itu, jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur maka capaian IDI Provinsi Maluku masuk ke dalam peringkat rendah dimana menduduki peringkat kedua dari bawah di atas Provinsi Papua (66,39).

7. Belum optimalnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif

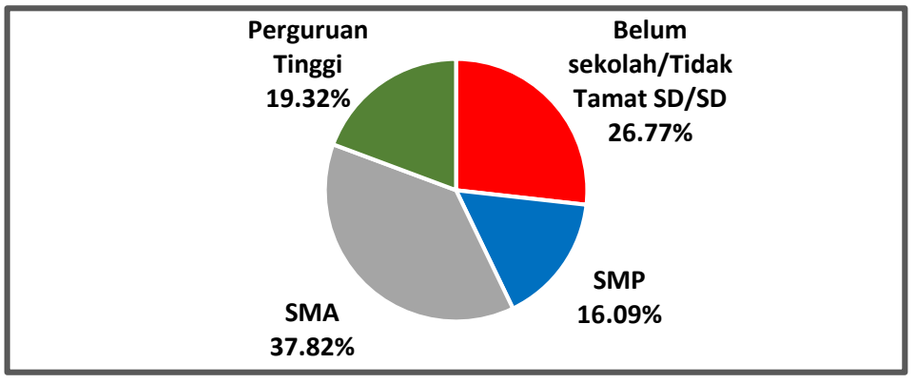
Terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku menduduki peringkat tertinggi kedua jika dibandingkan seluruh wilayah Indonesia Timur yakni mencapai 6,93 persen. Selain itu, capaian ini juga melebih dari pengangguran Nasional yang mencapai 6,49 persen. Hal inilah yang memicu permasalahan masih minimnya kapasitas dan kapabilitas angkatan kerja. Terlebih lagi jika dilihat dari tenaga kerja berdasarkan jenjang pendidikan, maka terlihat bahwa pendidikan tenaga kerja di Maluku masih kurang dikarenakan sebanyak 26,77 persen tenaga kerja di Provinsi Maluku hanya menyelesaikan pendidikan SD Sederajat termasuk yang tidak lulus SD dan tidak pernah menempuh pendidikan formal.

Gambar IV.8.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021



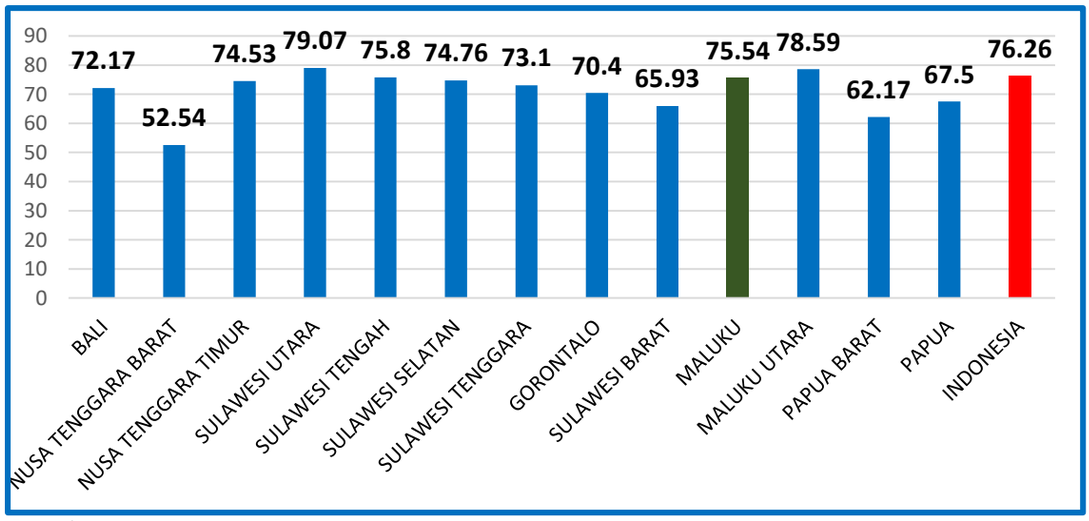
Sumber: BPS RI, 2022

Gambar IV.9.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Maluku Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2022

Gambar IV.10.
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender
Provinsi Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021



Sumber: BPS RI, 2022

Dalam peningkatan keterampilan dan kreativitas masyarakat, perlu adanya pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, permasalahan terkait kesetaraan gender ini cukup terlihat pada Indeks Pemberdayaan Gender di mana capaian Maluku (75,54) masih berada di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 76,26. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan sesama wilayah Indonesia Timur maka Maluku cukup baik capaiannya di bawah Sulawesi Utara (79,07). Sulawesi Tengah (75,80), dan Maluku Utara (78,59).

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada Perubahan RPJMD Provinsi Maluku harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari keenam permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku.

Tabel IV.2
Permasalahan Pembangunan
Provinsi Maluku Periode Pembangunan 2019-2024

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
Belum meratanya kualitas Sumber Daya Manusia	Minimnya kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah
	Belum optimalnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat
Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan	Belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah, khususnya perkebunan dan perikanan
	Belum optimalnya peningkatan ketahanan lingkungan hidup
	Belum optimalnya mitigasi dan ketahanan bencana
Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Maluku	Tingginya kemiskinan wilayah
	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Masih tingginya ketimpangan pembangunan wilayah
	Belum optimalnya konektivitas dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat

Permasalahan Pokok	Permasalahan
Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya	Tingginya potensi degradasi nilai-nilai agama dan kebudayaan daerah
	Belum optimalnya daya dukung penanaman modal daerah
	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata termasuk infrastruktur penunjangnya
Belum optimalnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif	Masih minimnya kapasitas dan kapabilitas angkatan kerja
	Belum optimalnya pengembangan kreativitas produk unggulan daerah
	Belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan
	Minimnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Permasalahan daerah menjadi salah satu acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran rumusan permasalahan per urusan pemerintahan daerah di mana poin-poin tersebut dapat digunakan untuk menyusun program prioritas pembangunan daerah. Berikut perumusan permasalahan per urusan pemerintah daerah beserta faktor penentu keberhasilan pencapaian target pembangunan:

Tabel IV.3
Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi Maluku Periode Pembangunan 2019-2024

Urusan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
Pendidikan	Belum optimalnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan	Peningkatan pengelolaan pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan beserta tenaga pendidik dan kependidikannya
	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau	
	Belum optimalnya kualitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan	
Kesehatan	Cukup tingginya angka kesakitan dan angka kematian	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan beserta pemerataan wilayah kerjanya
	Masih adanya kasus kekurangan Gizi	
	Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	
	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan tenaga medis	
	Rendahnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Optimalisasi kualitas kesehatan individu dan masyarakat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya pemenuhan layanan irigasi	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air, termasuk pemenuhan sumber air baku baru
	Belum semua masyarakat terlayani air minum dan sanitasi	

Urusan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Kurangnya ketersediaan sumber air guna pemenuhan kebutuhan air baku	
	Minimnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Peningkatan pengawasan dalam pembangunan pemanfaatan ruang
Perumahan dan Pemukiman	Belum semua perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai di kawasan permukiman
	Belum optimal penanganan pemukiman kumuh	Pengembangan kawasan pemukiman yang nyaman, serasi dan sehat
Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih ditemukan pelanggaran Perda	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
	Belum optimalnya kewaspadaan dan ketahanan bencana masyarakat	
	Adanya potensi konflik SARA	
Sosial	Belum optimalnya keterpaduan penanganan PPKS dalam penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan PPKS dalam meningkatkan kesejahteraan
	Belum Optimalnya Upaya Pengurangan Risiko, Penyelamatan dan Pemulihan Pasca Bencana	Peningkatan ketangguhan bencana
Tenaga Kerja	Belum optimalnya pengembangan lapangan usaha berbasis kewirausahaan	Peningkatan kualitas pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan dan hubungan industrial
	Belum optimalnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
	Belum optimalnya pengawasan terhadap perusahaan	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak Anak	Pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan kekerasan perempuan dan anak	
Pangan	Belum optimalnya Ketersediaan, Distribusi, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
Pertanahan	Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat	Peningkatan validitas data dan informasi pertanahan
	Minimnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur kepentingan umum yang memerlukan pembebasan tanah
Lingkungan Hidup	Minimnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup
	Belum optimalnya penanganan sampah	
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya pelayanan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kualitas data kependudukan

Urusan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan lembaga masyarakat dan adat di Maluku
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan KB serta Partisipasi Masyarakat dalam Program KB dan kesejahteraan keluarga	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga
		Mengoptimalkan Komunikasi Infomasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi pada remaja
		Merektur dan mengedukasi tenaga penyuluh
Perhubungan	Belum optimalnya moda transportasi umum, khususnya laut	Peningkatan kualitas pelayaran antar wilayah
	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	
Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya layanan dan jangkauan Jaringan Telekomunikasi	Optimalisasi cakupan layanan internet
	Aplikasi e-Government belum terintegrasi	
Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan koperasi	Pelatihan peningkatan kualitas koperasi sebagai lembaga hukum
	Belum optimalnya peningkatan kualitas UMKM	Peningkatan kualitas UMKM melalui bantuan modal dan pembinaan/pengawasan
Penanaman Modal	Belum optimalnya sistem dan pelayanan perizinan	Peningkatan iklim investasi, promosi dan layanan perizinan berbasis IT
Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan *hard skill* dan *soft skill* para pemuda Maluku
Statistik	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang lengkap dan valid	Implementasi Satu Data Indonesia
Persandian	Pengelolaan persandian belum optimal	Peningkatan kualitas SDM di bidang persandian
Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan budaya	Meningkatkan pemahaman budaya kepada masyarakat
Perpustakaan	Rendahnya minat baca masyarakat	Pemenuhan taman baca dan penggalakannya
Kearsipan	Rendahnya pengelolaan arsip secara baku	Pemenuhan SDM arsiparis di setiap OPD
Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
	Masih rendahnya Nilai Tukar Nelayan, khususnya pembudidaya ikan	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Pariwisata	Belum optimalnya kunjungan wisatawan, khususnya mancanegara	Peningkatan daya tarik destinasi wisata

Urusan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Masih rendahnya devisa dari wisatawan	
Pertanian	Masih minimnya kesejahteraan petani	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
Kehutanan	Minimnya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola hasil hutan	Peningkatan pelatihan/pembinaan pengelolaan hasil hutan
Energi dan Sumber Daya Mineral	Belum seluruh wilayah terjangkau fasilitas listrik	Peningkatan koordinasi dengan PLN terkait perluasan jaringan listrik
	Masih minimnya porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi di Maluku	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan energi baru terbarukan
Perdagangan	Masih terjadi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat	Penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah
	Belum optimalnya kapasitas ekspor barang baik dalam maupun luar negeri	Peningkatan kualitas dan promosi komoditas unggulan Maluku
Perindustrian	Belum maksimalnya perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan industri secara berjangka
Transmigrasi	Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan transmigran	Peningkatan pelatihan bagi para transmigran untuk mengembangkan keterampilannya
Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya pelaksanaan kelitbangan dalam pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga swasta lainnya dalam penelitian dan pengembangan daerah
Perencanaan	Belum optimalnya capaian sasaran strategis pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan pembangunan daerah
Keuangan Daerah	Belum optimalnya kualitas penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kapabilitas pengelola keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	
	Rendahnya kemandirian keuangan daerah	
Kepegawaian	Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	Peningkatan kualitas SDM pengelola kepegawaian
	Belum optimalnya kapasitas SDM aparatur	
Pengawasan	Belum optimalnya kualitas pembinaan, pengawasan serta pengendalian intern	Peningkatan pengawasan dan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah
Sekretariat Dewan	Belum optimalnya fasilitasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan fungsi dukungan dalam penyusunan produk hukum daerah

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Maluku adalah adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari, virus Corona dapat menular antar manusia dan sudah tersebar di berbagai wilayah. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu dampak terbesar tersebarnya Covid-19 pada level internasional. Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Beberapa negara memberikan berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang

amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan seiring dengan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memunculkan masukan-masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan agar bisa lebih komprehensif dalam perencanaan pembangunan di tengah Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Provinsi Maluku seperti:

a. *Sustainable Development Goals*/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas dengan MDGs, terdapat pada lebih ditekankan dan diprioritaskannya isu lingkungan global di dalam SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya *(Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonom; (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk

Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed Stated Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

d. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan

pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016

tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui *"The Katowice Climate Package"* yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi, termasuk Provinsi Maluku di dalamnya.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah imbas dari kebijakan *physical distancing* sehingga setiap kegiatan tatap muka dilakukan secara daring atau menggunakan *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan

komunikasi yang secara lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya perlakuan khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3) Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4) Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5) Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

a) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
c) Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
d) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
e) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f) Pengentasan kemiskinan; dan
g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

a) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
b) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
c) Moderasi beragama; dan
d) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

a) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
b) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
c) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
d) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
e) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
c) Pembangunan Rendah Karbon.

7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
c) Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
e) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
f) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Dalam pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024, pembangunan wilayah Maluku akan mencakup kegiatan prioritas berupa pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, dan penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu: kelapa, lada, pala, cengkih, emas, batubara, minyak dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi, dengan fokus komoditas pada Provinsi Maluku yakni pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, emas, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya.

Pada sisi pengembangan kawasan strategis, dilakukan pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan seperti Pengembangan SMK yang mendukung sektor agrobisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata dan teknologi dan rekayasa; Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi yang mendukung sektor industri, konstruksi, pariwisata dan pertanian; Pengembangan BLK; dan Penanganan anak tidak sekolah.

Pada pengembangan kawasan perkotaan, difokuskan pada pengembangan di Kota Ambon dan Kota Tual serta penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. Pada pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, dilakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital di 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku. Selain itu dilakukan pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya; Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 28 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku; Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan BUMDes Bersama di KPPN Maluku Tengah; Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah; Penanganan stunting; Pemberian bantuan sosial

dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat; dan pengarus utamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

b. Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (Covid-19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran Covid-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran Covid-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayak perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan Work From

Home, *Physical Distancing,* maupun yang akhir-akhir ini diterapkan yakni PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

c. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang disebabkan karena posisi geografis, Indonesia memiliki kerentanan terhadap dampak dari perubahan iklim. Hal inilah yang mendasari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti kesepakatan *Bali Action Plan* pada *The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan hasil COP-15 di Copenhagen dan COP-16 di Cancun serta memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan mencapai 41 persen jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/BAU). Agar Indonesia mampu memenuhi komitmen tersebut maka disusun RAN-GRK yang meliputi bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, pengelolaan limbah dan kegiatan pendukung lainnya. RAN-GRK ini akan menjadi acuan daerah dalam Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), tak terkecuali Provinsi Maluku.

d. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG)

Dalam rangka mewujudkan prioritas nasional dalam pembangunan gizi di Indonesia sekaligus memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan pada target 2.2 dimana pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak stunting dan wasting di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Sedangkan dari sisi pangan, maka perwujudan dari program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan perlu segera dicapai. Kedua poin itulah yang menjadi dasar bagi penyusunan RAN PG, dimana memiliki kerangka pikir berupa strategi, yakni:

1) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi dan aman untuk keluarga;
2) Penguatan komunikasi perubahan perilaku untuk peningkatan pangan dan gizi;
3) Perbaikan konsumsi gizi keluarga;
4) Penguatan kelembagaan dan koordinasi pangan dan gizi.

Adapun pada rencana aksi ini akan berupaya mewujudkan sebagai salah satu pilar Strategi Nasional penanganan stunting 2018-2024, khususnya pilar keempat yakni ketahanan pangan dan gizi. Pada pilar tersebut dijabarkan berupa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan, investasi dan inovasi pengembangan produk serta keamanan pangan.

4.2.3. Isu Strategis Regional

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Maluku Tahun 2005-2025

Pembangunan jangka panjang Maluku tahun 2005-2025 menjunjung visi "MALUKU YANG RUKUN DAN DAMAI, ADIL DAN DEMOKRATIS, SERTA MAJU DAN SEJAHTERA". Dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Maluku tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

a. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Provinsi Maluku yang bertaqwa, rukun, aman, dan damai adalah mendorong pembangunan yang dapat meningkatkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Maluku yang religius dalam menghayati nilai-nilai luhur ajaran agama sehingga tercipta semangat persaudaraan, persatuan, dan perdamaian. Dalam bermasyarakat individu-individu yang ada akan saling menerima dan saling menghargai hidup bersama dalam perbedaan, menerima, dan menghargai nilai-nilai budaya lokal serta menjamin rasa aman berbasis ketahanan diri dan masyarakat melalui apresiasi terhadap pentingnya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
b. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Maluku yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera adalah mendorong pembangunan daerah dengan mengelola sumber daya alam kepulauan unggulan Maluku secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan geoposisi yang strategis dalam skala nasional dan internasional (perkembangan ekonomi di *Pasifik Rim* dan *Arafura Rim*) yang didukung oleh sumber daya manusia dan kelembagaan yang

berkualitas, infrastruktur yang maju dan merata, serta teknologi yang adaptif dan fungsional terhadap kebutuhan daerah; dan

c. Mewujudkan masyarakat Kepulauan Maluku yang adil dan demokratis adalah menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kepulauan Maluku dan meningkatkan budaya politik masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi rasa keadilan demi terwujudnya stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam realitas kehidupan masyarakat yang majemuk serta terjaminnya penegakan hukum dan hak asasi manusia berbasis keadilan dan kepastian hukum melalui pembentukan tata hukum daerah kepulauan dengan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Pada tahapan pembangunan keempat, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang rukun, aman dan damai, bertaqwa, maju dan mandiri, adil dan demokratis melalui pemantapan dan mempertahankan pembangunan di segala bidang di seluruh wilayah.

Maluku yang bertaqwa, rukun, aman, dan damai ditandai dengan bertahannya kualitas ketaqwaan masyarakat dengan cara memelihara kualitas peran institusi sosial budaya dan keagamaan yang sudah tercipta yang mendukung sikap dan perilaku masyarakat yang dewasa dalam berinteraksi; kualitas spiritual SDM dengan cara memelihara kualitas peran institusi sosial kemasyarakatan yang sudah tercipta, yang mendukung sikap dan perilaku masyarakat Maluku yang bertaqwa dan menghargai kehidupan bersama dalam kemajemukan; serta infrastruktur sosial budaya dan keagamaan, sehingga tatanan masyarakat Maluku yang bertaqwa yang sudah tercipta tetap dapat terpelihara; mantapnya dan bertahannya stabilitas sosial dan keamanan yang telah dicapai; ketahanan sosial yang kokoh sebagai wujud ketahanan wilayah untuk menjamin keberlanjutan kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembangunan di segala bidang; terwujudnya kualitas sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia; terpeliharanya komunikasi politik dalam rangka keseimbangan peranan suprastruktur-infrastruktur politik (input-output politik) guna mempertahankan stabilitas politik yang sehat dan dinamis; terus memelihara kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan; bertahannya sistem ekonomi yang merata dan berkeadilan, dengan terus memantapkan sikap mental aparat birokrasi, pelaku ekonomi dan masyarakat, sehingga peran lembaga-lembaga

ekonomi yang bertumpu pada ekonomi masyarakat semakin berkembang mendukung stabilitas; bertahannya kualitas dunia pendidikan dan kesehatan secara merata pada setiap gugus pulau, sehingga tercipta manusia Maluku yang sehat dan berbudi pekerti luhur serta menghargai kemajemukan dalam masyarakat; bertahannya kualitas perilaku manusia dan masyarakat, dan memelihara kualitas fungsi kelembagaan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara arif dan bijak, dengan tetap menjamin hak-hak dan kepemilikan masyarakat termasuk hak-hak masyarakat adat; bertahannya sistem dan fungsi infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik secara merata di setiap gugus pulau, sehingga memberi peluang dan dapat memfasilitasi setiap aktivitas sosial ekonomi masyarakat; serta bertahannya sistem pemanfaatan ruang yang memungkinkan terciptanya aktivitas dan interaksi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang harmonis, berwawasan lingkungan dan berlandaskan Wawasan Nusantara.

Maluku yang maju dan mandiri ditandai dengan bertahannya sistem perekonomian daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang bertumpu pada pendekatan kewilayahan Gugus Pulau, dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan, sehingga tercipta dinamika ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku yang maju dan mandiri; bertahannya fungsi dan peran institusi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga dapat tetap memelihara dan meningkatkan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung dinamika aktivitas pembangunan; bertahannya infrastruktur sosial ekonomi secara merata pada setiap gugus pulau, sehingga dinamika perekonomian daerah dan masyarakat Maluku yang maju dan mandiri dapat tetap terpelihara; bertahannya kualitas peran institusi pendidikan dan kesehatan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang andal bagi kebutuhan pembangunan daerah secara berkesinambungan; bertahannya kualitas peran institusi legislasi dan penegak hukum, sehingga terjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian perekonomian daerah dan masyarakat yang maju dan mandiri; bertahannya kapasitas institusi sosial politik dan pemerintahan secara merata pada setiap gugus pulau, sehingga masyarakat dan dunia usaha memperoleh pelayanan yang berkualitas secara mantap dan berkesinambungan; bertahannya kualitas peran institusi-institusi

sosial kemasyarakatan, sehingga dinamika pembangunan daerah terus didukung oleh budaya kerja yang maju dan mandiri dengan berorientasi pada pembangunan; optimalisasi penataan kawasan strategis, kawasan perkotaan-perdesaan, dan peningkatan kapasitas struktur ruang wilayah berbasis kepulauan, dilakukan dengan meningkatkan peran teknologi dalam sistem sarana dan prasaran wilayah, terutama teknologi transportasi,dan energi sehingga mampu membawa taraf perkembangan wilayah Maluku yang memiliki daya saing pada lingkup yang lebih luas, kebijakan penataan ruang pada tahap ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi wilayah secara berkesinambungan.

Maluku yang adil dan demokratis ditandai dengan bertahannya kualitas peran institusi yang menjunjung supremasi hukum dan HAM sesuai ketentuan perundang-undangan nasional serta Tata Hukum Daerah wilayah kepulauan Provinsi Maluku guna memelihara tatanan pembangunan daerah yang adil dan demokratis secara berkelanjutan; kualitas peran institusi sosial budaya, sehingga nilai-nilai sosial dan budaya lokal inklusif yang semakin berkembang, memungkinkan manusia dan masyarakat Maluku mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai nilai-nilai keadilan dan demokrasi; kualitas peran institusi sosial ekonomi secara merata pada setiap gugus pulau, sehingga dinamika ekonomi berkembang adil dan demokratis secara berkelanjutan; kualitas peran institusi sosial kemasyarakatan secara merata pada setiap gugus pulau, sehingga sumber daya manusia yang menghargai nilai-nilai keadilan dan demokratis dapat terlibat dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan; kualitas infrastruktur sosial budaya dan ekonomi secara merata pada setiap gugus pulau, sehingga infrastruktur yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan; kualitas penataan ruang wilayah kepulauan Maluku, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat terutama masyarakat adat, sehingga terwujud optimalisasi peruntukan dan pemanfaatan ruang secara berkeadilan dan berkelanjutan; kualitas peran institusi sosial budaya, ekonomi, politik, dan hukum, sehingga secara berkelanjutan, sikap dan perilaku masyarakat Maluku yang menghargai nilai-nilai keadilan dan demokrasi dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan daerah; serta kualitas peran institusi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sekitar (Maluku Utara)

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Provinsi yang beribukota di Ternate ini telah melaksanakan pembangunan dari awal pembentukan wilayah hingga saat ini dimana pelaksanaan pembangunan berada pada pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 ini memiliki visi yang diemban oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yakni "MALUKU UTARA SEJAHTERA". Dengan misi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan yakni:

a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya;
b. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas dan Pengembangan Wilayah;
c. Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis;
d. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan; dan
e. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan.

Misi yang telah ditetapkan ini kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran yang merupakan gambaran/kondisi pembangunan pada akhir masa jabatan.

Tabel IV.4
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah
		Meningkatnya peran dan produktivitas pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya kualitas perempuan dan anak

Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan
Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas dan Pengembangan Wilayah	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah	Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau
		Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah
		Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah
Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis	Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan
		Meningkatnya keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat
Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan
		Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif
		Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
		Meningkatnya efektivitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah
		Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah

Beberapa poin penting terkait kondisi pembangunan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai Strategis dari adanya perbatasan antara pembangunan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku dapat dirincikan beberapa poin sebagai berikut:
    a. Kaya potensi perikanan namun pemanfaatan dan pengelolaannya belum optimal. Adapun potensi sumber daya perikanan tangkap provinsi Maluku Utara sebesar 1.035.230 ton per tahun, dengan *Maximum Sustainabel Yield*/MSY sebesar 517.000 ton/tahun dan JTN/TAC Total Allowable Catch sebesar 413.600 ton/tahun;
    b. Destinasi wisata bahari internasional kepulauan Maluku sebagai salah satu destinasi wisata nasional dan internasional (Kawasan Banda Neira dsk., Kawasan Halmahera dsk.);
    c. Memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk dalam Kawasan *Coral Triangle*;
    d. Terdapat pulau kecil terluar sebagai titik dasar garis pangkal Negara Indonesia di Kepulauan Maluku; dan
    e. Terletak pada *Ring of Fire* dan zona tumbukan lempeng benua sehingga rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi.
2. Adapun tantangan yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku sebagai sesama wilayah yang terletak di gugusan Kepulauan Maluku yakni:
    a. Kondisi geografis Kepulauan Maluku sebagian besar terdiri dari 89,22 persen wilayah laut dan 10,78 persen wilayah darat. Selain itu, terdapat kurang lebih 2.145 pulau di seluruh Kepulauan Maluku;
    b. Rendahnya nilai PDRB per kapita di Kepulauan Maluku dibandingkan dengan wilayah/daerah lain di Indonesia;
    c. Minimnya ketersediaan air baku, energi dan sarana prasarana komunikasi terutama di pulau-pulau kecil berpenghuni; dan
    d. Investasi di Kepulauan Maluku baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri masih tertinggal dibandingkan daerah lain.
3. Dalam penyusunan tata ruang wilayah, Kepulauan Maluku secara koordinatif memiliki tujuan yang hampir serupa, yakni:
    a. Lumbung Ikan Nasional yang berkelanjutan
    b. Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta

kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem wilayah pesisir dan pulau kecil;

c. Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari segitiga terumbu karang (*Coral triangle*) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30 persen dari luas daratan Kepulauan Maluku;

d. Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis gugus pulau dan kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan

e. Kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara dan pintu gebang internasional.

4. Dalam menyatukan infrastruktur pembangunan, maka telah dibangun konektivitas penyeberangan antar pulau di Kepulauan Maluku, yakni:
   a. Sabuk Tengah penyeberangan Indonesia pada jalur Sanana – Ambon
   b. Jalur penyeberangan (ferry) antar provinsi:
      - Fautkayon (Pulau Sulawesi) – Teluk Bara (Pulau Buru)
      - Wayaloar (Obi Selatan) – Wahai (Seram Utara)

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Maluku menyusun Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan lingkup yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku.

Dalam RTRW Provinsi Maluku, secara umum meliputi:

a. Tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya;

c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi;

d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;

e. Arahan pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi;

f. Arahan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
g. Peran masyarakat.

Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan perkebunan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana.

Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau dan Gugus Pulau. Strategi pengembangan struktur ruang yang menggunakan konsep laut pulau dan Gugus Pulau meliputi:

a. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Provinsi Maluku dengan wilayah luar Provinsi.
b. Pengembangan kota-kota yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu-pintu keluar masuk (*Multy Gate*) dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya.
c. Pengembangan sistem transportasi yang diprioritaskan dan diarahkan untuk keterkaitan antar pusat-pusat pengembangan, baik transportasi darat, laut, maupun udara.
d. Memperkuat struktur kegiatan di Gugus-Gugus Pulau yang ada di Provinsi Maluku, dan implikasi terhadap ruang kota-kota yang menjadi orientasi pertumbuhan di masing-masing Gugus Pulau.
e. Pengembangan kota-kota yang tingkatannya lebih rendah agar dapat berfungsi sebagai pendukung pusat-pusat orientasi ini.

Kebijakan pengembangan struktur ruang Provinsi Maluku meliputi:

a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau

Sedangkan Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

a. mengembangkan keterkaitan antar kota dalam kawasan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
b. mengembangkan ibukota kabupaten sebagai pusat wilayah belakangnya;
c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat-pusat pertumbuhan; dan
d. mengembangkan kota-kota dan desa-desa pelabuhan di masingmasing Gugus Pulau sebagai pusat startegis pengembangan

Strategi peningkatan kualitas pelayanan jaringan meliputi:

a. meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang merata di setiap Gugus Pulau;
b. pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk mendukung kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/ transportasi, terisolir, dan rawan bencana alam, serta kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah industri dan wilayah pariwisata.
c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energy terbarukan dan tak terbarukan secara merata di setiap Gugus Pulau, teristimewa untuk mendukung pengembangan kawasankawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian dan pertambangan;
d. meningkatkan kualitas air baku, jaringan dan jangkauan prasarana sumber daya air serta penyediaan air bersih dan destilasi air laut bagi daerah-daerah yang tidak memiliki wilayah sungai; dan
e. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas secara merata di setiap Gugus Pulau

Adapun kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi:

a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi

Beberapa hal penting terkait kewilayahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku juga dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Maluku adalah Kota Ambon dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Namlea, Kairatu, Wahai, Werinama, Bula, Masohi, Tual, Langgur, Tiakur, Wonreli, Namrole, Kepala Madan, Dataran Honipopu, Dataran Hunimua.
b. Dalam menyusun kebijakan terkait konektivitas wilayah harus memperhatikan rencana prasarana tranasportasi darat yakni Rencana Jalan di Provinsi Maluku baik Jalan Nasional yang berfungsi sebagai jalan arteri primer maupun sebagai jalan kolektor primer; Jalan Strategis Nasional; Jalan Provinsi yang befungsi sebagai jalan kolektor primer 2. Sedangkan pada rencana prasarana transportasi penyeberangan meliputi arahan pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan dan rencana prasarana transportasi udara meliputi bandara umum dan bandara khusus. Prasarana transportasi udara yang sudah dikembangkan meliputi bandara umum Pattimura di Ambin dan bandara khusus di Bula dan Benjina. Selain itu juga direncanakan pengembangan dan pembangunan bandara umum di beberapa wilayah Provinsi Maluku.
c. Kawasan Andalan Provinsi di Provinsi Maluku meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap kepentingan ekonomi yang bersumber dari sektor-sektor unggulan kawasan. Program pengembangan kawasan andalan difokuskan untuk pembangunan agribisnis, industri, pariwisata, bisnis kelautan, jasa, sumber daya manusia, dan pertahanan keamanan.

Penetapan kawasan andalan nasional di Provinsi Maluku terdiri atas lima kawasan yakni:

1) kawasan Seram;
2) kawasan Kei-Aru-P.Wetar-P.Tanimbar;
3) kawasan Buru;
4) kawasan Laut Banda dan sekitarnya; dan
5) kawasan Laut Arafuru dan sekitarnya.

Sedangkan Penetapan Kawasan Andalan Provinsi di Provinsi Maluku, terdiri atas 12 kawasan, yaitu:

1) kawasan Pulau Buru;
2) kawasan Seram Barat;
3) kawasan Seram Utara;

4) kawasan Seram Timur;
5) kawasan Seram Selatan;
6) kawasan Kepulauan Banda dan Teon Nila Serua;
7) kawasan Pulau Ambon dan PP Lease;
8) kawasan Kepulauan Kei;
9) kawasan Kepulauan Aru;
10) kawasan Kepulauan Tanimbar;
11) kawasan Kepulauan Babar; dan
12) kawasan Kepulauan PP Terselatan dan Wetar

d. Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Maluku dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
b. Kawasan Laut Banda
c. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Marsela, Metimiarang, Letti, Kisar, Wetar, Ararkula, Karaweira, Batarkusu dan Lirang) dengan negara Timor Leste/Australia.

4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Maluku

Negara Republik Indonesia kini memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pengelolaan Lingkungan Hidup setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah KLHS. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan /atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Penyusunan KLHS menggunakan beberapa indikator dan/atau pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan/atau Program antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup,

dan analisis risiko Lingkungan Hidup. Berbagai capaian indikator dan/atau pendekatan dalam KLHS ini mampu memberikan skenario dan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan jangka menengah dalam menyusun program pembangunan berada pada koridor ketahanan lingkungan hidup.

KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Maluku disusun dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Maluku periode pembangunan 2019-2024. Provinsi Maluku dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Steategis Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 memiliki kewenangan 229 indikator dari total 236 indikator yang menjadi kewenangan untuk provinsi. Hal tersebut dikarenakan beberapa indikator merupakan indikator khusus dan indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Maluku sehingga tidak menjadikannya sebagai target pembangunan berkelanjutan.

Secara umum Provinsi Maluku sudah cukup baik dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana jika dilihat dari persentase capaian TPB untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target memiliki porsi terbanyak sebesar 47 persen (108 indikator) dari 229 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku. Tantangan yang dihadapi Provinsi Maluku kedepan adalah indikator yang memiliki capaian sudah dilaksanakan dan belum mencapai target yang memiliki persentase sebanyak 30 persen (69 indikator) yang diharapkan indikator tersebut dapat mencapai target nasional pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, terdapat juga 6 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional serta 46 indikator yang belum mempunyai data sesuai indikator TPB.

Salah satu poin penting pada penyusunan KLHS adalah dirumuskannya skenario pembangunan berkelanjutan dimana pada KLHS Perubahan ini lebih ditekankan pada perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk memberi masukan pada penyusunan RPJMD. Hal ini juga berlaku untuk penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dimana pada KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Maluku dirumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan Provinsi Maluku sebagai berikut:

a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
b. Masih rendahnya kualitas SDM
c. Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal
d. Alih fungsi lahan dan hutan
e. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim

f. Kemiskinan dan pengangguran (diperparah pandemi Covid-19)
g. Keterbatasan aksesibilitas serta sarana dan prasarana

Selanjutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dihasilkan dari KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Memasukkan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Kajian 6 muatan KLHS ke dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
b. Memasukkan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan/Isu Utama ke dalam Isu Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.
c. Untuk indikator yang sudah mencapai target nasional (RPJMN 2019) rekomendasi terkait dengan rumusan isu strategis, permasalahan, sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat mengacu pada program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 sampai dengan pelaksanaan tahun 2020 dengan menyesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Kepmendagri No 050-3708 tahun 2020.
d. Mengintegrasikan indikator TPB hasil perumusan skenario dengan upaya tambahan berupa rumusan isu strategis/isu utama, permasalahan, sasaran strategis, program, kegiatan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku serta RAD TPB sesuai dengan ketentuan pasal 21 Permendagri 07 tahun 2018.
e. Untuk Indikator TPB yang belum ada, terutama yang terkait dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku sesuai dengan kondisi daerah.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku periode pembangunan 2019-2024 ini akan mempertimbangkan hasil KLHS Perubahan RPJMD terkait skenario dan rekomendasi yang selaras dengan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

5. Dokumen Pendukung Pencapaian Pembangunan Provinsi Maluku

Berbagai kajian telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dimana hasilnya mampu memberikan rekomendasi pada perencanaan pembangunan maupun pengendalian dan evaluasinya. Berikut dokumen

perencanaan lainnya yang merupakan dokumen/kajian pendukung pembangunan Provinsi Maluku.

a. Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAD MAPI)
   RAD MAPI merupakan bagian dari kerangka pembangunan daerah provinsi Maluku sebagai turunan dari RAD MAPI Nasional. Dari sisi perencanaan daerah RAD MAPI merupakan rencana yang lebih spesifik bersifat lintas sektoral dalam mempersiapkan rencana pembangunan daerah yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim. Hal ini menjadikan pembangunan Provinsi Maluku mengarah pada pembangunan berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resilliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim.
   Sebagai wilayah yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi, terlihat dari adanya 12 jenis ancaman bencana antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, gelombang ekstrem, abrasi, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan
   lahan, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi. Selain itu, proyeksi Iklim periode 2016 – 2045 menunjukkan adanya peningkatan suhu temperatur sekitar 0,50 C sampai 1,50 C dengan kemungkinan musim hujan yang lebih
   basah dan musim kering yang lebih kering. Oleh karena itulah dengan RAD-MAPI ini menjadikan Pemerintah Provinsi Maluku memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan, berpartisipasi dalam menghadapi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
b. Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
   Sebagai tindaklanjut dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), maka Provinsi Maluku menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Hal ini dilakukan mengingat Provinsi Maluku memiliki potensi sumber emisi Gas Rumah Kaca khususnya pada sektor pertanian, sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor energi dan transportasi, dan sektor pengelolaan limbah.
   Berdasarkan kajian tersebut, pada perhitungan Business as Usual (BaU) dapat diketahui bahwa besar emisi pada Provinsi Maluku tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 dari aktivitas di Provinsi Maluku diproyeksikan sebesar 41.456.015,87 ton CO2 eq. Penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor kehutanan (36.787.324,94

tonCO2eq), sektor energi dan transportasi (3.632.010,00 tonCO2eq), sektor pertanian (773.480,93 tonCO2eq), dan sektor limbah (371.200,00 tonCO2eq).

Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja RAD-GRK Provinsi Maluku, estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 60,93 persen dari BAU baseline tahun 2030.

Mitigasi hasil RAD-GRK Provinsi Maluku uang diusulkan dijabarkan sebagai berikut:

1) Sektor pertanian: (1) penanaman varietas padi rendah emisi (Cisantana dan Ciherang), (2) pengembangan biogas dari kotoran sapi. Besarnya emisi sektor pertanian setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030 yaitu sebesar 739.748,29 tonCO2eq atau menurun sebesar 4,36 persen terhadap kondisi BaU baseline sektor pertanian.
2) Sektor kehutanan dan lahan gambut: (1) perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan, (2) perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (SDH), (3) pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dan (4) peningkatan fungsi dan daya dukung das berbasis pemberdayaan masyarakat . Besarnya emisi sektor kehutanan dan lahan gambut setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030 yaitu sebesar 11.598.129,51 tonCO2eq atau menurun sebesar 68,47 persen terhadap kondisi BaU baseline sektor kehutanan dan lahan gambut.
3) Sektor pengelolaan energi dan transportasi: (1) pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dan (2) mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur. Besarnya emisi sektor pengelolaan energi dan transportasi setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030 yaitu sebesar 3.557.945,90 tonCO2eq atau menurun sebesar 2,03 persen terhadap kondisi BaU baseline sektor pengelolaan energi dan transportasi.
4) Sektor pengelolaan limbah: (1) pembangunan TPS 3R dan TPA. Besarnya emisi sektor pengelolaan energi dan transportasi setelah pelaksanaan aksi mitigasi pada tahun 2030 yaitu sebesar 340.900 tonCO2eq atau menurun sebesar 8,16 persen terhadap kondisi BaU baseline sektor pengelolaan limbah.

c. Road Map Penyelenggaraan Rumah Basudara Sejahtera platform Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (RBS – SLRT)

Road Map (Peta Jalan) Penyelenggaraan Rumah Basudara Sejahtera-Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (RBS-SLRT) dan juga Puskesos (RBS-SLRT di tingkat desa/kelurahan) diperlukan untuk merumuskan dengan jelas berbagai strategi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Maluku dalam rangka menjamin keberlanjutan penyediaan akses atau pusat layanan keluhan dan kebutuhan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu. Roadmap penyelenggaraan RBS-SLRT diharapkan memiliki capaian sebagai berikut:

- Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.
- Penyelenggaraan kegiatan RBS-SLRT dapat mengurangi jumlah rumah tangga atau penduduk miskin dan permasalahan sosial di Maluku,
- Adanya penyelenggaraan pembangunan yang inklusif. Penyelenggaraan RBS-SLRT akan mendorong partisipasi masyarakat fakir miskin dan orang tidak untuk memperoleh hak-haknya, terkait dengan masalah perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- Terselenggaranya kegiatan layanan publik yang akuntabel. Penyelenggaraan kegiatan RBS-SLRT memperkuat akses dan sistem penyaluran layanan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang transparan dan akuntabel.
- Adanya peningkatan kapasitas lokal. Penyelenggaraan RBS-SLRT akan meningkatkan modal sosial dan kapasitas berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah di provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

6. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Maluku

Perumusan isu strategis Provinsi Maluku dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2019-2024, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Provinsi Maluku yang telah dikaji dan dianalisis permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu

nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Perubahan RPJMD Maluku, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku periode pembangunan 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut.

a. Reformasi Birokrasi secara menyeluruh

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik. Sejalan dengan pengelolaan pemerintahan dalam semangat otonomi daerah, dimana kabupaten/kota memiliki kewenangannya sendiri yang secara garis besar terpisah dari kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pada implementasinya tak jarang ditemukan adanya ketidakselarasan penyelenggaraan pemerintahan/pelaksanaan pembangunan antar level pemerintahan yang secara tidak langsung berdampak pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat diantaranya tidak terintegrasinya konsep pengembangan wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan tidak selarasnya skenario/strategi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan kabupaten/kota.

Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Diantaranya keadaan ini terjadi karena aparatur pemerintah masih memposisikan diri sebagai pihak yang "dilayani" bukan melayani. Permasalahan utama pelayanan publik terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas pelayanan tergantung pada pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) ke depannya.

b. Sumber Daya Manusia Unggul dan Kompetitif

Derajat dan kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan. Hal tersebut penting menjadi perhatian mengingat tersedianya sumber daya manusia yang potensial, memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang diharapkan akan mampu memiliki daya saing dalam persaingan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, optimalisasi capaian pendidikan dan kesehatan perlu diupayakan untuk memperbaiki derajat

kehidupan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu sehingga akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.

Adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 mengancam upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam jangka panjang, diperkirakan terjadi ancaman lost generation pada kelompok usia sekolah saat ini. Generasi yang hilang ditandai dengan kondisi kesehatan yang rentan, hilangnya tujuan hidup dan kurangnya pengetahuan. Kondisi kesehatan yang rentan disebabkan sempat terhentinya program-program imunisasi dan vaksin, pemberian vitamin dan kunjungan tenaga kesehatan ke rumah-rumah. Selain itu, pembatasan kegiatan ekonomi menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat dan berimbas pada turunnya asupan gizi.

Pembatasan aktivitas di luar rumah mengakibatkan turunnya potensi kecerdasan sosio-emosional yang dialami anak-anak dan generasi muda. Pengalaman hidup yang kurang diperkirakan menjadi salah satu penyebab munculnya lost generation. Pendidikan berbasis daring juga berpotensi menimbulkan kesenjangan materi yang diterima peserta didik. Anak-anak dari keluarga menengah ke atas lebih berpeluang mengakses pendidikan dari gawai dan teknologi yang lebih baik daripada anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Kualitas tenaga pendidik juga berpengaruh pada kualitas materi pendidikan daring yang disampaikan.

Penggunaan gawai secara intensif berpeluang membuat peserta didik mengakses situs nonpendidikan. Terbukanya kanal internet, berisiko masuknya informasi-informasi palsu (hoax), konten pornografi dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai budaya masyarakat terancam luntur dan tergantikan dengan budaya dari luar yang tidak semuanya selaras dengan norma-norma yang telah berlaku. Bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, ancaman ini telah menjadi perhatian masyarakat.

Berbagai kondisi tersebut akhirnya menjadi kendala dalam mewujudkan sumber daya manusia Maluku yang unggul dan kompetitif, dimana potensi SDM yang terus meningkat secara kuantitatif ini harus diimbangi dengan mutu SDM yang berdaya saing. Oleh karena itu, akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan baik dari sisi kualitas maupun pemerataannya harus mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Maluku.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan dan berdaya saing

Pengelolaan dan pemanfaataan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi (economic resource) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjamin keberlanjutan/kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Berbicara daya saing, banyak aspek yang seyogyanya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam peningkatan daya saing daerah, seperti produktivitas, nilai tambah dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan ketrampilan masih sangat dibutuhkan. Nilai tambah produk pun masih rendah, demikian juga logistik dalam kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masih berbiaya tinggi/mahal harganya. Ketiga faktor ini (produktivitas, nilai tambah dan logistik) saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan produktivitas erat kaitannya dengan masalah rendahnya nilai tambah. Rantai produk atau jalur distribusi yang terlalu panjang disertai dengan minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses bisnis usaha juga menjadi salah satu penyebabnya.

Salah satu upaya dalam rangka mengelola Sumber Daya Alam berkelanjutan dan berdaya saing adalah dengan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) pada tahun 2023. Dengan disusun dan diimplementasikannya RAD-KSB di Maluku akan membentuk komitmen Provinsi Maluku dalam menargetkan kelapa produksi kelapa sawit untuk tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Dokumen ini nantinya akan dirumuskan sebagai pedoman bersama untuk membantu pemerintah dan semua pihak lainnya dalam perencanaan, dan mengembangkan kebijakan serta program-program yang terkait dengan kelapa sawit di Provinsi Maluku.

d. Kemiskinan Ekstrem dan pengangguran

Posisi kemiskinan dalam rangkaian proses pembangunan ibarat mata rantai yang tidak terputus. Kemiskinan merupakan sebab sekaligus akibat gagalnya sebuah pembangunan. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan sumber daya lainnya, padahal pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah akan menurunkan daya saing daerah, yang pada gilirannya akan berimbas pada penambahan angka kemiskinan itu sendiri.

Salah satu fokus penanganan kemiskinan saat ini adalah kemiskinan ekstrim dimana pada tahun 2024 diharapkan kemiskinan ekstrim sudah berada pada angka 0 persen. Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Kondisi Provinsi Maluku juga cukup tinggi kemiskinan ekstrim dimana total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18,76 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 21.270 jiwa; Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 13,65 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.660 jiwa; Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10.53 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa; Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.750 jiwa; serta Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 14,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.580 jiwa.

Pengangguran di Maluku juga perlu menjadi perhatian mengingat Maluku merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi se-wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan upaya berbagai pihak agar meningkatkan kompetensi angkatan kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Maluku.

Masih rendahnya kapabilitas tenaga kerja yang terlihat dari jenjang pendidikannya, memaksa pemerintah daerah untuk meningkatkan

keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dalam mewujudkan kehidupan layak. Diharapkan nantinya, tenaga kerja yang unggul dan kompetitif akan terealisasi sehingga akan menjadi daya Tarik bagi penanam modal maupun meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah/lokal. Pada akhirnya, dengan daya saing yang tinggi akan meningkatkan pendapatan rumah tangganya sehingga terwujud kondisi rumah tangga yang lebih baik.

Kondisi kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku diperparah dengan merebaknya pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan roda perekonomian melambat, mendorong naiknya angka pengangguran terbuka dan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

e. Pengendalian dan pemanfaatan ruang

Provinsi Maluku didominasi oleh pulau-pulau kecil yang memiliki pembangunan beragam dan sulit untuk dimonitoring dan diawasi, dimana sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang. Selain itu, pengendalian pemanfataan ruangnya juga belum optimal disebabkan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku telah memiliki 1 (satu) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang. Oleh karenanya, perlu adanya dukungan dari Provinsi Maluku dalam percepatan implementasi pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah yang telah disusun.

Peraturan tersebut mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Ambon dengan penetapan pada Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021. RDTR ini nantinya akan menjadi rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTRW Kota Ambon yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada pembangunan Kota Ambon tahun 2021-2041.

Salah satu fungsi dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang adalah untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung, termasuk didalamnya memperhatikan adanya alih fungsi lahan dan hutan. Sebagai wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian, maka Maluku memiliki potensi alih fungsi lahan dan hutan yang cukup tinggi. Hal ini tentu jika tidak dikontrol dan diawasi akan menyebabkan rusaknya ekosistem lahan dan hutan dengan beberapa dampak negatif sebagai konsekuensinya seperti terjadinya bencana alam.

f. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim

Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Beberapa potensi bencana yang dimiliki oleh Provinsi Maluku seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemi dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut. Keseluruhan potensi bencana ini menjadikan pemerintah harus meningkatkan ketahanan bencana sekaligus meningkatkan kualitas penanggulangan dan pemulihan bencana.

Isu strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting karena komitmen dari pemerintah pusat berdasarkan ratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016 sesuai UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris, yang diimplementasikan melalui First Nationally Determerned Contribution (NDC) yang merupakan komitmen Indonesia untuk mengurangi reduksi emisi 29% dengan kemampuan sendiri dan target 38% - 41% jika dengan kerjasama internasional. Oleh karena itu, isu penting untuk Maluku yakni Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor energi, limbah, industri, pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan adaptasi perubahan iklim meliputi sektor perikanan, pariwisata, air bersih, pertanian/perkebunan, kehutanan, perhubungan laut, serta adaptasi bencana banjir dan longsor.

g. Konektivitas serta sarana dan prasarana

Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km2 dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Km2 atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (terestrial) yang luasnya hanya 54.184,96 Km2 atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukan bahwa potensi Provinsi Maluku dominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan sebagai keunggulan komparitif terhadap wilayah provinsi

lainya. Potensi wilayah yang bercirikan kepulauan tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya. Selain itu, terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan. Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste.

Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar pembangunan.

Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah. Dengan karakteristik wilayah kepulauan salah satu tantangan terbesar pembangunan di Provinsi Maluku adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Provinsi Maluku. Infrastruktur transportasi yang memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa dalam rangka menurunkan biaya logistik dan produk hingga sampai ke tangan konsumen, yang juga mendukung pelayanan dasar. Konsep konektivitas kepulauan di Provinsi Maluku diharapkan menjadikan Provinsi Maluku yang terakses secara lokal, terintegrasi secara nasional dan terhubung secara global. Untuk itu selain memperkuat aksesibilitas lokal, konektivitas dengan jaringan nasional dan global pun perlu diperhatikan, salah satunya dengan mempersiapkan pintu keluar di kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang bagian selatan Indonesia.

h. Minimnya capaian vaksinasi COVID-19

Maluku merupakan provinsi terendah dengan dampak kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Namun, capaian vaksinasi Covid-19 di Maluku juga termasuk paling minim dengan dosis pertama baru belum mencapai 70 persen. Hal ini dikarenakan beberapa kendala di antaranya terkait minimnya

ketersediaan jaringan internet di pulau terpencil, kurangnya ketersediaan lemari pendingin untuk penyimpanan vaksin, rendahnya konektivitas antar wilayah, serta cuaca ekstrem yang melanda pada waktu-waktu tertentu.

Beberapa daerah yang masih minim vaksinasi dilakukan penggenjotan terhadap pemberian vaksin melalui berbagai upaya baik pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota maupun instansi vertikal bahkan kepolisian dan TNI. Adapun untuk vaksinasi anak umur 6-11 tahun, baru sebatas Kota Ambon yang diberi izin untuk melaksanakannya. Rekomendasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk vaksinasi anak, dikarenakan capaian vaksinasi kota Ambon yang telah mencapai 91 persen dari target vaksinasi yang diberikan, serta vaksinasi lansia sudah melebihi 60 persen. Sehingga rekomendasi ini memberikan "angin segar" bagi percepatan penanganan COVID-19 di Maluku.

i. Investasi, pengembangan pariwisata dan budaya daerah

Keragaman sumber daya alam terutama pariwisata, kekayaan budaya dan adat istiadat, agama maupun sumber daya sosial lainnya merupakan kekayaan dan keunggulan Provinsi Maluku. Namun keragaman ini belum dikelola dan dikembangkan secara baik. Pengelolaan keragaman multi dimensi ini sudah seharusnya mendapat perhatian serius dan porsi strategis dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Maluku ke depannya, yang diarahkan pada pengembangan berbasis kearifal lokal dan konservasi kultural (yang tidak hanya bersifat seremonial).

Investasi pun perlu terus ditingkat, karena suatu wilayah atau usaha bisa berdaya saing didukung juga oleh investasi. Tidak hanya investasi asing yang terus ditingkatkan, investasi dari dalam negeri juga perlu terus didorong. Karena dari investor dalam negeri pada akhirnya nilai tambah yang tercipta akan dinikmati oleh penduduk Indonesia sendiri.

Dalam melihat bagaimana investasi mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maka dilakukan analisis ICOR. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Secara umum, ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

Tabel IV.5
Skenario Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi
Provinsi Maluku Tahun 2021-2024

Tahun	Target Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK (Milyar Rp)	Kebutuhan Investasi (Milyar Rp)		
			ADHK	Implisit	ADHB
2021	4,75	32.226, 37	10.229,37	166,62	17.044,48
2022	5,87	34.118,06	11.179,88	172,72	19.310,03
2023	6,27	36.257,26	12.642,69	179,35	22.675,14
2024	6,71	38.690,12	14.378,22	186,60	26.829,71

Sumber: Bappeda Provinsi Maluku, 2021

Dari hasil penghitungan ICOR di Provinsi Maluku, maka kebutuhan investasi untuk beberapa skenario pertumbuhan ekonomi terlihat pada tabel di atas. Pada skenario pertumbuhan ekonomi 4,75 persen maka diperlukan investasi sebesar 17,04 trilyun rupiah di tahun 2021. Untuk skenario pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87 persen maka diperlukan investasi di Maluku sebesar 19,31 trilyun rupiah. Sedangkan pada akhir periode pembangunan daerah, jika pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,71 persen maka perlu adanya investasi sebesar 26,83 trilyun rupiah pada tahun 2026.

Kebutuhan investasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mengingat keterbatasan anggaran daerah. Namun, tugas Pemerintah Provinsi Maluku adalah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik perhatian investor swasta maupun rumahtangga baik dari dalam maupun luar Provinsi Maluku.

j. Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

Pemerintah Provinsi Maluku telah mencanangkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional/ LIN. Hal ini berarti menjadikan Maluku sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Hal ini didasari dari potensi sumber daya ikan Provinsi Maluku yang diperkirakan mencapai kurang lebih satu juta ton dengan jumlah tangkapan sekitar 80 persen per tahun. Adapun daerah tangkapan dibagi dalam 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu: (1) WPP Laut Banda, (2) WPP Laut Seram dan Teluk Tomini; dan (3) WPP Laut Arafura. Pembangunan LIN ini merupakan salah satu bagian dari konsep ekonomi biru yang dijalankan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor ekonomi yang berbasis kemaritiman sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu motor revitalisasi perekonomian pasca COVID-19 maupun menyeimbangkan perekonomian Indonesia bagian Timur.

Dalam mewujudkan hal tersebut, berbagai sarana dan prasarana segera disiapkan khususnya Pelabuhan Perikanan Ambon. Kemudian dari sarana dan prasarana tersebut diperkirakan mampu menampung kapal-kapal penangkap ikan sebanyak 995 kapal dengan berbagai *Gross Tonnage* (GT). Selain itu, adanya kebijakan ini akan menyerap tenaga kerja dari sisi produksi perikanan maupun industry pengolahannya yang secara otomatis akan mengurangi angka kemiskinan secara masif.

k. Pengembangan Blok Masela

Mengacu pada Pasal 2 Permen ESDM No. 37/2016, dengan telah disetujuinya revisi POD I Lapangan Abadi Wilayah Kerja ("WK") Masela oleh Menteri ESDM melalui Surat No. 258/10/MEM.M/2019 tanggal 5 Juli 2019, maka Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("K3S") WK Masela yaitu INPEX Masela Ltd memiliki kewajiban untuk menawarkan Partisipasi Interes ("PI") 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD").

Mengingat Lapangan Abadi WK Masela berada di atas 12 Mil Laut, maka Menteri ESDM sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 17 Permen ESDM No. 37/2016 telah menetapkan kebijakan penerima penawaran PI 10% di WK Masela melalui Surat Menteri ESDM No. 560/13/MEM.M/2019 tanggal 9 Desember 2019 adalah BUMD Maluku dalah hal ini PT Maluku Energi Abadi (Perseroda).

Sesuai dengan Surat SKK Migas No. SRT-0886/SKKMA0000/2019/S9 tanggal 20 Desember 2019, penunjukan BUMD/PPD sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 37/2016. Manfaat keterlibatan Daerah dalam Pengelolaan WK Masela melalui PI 10% sendiri dapat dibagi menjadi 3 hal, antara lain:

- Profit, di mana PI 10% memberikan keuntungan/profit bagi BUMD yang akan menambah Pendapatan Daerah;
- Knowledge, PI 10% diharapakan dapat memberikan kesempatan kepada Provinsi Maluku akan adanya transfer knowledge terutama kepada putra putri Daerah melalui BUMD yang ditunjuk untuk mendapatkan pengetahun dan pengalaman dari Pengelolaan PI 10% tersebut; dan
- Transparansi, dengan adanya Pengelolaan PI 10% oleh BUMD diharapkan BUMD dapat mengetahui data-data lifting, cadangan, cost dll.

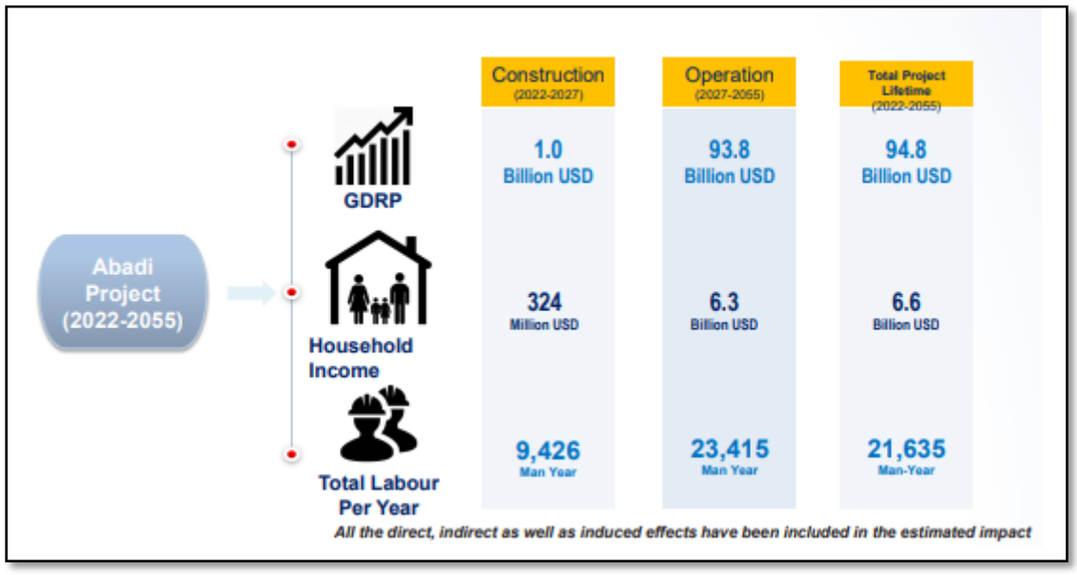
Dengan demikian Pengelolaan PI 10% WK Masela diharapkan menjadi kesempatan bagi Provinsi Maluku untuk bangkit dari ketertinggalan, sehingga

dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti daerah termiskin, tingginya angka pengangguran, kualitas kesehatan dan pendidikan, serta berbagai isu lain yang selama ini membebani Provinsi Maluku.

Dengan adanya potensi Blok Masela (P1) sebesar 11,92 TCF (90% P1 = 10,73 TCF), hasil resertifikasi cadangan oleh LEMIGAS 17 Maret 2015 dan dengan skenario pengembangan *onshore* memberikan kesempatan besar bagi masyarakat Maluku untuk mendapatkan *multiplier effects* serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya.

Merujuk jadwal Proyek Abadi Masela tahapan konstruksi (*Engineering, Procurement, Construction & Installation*/ EPCI) maka pada 2022 s.d. 2027 diperkirakan membutuhkan berbagai suplai jasa penunjang seperti suplai alat & bahan konstruksi, suplai kebutuhan makanan, suplai tenaga kerja, suplai transportasi, dan suplai penunjang lainnya.

Gambar IV.11.
Overview Dampak Ekonomi untuk Wilayah Maluku



l. Pembangunan Ambon New Port

Pemerintah memiliki rencana untuk membangun Pelabuhan Ambon Baru (New Ambon Port) yang akan disatukan dengan pelabuhan Perikanan Terintregasi, guna mendukung penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Pembangunan infrastruktur Pelabuhan baru ini kaan dibangun dengan menggunakan APBN. Diharapkan nantinya Pelabuhan Ambon Baru ini akan menajdi pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur. Selain itu, Pelabuhan ini akan mendorong konektivitas antara Indonesia dengan Australia maupun antar wilayah di NKRI. Pada perencanaannya pula Pelabuhan Ambon Baru akan diwujudkan sejumlah

fasilitas terminal petikemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan, tempat pengolahan ikan, kawasan industri logistik, terminal LNG dan pembangkit listrik serta dermaga ultimate dengan panjang 1.000 meter.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi RPJMD merupakan cita-cita yang ingin dicapai Provinsi Maluku diakhir periode dalam perencanaan lima tahun. Usaha untuk mengupayakan visi adalah dengan menentukkan misi-misi dalam RPJMD. Melihat kondisin saat ini dimana terdapat pembaruan regulasi serta dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan masyarakat, maka perlu adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah untuk menangani dan memperbaiki kondisi dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Dengan ini perubahan RPJMD Provinsi Maluku dilakukan di mana RPJMD ini sudah dilaksanakan melalui RKPD tahun 2019, 2020, dan 2021. Dengan demikian, capaian tahun lalu terutama capaian pembangunan tahun 2020, menjadi dasar apa saja yang harus dilakukan untuk saat ini dan 3 (tiga) tahun mendatang.

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang terkenal karena keindahan alamnya dan komoditi utama di sektor pertanian. Pembangunan di sisa masa pembangunan Provinsi Maluku perlu memerhatikan pengembangan Sumber daya alam Provinsi Maluku yang bisa menjadi salah satu sumber perekonomian unggulan. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan di Provinsi Maluku. Selain itu, fasilitas sarana prasarana yang saling terintegrasi menjadi daya dukung dalam pembangunan. Melihat dari struktur pembangunan Provinsi Maluku maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

5.1. VISI

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama dari seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Maluku. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Provinsi Maluku, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari visi dan misi Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Provinsi Maluku yang telah disusun, diarahkan untuk mencapai visi "MALUKU YANG RUKUN DAN DAMAI, ADIL DAN DEMOKRATIS, SERTA MAJU DAN SEJAHTERA". Terdapat 3 Misi Pokok yaitu: Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Provinsi Maluku yang (1) Bertaqwa, Rukun, Aman, dan Damai; (2) Maju, Mandiri dan Sejahtera; serta (3) Adil dan Demokratis. Tahapan pembangunan RPJMD 2019-2024 merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir pembangunan jangka menengah sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Provinsi Maluku. Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019–2024 yaitu :

" Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan "

Visi di atas merupakan gambaran yang ingin dicapai Provinsi Maluku di akhir tahun kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 2024 dengan 3 frasa; frasa pertama yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani; frasa kedua yaitu Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan dan frasa ketiga yaitu Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan. Pernyataan visi di atas mengandung makna sebagai berikut :

1. **Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna** :

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

2. **Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

3. Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna :

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.

Pelaksanaan visi pembangunan ini dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pengembangan sektor-sektor ekonomi yang strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat serta pemenuahan sarana prasarana dibingkai dalam kearifan budaya lokal dan pembangunan yang berkelanjutan

5.2. MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Dalam mewujudkan visi dan misinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode Tahun 2019–2024 menetapkan sejumlah program unggulan yang diarahkan sebagai wujud konkrit langkah-langkah akselerasi mewujudkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Program unggulan, merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019–2024. Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019- 2024 yang disertai dengan implementasi Program unggulannya, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif. Dari misi pertama Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani, implementasi program unggulan antara lain:

- Rapat koordinasi bulanan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan para Bupati/ Walikota;
- Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota berbasis e-government;
- Integrasi e-planning dan e-budgeting;
- Pertemuan rutin bulanan dengan para pemangku kepentingan (coffee morning).

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau-pulau terpencil, terdepan dan terluar. Dari misi kedua Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau, implementasi program unggulan antara lain:

- Penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi
- Program sarjana mengajar di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
- Pemberdayaan agen perdamaian berbasis agama dan budaya lokal
- Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi serta dosen

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, di antaranya melalui peningkatan keterampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan

ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang. Dari misi ketiga Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, implementasi program unggulan antara lain:

- Revitalisasi BUMD;
- Satu produk satu desa;
- Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah;
- Revitalisasi tanaman rempah (pala dan cengkih);
- Peningkatan daya saing produk olahan perikanan; dan
- Tata niaga produk pertanian dan perikanan (sistem resi gudang).

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Mengingat infrastruktur merupakan investasi pembangunan pendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan juga jasa, maka sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku akan terus didorong dengan mengupayakan sumber-sumber pendanaan di luar APBD dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan

yang beraneka ragam. Dari misi kelima Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata, implementasi program unggulan antara lain:

- Banda sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata; dan
- Festival budaya tahunan;

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Di samping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan *(no one left behind)*. Dari misi keenam Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi, implementasi program unggulan antara lain

- Pekan pemuda kreatif
- Pekan olah raga unggulan pemuda

Penyusunan Misi merupakan upaya untuk mewujudkan Visi, sehingga Keterkaitan visi dan misi Provinsi Maluku dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar V.1
Visi dan Misi Provinsi Maluku



5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Maluku dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 terdapat 16 Tujuan dan 18 sasaran daerah. Setelah dilakukan perubahan, maka dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 terdapat 8 Tujuan dan 20 Sasaran Daerah. Arahan tujuan pembangunan jangka menengah ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan.

Tabel V.1.
Tujuan dan Indikator tujuan RPJMD perubahan Provinsi Maluku

RPJMD PERUBAHAN		
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR**
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani		
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Indeks Reformasi Birokrasi**
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau		
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	**Tingkat Kemiskinan**
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau		
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan	**Indeks Wiliamson/Indeks Kesenjangan Wilayah**
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata		
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata	**Indeks Pembangunan Budaya**
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi		
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif	**Indeks Pengeluaran**

Agar visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Maluku tahun 2019–2024 lebih terarah dalam pengejawantahannya ke depan, maka visi dan misi tersebut secara operasional dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran berdasar visi dan misi dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

1. Tujuan pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP;
- Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik;
- Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola keuangan daerah dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Tujuan kedua: Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing sasaran yang ingin dicapai:

   - Sasaran 1: Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan indikator Indeks Pendidikan
   - Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata dengan indikator Indeks Kesehatan

3. Tujuan ketiga: Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan sasaran yang ingin dicapai:

   - Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dengan indikator LPE kategori industri pengolahan dan LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor
   - Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan dengan indikator LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

4. Tujuan keempat: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sasaran yang ingin dicapai:

   - Sasaran 1: Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator PDRB per Kapita
   - Sasaran 2: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

- Sasaran 3: Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat dengan indikator Inflasi
- Sasaran 4: Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

5. Tujuan kelima: Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan
   Berdasarkan tujuan Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan sasaran yang ingin dicapai:
   - Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana (IRB)
6. Tujuan Keenam: Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan
   Berdasarkan tujuan Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan sasaran yang ingin dicapai:
   - Sasaran 1: Meningkatnya pemeratan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah dengan indikator Indeks Gini
   - Sasaran 2: Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur dengan indikator Indeks Infrastruktur
7. Tujuan Ketujuh: Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata

   Berdasarkan tujuan Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata sasaran yang ingin dicapai:
   - Sasaran 1: Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis dengan indikator Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama
   - Sasaran 2: Meningkatnya investasi pembangunan daerah dengan indikator Pertumbuhan Investasi
   - Sasaran 3: Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional

8. Tujuan kedelapan: Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif
   Berdasarkan tujuan Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari dengan indikator LPE Ekonomi Kreatif
- Sasaran 2: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dengan indikator Indeks pembangunan Pemuda
- Sasaran 3: Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender)

Tabel V.2.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Indikator Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Visi: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan

RPJMD PERUBAHAN			REALISASI			TARGET			TARGET AKHIR
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani									
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Indeks Reformasi Birokrasi**	CC (58,20)	CC		B (67,50)	B (70,00)	BB (72,50)	BB (72,50)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	(CC) 59,34	NA	B (60,18)	B (65,00)	BB (67,50)	BB (70,00)	BB (70,00)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	NA	-3,82	3.86	3,05	3,1	3,15	3,15
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	NA	NA		3,3	3,35	3,4	3,4
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	NA		70,5	71	71,5	71,5
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau									
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	69,45	69,49	69,71	70,10	70,39	70,69	70,69
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan	0,714	0,719	0,722	0,728	**0,732**	0,737	0,737

RPJMD PERUBAHAN			REALISASI			TARGET			TARGET AKHIR
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan	0,705	0,707	0,709	0,712	0,714	0,716	0,716
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan									
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	5,41	-0,92	3,04	5,00–5,82	5,60-6,27	6,10 - 6,71	6,10 - 6,71
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan	2,69	-2,31	0,47	2,32	4,17	6,02	6,02
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor	6,84	-4,41	4,41	7.93	11,46	14,98	14,98
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,42	1,71	0,75	8,28	15,82	23,35	23,35
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	**Tingkat Kemiskinan**	17,65	17,99	16,30	16,11	15,92	15,73	15,73
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	25,6	25,25	26,07	26,38	26,94	27,5	27,5
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	NA	58,15		66,65	71,65	76,95	76,95

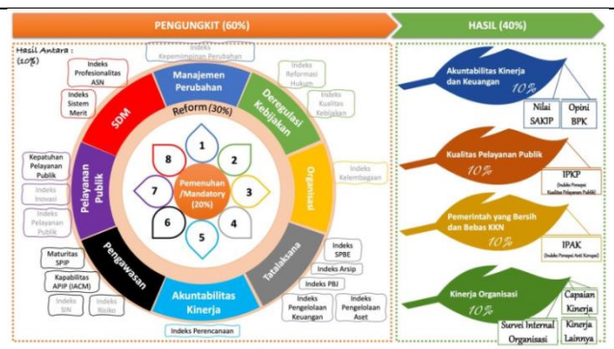
RPJMD PERUBAHAN				REALISASI			TARGET			TARGET AKHIR
MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi	2,72	1,69	4,01	2,04-3,80	2,10-3,24	2,09-2,99	2,09-2,99
		Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,08	7,57	6,93	6,45	6,12	6,05	6,05
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,34	76,86		77,46	77,66	77,87	77,87
			Indeks Resiko Bencana (IRB)	160,35	160,35		160,15	160,05	159,95	159,95
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau										
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan		**Indeks Wiliamson/ Indeks Kesenjangan Wilayah**	0,222	0,388		0,319	0,285	0,250	0,250
		Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	0,38	0,326	0,320	0,31	0,3	0,295	0,295
		Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	NA	NA		70,75	71,5	72,25	72,25

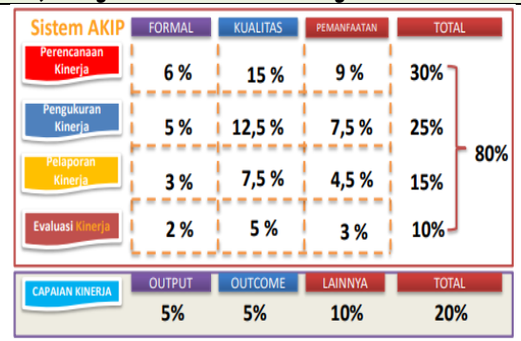
RPJMD PERUBAHAN				REALISASI			TARGET			TARGET AKHIR
MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata										
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata		**Indeks Pembangunan Budaya**	NA	NA		53,00	54,50	56,00	56,00
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,70	1,74		3,60	3,80	4,00	4,00
		Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	79,4	100	100	80,5	80,75	81	81
		Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	NA	NA		15	20	25	25
		Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata	NA	NA		6,84	6,85	6,86	6,86
			Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional	2,8	4,5		10	13	15	15
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi										
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif		**Indeks Pengeluaran**	0,665	0,660	0,661	0,665	0,667	0,669	0,669
		Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif	NA	NA		2,25	3,00	3,75	3,75
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda	NA	NA		54,00	54,50	55,00	55,00

RPJMD PERUBAHAN				REALISASI			TARGET			TARGET AKHIR
MISI	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,04	92,97	93,19	93,49	93,74	94,00	94,00

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Provinsi Maluku periode 2019-2024 ini disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.

Tabel V.3.
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani				
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	

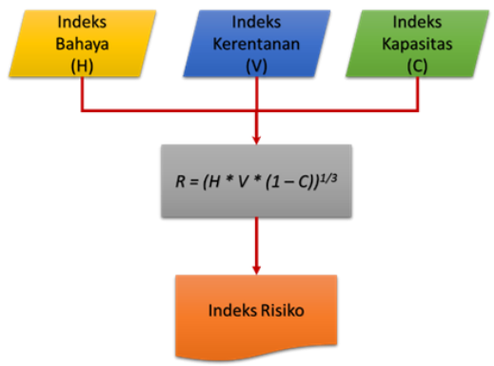
Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} x\ Nilai\ Penimbang$
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Melalui survey pihak eksternal 
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15)

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
				2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) 4. Penyerapan anggaran (20) 5. Kondisi keuangan daerah (15) 6. Opini BPK atas LKPD (15)
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau				
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saingSaing		IPM	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan}\ x\ I_{Pendidikan}\ x\ I_{Pengeluaran}}\ x\ 100$
		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
				RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0
		Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Ket.AHH = Angka Harapan Hidup
Misi 3 : Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan				
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
		Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori Industri Pengolahan	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan
			LPE kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{PDRB_{(Pd)t} - PDRB_{(Pd)t-1}}{PDRB_{(Pd)t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya Pd= Kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
		Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ Miskin}{Jumlah\ Penduduk} x100\%$
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	$\frac{PDRB\ adh\ Berlaku}{Jumlah\ Penduduk} x100\%$
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	$Y\ (f) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$ Dimana : i : Indikator ke-1,2,3,...,7,8 dan 9 j : Kabupaten ke-1,2,3,...,414,415 dan 416; kota ke-1,2,3,...,96,97 dan 98 Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupatem/kota ke-j a_i : Bobot masing – masing indikator ke-i X_{ij} : Nilai standarisasi masing – masing indikator ke-I pada kabupaten/kota ke-j

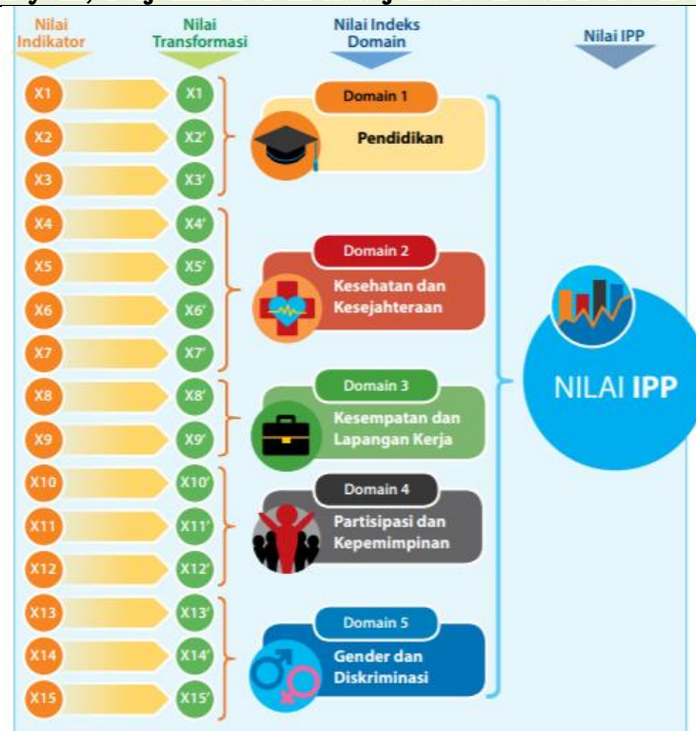
<table>
<tr><th>Misi</th><th>Tujuan Daerah</th><th>Sasaran Daerah</th><th>Indikator Tujuan/Sasaran Daerah</th><th>Definisi Operasional</th></tr>
<tr><td colspan="5">VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement
<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr>
<tr><td colspan="3">ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Rasio kosumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Total</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td colspan="3">ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan</td><td>0,15</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran</td><td>0,075</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Persentase rumah tangga tanpa akses listrik</td><td>0,075</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Total</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td colspan="3">ASPEK PEMANFAATAN PANGAN</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun</td><td>0,05</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih</td><td>0,15</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk</td><td>0,05</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Prevalensi balita stunting</td><td>0,05</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Angka harapan hidup pada saat lahir</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Total</td><td>0,40</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat</td><td>Inflasi</td><td>
$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^{k} \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^{k} P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$
$$NK_n = RH_n \text{ x } NK_n$$
$$Inflasi_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \text{ x } 100$$
Dengan :
$Inflasi_n$ = Inflasi pada periode ke-n
IHK_n = Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n
IHK_{n-1} = Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode ke n-1
RH_n = Relatif Harga (RH) pada periode ke-n
NK_n = Nilai Konsumsi (NK) pada periode ke- n-1
</td></tr>
</table>

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
		Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} x100\%$
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = \frac{\text{Emisi GRK}_{(n)} - \text{Emisi GRK}_{(n-1)}}{\text{Emisi GRK}_{(n-1)}} x100\%$
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			Indeks Resiko Bencana (IRB)	

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
Misi 4 : Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau				
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan		Indeks Wiliamson/Indeks Kesenjangan Wilayah	$IW = \frac{\sqrt{\sum(Yi - Y)^2 \, fi/n}}{Y}$ Keterangan : IW = Indeks Williamson Yi = PDRB pr kapita kabupaten ke-i Y = PDRB perkapita provinsi ke-i fi = Jumlah penduduk kabupaten ke-i n = Jumlah penduduk provinsi ke-i
		Meningkatnya pemeratan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_{pi} x (Fc_i + Fc_{i-1})$ BPS sudah rilis data Gini Rasio per Kabupaten/Kota

<table>
<tr><th>Misi</th><th>Tujuan Daerah</th><th>Sasaran Daerah</th><th>Indikator Tujuan/Sasaran Daerah</th><th>Definisi Operasional</th></tr>
<tr><td colspan="5">VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur</td><td>Indeks Infrastruktur</td><td>Indeks Infrastruktur Tingkat Provinsi =
0,3255 x jalan + 0,3343 x air + 0,5133 x sanitasi + 0,5033 x pkpl + 0,5153 x i_kom_inv
Variabel Indeks Infrastruktur :
<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td>% Kondisi jalan dalam keadaan mantap tahun-x</td></tr><tr><td>% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x</td></tr><tr><td>%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x</td></tr><tr><td>% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN</td></tr><tr><td>Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Misi 5 : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata</td><td></td><td>Indeks Pembangunan Budaya</td><td>Dimensi penghitungan:
Ekonomi budaya, Pendidikan, Ketahanan sosial budaya, Warisan budaya, Ekspresi budaya, Budaya literasi dan Gender (Laporan Indeks Pembangunan Kebudayaan)</td></tr>
<tr><td></td><td>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</td><td>$\frac{PDRB_{(Par)t}}{PDRB_t} x100\%$
Ket:
PDRB atas dasar harga berlaku
t= tahun berjalan
Par= Sektor Pariwisata</td></tr>
<tr><td>Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis</td><td>Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama</td><td>Mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan model Pengukuran variabel Pola Pendidikan Keluarga (X1); Peran Kementerian Agama (X2); dan Implementasi Kearifan Lokal (X3)</td></tr>
</table>

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
		Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	$\frac{PDRB_{PMTB} - PDRB_{PMTB-1}}{PDRB_{PMTB-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga berlaku t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
		Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Sektor-sektor terkait parowisata
			Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional	$= \frac{Persentase\ Cagar\ Budaya\ yang\ Masuk\ Dalam\ Kategori\ Tingkat\ Nasional}{Jumlah\ Cagar\ Budaya\ yang\ Masuk\ Dalam\ Kategori\ Tingkat\ Nasional} x100\%$
Misi 6 : Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi				
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif		Indeks Pengeluaran	$I_{Pengeluaran} = \frac{In(pengeluaran) - In(pengeluaran_{\min})}{In(pengeluaran_{maks}) - In(pengeluaran_{\min})}$ Ket: Pengeluaran Min = Rp. 1.007.436,- Pengeluaran Max = Rp. 26.572.352,-
		Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori yang masuk industri kreatif

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	 Keterangan : X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisas), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
		Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	$\frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki-laki} x100$

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Provinsi Maluku. Keterkaitan Kebijakan (IKU) daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.4.
Keterkaitan IKU Daerah dan IKU OPD Provinsi Maluku

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani						
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	SEMUA OPD (RUTIN)
	Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks Sistem Merit	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
				Indeks Profesionalitas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
				Indeks Perencanaan Pembangunan	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Indeks Inovasi Daerah	Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan/diterapkan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Nilai LPPD	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase OPD yang memiliki pelayanan publik dengan nilai IKM minimal B	SEKRETARIAT DAERAH
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung	Tingkat pertumbuhan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kab/kota	BADAN PENGHUBUNG
				Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	SEKRETARIAT DEWAN

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kependudukan	Rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Tingkat pemanfaatan data kependudukan	
					Persentase masyarakat yang memiliki e-KTP	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan Penanaman Modal	Rata-rata lama pengurusan dokumen perijinan usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di wilayah perbatasan	Persentase pengajuan rekomendasi yang ditindaklanjuti (LOKPRI)	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
				Indeks SPBE	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks Maturitas SPIP	Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Tingkat Kepatuhan OPD dalam menyusun BMD	BPKAD
					Indeks Pengelolaan Aset Daerah	BPKAD
				Derajat Fiskal Otonomi Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau						
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	
				Harapan lama sekolah	APM SMA/SMK	
					APK SMA/SMK	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah kunjungan perpustakaan daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Indeks Minat Baca Masyarakat	
		Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, dan merata	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Angka Kesakitan	DINAS KESEHATAN
					Angka Kematian Bayi	
					Angka Kematian Ibu Melahirkan	
					Persentase penerapan PHBS	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	*Bed Occupancy Rate* (BOR)	RSUD
					Rasio Daya Tampung RS	
					Rata-rata waktu tunggu pelayanan	

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan						
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan	Pertumbuhan jumlah industri besar di Provinsi Maluku	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang Aktif	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	
			LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor	ekspor bersih perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	LPE subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Nilai Tukar Petani	DINAS PERTANIAN
					Produktivitas pertanian	
				LPE subsektor kehutanan dan penebangan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	DINAS KEHUTANAN
					Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	
				LPE subsektor perikanan	Nilai Tukar Nelayan	

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
					Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	Tingkat Penurunan jumlah PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	DINAS SOSIAL
	Indikator: Tingkat Kemiskinan				Persentase PPKS yang tertangani	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan	Persentase Cadangan Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi	Tingkat Inflasi	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	
					Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	
				Persentase Peningkatan Transmigran	Tingkat kesejahteraan desa transmigrasi dan desa penduduk sekitar	

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air	Persentase sampah dan limbah yang tertangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indikator: Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			Indeks Kualitas Udara	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	
					Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	
				Indeks Kualitas Air Laut	Tingkat pencemaran air laut	
				Bauran energi baru dan terbarukan (EBT)	Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US $ juta)	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau						
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektifitas wilayah kepulauan	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	Indeks Desa Membangun Provinsi Maluku	Persentase Kabupaten/Kota berstatus IDM Maju	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Indikator: Indeks Williamson/Indeks Kesenjangan Wilayah	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Rasio kemantapan jalan provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Kapasitas Air Baku	
					Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	
					Rasio rumah layak huni	

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
				Persentase luasan kawasan kumuh	Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Rasio konektivitas provinsi	Indeks angkutan jalan	DINAS PERHUBUNGAN
					Indeks angkutan laut dan penyeberangan	
				Rasio elektrifikasi	Persentase desa yang teraliri listrik	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				Cakupan Desa yang memiliki akses internet	Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata						
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Demokrasi Provinsi Maluku	Nilai aspek kebebasan sipil	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Indikator:				Nilai aspek hak-hak politik	
	Indeks Pembangunan Budaya				Nilai aspek lembaga demokrasi	
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB			tingkat kejadian konflik antar desa dan antar kelompok	angka kejadian separatisme, radikalisme, dan tindakan kriminalitas yang tertangani	
					Persentase penurunan pengguna narkoba dan obat2an terlarang	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
		Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi Maluku	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA Provinsi Maluku	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	pertumbuhan wisatawan	DINAS PARIWISATA
					pertumbuhan desa wisata	DINAS PARIWISATA
			Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional	Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional	Jumlah cagar budaya nasional	DINDIKBUD
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi						
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Maluku	Jumlah Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	DINAS PARIWISATA
	Indikator: Indeks Pengeluaran				Jumlah Pertumbuhan pelaku wisata	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Pertumbuhan wirausaha muda	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	
				Persentase peningkatan prestasi olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	

MISI	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	OPD
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan						
		Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Proporsi perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Indeks perlindungan anak	

Provinsi Maluku merupakan tangan estafet pertama ketercapaian pembangunan Nasional, sehingga dalam pengambilan kebijakan perlu menyelaraskan dengan Nasional. Berikut ini adalah keterkaitan RPJMD perubahan Provinsi Maluku dengan RPJMN.

Tabel V.5.
Keselarasan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku dengan Nasional

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B:
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Perilaku Anti Korupsi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau				
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan	Terpenuhinya layanan dasar	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan	Terpenuhinya layanan dasar	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
				Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan				
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB industri pengolahan
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor		Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Pertumbuhan wirausaha (%
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonom	Tingkat Inflasi
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)
				Indeks Kualitas Air (IKA
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau				
	Meningkatnya pemeratan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini	Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas wilayah	Panjang jalan baru yang terbangun (Km)
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata				
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama

RPJMD PERUBAHAN			RPJMN 2020-2024	
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan investasi (PMTB)
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Kontribusi PDB pariwisata
		Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional		
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi				
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Penyusunan dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 disimpulkan bahwa tingkat capaian dari 28 IKU pada pada RPJMD Provninsi Maluku sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa 6 indikator atau 21,43 % melampaui target, 2 atau 7,14% indikator telah tercapai, 10 atau 35.71% indikator belum

tecapai dan 10 atau 35.71% indikator belum dapat diinfomasikan oleh OPD. Dari hasil evaluasi tersebut, maka disimpulkan untuk dilakukan perubahan sehingga dilakukanlah perumusan IKU daerah.

Sandingan antara RPJMD Murni dan Perubahan untuk melihat indikator kinerja yang yang menjadi perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.6.
Sandingan Sasaran RPJMD Murni Tahun 2019-2024 dan RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 Provinsi Maluku

RPJMD MURNI			RPJMD PERUBAHAN		
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**MISI**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani			**Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani**		
	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
	Terwujudnya kolaborasi antar pemerintah dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	Tingkat efektivitas kerjasama pemerintah daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
				Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau			**Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau**		
	Tersedianya akses pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Persentase Layanan Pendidikan Berkualitas		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan
	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Usia Harapan Hidup		Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			**Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**		
	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB		Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan

RPJMD MURNI			RPJMD PERUBAHAN		
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**MISI**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
					LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB		Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
				Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap komoditi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah				
				Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi
				Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan kapasitas penanggulangan bencana berbasis kepulauan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Indeks Resiko Bencana (IRB)			Indeks Resiko Bencana (IRB)
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau			**Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau**		
	Mewujudkan kemandirian wilayah	Indeks Gini		Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan	Indeks Konektivitas antar wilayah		Mewujudkan konektivitas wilayah dan	Indeks Infrastruktur

RPJMD MURNI			RPJMD PERUBAHAN		
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**MISI**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
	ketersediaan infrastruktur			ketersediaan infrastruktur	
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata			**Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata**		
	Meningkatkan ketahanan budaya lokal	Peningkatan keragaman budaya dan kearifan lokal yang terdaftar dan dikelola dengan baik		Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama
	Mewujudkan kerukunan, ketertiban dan keamanan yang kondusif dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat serta kerjasama yang harmonis antara Pemerintah, TNI dan POLRI	Indeks Rasa Aman			
	Meningkatnya investasi dan penyerapan tenaga kerja	Pertumbuhan Investasi		Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi
	Meningkatkan pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata
					Persentase cagar budaya yang msuk dalam kategori tingkat nasional
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi			**Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi**		
				Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda
	Meningkatnya akses dan manfaat	Indeks Pembangunan Gender		Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)

RPJMD MURNI			RPJMD PERUBAHAN		
MISI	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**MISI**	**SASARAN**	**INDIKATOR**
	pembangunan untuk semua	Indeks Pemberdayaan Gender			
	Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing	Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Berbasis Kompetensi			
		Lulusan SMK yang terserap pasar kerja			
		Pertumbuhan Wirausaha Muda			

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, bagaimana langkah pemerintah Provinsi Maluku mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1 STRATEGI

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Provinsi Maluku mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah dalam perumusan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel VI.I berikut :

Tabel VI.1.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi
Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan			
Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani			
	Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
		Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
		Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau			
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing		
		Sasaran 4 : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
		Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	
Misi 3 : Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			
	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		
		Sasaran 6 : Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan
		Sasaran 7 : Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	
	Tujuan 4 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		
		Sasaran 8 : Meningkatnya pendapatan masyarakat	Percepatan pengentasan kemiskinan
		Sasaran 9 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah	
		Sasaran 10 : Terkendalinya harga kebutuhan pokok	
		Sasaran 11 : Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	
	Tujuan 5 : Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan		

Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi
Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan			
		Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana
Misi 4 : Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau			
	Tujuan 6 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan		
		Sasaran 11 : Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas
		Sasaran 12 : Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	
Misi 5 : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata			
	Tujuan 7 : Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata		
		Sasaran 13 : Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata
		Sasaran 14 : Meningkatnya investasi pembangunan daerah	
		Sasaran 15 : Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	
Misi 6 : Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi			
	Tujuan 8 : Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif		
		Sasaran 16 : Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	Pengembangan usaha ekonomi kreatif
		Sasaran 17 : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah
		Sasaran 18 : Meningkatnya pembangunan SDM yang berkeadilan	Optimalisasi pengarusutamaan gender

Penjabaran dari strategi–strategi Provinsi Maluku yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan upaya mengimplementasikan reformasi birokrasi secara menyeluruh, masih ditemukan sebuah permasalahan, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintah yang baik, hal ini dikarenakan belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Oleh karena

itu, optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance menjadi salah satu strategi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Strategi Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance didukung dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas manajemen pemerintah daerah, optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT, serta peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah. Strategi ini dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya tata kelola keuangan daerah, sehingga permasalahan yang ada di birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dapat diselesaikan dan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dapat diwujudkan. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi yang pertama, Kepala Daerah Provinsi Maluku, yaitu Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani.

2. Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku terus mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. Berdasarkan pada data capaian Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Maluku berada pada nilai 69,45 pada tahun 2019 dan 69,49 pada tahun 2020. Kondisi ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia masyarakat Maluku perlu untuk terus ditingkatkan. Permasalahan utama yang ditemui pada masyarakat Maluku adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, dikarenakan masih minimnya kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, belum optimalnya mutu dan jangkauan pelayanan kesahatan masyarakat.

Selain itu, terjadinya penurunan Laju pertumbuhan Penduduk di Provinsi Maluku dalam rentang tahun 2017 s.d 2020 secara relatif namun meningkat secara absolute membutuhkan upaya-upaya strategis agar laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BKKBN target penurunan angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR) pada tahun 2020 masih berada di angka 3,1 dari target yang ditetapkan yaitu di angka 2,9; persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau *Unmet Need* masih berada di angka 33,4 persen

dari target sebanyak 13,68 persen di tahun 2020; persentase pemakaian kontrasepsi modern bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun (Mcpr) di tahun 2020 baru tercapai sebanyak 36,6 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 45,42 persen. Begitu pula persentase angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) baru tercapai sebanyak 21,8 persen pada tahun 2020 dari target 25 persen.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka Pemerinah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan arah kebijakan dalam peningkatan kualitas pendidikan menengah yang terjangkau, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan non-formal, peningkatan kualitas SDM (nakes); dan peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Strategi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi yang kedua Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau.

3. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan

Pengembangan ekonomi wilayah merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk memacu perkembangan sosial ekonomi di wilayah Maluku dengan mengelola sumber daya yang ada. Pengembangan ekonomi suatu wilayah tergantung pada keunggulan daya saing pada sektor–sektor ekonomi pada wilayah tersebut, dan setiap sektor memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Dalam upaya pengembangan wilayah, pengelolaan sumber daya alam berkalnjutan dan berdaya saing terus menjadi perhatian utama. Permasalahan utama yang ditemukan dalam pengembangan perekonomian di Wilayah Maluku yaitu belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan, dikarenakan masih belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah, khususnya perkebunan dan perikanan. Sebagai salah satu upaya untuk

mengoptimalkan pengelolaan perekonomian, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.

Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan didukung dengan arah kebijakan penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan dan peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, khususnya komoditas perikanan tangkap dan rempah-rempah. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah serta meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan. Salah satu upaya yang terintegrasi secara nasional adalah percepatan realisasi PSN Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi ke tiga Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

4. Percepatan pengentasan kemiskinan

Kemiskinan dan pengangguran merupakan suatu permasalahan kompleks di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya tingkat pendapatan masyarakat, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, kemiskinan dan pengangguran menjadi suatu isu strategis yang menjadi perhatian untuk diatasi agar semakin menurun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Maluku. Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku pada tahun 2019 mencapai 17,69% dan pada tahun 2020 mencapai 17,44%, masih cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Indonesia yang mencapai 10,19% pada September 2020. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemiskinan di Provinsi Maluku harus terus ditekan. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menemukan permasalahan yaitu masih tingginya kemiskinan wilayah di Provinsi Maluku yang diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu percepatan pengentasan kemiskinan dan didukung dengan arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu, peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), perwujudan ketersediaan pangan pokok daerah, pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM usia kerja. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan daerah, terkendalinya harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan angkatan kerja yang berdaya saing sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi ketiga Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

5. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana

Dalam pembangunan suatu wilayah, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk memperkecil dampak yang akan merugikan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Pada wilayah Provinsi Maluku, lingkungan hidup menjadi suatu isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Isu lingkungan yang ada di wilayah Maluku di antaranya yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan pesisir dan pulau–pulau kecil yang belum optimal, alih fungsi lahan, serta kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mengupayakan pengendalian lingkungan dalam pembangunan yang dilakukan, menemukan permasalahan, yaitu belum optimalnya peningkatan ketahanan lingkungan hidup dan belum optimalnya mitigasi dan ketahanan bencana.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dengan arah kebijakan peningkatan pengawasan dan

pengendalian aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan, serta penguatan ketangguhan bencana. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi yang ke tiga Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perumbuhan ekonomi, karena infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta terwujudnya stabilitas perekonomian. Sebagai wilayah kepulauan, pembangunan infrastruktur dalam pembangunan di Wilayah Maluku harus disesuaikan dengan kondisi wilahnya. Dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan aksesbilitas serta sarana dan prasarana di wilayah Maluku, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah dikarenakan masih tingginya ketimpangan pembangunan wilayah dan belum optimalnya konektivitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu percepatan pembangunan insfrastruktur dasar yang merata dan berkualitas dengan arah kebijakan akselerasi pengembangan pembangunan desa yang mandiri dan penguatan konektivitas antar wilayah. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mendukung peningkatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah serta mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian pada misi keempat Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.

7. Peningkatan ketahanan sosial budaya masyakarat dan daya saing pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan regional serta menjadi tumpuan pemerintah dalam pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat Pengembangan pariwisata dengan berdasarkan pada kebudayaan merupakan suatu kolaborasi yang sangat strategis karena beragamnya kebudayaan dan pariwisata daerah–daerah di Indonesia dapat menjadi perintis utama dalam mencapai tujuan ekonomi. Salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya pariwisatanya yaitu Provinsi Maluku. Maluku dengan gugusan kepulauan yang sangat indah untuk dijadikan potensi pariwisata serta sarat dengan objek wisata sejarah zaman penjajahan dan kebudayaan lain turut memberikan daya tarik yang berbeda. Dalam upaya peningkatan investasi serta pengembangan pariwisata dan budaya daerah, terdapat permasalahan yang harus dihadapi, yaitu belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya, dikarenakan tingginya potensi degradasi nilai – nilai agama dan kebudayaan daerah, belum optimalnya daya dukung penanaman modal daerah, dan belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata termasuk infrastruktur penunjangnya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yaitu peningkatan ketahanan sosial budaya masyakarat dan daya saing pariwisata dengan didukung arah kebijakan penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa, optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mencapai terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis, meningkatnya investasi pembangunan daerah, dan meningkatnya ekonomi pariwisata daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi kelima Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Meningkatnya Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata.

8. Pengembangan usaha ekonomi kreatif

Pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku. Pengangguran dan ketenagakerjaan merupakan satu kesatuan yang yang keduanya menciptakan suatu permasalahan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika pemerintah daerah mampu mengatasi permasalahan tersebut, maka akan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Dalam upaya pembangunan kualitas tenaga kerja yang unggul dan kompetitif, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu masih rendahnya keterampilan dan kreatifitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif, dikarenakan masih minimnya kapasitas dan kapabilitas angkatan kerja dan belum optimalnya pengembangan kreatifitas produk unggulan daerah.

Berdasarkan pemasalahan yang ada, terdapat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yaitu pengembangan usaha ekonomi kreatif dn didukung arah kebijakan meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang kreatif dan berdikari dalam upaya meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif. Strategi dan rah kebijakan ini mendukung pencapaian misi keenam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatof, Mandiri dan Berprestasi.

9. Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah

Kegiatan pembangunan tidak lepas dari upaya partisipasi yang dilakukan dari seluruh elemen yang ada baik pemerintah, swasta serta masyarakat. Salah satu komponen yang harus berpartisipasi dalam pembangunan adalah partisipasi pemuda. Keberhasilan dalam kegiatan pembangunan suatu daerah sangat tergantung dari tingkat partisipasi pemuda yang ada pada wilayah tersebut. Peran pemuda dalam pembangunan memiliki peran yang strategis sehingga perlu adanya pengembangan potensi dan perannya melalui pemberdayaan, pelatihan, dan lainnya. Dalam upaya pembangunan kualitas tenaga kerja yang unggul dan kompetitif masih terdapat permasalahan yaitu masih

rendahnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif, dikarenakan masih belum optimalmya pengembangan kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yang dilakukan, yaitu pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah dengan arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dalam upaya meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi keenam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

10. Optimalisasi pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender merupakan merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan di samping pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki – laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Dalam mendukung pengarusutamaan gender, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku masih terdapat permasalahan, yaitu masih minimnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memiliki strategi yaitu optimalisasi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul pada masyarakat wilayah Maluku.

Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender ini didukung dengan arah kebijakan peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan

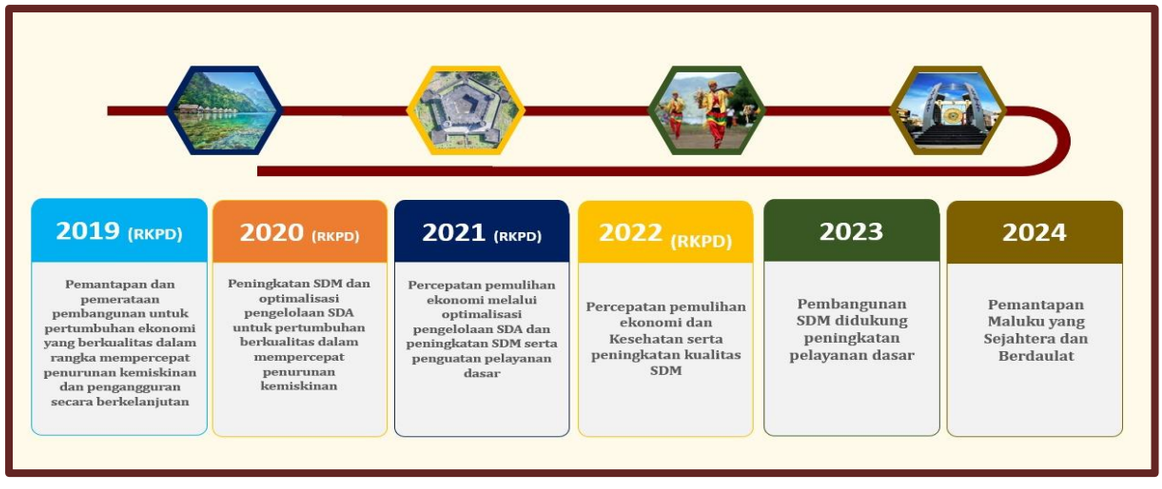
pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dalam upaya peningkatan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif. Strategi dan arah kebijakan ini mendukung pencapaian misi ke enam Kepala Daerah Provinsi Maluku yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Provinsi Maluku setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar VI.1.
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024



RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 telah dilaksanakan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 (tahun berjalan), maka strategi dan arah kebijakan diperbaiki untuk meningkatkan efektifitasnya dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD. Penjabaran tema/agenda pembangunan dalam Perubahan Provinsi Maluku Tahun 2021-2024 sesuai gambar diatas adalah sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan Tahun I (2020)

Kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2020 tertuang dalam RKPD Tahun 2020 dengan tema "**Peningkatan SDM dan Optimalisasi Pengelolaan SDA Untuk Pertumbuhan Berkualitas dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan".**

Berdasarkan pada tema pembangunan yang telah ditentukan, maka dapat disusun prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas kebijakan nasional terkait pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, serta stabilitas pertahanan dan keamanan. Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020 yaitu :

a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pegangguran;
b. Revitalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik;
c. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau;
d. Optialisasi Pengelolaan SDA, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industru Pengolahan Secara Berkelanjutan;
e. Meningkatkan Infrstruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata;
f. Peningkatan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis, dan Berbudaya yang Mendukung Aktivitas Ekonomi, Investasi dan Pariwisata; dan
g. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM yang Unggul.

2. Agenda Pembangunan Tahun II (2021)

Kebijakan pembangunan Tahun 2021 Provinsi Maluku tertuang dalam RKPD Provinsi Maluku Tahun 2021 dengan tema **"Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Peningkatan SDM serta Penguatan Pelayanan Dasar".**

Berdasarkan pada tema pembangunan yang telah ditentukan, maka disusun prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan

pembangunan nasional terkait percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Prioritas pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2021 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 yaitu :

a. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik;
c. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan;
e. Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas;
f. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata; dan
g. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia Maluku yang unggul.

3. Agenda Pembangunan Tahun III (2022)

Tahun 2022 merupakan agenda pembangunan Provinsi Maluku dengan tema **"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas SDM".** Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak perumbuhan ekonomi, karena infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta terwujudnya stabilitas perekonomian.

Arah kebijakan percepatan pemulihan infrastruktur diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat vital dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam menyusun kebijakan – kebijakan pembangunan, perlu disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19 untuk memperkuat perekonomian.

4. Agenda Pembangunan Tahun IV (2023)

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari agenda pembangunan Provinsi Maluku dengan tema **"Pembangunan SDM Didukung Peningkatan Pelayanan Dasar".** Peningkatan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Maluku. Pengembangan sumber daya manusia didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat.

Agenda pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan didukung kemudahan dalam akses pelayanan dasar diharapkan dapat membantu masyarakat Maluku dalam mencapai sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing.

5. Agenda Pembangunan Tahun V (2024)

Agenda pembangunan pada tahun 2024 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir Perubahan RPJMD periode 2019-2024. Pada tahun 2024 ini di harapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Agenda pembangunan pada tahun 2024 menitikberatkan pada tema **"Pemantapan Maluku yang Sejahtera dan Berdaulat".** Berdasarkan pada tema tersebut, maka fokus pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah pembangunan di segala bidang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan perekonomian, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 menjadi tahun terakhir dalam periode pembangunan 2019 – 2024, sehingga diharapkan pembangunan Provinsi Maluku mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku.

Guna mendukung pencapaian kebijakan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan masing-masing tema adalah sebagai berikut,

Tabel VI.2
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan
Perubahan RPJMD Provinsi Maluku 2022-2024

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
Visi : "Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"				**2022**	**2023**	**2024**
Misi 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani						
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance	Peningkatan kapasitas dan manajemen pemerintah daerah			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT			
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah		Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah			
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau						
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing					
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan menengah yang terjangkau			
			Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan non formal			
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata		Peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (Tenaga Kesehatan) Maluku yang unggul.			
			Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau			
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan						
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan					
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan	Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan			

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
Visi : "Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"				**2022**	**2023**	**2024**
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan			
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat					
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat			
			Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)			
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Ketersediaan pangan daerah			
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok		Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat			
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas		Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM dan penciptaan lapangan kerja			
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan					
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan			
			Penguatan mitigasi risiko bencana daerah			
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau						
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan					
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas	Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri			
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur		Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah			
Misi 5 : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata						
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata					
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa			

Visi/ Misi	Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
Visi : "Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan"				**2022**	**2023**	**2024**
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah		Optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi			
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah		Peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata			
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi						
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif					
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda			
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga			
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan			

Perubahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen RPJMD sebelumnya dan memerhatikan kebijakan Nasional. Dalam proses perubahan strategi atau prioritas pembangunan dan kebijakan dibuat lebih menonjolkan fokus-fokus pembangunan yang akan dilakukan di sisa tahun pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku. Berikut strategi dan arah kebijakan pada agenda pembangunan RPJMD Provinsi Maluku sebelum dan sesudah perubahan dalam tabel sanding,

Tabel. VI. 3

Tabel Sanding Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Murni dan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku

RPJMD MURNI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani			**Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani**		
	Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, pengelolaan aset yang profesional; peningkatan kinerja kelembagaan; Peningkatan kualitas reformasi birokrasi; peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi berbasis teknologi informasi; peningkatan kompetensi aparatur.	Revitalisasi tata kelola pemerintahan Revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik		Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance	Peningkatan kapasitas dan manajemen pemerintah daerah

RPJMD MURNI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan koordinasi pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota; peningkatan kerjasama pembangunan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan layanan publik yang berkualitas			Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan layanan publik yang berkualitas			Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau			**Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau**		
	Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan; peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; bantuan penyelenggaraan pendidikan yang murah bagi siswa miskin; meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau		Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan menengah yang terjangkau
					Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan non formal
	Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan	Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan			Peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (Tenaga

RPJMD MURNI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	jumlah dan kualitas dokter serta tenaga kesehatan lainnya; peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan; bantuan penyelenggaraan layanan kesehatan yang murah dan terjangkau.	kesehatan yang merata dan terjangkau			Kesehatan) Maluku yang unggul.
					Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			**Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**		
	Pengembangan industri berbahan baku sumber daya alam; pengembangan industri skala rumah tangga; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; bantuan sarana pendukung industri; akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha; pengawasan dan fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan		Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan	Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan
		Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan			

RPJMD MURNI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan perkebunan; peningkatan sdm penyuluh, sarana prasarana, pemberdayaan petani; perlindungan terhadap plasma nutfah Maluku	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan			Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
	Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi; stabilisasi harga pangan; peningkatan cadangan pangan daerah; diversifikasi pangan lokal, peningkatan industri pangan olahan; penyediaan lahan pangan berkelanjutan			Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat
					Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
					Ketersediaan pangan daerah
					Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
					Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM dan penciptaan lapangan kerja
	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta pengurangan resiko bencana; perbaikan kualitas lingkungan; peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap			Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan
					Penguatan mitigasi risiko bencana daerah

RPJMD MURNI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kelestarian lingkungan hidup dan resiko bencana				
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau			**Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau**		
	Revitalisasi model pembangunan berbasis gugus pulau; implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gugus pulau secara terintegrasi; penguatan kelembagaan implementasi gugus pulau	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata		Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas	Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri
	Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana prasarana wilayah; meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap infrastruktur dasar; meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur	Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas			Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah

RPJMD MURNI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata			**Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata**		
	Aktualisasi nilai budaya lokal dan keragaman budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfataan serta pembinaan budaya	Peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendukung aktifitas ekonomi dan investasi serta pariwisata		Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa
	Penguatan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda; memperkuat koordinasi dan kerjasama Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI				
	Mendorong kemudahan investasi melalui integrasi layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta promosi investasi	Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata			Optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi
	Pengembangan objek destinasi pariwisata; promosi pariwisata; penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia pariwisata ; peningkatan ekonomi kreatif; Percepatan				Peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata

RPJMD MURNI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Banda				
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi			**Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi**		
	Peningkatan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan; penjaringan dan pembinaan olahraga sejak usia dini; penataan kelembagaan olahraga daerah; peningkatan kapasitas sdm olahraga; penyediaan sarana dan prasarana olahraga prestasi	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia Maluku yang unggul		Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga
	Penyelenggaraan pendidikan vokasi/diklat/ bimtek yang bermutu dan tersertifikasi berbasis sektor unggulan daerah	Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia Maluku yang unggul secara merata		Peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata	Meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda

RPJMD MURNI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, serta perlindungan bagi kelompok rentan	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia Maluku yang unggul secara merata		Optimalisasi pengarusutamaan gender	Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah Provinsi Maluku disusun dengan berdasarkan pada program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019–2024 dan penjabaran dari tujuan dan sasaran pada masing–masing misi. Berikut merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2019–2024 :

Tabel VI. 4
Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024

No.	PROGRAM UNGGULAN	URAIAN PROGRAM	RENCANA AKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
1.	MALUKU BAKU DAPA MAJU BERSAMA	Program ini bertujuan membangun sinergitas para pemangku kepentingan baik bupati/walikota, TNI/POLRI, para tokoh masyarakat bersama pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dan mendukung pembangunan daerah melalui pertemuan koordinasi, kunjungan masyarakat baik informal maupun secara formal. Kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota difokuskan pada kecamatan/desa yang inovatif/kreatif/berprestasi dan yang mampu menyelenggarakan praktik-praktik cerdas yang dapat menjadi contoh buat pembangunan daerah lainnya.	Rapat koordinasi berkala Gubernur dan Wakil Gubernur dengan para Bupati/Walikota	Biro Pemerintahan
			Pertemuan berkala dengan para pemangku kepentingan melalui *coffee morning*	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2.	MALUKU DIGITAL	Dalam rangka menjalani era globalisasi yang berbasis teknologi informasi, maka implementasi e government yang terintegrasi, termasuk layanan publik, infrastruktur maupun ekosistem digital sudah harus dipersiapkan terlebih dalam rangka era industri 4.0	Layanan e goverment secara terintegrasi (administasi, SIMPEG, e planning, e budgeting, e aparatur),	Dinas Kominfo, Biro Organisasi, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, UMKM berbasis teknologi informasi	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	PROGRAM UNGGULAN	URAIAN PROGRAM	RENCANA AKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
3.	MALUKU DAMAI	Menjadikan Maluku sebagai Pusat Pembelajaran Perdamaian. yang telah berhasil '*recovery*" dari konflik sosial dan untuk memperkokoh eksistensi Maluku sebagai Provinsi Damai.	Pemberdayaan mitra perdamaian berbasis agama dan budaya lokal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Biro Kesekahteraan Rakyat
4.	MALUKU SEHAT & CERDAS	Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan untuk menyiapkan generasi Maluku yang sehat dan cerdas. Pengembangan kapasitas masyarakat.	Kartu Maluku Sehat	Dinas Kesehatan
			Kartu Maluku Pintar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Negeri Berbahasa Inggris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Beasiswa untuk pelajar miskin	Biro Kesejahteraan Rakyat
5.	KALESANG MALUKU	Upaya menjaga dan menyelamatkan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim	Gerakan Daerah Penyelamatan Air dan Lingkungan	Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Non Pemerintah dan Masyarakat
			Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tabaos Maluku Bebas Sampah	Pemerintah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Non Pemerintah dan Masyarakat
			Keluarga Tanggap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan ekonomi lokal melalui penciptaan gerakan ekonomi kreatif, peningkatan nilai tambah produk lokal dan	Revitalisasi BUMD	Biro Perekonomian Daerah
			Akses Permodalan UMKM	Biro Perekonomian Daerah

No.	PROGRAM UNGGULAN	URAIAN PROGRAM	RENCANA AKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
6.	MALUKU SEJAHTERA	membangun jaringan distribusi dan pemasaran serta pengelolaan sumber daya alam strategis lainnya dengan didukung oleh : ▪ pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang termasuk di dalamnya mendirikan BUMD baru dengan bidang usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, energi, jasa penunjang serta pertambangan mineral ▪ Pengembangan jaringan transportasi terintegrasi dan infrastruktur pendukung lainnya	Satu Desa Satu Produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Gerakan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal wilayah	Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, Bappeda
			Revitalisasi Tanaman Rempah (pala dan cengkih)	Dinas Pertanian
			Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Sumber Daya Alam	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindag
			Tata Niaga Produk Pertanian dan Perikanan	Dinas Perindag, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, BPMD PTSP
			Pengembangan Trans Maluku	Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan
			Listrik Untuk Semua	Dinas ESDM
7.	BUDAYA ANAK NEGERI	Merupakan salah satu upaya meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan. Program ini bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Maluku yang diharapkan dapat memupuk, memelihara dan meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan daerah.	Festival Budaya Tahunan	Dinas Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Museum dan Nilai Kesejarahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pekan Pemuda Kreatif	Dinas Pemuda Olahraga
			Pekan Olah Raga Unggulan Pemuda	Dinas Pemuda Olahraga

No.	PROGRAM UNGGULAN	URAIAN PROGRAM	RENCANA AKSI	OPD PENANGGUNG JAWAB
8.	PEMUDA UNGGUL	Merupakan upaya mengedepankan peran pemuda sebagai agen perubahan. Menyiapkan dan membentuk pemuda-pemuda unggul berkarakter yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan.	Program Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan SMK Kemaritiman dan Pertambangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu	Biro Kesra

Tabel VI.5
Program Prioritas Gugus Pulau

No.	Wilayah Pengembangan	Gugus Pulau	Wilayah Administratif	Arah Pengembangan	Indikasi Program
1	Pulau Buru	I	Kab. Buru dan Buru Selatan	Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan	▪ KEK Peternakan di Buru Selatan ▪ Pembangunan Bendungan Waeapo (PSN)
2	Ambon dan Pulau – Pulau Lease	VII	Kota Ambon dan Kab. Malteng (Kec. Saparua, Saparua Timur, Haruku, Nusalaut, Leihitu dan Leihitu Barat, Salahutu)	Jasa, Pariwisata	▪ Festival Budaya ▪ Revitalisasi Pelabuhan Yos Sudarso (terintegrasi dengan pusat bisnis) • Pembangunan Ambon New Port
3	Pulau Seram	II, III, IV,V	Kab. Malteng, Kab. SBB, Kab. SBT	Perkebunan, Tanaman Pangan	▪ Kota Terpadu Mandiri Kobi ▪ Kawasan Industri Terpadu Seram Utara ▪ Pengembangan Industri Hasil Perkebunan ▪ Festival Budaya ▪ Pengembangan Bandara Kufar ▪ Pembangunan Bandara Gorom
4	Kepulauan Banda	VI	Kab. Malteng (Kec. Banda)	Pariwisata	▪ KEK Pariwisata Banda ▪ Pengembangan Bandara Banda ▪ Festival Budaya
5	Kepulauan Kei	VIII	Kab. Maluku Tenggara dan Kota Tual	Perikanan dan Pariwisata Pertanian Lahan Kering	▪ Pengembangan Pariwisata Kepulauan Kei ▪ Pengembangan Perikanan diTual ▪ Pengembangan infrastruktur di Pulau Kei Besar
6	Kepulauan Aru	IX	Kab. Kep. Aru	Perikanan	▪ Pengembangan Perikanan ▪ Pengembangan Bandara Rar Guwamar
7	Kepulauan Tanimbar	X	Kab. Kep. Tanimbar	Perikanan, Pertambangan (Migas)	▪ Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela (PSN) ▪ Pengembangan SKPT Saumlaki ▪ Pengembangan Bandara Mathilda Batayeri

No.	Wilayah Pengembangan	Gugus Pulau	Wilayah Administratif	Arah Pengembangan	Indikasi Program
8	Kepulauan Maluku Barat Daya	XI, XII	Kab. MBD	Perikanan, Peternakan	▪ Pengembangan SKPT Tiakur ▪ Pengembangan Plasma Nutfah Peternakan ▪ Pengembangan Bandara Jos Orno Insula ▪ Pembangunan Bandara Tepa

6.4 ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

6.4.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah berfungsi untuk menetapkan fokus pengembangan secara kewilayahan sesuai dengan karakteristik, potensi kewilayahan, ketersediaan daya dukung dan daya tampung pada fungsi kawasan yang mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan pembentukan gugus pulau, kebijakan pengembangan wilayah akan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Provinsi Maluku. Strategi kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Maluku terdiri dari:

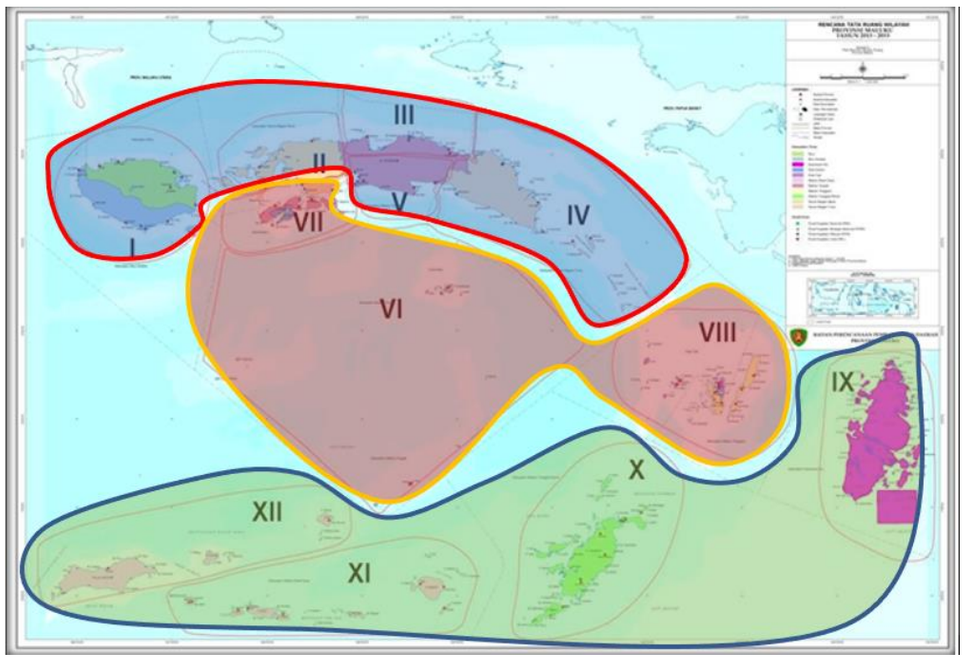
1. Pembagian 8 (delapan) Wilayah Pengembangan meliputi: Pulau Buru, Ambon dan Pulau-pulau Lease, Pulau Seram, Kepulauan Banda, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Maluku Barat Daya;
2. Penentuan keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan berdasarkan gugus pulau yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pengembangan wilayah sehingga kesenjangan pembangunan bisa dikurangi. Penentuan keterkaitan fungsional antar WP ini meliputi tiga bagian:
    a. Kawasan yang terletak di gugus pulau I, II, III, IV, dan V mencakup WP Pulau Buru dan WP Pulau Seram menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan budidaya dengan tujuan ekonomis seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
    b. Kawasan yang terletak di gugus pulau VI, VII, dan VIII mencakup WP Kepulauan banda, WP Ambon dan Pulau-pulau Lease, dan WP Kepulauan Kei menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata, kebudayaan, dan melibatkan pengembangan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kerentanan terhadap

resiko bencana alam dan non alam, serta sedapat mungkin menghindari alih fungsi lahan lindung dan pertanian;

c. Kawasan yang terletak di gugus pulau IX, X, XI, dan XII mencakup WP Kepulauan Aru, WP Kepulauan Tanimbar, dan WP Kepulauan Maluku Barat Daya menjadi kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan budidaya perikanan, peternakan, dan pertambangan. Kegiatan-kegiatan ini merupakan prioritas pembangunan Provinsi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa harus mengorbankan fungsi-fungsi lingkungan.

Keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan ini dapat dilihat di gambar berikut:

Gambar VI.2
Peta Keterkaitan Antar Wilayah Pengembangan dalam Gugus Pulau



Sumber: RTRW Provinsi Maluku setelah diolah, 2021

6.4.2 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan kepada berbagai faktor dan merupakan integrasi pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perumusan ini dibuat mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan dan arah pengembangan di setiap Wilayah Pengembangan,

dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033, RPJPD Provinsi Maluku, yang diselaraskan dengan program prioritas dan program pembangunan daerah serta program unggulan pimpinan daerah. Alur kerangka pikir perumusan arah kebijakan kewilayahan dirumuskan sebagaimana dalam gambar berikut ini:

Gambar VI.3
Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan Kewilayahan



Sumber: Hasil analisis, 2021

Dengan demikian strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2019-2024) mendatang secara umum diarahkan untuk mendukung:

1. Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di setiap Gugus Pulau;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau;
4. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana;
5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah melalui kawasan budidaya; dan
6. Optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah.

Berikut ini adalah arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan fokus wilayah pembangunan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian gugus pulau,

Tabel VI.6

Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Wilayah Pembangunan Kabupaten/Kota

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*	Peningkatan kapasitas dan manajemen pemerintah daerah	12 Gugus pulau
	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT	12 Gugus pulau
	Peningkatan akuntabilitas, pengawasan dan kualitas tata kelola keuangan daerah	12 Gugus pulau
Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang terjangkau	Gugus II, III, IV, V, dan IX.
	Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau	12 Gugus pulau
Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan	Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan	Gugus II, III, IV, V
	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, khususnya komoditas perikanan tangkap dan rempah-rempah	Gugus I, VII, IX, X, XI, XII
Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu	12 Gugus pulau (Khususnya Gugus IX, X, XI)
	Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	12 Gugus pulau
	Perwujudan ketersediaan pangan pokok daerah	12 Gugus pulau (Khususnya Gugus III & IV)
	Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	12 Gugus pulau
	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM usia kerja	12 Gugus pulau (Khususnya Gugus I, VI, VII, VIII)

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS WILAYAH
Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan menghadapi bencana	Peningkatan pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan	12 Gugus pulau
	Penguatan ketangguhan bencana daerah	12 Gugus pulau
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas	Akselerasi pengembangan pembangunan desa yang mandiri	12 Gugus pulau
	Penguatan konektivitas antar wilayah	12 Gugus pulau
Peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan budaya daerah	Penguatan kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa	12 Gugus pulau
	Optimalisasi kemudahan dan peluang berinvestasi	Gugus II, III, IV, VI, VIII, IX, X
	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata	Gugus VI, VII, VIII,
Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda	12 Gugus pulau
Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kepemudaan dan olahraga	12 Gugus pulau
Optimalisasi pengarusutamaan gender	Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan	12 Gugus pulau

Sumber: Diolah dari RTRW, 2021

6.4.3 Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW bertujuan untuk mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat. Dalam dokumen RTRW, dijelaskaan secara rinci mengenai pembangunan berdasarkan zonasi di Provinsi Maluku selama 20 tahun ke depan yaitu dari 2013-2033. Kawasan strategis Provinsi di Provinsi Maluku meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta lingkungan. Jenis kawasan strategis Provinsi di Provinsi Maluku yaitu :

1. Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, yang meliputi :
   a. Kepulauan Aru;
   b. Kepulauan Tanimbar;
   c. Kepulauan Babar;
   d. Kepulauan Leti – Moa – Lakor;
   e. Pulau Kisar;
   f. Pulau Wetar;
   g. Pulau Lirang
2. Kawasan strategi dari Aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang meliputi :
   a. Kawasan Seram Barat (GP 2);
   b. Kawasan Seram Selatan (GP 5);
   c. Kawasan Seram Timur (GP 4);
   d. Kawasan Seram Utara (GP 3);
   e. Kawasan Pulau Buru (GP 1);
   f. Kota Ambon (GP 7);
   g. Kepulauan Tanimbar (GP 10);
   h. Kepulauan Kei (GP 8);
   i. Kawasan Bula (GP 4);
   j. Kawasan Benjina (GP 9);
   k. Zona Industri Seram Selatan (GP 5);
   l. Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang.

3. Kawasan Strategis dari Aspek Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi seluruh kawasan darat dan laut kebupaten/kota di Provinsi Maluku, terutama di :
   a. Teluk Ambon (GP 7);
   b. Kawasan Bula (GP 4);
   c. Kawasan Buru (GP 1);

Tabel VI.7

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi

NO.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1.	Kepulauan Aru; Kepulauan Tanimbar; Kepulauan Babar; Kepulauan Leti – Moa – Lakor; Pulau Kisar; Pulau Wetar; dan Pulau Lirang	Pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Provinsi.	Mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman.
2	Kawasan Seram Barat (GP 2); Kawasan Seram Selatan (GP 5); Kawasan Seram Timur (GP 4); Kawasan Seram Utara (GP 3); Kawasan Pulau Buru (GP 1); Kota Ambon (GP 7); Kepulauan Tanimbar (GP 10); Kepulauan Kei (GP 8); Kawasan Bula (GP 4); Kawasan Benjina (GP 9); Zona Industri Seram Selatan (GP 5); dan Kawasan Ambon – Natsepa – Tulehu – Liang.	Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA, SDM, dan sumber daya lainnya di kawasan kepulauan yang mencakup wilayah darat dan laut (perairan).	Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan.

NO.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
3	Teluk Ambon (GP 7); Kawasan Bula (GP 4); dan Kawasan Buru (GP 1);	Peningkatan fungsi lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sekitarnya.	Mengendalikan kegiatan budi daya pada kawasan strategis yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan serta daya dukung lingkungan, termasuk pengendalian alih fungsi kawasan lindung.

Arah kebijakan pembangunan yang melingkupi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku dirumuskan untuk mendukung capaian lima indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB Perkapita. Proyeksi target dukungan dari Kabupaten dan kota di Provinsi Maluku untuk periode 2019-2024 akan ditampilkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel VI.8

Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024

Kab/ Kota	IPM				
	Target				
	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	63,14	63,41	63,68	63,95	**63,95**
Kabupaten Maluku Tenggara	66,49	66,78	67,06	67,35	**67,35**
Kabupaten Maluku Tengah	71,57	71,87	72,18	72,48	**72,48**
Kabupaten Buru	69,26	69,55	69,85	70,14	**70,14**
Kabupaten Kepulauan Aru	63,99	64,27	64,54	64,81	**64,81**
Kabupaten Seram Bagian Barat	65,91	66,19	66,48	66,76	**66,76**
Kabupaten Seram Bagian Timur	64,41	64,68	64,96	65,23	**65,23**
Kabupaten Maluku Barat Daya	62,18	62,44	62,71	62,97	**62,97**
Kabupaten Buru Selatan	64,98	65,26	65,53	65,81	**65,81**
Kota Ambon	80,74	80,64	80,53	80,43	**80,43**
Kota Tual	68,26	68,55	68,85	69,14	**69,14**
Provinsi Maluku	69,80	70,10	70,39	70,69	**70,69**

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2021

Tabel VI.9

Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024

Kab/ Kota	Persentase Penduduk Miskin				
	Target				
	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	24,76	24,07	23,58	23,08	**23,08**
Kabupaten Maluku Tenggara	18,80	18,15	17,66	17,16	**17,16**
Kabupaten Maluku Tengah	17,84	17,35	17,00	16,64	**16,64**
Kabupaten Buru	17,23	16,65	16,22	15,78	**15,78**
Kabupaten Kepulauan Aru	24,71	23,94	23,37	22,80	**22,80**
Kabupaten Seram Bagian Barat	20,10	19,36	18,79	18,22	**18,22**
Kabupaten Seram Bagian Timur	18,68	17,85	17,20	16,56	**16,56**
Kabupaten Maluku Barat Daya	26,33	25,63	25,14	24,63	**24,63**
Kabupaten Buru Selatan	13,04	12,46	11,99	11,53	**11,53**
Kota Ambon	6,01	5,91	5,85	5,79	**5,79**
Kota Tual	18,67	17,70	16,91	16,14	**16,14**
Provinsi Maluku	**17,05**	**16,52**	**16,13**	**15,73**	**15,73**

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2021

Tabel VI.10

Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024

Kab/ Kota	Tingkat Pemgangguran Terbuka (TPT)				
	Target				
	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	4,02	3,81	3,60	3,44	**3,44**
Kabupaten Maluku Tenggara	4,50	4,52	4,62	4,52	**4,52**
Kabupaten Maluku Tengah	7,49	7,31	7,09	6,89	**6,89**
Kabupaten Buru	7,21	7,16	6,49	6,54	**6,54**
Kabupaten Kepulauan Aru	3,60	3,49	3,30	2,88	**2,88**
Kabupaten Seram Bagian Barat	5,30	5,01	4,74	4,54	**4,54**
Kabupaten Seram Bagian Timur	3,02	2,84	2,67	2,46	**2,46**
Kabupaten Maluku Barat Daya	3,55	3,62	3,69	3,99	**3,99**
Kabupaten Buru Selatan	2,15	1,96	1,92	1,88	**1,88**
Kota Ambon	12,04	11,02	10,27	9,95	**9,95**
Kota Tual	8,72	8,25	7,81	7,45	**7,45**
Provinsi Maluku	**7,04**	**6,45**	**6,12**	**6,05**	**6,05**

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2021

Tabel VI.11

Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024

Kab/ Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)				
	Target				
	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	5,08	6,30	6,65	7,18	**7,18**
Kabupaten Maluku Tenggara	4,97	6,14	6,58	7,02	**7,02**
Kabupaten Maluku Tengah	4,93	6,11	6,54	7,02	**7,02**
Kabupaten Buru	5,06	6,42	6,81	7,20	**7,20**
Kabupaten Kepulauan Aru	4,94	6,14	6,54	6,94	**6,94**
Kabupaten Seram Bagian Barat	4,95	6,04	6,50	6,97	**6,97**
Kabupaten Seram Bagian Timur	2,08	2,56	2,72	2,88	**2,88**
Kabupaten Maluku Barat Daya	5,13	6,27	6,84	7,41	**7,41**
Kabupaten Buru Selatan	5,33	6,33	7,00	7,33	**7,33**
Kota Ambon	4,79	5,92	6,33	6,78	**6,78**
Kota Tual	4,99	6,14	6,53	7,10	**7,10**
Provinsi Maluku	**4,75**	**5,85**	**6,28**	**6,71**	**6,71**

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2021

Tabel VI. 12

Penetapan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota guna Mendukung Pencapaian target Provinsi Maluku 2021-2024

Kab/ Kota	PDRB Perkapita				
	Target				
	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
Kabupaten Kepulauan Tanimbar	24,43	24,97	25,50	26,03	**26,03**
Kabupaten Maluku Tenggara	33,27	34,01	34,73	35,45	**35,45**
Kabupaten Maluku Tengah	23,82	24,34	24,86	25,38	**25,38**
Kabupaten Buru	16,78	17,15	17,52	17,88	**17,88**
Kabupaten Kepulauan Aru	36,85	37,66	38,46	39,26	**39,26**
Kabupaten Seram Bagian Barat	18,01	18,41	18,80	19,19	**19,19**
Kabupaten Seram Bagian Timur	25,64	26,20	26,76	27,31	**27,31**
Kabupaten Maluku Barat Daya	23,26	23,78	24,28	24,79	**24,79**
Kabupaten Buru Selatan	22,59	23,09	23,58	24,07	**24,07**
Kota Ambon	30,34	31,01	31,67	32,32	**32,32**
Kota Tual	32,81	33,54	34,25	34,96	**34,96**
Provinsi Maluku	25,81	26,38	26,94	27,50	**27,50**

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Maluku, 2021

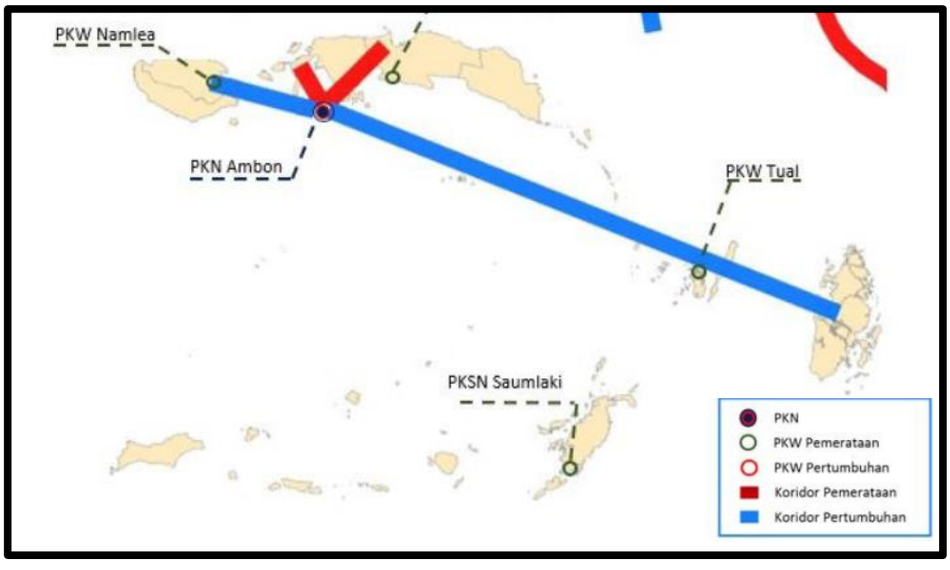
Sementara itu untuk dapat melakukan pengendalian atas pemanfaatan ruang dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan pengendalian pemanfaatan guna terwujudnya tertib ruang dalam pembangunan yang selaras dengan RTRW diperlukan beberapa hal berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban berdasarkan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
2. Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berada dalam kewenangan kabupaten/kota harus berpedoman pada RTRW Provinsi;
4. Pemberian izin pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota yang berdampak besar dan/atau berkaitan dengan kepentingan nasional dan/atau provinsi, harus diberikan melalui koordinasi dengan gubernur.

6.4.4 Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Maluku

Pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan potensi wilayah. Pengembangan wilayah yang dilaksanakan mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaaan terhadap resiko bencana serta difokuskan pada dua koridor utama yaitu koridor pemerataan dan koridor pertumbuhan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini,

Gambar VI.4
Peta Pengembangan Kawasan Nasional di Wilayah Provinsi Maluku



6.4.4.1. Prioritas Berdasarkan Sektor Unggulan dan Pusat Pertumbuhan Utama

Secara umum, pengembangan wilayah Maluku terfokus pada pengembangan sektor unggulan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama, serta memantapkan perannya sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Wilayah-wilayah pengembangan ini ditandai dengan penetapan pusat-pusat kegiatan, yaitu pusat kegiatan wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan komoditas unggulan yang meliputi pengembangan tanaman perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan antara lain industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain- lain, serta transportasi dan pergudangan.
2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), di antaranya yang telah ditetapkan adalah:
    a. Pengembangan Kota Pelabuhan di Ambon;
    b. Pengembangan PKSN Saumlaki termasuk ekonomi kawasan sekitarnya;
    c. Pengembangan kawasan pedesaan;
    d. Pengembangan kawasan transmigrasi;
    e. Pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan; dan
    f. Pengentasan daerah tertinggal;

Berikut ini adalah penjabaran mengenai matrik pembangunan RPJMN dalam hal pengembangan wilayah berdasarkan proyek prioritas strategis nasional di Provinsi Maluku,

Tabel VI. 13
Matrik Pembangunan RPJMN untuk Pengembangan Wilayah di Provinsi Maluku

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Provinsi Maluku				
KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun			
Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi	Provinsi Maluku, Kab. Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru Selatan, Kota Ambon	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi	Provinsi Maluku, Kepuluan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kab. Maluku Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Makuku Barat Daya	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi		Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi		Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara	Kementerian ESDM
			Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas	Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per provinsi	Provinsi Maluku, a.l: Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian Timur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kementerian Kelautan dan Perikanan

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
		Provinsi Maluku	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase PDRB kawasan perkotaan terhadap PDRB Pulau Maluku			
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi Maluku)		Kota Ambon, Kota Tual	1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 3. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; 4. Program Pengembangan Perumahan; 5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	. Kemenhub; . Pemda,; . Badan Usaha; . BUMN; . Kemennaker; . Kemen PUPR; . KPBU, APBD,
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri			
	Jumlah Daerah Tertinggal (kabupaten)	Prov. Maluku: Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya		
	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN			
	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	Kab. Maluku Tengah	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	1.Penduduk miskin di daerah tertinggal 2.Rata-rata IPM di daerah tertinggal	Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya	1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; 3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; 4. Program Penyelenggaraan Jalan; 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 6. Program Pengembangan Daerah Tertinggal; 7. Program Pengembangan Daerah Tertentu; 8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 9. Program Penanganan Fakir Miskin; 10. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaa Mikro; 11. Program Pengelolaan Ruang Laut.	1. Kementerian Perhubungan; 2. Kementerian PUPR; 3. Kementerian Desa PDTT; 4. Kementerian Sosial; 5. Kementerian KUKM; 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Pemda
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Tual	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Kementerian Pertanian 2. Kemendesa PDTT 3. Kementerian

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
			3. Program Ketenagalistrikan	ESDM;
Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)			
	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)			
	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat			
	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas			
	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus Berbasis Elektronik			
	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik			
	Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah			
	Persentase capaian SPM di daerah (%)			
	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien			
	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik			

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Maluku	(1) Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik		1. Program Bina Administrasi Kewailayahan; 2. Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial; 3. Program Bina Otonomi Daerah;	1. Kemendagri; 2. BIG
	(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama daerah	Pusat	1. Program Bina Administrasi Kewilayahan; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kemendagri
	(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%)	Pusat		
	(4) Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	Pusat	1. Program Penelitian dan Pengembangan; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kemendagri
	(5) Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat	Pusat	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	(6) Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas	Pusat		
	(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien			
	(8) Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan.		. Program Bina Otonomi Daerah; . Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
Peningkatan Pelayanan Pertanahan				
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha)	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha)	Maluku	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	Maluku	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang	Maluku	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Kementerian ATR/BPN

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD harus berpedoman kepad RPJMN, maka pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional perlu dijabarkan ke seluruh tingkat pemerintahan secara berjenjang berdasarkan pembagian urusan pemerintah antara RPJMD-RKPD Provinsi dan RPJMN-RKP, serta RPJMD-RKPD Provinsi dengan RPJMN-RKP. Oleh karena itu, maka penyelarasan RPJMD Provinsi Maluku terhadap RPJMN perlu untuk dilakukan. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan terjadinya sinergitas antara program prioritas pemerintah daerah dengan program prioritas nasional. Penyelarasan ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perumusan program prioritas daerah dan penetapan indikator pembangunan di provinsi. Berikut adalah tabel penyelarasan dukungan program prioritas pembangunan Provinsi terhadap Program Prioritas Nasional.

Tabel VI.14
Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi terhadap Program Prioritas Nasional

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku							
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PN	**MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS**							**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							
	PP : Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Dengan Satuan Rumah Tangga)	0,0068	0,0072	0,01	0,008	0,0083

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,0	68,0	68,8	69,2	70,3							
PP	**PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi**	Produktivitas air (water productivity) (US$/m^3)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4							
								PANGAN						
PP	**PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan**	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Kemmandirian Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100
		Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0							
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan	100	100	100	100	100

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									(Dengan Satuan:%)					
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry ExperienceScale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100
PP	**PP : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan**	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9							
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	≤80							
								KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
pp	**PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi**	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Dengan Satuan:satuan)	760	696	518	518	518
		Kontribusi UMKM terhadap PDB(Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terciptanya UMKM yang unggul dan berdaya saing (Dengan Satuan:Satuan)	60	70	80	90	100

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel (Dengan Satuan:Satuan)	40	50	60	70	80
pp	**PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi**	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1							
		Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8							
		Pertumbuhan PDB IndustriPengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1							
		Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5							
		Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689							
								PENANAMAN MODAL						

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan investasi (Dengan Satuan:Persen)	0	0	100	100	100
		Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0							
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5							
		Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7							
								PERINDUSTRIAN						
		Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:Orang)	35.719	35.719	35.719	0	0
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0							
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0							
								PERDAGANGAN						

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PP	**PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (Dengan Satuan:Pesen)	10	10	10	10	10
		Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0							
		Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0							
PP	**PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4							
		Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0							
		Peringkat Travel and Tourism Competitive	N.A	34-39	N.A	29-34	N.A							
PN	**MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**													
PP	**PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN**	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98							

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
								PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
		Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:Persentase)	0	2,9	0	2,87	2,84
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80							
								SOSIAL						
PP	**PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL**	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80		Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100
								KESEHATAN						
PP	**PP : Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 100.000 kelahiran hidup)	127	125	123	121	119

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:Per 1000 Kelahiran Hidup)	6	6	6	6	6
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000 kelahiran hidup)	4	4	4	4	4
								PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Dengan Satuan:Persen)	0	45,7	46	46,27	46,2
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Keluarga Berencana (Dengan Satuan:Persen)	60	65	70	75	80

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18							
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14		Prevalensi Balita Stunting (Dengan Satuan:Persen)	24	24	23	22	21
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7		Prevalensi Balita Gizi Kurang (Dengan Satuan:Persen)	8	7,5	7	6,5	6
		Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Dengan Satuan:Persen)	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Dengan Satuan:Persen)	70	75	80	85	87
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405							
		Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09							

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7		Presentase Merokok pada 10 - 18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	9.10	9.10	9	8.90	8.80
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8							
		Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1							
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100		Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	2	5	11
		Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100							
								PENDIDIKAN						
PP	**PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS**	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	299,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2							
		Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA		NA NA NA	NA NA NA		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Dengan Satuan:Persentase Angka Kelulusan)	100	100	100	100	100

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Angka partisipasi sekolah (Dengan Satuan:Persentase Angka Partisipasi Sekolah)	97,14	97,58	98,56	98,91	99,18
		Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	15,6	13,8	14	14,16		Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (Dengan Satuan:Rasio)	1:19	1:20	1:20	1:20	1:20
								PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
PP	**PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA**	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,9	71,7	73,49							
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun							
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) 9	91,21	91,3	91,3	91,3	91,39							
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24	73,5	73,7	74	74,18							
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,51	53,1	53,8	54,4	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (Dengan Satuan:%)	26,75	26,85	27,05	27,50	30

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (Dengan Satuan:%)	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35
								KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5 5	56,5	58,2	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Dengan Satuan:%)	60	70	80	90	100
PP	**PP : PENGENTASAN KEMISKINAN**	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40							
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6				50							
		Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)												
		Bidang tanah yang diredistribusi	750.000				7.750.000							

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				52.286.087							
								TENAGA KERJA						
PP	**PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING**	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	0,53	1,53	2,53	3,75	5
		Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University												
		a. Top 200	0	0	0	0	1							
		b. Top 300	1	1	1	1	2							
		c. Top 500	2	2	2	2	3							
		Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	6,30	8	8,2	8,5	8,7
PN	**REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**													
								UMUM						
PP	**PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK**							PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	JUMLAH PEMBINAAN SEPARATISME, RADIKALISME DAN TINDAK	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER								KRIMINALITAS (Dengan Satuan:%)					
								KEBUDAYAAN						
PP	**PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA**							PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	meningkatnya Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Jumlah Cagar Budaya)	64	65	65	68	70
								UMUM						
PP	**PP : MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN**	Indeks Kerukunan Umat Beragama						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	JUMLAH PEMBINAAN TERHADAP PAHAM KEAGAMAAN BERMASALAH	6	9	11	13	16

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL							SOSIAL, DAN BUDAYA	(Dengan Satuan:JUMLAH PEMBINAAN)					
PP	**PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER**							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat (Dengan Satuan:NIlai)	52.90	54	58	62	65
PN	**MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR**													
								PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
PP	**PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,4	94	94,6	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan	82,35	83,5	84,8	86	87	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		(atap, lantai, dinding) (%)												
		Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,9	58,2	59,6	60							
		Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4							
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)							
		Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0							
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)							
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15							
		Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5							
		Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1							
		Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229,16667	115942,7083	116142,7083	116342,7083	116342,7083							
								KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
		Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Menurunnya Indeks risiko bencana di daerah (Dengan Satuan:indeks)	160.35	160.35	160.25	160.15	160.05

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4	11,43251	11,4	11,43	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentasi Capaian Pengelolaan Sumber daya Air (Dengan Satuan:-)	0	0	0	0	0
								PERHUBUNGAN						
		Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentasi Angka Kecelakaan di Jalan Raya (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4629888213	13811000000	165732000000	1988784000000
								PUPR						
PP	**PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI**	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Kemantapan Jalan (Dengan Satuan:satuan)	0	0	0	0	0
								PERHUBUNGAN						
		Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentasi Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan, Presentasi Pelabuhan Laut yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis (Dengan Satuan:Dokemen)	0	10446190071	7725000000	8111250000	9733500000

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)												
		Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)												
PP	**PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)						PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Presentasi terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah (Dengan Satuan:Dokemen)	0	555948400	0	0	0
								ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
PP	**PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektifikasi (Dengan Satuan:%)	95	96	97	98	99
		Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	Persentase rumah tangga pengguna listrik (Dengan Satuan:RUmah Tangga)	350	365	375	390	400	
		Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07							
								KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PP	**PP : TRANSFORMASI DIGITAL**	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Pemenuhan Operasional perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100
		Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Dengan Satuan:persen)	83,33	83,33	83,33	100	100
		Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Peresentase pemanfaatan Jaringan TIK (Dengan Satuan:persen)	30	60	80	100	100
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	76,7							
PN	**MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM**													
								LINGKUNGAN HIDUP						

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PP	**PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Upaya)	3	3	3	3	3
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)	1	1	1	1	1
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5							
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	65	65,5	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah objek kelembagaan MHA dan kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku yang diakui keberadaannya	11	9	2	3	4

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									(Dengan Satuan:Objek)					
PP	**PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM**	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya dan Tertanggulangi nya Bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)	50	55	60	65	70
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1	1,15							
		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100
								ESDM						
PP	**PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON**	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	13	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Dengan Satuan:%)	0,0068	0,0072	0,0075	0,0079	0,0083

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57	58,3							
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4							
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2,3	2,5	2,6	2,9							
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7	7,3							
PN	**MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK**													
PP	**PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI**							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA	PERSENTASE LEMBAGA DEMOKRASI (Dengan Satuan:%)	68%	71%	74%	77%	80%

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
								N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
PP	**PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI**	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,1	95,3	95,5	96	95,7							
PP	**PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL**	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,7	0,73	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
PP	**PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA**	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	0	0
		PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85							
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70							

Kode	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi Maluku						
(PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PP	**PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,2	0,2							
		Global Terorism Index	4,44	4,39	4,34	4,3	4,24							
		Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menigkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100
		Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4							

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang akan dijabarkan dalam program untuk mewujudkan struktur ruang provinsi dan pola ruang provinsi sebagai yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel VI. 15
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (Implementasi Rencana) RTRW Provinsi Maluku
(Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Maluku) Tahun 2013-2033

PROGRAM UTAMA		PROGRAM		KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
									I						II	III	IV
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
I	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**	*	**Perwujudan Sistem Perkotaan Provinsi**														
				A	**Percepatan Pembangunan Kota-Kota Utama Perbatasan**												
				1	Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kota sebagai kota-kota perbatasan	APBN/APBD	Bappeda Prov, Kab	GP 9, 10, 11, 12							▬		
				B	**Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis otonomi daerah**												
				1	Pengembangan Kota Sentra Produksi Pertanian	APBN/APBD Prov dan APBD Kab.	Dinas PU, Distan Prov, Distan Kab, Bappeda	Namlea (1), Kairatu (2), Wahai (3), Bula (4)							▬		
				C	**Pengendalian perkembangan Kota-Kota Berbasis Mitigasi Bencana pada seluruh Kota/Pusat permukiman di tepi Pantai terutama di bagian Utara dan Selatan Provinsi Maluku**												
				1	Pengorganisasian perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan pada tingkat lintas Prov/Kab/Kota	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah										
				2	Penyusunan Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan resiko bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah										
				3	Pemantauan dan evaluasi peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup/sumber daya alam yang berwawasan resiko bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah										

PROGRAM UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
						I						II	III	IV
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
		4 Penetapan tata ruang dan tata guna lahan berbasis resiko bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah										
		5 Pengembangan program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah										
	* **Perwujudan Sistem Transportasi**													
		A **Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**												
		1 Pembangunan fasilitas pendukung pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan/BRT (Rambu, Marka, Shelter, JOP)	APBD	Pemda Prov, Kab./Kota & swasta	Kota Ambon									
		2 Pengembangan dan Optimasi Terminal												
		a. Tipe B	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Pemda, Swasta	Ambon, Masohi, Bula									
		b. Tipe C	APBD	Pemda, Swasta	Saumlaki, Ilwaki, Dobo, Werinama, Kairatu, Tual, Namlea, Wahai									
		B **Perwujudan Sistem Jaringan Penyeberangan pada Gugus Pulau yang tersedia**												
		1 Pelabuhan penyeberangan antar kabupaten dalam mendukung Trans Maluku			Namlea (P.Buru), Galala (P.Ambon),									
					Namlea (P.Buru) Waisala (SBB)									

PROGRAM UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
						I						II	III	IV
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
		Lintasan Segitiga Penyeberangan			P.Seram- P.Geser-P.Kei, Airnanang (Pantai Timur SBT)-Geser (P.Geser)									
					Kep.Kei-Kep.Aru-P.Yamdena									
					P.Yamdena - P.Wetar									
		2 Pelabuhan Penyeberangan dalam kabupaten			Poka-Galala (Ambon), Tulehu-Haruku-Wailey (Maluku Tengah), Hunimua-nalahiya-Amahai(Maluku Tengah), Saparua-Nalahia, Ambalau-Wamsisi, Wamsisi-Namrole,Namrole-Leksula, Ambalau-Galala									
		C **Perwujudan Tatanan Kepelabuhanan**												
		1 Unit penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III			Amahai, Geser, Leksula, Wonreli, Wahai, Waisarisa									
		2 Unit Penyelenggara Pelabuhan lainnya			Adeaut, Kroing, Serwaru, Bula, Tior, Kaimer, Toyando, Molu, Dawera, Lelang, Lakor, Upisera, Arwala, P.Kelapa, Lewa, Lerokis, Benjina, Bt.Goyang, Tutukembong, Ulima, Werinama, Kobisonta, Marsela, Serua, Nila, teon, Bebar, Wulur, Kataloka, Fogi dan Kairatu									

PROGRAM UTAMA		PROGRAM		KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
									I						II	III	IV
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
				D	Perwujudan Tatanan Bandar Udara												
				1	Pembangunan Lapangan Terbang Baru			Namniwel (Kab. P.Buru)									
								Pulau Moa (MBD)									
				2	Pembangunan Lapangan Terbang			Bula (SBT)									
				3	Rencana Pembangunan			Tepa (MBD)									
					Lapangan Terbang			Wetar (MBD)									
				4	Rencana Pembangunan Lapangan Terbang Khusus			Bula (SBT)									
				5	Perpanjangan Run Way Lapangan Terbang			Banda (Maluku Tengah)									
								Amahai (Maluku Tengah)									
								Wahai (Maluku Tengah)									
								Larat (MTB)									
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI MALUKU**																
		*	**Perwujudan Kawasan Lindung Provinsi**	**A**	**Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional dan Provinsi**												
				1	Suaka Alam	APBN	Balai Pengelolaan DAS Waehapu Batu Merah	Suaka Alam Kabupaten Maluku Tenggara									
				B	**Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional dan Provinsi**												
				1	Suaka Margasatwa	APBN	Balai KSDA Maluku	P.Kobror, P.Baun, P.Kassa, SM.Tanimbar, Gn.Api Kisar									

PROGRAM UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
						I						II	III	IV
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
		2 Cagar Alam	APBN	Balai KSDA Maluku	P.Pombo, Nustaram, Angwarmase, Bakauhuhun									
		3 Taman Wisata Alam	APBN	Balai KSDA Maluku	Marsegu, Gn. Api Banda									
		4 Suaka Alam	APBN	Balai KSDA Maluku	Tanjung Sial, Sahuwai, Masbait									
		C	**Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Pengembangan Dampak Bencana**											
		1 Pemetaan Peta Prakiraan Daerah Risiko Bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
		2 Penyusunan kebijakan pengendalian atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
		3 Penyusunan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berawasan risiko bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
		4 Pemantauan dan evaluasi peraturan terkait pengelola lingkungan hidup yang berawasan risiko bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
		5 Penetapan tata ruang dan tata guna lahan berbasis risiko bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
		6 Penerapan upaya mitigasi struktur dan non-struktural	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
		7 Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										

PROGRAM UTAMA		PROGRAM		KEGIATAN		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
									I						II	III	IV
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
				8	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
				9	Pemulihan darurat sarana prasarana vital dan utilities	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
				10	Peningkatan kapasitas tanggap darurat melalui antara lain pendidikan, pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur serta penyediaan anggaran yang memadai	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
				11	Rehabilitasi dan Rekonstruksi fasilitasi dan infrastruktur publik di daerah pasca	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
				12	Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
				13	Penyusunan rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
				14	Pemulihan sarana - prasarana publik dan rekosntruksi rumah warga korban bencana	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
				15	Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										

PROGRAM UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
						I						II	III	IV
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
		16 Peningkatan kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi melalui antara lain pendidikan, pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur serta penyediaan anggaran yang memadai	APBN/APBD dan Sumber Dana Sah lainnya	BNPB, Instansi K/L, Pemda Prov/Kab./Kota, Instansi vertikal di daerah										
	* Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya	**A Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk sub sektor Tanaman Pangan dan Peternakan**												
		1 Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk sub sektor Tanaman Pangan dan Peternakan	APBN / APBD PROV dan APBD Kab.	Distan Provinsi, Distan Kab/Kota, Kementan	Buru (1), Seram (2,3,4,5), Ambon(7), Kei (8), Aru (9), Saumlaki (10), Babar (11), Wetar (12)									
		B Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan												
		a. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Sub Sektor Perkebunan	APBN / APBD PROV dan APBD Kab.	Distan Provinsi, Distan Kab/Kota, Kementan	Buru (1), Seram (2,3,4,5), Ambon(7), Banda (6), Kei (8), Aru (9), Saumlaki (10), Wetar (12)									
		b. Pengembangan Kawasan Andalan untuk sub sektor Perkebunan	APBN / APBD PROV dan APBD Kab.	Distan Provinsi, Distan Kab/Kota, Kementan	Buru (1), Seram (2,3,4,5), Kei (8), Aru (9), Saumlaki (10), Wetar (12)									
		C Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Industri Pengolahan (Hasil Pertanian dan Perkebunan)												
		Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Industri Pengolahan (Hasil Pertanian dan Perkebunan)	APBN / APBD PROV dan APBD Kab., Swasta	Distan Provinsi, Distan Kab/Kota, Kementan	Buru (1), Seram (2,3,4,5), Ambon(7), Banda (6), Kei (8), Aru (9), Saumlaki (10), Wetar (12)									
		D Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan												

PROGRAM UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
						I						II	III	IV
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
		1 Pengadaan Rumah Ikan/Fish Apartement (Bubu)												
		2 Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan												
		3 Pembangunan Cold Storage												
		4 Pembangunan Pabrik Pengolahan Rumput Laut												
		5 Pembangunan Pabrik Es												
		6 Pembangunan Pengembangan Perikanan Budidaya												
		7 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD												
		E Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Kelautan												
		1 Rehabilitasi Mangrove												
		2 Rehabilitasi Terumbu Karang/Transplatasi Karang												
		3 Pemasangan Listrik Tenaga Surya untuk masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
		4 Rencana strategis pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil												

PROGRAM UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
						I						II	III	IV
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
		F **Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Industri**												
		1 Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut (ikan dan rumput laut)	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	Kota Ambon, MTB, SBB, Kota Tual									
		2 Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Kehutanan (minyak atsiri)	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, SBB, Malteng, MBD									
		3 Pengambangan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (Kelapa)	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	Kota Ambon, Malteng, Malra									
	* **Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi**													
		A **Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**												
		1 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Masyarakat Industri												
		a Pelatihan teknis pengolahan industri	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	11 kab/kota									
		b Magang Proses pengolahan industri	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	11 kab/kota									
		2 Pengolahan Sarana Industri												
		a Restrukturisasi peralatan industri	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	8 kab/kota									
		3 Penumbuhan Wirausaha Baru	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	11 kab/kota									

PROGRAM UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	LOKASI KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN								
						I						II	III	IV
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2024	2025-2030	2031-2033
		4 Revitalisasi Pasar Tradisional	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	11 kab/kota									
		5 Pengembangan Pasar Daerah Perbatasan	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	3 kab/kota									
		6 Pembangunan Pusat Distribusi Regional	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	11 kab/kota									
		7 Misi Dagang Lokal	APBN/APBD	Dinas Perindag Provinsi Maluku	11 kab/kota									

6.4.4.2. Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan *Ambon New Port*

Potensi jumlah tangkapan ikan yang melimpah menjadikan Provinsi Maluku sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia. Daerah potensial ini dibagi ke dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu: WPP Laut Banda, WPP Laut Seram & Teluk Tomini, dan WPP Laut Arafura. Sebagai produsen perikanan terbesar, Provinsi Maluku memiliki kemampuan menyumpai kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dan industri secara nasional serta menjadi wilayah eksportir utama komoditas perikanan paling potensial di Indonesia.

Potensi hasil tangkapan yang sangat besar ini perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas dan lahan yang representatif, layak dan efektif. Perencanaan yang strategis dan berkelanjutan sangat diperlukan agar kepentingan dari seluruh stakeholder dapat diakomodir dengan baik. Selain itu, posisi perairan Maluku yang sangat strategis baik secara ekonomis, ekologis, dan politis membuat pemerintah Republik Indonesia menetapka Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Konsepsi dasar dari program Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku bisa dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar VI.5
Konsepsi Lumbung Ikan Nasional (LIN)

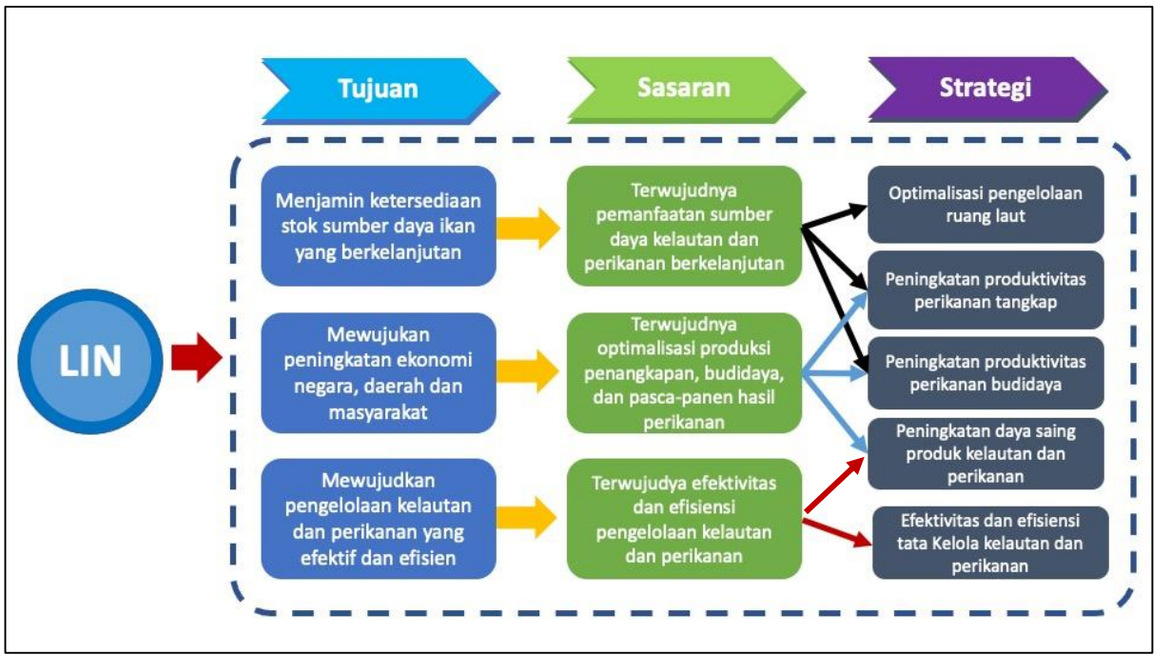


Sementara itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Lumbung Ikan Nasional, diperlukan strategi-strategi dengan mempertimbangkan 5 aspek vital yaitu:

1. Pengelolaan ruang laut yang melingkupi,
   a. Pengembangan dan optimalisasi kawasan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
   b. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
   c. Pemantapan perencanaan ruang laut; dan
   d. Optimalisasi jasa kelautan.
2. Perikanan tangkap yang melingkupi,
   a. Optimalisasi produksi perikanan tangkap;
   b. Penyediaan saran perikanan tangkap; dan
   c. Optimalisasi prasarana utama perikanan tangkap.
3. Perikanan budidaya yang melingkupi,
   a. Pengelolaan kawasan budidaya berkelanjutan;
   b. Optimalisasi produksi perikanan budidaya; dan
   c. Penyediaan sarana prasarana perikanan budidaya.
4. Penguatan daya saing yang melingkupi,
   a. Peningkatan konektivitas dan penyediaan saran prasarana logistik;
   b. Pembinaan mutu usaha pengolahan dan pemasaran ikan;
   c. Promosi dan fasilitasi pemasaran;
   d. Peningkatan penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran;
   e. Penerapan sistem pengolahan nirlimbah (ekonomi biru);
   f. Peningkatan usaha dan investasi kelautan dan perikanan; dan
   g. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat dan pemenuhan gizi protein untuk mengatasi stunting.
5. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melingkupi,
   a. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengawasan SDKP, peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan regulasi;
   b. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas penegak hukum di laut;
   c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan (SDKP).

Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, dan Strategi LIN bisa dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar VI.6
Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, dan Strategi LIN



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

Berdasarkan urgensitas proyek Lumbung Ikan Nasional dari sudut pandang ekonomis, ekologis, kebutuhan infrastruktur, dan sosial budaya diperlukan sebuah perlabuhan terpadu yang terintegrasi. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon yang masih beroperasi hingga saat ini memiliki beberapa kendala teknis yang perlu untuk diperhatikan di antaranya adalah,

1. Lokasi yang berada di tengah pusat perdagangan, pemukiman, dan fasilitas umum perkotaan lainnya;
2. Pelabuhan perikanan yang telah melebihi kapasitas;
3. Padatnya lalu lintas keluar masuk di Teluk Ambon; dan
4. Kapasita pelabuhan kargo yang akan mencapai kapasitas maksimum dalam beberapa tahun mendatang.

Atas dasar isu dan masalah di atas, pemerintah mencanangkan proyek pembangunan pelabuhan Ambon baru atau yang kemudian disebut dengan *Ambon New Port* yang sekaligus diproyeksikan sebagai pendukung utama Lumbung Ikan Nasional. *Ambon new port* akan difungsikan sebagai pusat beberapa kegiatan seperti pelabuhan perikanan, terminal peti kemas (internasional dan domestik), terminal roro, kawasan industri logistik, terminal *Liquefied Natural Gas (LNG)*, dan pembangkit listrik. Pelabuhan baru ini akan melingkupi seluruh aktivitas yang ada di sekitar WPP 718, termasuk yang berasal dari PPN Merauke dan sekitarnya.

Ambon new port akan difungsikan sebagai pelabuhan terintegrasi dengan kebutuhan lahan seluas kurang lebih 200 Ha dengan rincian lahan pelabuhan seluas 50 Ha dan lahan kawasan industri 150 Ha. Sementara itu sumber pembiayaan untuk infrastruktur dasar akan diambil dari APBN. Sementara itu untuk pembangunan tahap lanjut, sumber pembiayaan akan berasal dari kerja sama Pelindo IV dengan pihak swasta melalui skema kerja sama pemeritan dan badan usaha (KPBU) dengan total hingga 5 triliun rupiah.

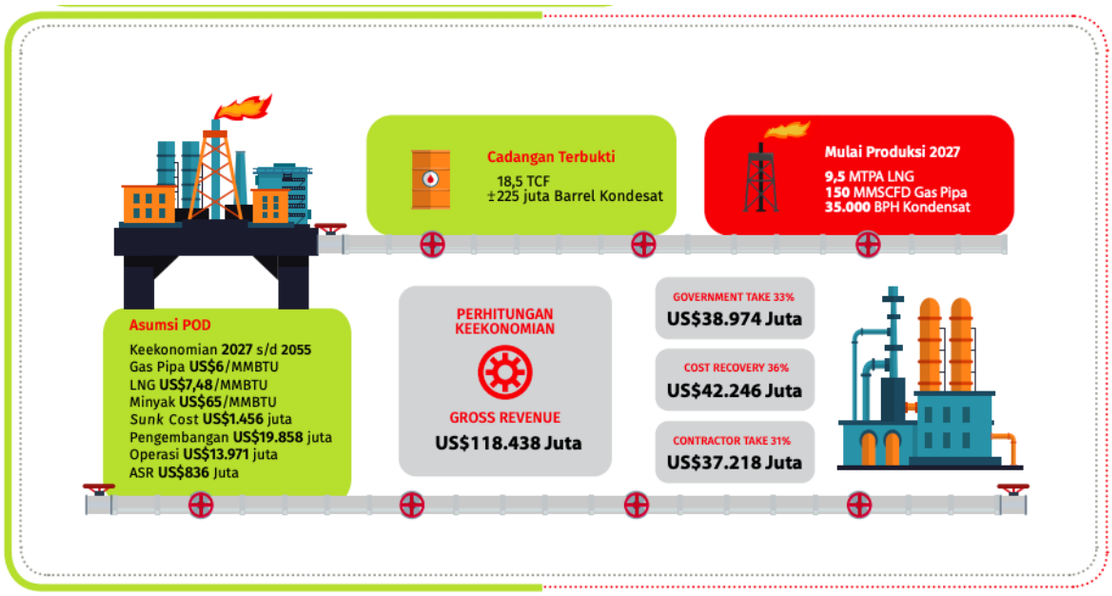
6.4.4.3. Blok Masela

Selain memiliki potensi yang sangat besar pada produksi rempah-rempah dan sumber daya laut, Provinsi Maluku juga memiliki potensi gas bumi yang sangat besar yaitu mencapai 10,7 Trilion Cubic Feet (TCF) dengan masa *reserve to production* selama 70 tahun di Blok Masela. Berdasarkan potensi ini, proyek Blok Masela menjadi proyek gas bumi terbesar di dunia dengan nilai investasi mencapai 390 triliun rupiah.

Pembahasan mengenai proyek gas bumi di Blok Masela telah mengalao revisi dalam Rencana Pengembangan (Pod) pada pertengahan tahun 2019. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan *Head of Agreement (HoA)* oleh SKK Migas dan Inpex pada 16 Juni 2019 di Tokyo, Jepang. Pengaruh positif yang diharapkan dari adanya kesepakatan ini adalah tetap berlangsungnya proyek Blok Masela hingga tahun 2055. Hal ini berkesesuaian dengan telah dijadikannya pengembangan lapangan abadi di Blok Masela sebagai salah satu prioritas dan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Maluku.

Lapangan abadi Masela memiliki cadangan minyak bumi yang terbukti sebanyak 18,5 TCF. Dengan potensi cadangan terbukti yang besar tersebut, proyek Blok Masela akan mulai berproduksi pada taun 2017. Perhitungan potensi pendapatan kotor *(gross revenue)* sebanyak 118,438 juta Dolar Amerika. Penjabaran mengenai rencana pengembangan Lapangan Abadi Masela bisa dilihat dengan lebih rinci pada gambar berikut ini:

Gambar VI.7
Rencana Pengembangan (PoD) Lapangan Abadi Masela



Pengembangan lapangan abadi Masela, harus mengacu kepada Kebijakan Energi Nasional (KEN) yaitu adanya jaminan ketersediaan, akses energi, dan terjangkaunya harga secara berkelanjutan. Dengan demikian strategi dan arah kebijakan harus diformulasikan untuk turut menguatkan Neraca Gas Regional dan Nasional.

6.5 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PAGU INDIKATIF

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran daerah. Program prioritas daerah mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan akan diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait. Diharapkan program prioritas pembangunan yang terpilih mampu memberikan kontribusi positif bahkan akseleratif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Maluku. Program prioritas Provinsi Maluku untuk periode 2019-2024 yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran perubahan RPJMD bisa dilihat di dalam tabel berikut ini,

Tabel VI.16
Keselarasan Program dengan Visi, Misi dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
Misi 1: Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani																
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Indeks Reformasi Birokrasi**														
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP														
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik														
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK*	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,91	0	0,93	264.153.340	0,95	240.000.000	0,97	994.660.887	0,99	1.188.200.020	0,99	2.687.014.247	D I N A S KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN*	Persentase pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku (Dengan Satuan:%)	100	100	0	100	345.071.057	100	414.085.267	100	496.902.320	100	596.282.785	100	1.852.341.429	BADAN PENGELOLA P E R B A T A S A N DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK*	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan	83,33	83,33	3.213.743.854	83,33	3.213.743.854	83,33	6.943.743.854	100	9.446.743.854	100	11.828.743.854	100	34.646.719.270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		pemerintah dan pembangunan (Dengan Satuan:persen)														
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, Itjen dan Inspektorat (Dengan Satuan:%)	75	80	8.550.000.000	85	11.442.037.897	90	15.395.000.000	95	17.655.000.000	100	20.070.000.000	100	73.112.037.897	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Dengan Satuan:Level)	C	CC		CC		B		B		BB		BB		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah														
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH*	Persentase terlaksannya program pengelolaan pendapatan daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	11.146.820.737	100	11.733.495.511	100	12.320.170.287	100	12.936.178.801	100	13.582.987.742	100	61.719.653.078	BADAN PENDAPATAN DAERAH

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
Misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau																
	Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**														
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah	Indeks Pendidikan														
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN*	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	96,90	97,14	87.523.792.000	97,58	87.523.792.000	98,56	87.523.792.000	98,91	87.523.792.000	99,18	87.523.792.000	99,18	437.618.960.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Indeks Kesehatan														
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN*	Rasio dokter per satuan penduduk (Dengan Satuan:per satuan penduduk)	15	35	36.300.711.684	36	37.041.985.982	37	38.534.884.210	38	50.280.065.028	39	56.656.559.171	39	218.814.206.075	DINAS KESEHATAN
		Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	5	6		7		8		9		10		10		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:per Satuan Penduduk)	2,65	11		12		13		14		15		15		DINAS KESEHATAN
		Rasio Bidan Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	78	95		96		97		98		99		99		DINAS KESEHATAN
		Rasio Perawat Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	217	117		220		225		230		235		235		DINAS KESEHATAN
		Rasio Apoteker Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	14,88	12		16		17		18		19		19		DINAS KESEHATAN
		Rasio Sarjana Kesehatan Masyarakat Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	24	35		36		37		38		39		39		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT*	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:Per 1000 Kelahiran Hidup)	6	6	138.312.659.924	6	246.467.302.760	6	211.178.818.428	6	228.512.000.928	6	241.884.025.684	6	1.066.354.807.724	DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000 kelahiran hidup)	7	7		7		7		7		7		7		DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000 kelahiran hidup)	4	4		4		4		4		4		4		DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 100.000	132	127		125		123		121		119		119		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		kelahiran hidup)														
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	30,73	35		40		45		50		55		55		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Dengan Satuan:Persen)	45	48		51		54		67		60		60		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Dengan Satuan:Persen)	66,9	68,8		70,6		72,5		74,3		76,2		76,2		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Non Polio AFP rate	14	> 2		> 2		> 2		> 2		> 2		> 2		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		per 100.000 penduduk (Dengan Satuan:per 100.000 penduduk)														
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Dengan Satuan:Persen)	61	70		75		80		85		87		87		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Dengan Satuan:Persen)	< 0.2	< 0.2		< 0.2		< 0.2		< 0.2		< 0.2		< 0.2		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Dengan Satuan:Persen)	76,80	80		85		87		90		95		95		DINAS KESEHATAN
		Cakupan kunjungan bayi (Dengan Satuan:Persen)	64	70		73		76		79		82		82		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pembantu	554	506		520		530		540		550		550		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		puskesmas (Dengan Satuan:Jumlah)														
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (Dengan Satuan:Persen)	68,28	75		77		79		81		83		83		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan nifas (Dengan Satuan:Persen)	63,52	65		70		75		80		85		85		DINAS KESEHATAN
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	30,27	31		33		35		37		39		39		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan anak balita (Dengan Satuan:Persen)	37	45		50		55		60		65		65		DINAS KESEHATAN
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (Dengan Satuan:Persen)	70	73		76		79		82		85		85		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes (Dengan Satuan:Persen)	60	77		80		85		90		95		95		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Krisis Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Asi Eksklusif (Dengan Satuan:Persen)	25	50		53		56		59		62		62		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	66,9	90		93,5		94		94,5		95		95		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		(Dengan Satuan:Persen)														
		Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Madya (Dengan Satuan:Jumla)	34	77		125		148		154		165		165		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Balita Gizi Kurang (Dengan Satuan:Persen)	8,5	8		7,5		7		6,5		6		6		DINAS KESEHATAN
		Presentase Merokok pada 10 - 18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	9,10	9,10		9,10		9		8,90		8,80		8,80		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Keluarga Berencana (Dengan Satuan:Persen)	51,64	60		65		70		75		80		80		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Dengan Satuan:Persen)	63	65		67		69		71		73		73		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Balita Stunting (Dengan	23	25		24		23		22		21		21		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Satuan:Persen)														
		Annual Paracite Incidence (API) (Dengan Satuan:Persen)	1,02	3,1		1,15		1,1		1		0,8		0,8		DINAS KESEHATAN
		Slide Postivity Rate (SPR) (Dengan Satuan:Persen)	< 5	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		DINAS KESEHATAN
		Puskesmas yang Melaksanakan Tatalaksana Program ISPA sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	NA	55		60		65		70		75		75		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Dengan Satuan:Persen)	23	23		25		27		29		31		31		DINAS KESEHATAN
		Persentase ODHA yang Mendapat Pengobatan ARV (Dengan Satuan:Persen)	31	55		55		55		55		55		55		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Prevalensi Ibu Hamil Anemia (Dengan Satuan:Persen)	22,27	20		18		16		14		12		12		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Rumah Sakit dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Dengan Satuan:Jumlah)	2	3		4		5		6		7		7		DINAS KESEHATAN
		Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	60	61		62		63		64		65		65		DINAS KESEHATAN
		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (Dengan Satuan:Persen)	95	91		92		93		94		95		95		DINAS KESEHATAN
		Persentase Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit yang Memenuhi Syarat Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	45,8	46,5		47		47,5		48		48,5		48,5		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Persentase Penerapan Sistem Kewaspadaan Dini (Dengan Satuan:Persen)	53,2	100		80		80		80		80		80		DINAS KESEHATAN
		Persentase Kabupaten/ Kota dengan Puskesmas yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		10		DINAS KESEHATAN
		Persentase Pengawasan Sarana Air Bersih (Dengan Satuan:Persen)	57,7	60		63		66		69		72		72		DINAS KESEHATAN
		Persentase Kabupaten/ Kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokor (KTR) (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		10		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Persentase Kabupaten/ Kota yang Melakukan deteksi dini Penyakit Kanker (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		10		DINAS KESEHATAN
		Persentase Kabupaten/ Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Gangguan Indera (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		10		DINAS KESEHATAN
		Persentase Kabupaten/ Kota dengan Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		10		DINAS KESEHATAN
		Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM (Dengan Satuan:Jumlah)	482	500		520		540		560		580		580		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Persentase Keluarga Menggunakan Jamban Memenuhi Syarat Kesehatan (Dengan Satuan:Jumlah)	68	70		72		74		76		78		78		DINAS KESEHATAN
		Persentase Kabupaten/ Kota Sehat (Dengan Satuan:Persen)	18	18		20		22		24		26		26		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Evidence Based (Dengan Satuan:Jumlah)	11	11		11		11		11		11		11		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (Dengan Satuan:Persen)	55	60		65		70		75		80		80		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Puskesmas Mampu	18	20		22		24		26		28		28		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:Persen)														
		Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Jiwa (Dengan Satuan:Persen)	NA	5		8		11		14		17		17		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Dengan Satuan:Persen)	55	60		70		80		90		100		100		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Balita Gizi Buruk (Dengan Satuan:Persen)	0,9	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Vitamin A pada Bayi dan Balita (Dengan Satuan:Persen)	61	78		80		82		84		86		86		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Balita (D/S) (Dengan Satuan:Persen)	55	65		67		69		71		73		73		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Prevalensi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kalori (Dengan Satuan:Persen)	18,5	18		17		16		15		14		14		DINAS KESEHATAN
		Persentase Kabupaten/ Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayannan terpadu PTM sesuai Standar (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		10		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Beryodium (Dengan Satuan:Persen)	64	75		79		83		87		91		91		DINAS KESEHATAN
		Persentase Pelaksanaan Campak Dosis Kedua (Dengan Satuan:Persen)	45,7	51,1		56,5		61,9		67,2		72,6		72,6		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Rumah	0	0		2		5		11		13		13		DINAS KESEHATAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Sakit yang Terakreditasi Utama (Dengan Satuan:Jumlah)														
Misi 3: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan																
	Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**														
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	LPE kategori industri pengolahan														
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI*	Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:USD (Juta))	25	25	1.300.000.000	30	1.300.000.000	35	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	6.500.000.000	D I N A S PERINDUSTRIAN D A N PERDAGANGAN
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:Orang)	35,719	35,719		35,719		35,719		0		0		0		D I N A S PERINDUSTRIAN D A N PERDAGANGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Pertumbuhan Usaha Mikro dan		91,22	500.000.000	91,50	2.909.310.450	91,78	2.934.025.973	92,06	30.880.727.272	92,34	3.234.763.635	92,34	40.458.827.330	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)*	Kecil (Dengan Satuan:%)														
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI*	Persentase Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel (Dengan Satuan:Satuan)			79.000.000.000		85.000.000.000	70	100.844.431.000	75	105.886.653.000	80	111.180.985.000	80	481.912.069.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		LPE kategori perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor														
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN*	Jumlah sarana distribusi perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	2.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	22.000.000.000	D I N A S PERINDUSTRIAN D A N PERDAGANGAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan														
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*	Jumlah Penambahan Sarana Pertanian yang dikembangkan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	17.494.160.000	1	18.089.360.000	1	18.689.460.000	1	19.264.560.000	1	19.839.660.000	1	93.377.200.000	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN*	Jumlah Penambahan Prasarana Pertanian yang dikembangkan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	9.618.000.000	1	9.690.000.000	1	9.760.000.000	1	9.815.000.000	1	9.895.000.000	1	48.778.000.000	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN*				4.300.366.000		4.300.366.000		4.300.366.000		4.300.366.000		4.300.366.000		21.501.830.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP*	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap		523,26	10.478.000.000	533,7	10.478.000.000	544,4	10.478.000.000	555,3	10.478.000.000	566,39	10.478.000.000	577,72	52.390.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	**Tingkat Kemiskinan**														

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita														
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL*	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	0	100	1.109.898.478	100	2.789.000.000	100	3.871.900.000	100	4.414.200.000	100	12.184.998.478	DINAS SOSIAL
		Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL*	Presentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabiliotas terlantar di dalam panti (Dengan Satuan:persen)	100	100	860.000.000	100	4.915.117.931	100	8.783.988.496	100	8.651.700.016	100	9.203.370.056	100	32.414.176.499	DINAS SOSIAL
		Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti (Dengan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Satuan:Persen)														
		Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Presentase cakupan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL*				1.145.000.000		2.778.117.949		10.703.200.000		11.805.720.000		12.972.720.000		39.404.757.949	DINAS SOSIAL

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)														
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT*	Persentase cadangan pangan(Dengan Satuan:%)		67,3	0	70%	2.597.253.485	70%	2.727.116.159	75%	2.863.471.967	75%	3.006.645.566	75 %	11.194.487.177	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat	Inflasi														
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:Persen)	3,5-4	3.5-4	200.000.000	3,5-4	250.000.000	3,5-4	250.000.000	3,5-4	250.000.000	3,5-4	250.000.000	3,5-4	1.200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah realisasi jenis pupuk bersubsidi (Dengan Satuan:jenis)	0	0		0		2		2		2		2		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka														
	PROGRAM PENEMPATAN	Persentase Tenaga kerja yang	6,30	6,30	0	8	78.527.900	8,2	210.000.000	8,5	216.000.000	8,7	226.800.000	8,7	731.327.900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	TENAGA KERJA*	ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/ kota (Dengan Satuan:Persen)														
	Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan	**Indeks Gas Rumah Kaca**														
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)														
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP*	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Upaya)	0	3	887.920.800	3	2.169.998.916	3	2.278.498.863	3	2.392.423.804	3	2.512.044.994	3	10.240.887.377	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Resiko Bencana (IRB)														

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN*	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (Dengan Satuan:%)	64	100	0	100	129.994.292	100	355.520.000	100	373.296.000	100	391.960.800	100	1.250.771.092	B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Misi 4: Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau																
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektifitas wilayah kepulauan	**Indeks Williamson /Indeks Kesenjangan Wilayah**														
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah	Indeks Gini														
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT*	Persentase peningkatan status desa mandiri (Dengan Satuan:Persen)	0,33	1,33	3.050.000.000	2,33	3.450.000.000	3,33	4.312.000.000	4,33	4.685.000.000	6,33	4.793.000.000	6,33	20.290.000.000	D I N A S PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Persentase Keluarga yang melaksanakan	0	0	0	39,68	303.173.501	40,68	650.000.000	41,68	1.135.000.000	42,68	1.290.000.000	42,68	3.378.173.501	D I N A S KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	SEJAHTERA (KS)*	Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (Dengan Satuan:Persen)														
	Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Infrastruktur														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN*	Presentase Kemantapan Jalan (Dengan Satuan:satuan)	0	60,58	369.381.630.007	62,58	80.946.465.000	64,58	64.077.465.000	66,58	72.906.688.651	70,58	74.073.672.842	70,58	661.385.921.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)*	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	0	10%	243.733.178.916	20%	106.391.076.763	50%	109.209.890.245	75%	95.328.486.143	100%	99.381.191.901	100%	654.043.823.968	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		(Dengan Satuan:-)														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG*	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR (Dengan Satuan:-)	0	65,80	2.868.737.212	67,00	5.181.800.000	68,50	7.600.000.000	70,00	7.350.000.000	71,50	7.150.000.000	71,50	30.150.537.212	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN*	Capaian Penguranga n Kumuh (Dengan Satuan:Meter)	0	25563 Meter	53.712.331.322	9726 Meter	20.410.000.000	8290 Meter	30.410.000.000	8766 Meter	25.410.000.000	9520 Meter	25.410.000.000	9520 Meter	155.352.331.322	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN*	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	100	100	23.924.519.387	100	7.668.475.170	100	31.308.022.487	100	33.812.664.846	100	36.517.679.874	100	133.231.361.764	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)*	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (Dengan Satuan:%)	100	100	20.855.765.387	100	4.000.999.780	100	32.933.637.000	100	35.568.327.960	100	38.413.793.797	100	131.772.523.924	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN*	Presentasi Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan, Presentasi Pelabuhan Laut yang Terbangun, Pertumbuha	7	0	2.089.238.022	1	2.089.238.019	3	2.089.238.010	5	2.089.238.010	7	2.089.238.010	7	10.446.190.071	DINAS PERHUBUNGAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		n Trayek Angkutan Laut Perintis (Dengan Satuan:Dokemen)														
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN*	Rasio Elektifikasi (Dengan Satuan:%)	90,95	95	600.000.000	96	600.000.000	97	600.000.000	98	600.000.000	99	600.000.000	99	3.000.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) (Dengan Satuan:Rumah Tangga Sasaran (RTS)	0	0		350		365		375		390		390		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Misi 5: Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata																
	Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata	**Indeks Pembangunan Budaya**														
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB														
	Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama														

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	0	100	8.052.982.422	100	9.744.804.900	100	10.232.045.145	100	10.743.647.403	100	38.773.479.870	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Meningkatnya investasi pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi														
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL*	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	305.236.800	0	242.924.088	2	1.288.420.000	2	1.417.262.000	2	1.629.851.300	2	4.883.694.188	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah	LPE Sektor Pariwisata														
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA*	Pertumbuhan Destinasi Wisata (Dengan Satuan:Persen)	0	5	2.306.000	5	3.864.556.080	5	5.100.000.000	5	527.306.000	5	552.306.000	5	10.046.474.080	DINAS PARIWISATA
		Persentase cagar budaya yang masuk dalam kategori tingkat nasional														
	PROGRAM PENGEMBANG	Jumlah cagar budaya yang	63	64	12.185.8	65	12.185.885.000	65	12.185.885.000	68	12.185.885.000	70	12.185.885.000	70	60.929.425.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	AN KEBUDAYAAN*	dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Jumlah Cagar Budaya)			85.000											
Misi 6: Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi																
	Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif	**Indeks Pengeluaran**														
	Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari	LPE Ekonomi Kreatif														
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Persen)	0	10	0	15	0	20	2.850.000.000	25	3.255.000.000	30	3.660.000.000	30	9.765.000.000	DINAS PARIWISATA
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga	Indeks pembangunan Pemuda														
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA	Tingkat Pengembangan Daya	50	60	5.465.000	70	21.638.000.000	80	9.800.000.000	90	10.300.000.000	100	10.550.000.000	100	57.753.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
	SAING KEOLAHRAGAAN*	Saing Keolahragaan (Dengan Satuan:%)			0.000											
	Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)														
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN*	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Dengan Satuan:%)	0	0	400.000.000	0	93.884.000	0	347.743.000	0	455.455.000	0	514.000.000	0	1.811.082.000	D I N A S PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (Dengan Satuan:%)	30	26,75		26,85		27,05		27,50		30		30		D I N A S PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Dengan Satuan:%)	20	20		30		45		52		65		65		D I N A S PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (Dengan Satuan:%)	0	41		43		45		47		50		50		D I N A S PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Dengan Satuan:%)	0	40		42		44		46		48		48		D I N A S PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MISI	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VISI: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan																
		Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian (Dengan Satuan:%)	0	20		21		22		23		25		25		D I N A S PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)*	Presntase Kabupaten/ Kota Layak Anak (Dengan Satuan:%)	100	18,18	600.000.000	27,27	617.000.000	45,45	810.000.000	72,72	965.000.000	100	1.061.500.000	100	4.053.500.000	D I N A S PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku sesuai dengan hasil Pemilu, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno terpilih sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2019-2024.

Meskipun mengalami perubahan, RPJMD ini tetap mempunyai arah dan tujuan besar yang sama yaitu selain sebagai penjabaran visi dan misi kepada daerah terpilih, yang tentu juga tetap memedomani RPJPD, RTRW, RPJMN maupun RPJMD Provinsi. Program pembangunan dan program perangkat daerah, dalam perubahan ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran dan program serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah yang masih tersisa selama dua tahun ke depan.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan di setiap perangkat daerah Pemerintah Provinsi Maluku. Program-

program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.

Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Adapun perubahan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 ini sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya perubahan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022-2024 secara rinci tercantum pada Tabel berikut ini:

Tabel VII.1
Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022-2024

No	Uraian	Realisasi	Target		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**3,045,754.00**	**3,317,664.08**	**2,878,436.01**	**2,989,970.69**	**3,134,299.28**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**545,681.00**	**572,407.89**	**590,037.88**	**589,605.38**	**613,543.20**
	Pajak Daerah	382,358.00	379,190.26	393,104.88	405,669.00	417,495.00
	Retribusi Daerah	94,008.00	101,427.98	103,963.67	107,277.00	114,298.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38,892.00	40,144.37	40,549.37	40,836.38	42,878.20
	Lain-Lain PAD yang Sah	30,423.00	51,645.28	52,419.96	35,823.00	38,872.00
1.2	**Pendapatan Transfer-LRA**	**2,498,866.00**	**2,741,651.92**	**2,285,423.10**	**2,400,015.31**	**2,520,356.08**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2,498,866.00**	**2,732,478.91**	**2,279,591.49**	**2,393,892.12**	**2,513,926.73**
	Dana Bagi Hasil Pajak	45,255.00	33,895.70	35,673.25	37,777.97	40,006.87
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	31,782.00	40,164.03	38,996.88	40,946.72	42,994.06
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,524,466.00	1,524,362.74	1,525,401.86	1,601,671.95	1,681,755.55
	Dana Alokasi Khusu (DAK)	897,363.00	1,124,883.43	673,687.89	707,372.29	742,740.90
	Dana Insentif Daerah		9,173.01	5,831.61	6,123.19	6,429.35
	Pend. Transfer Pem. Pusat - Lainnya - LRA	-				
	Dana Penyesuaian - LRA					
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1,207.00**	**3,604.27**	**2,975.03**	**350.00**	**400.00**
	Pendapatan Hibah	1,207.00	3,604.27	2,975.03	350.00	400.00
	Dana Bagi Hasil dari Pedapatan Lainnya					
	BELANJA	**2,687,128.34**	**4,154,789.12**	**1,527,397.30**	**1,571,633.59**	**1,615,946.12**
	BELANJA OPERASI	**2,095,676.16**	**2,556,227.85**	**1,204,443.47**	**1,234,507.18**	**1,265,322.49**

No	Uraian	Realisasi	Target		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Pegawai	948,885.28	1,173,218.02	1,202,548.47	1,232,612.18	1,263,427.49
	Belanja Barang dan Jasa	673,020.75	1,226,721.79			
	Belanja Bunga	1,295.00	8,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00
	Belanja Subsidi		536.50	600.00	600.00	600.00
	Belanja Hibah	471,393.32	142,039.52			
	Belanja Bantuan Sosial	1,081.81	5,417.02			
	BELANJA MODAL	**591,452.18**	**1,285,206.99**	-	-	-
	Belanja Modal Tanah	8,329.00	34,476.76			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142,270.43	401,815.13			
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	153,051.64	234,782.00			
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	250,172.22	610,880.65			
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37,628.89	3,252.45			
	TRANSFER		**206,453.18**	**210,707.68**	**219,267.95**	**226,872.25**
	BELANJA TAK TERDUGA		**106,901.10**	**112,246.15**	**117,858.46**	**123,751.38**
	PEMBIAYAAN					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**338,326.48**	**852,389.06**	**150,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
	Penggunaan SiLPA	163,326.48	343,328.07	150,000.00	50,000.00	50,000.00
	Pinjaman Daerah	175,000.00	508,360.99			
	Pengembalian investasi non permanen		700.00			
	Pencairan Dana Cadangan					
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**32,775.00**	**6,000.00**	**86,333.33**	**200,000.00**	**150,000.00**
	Penyertaan Modal	32,775.00	6,000.00	13,000.00	10,000.00	10,000.00
	Pengembalian pokok hutang			23,333.33	140,000.00	140,000.00

No	Uraian	Realisasi	Target		Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pembentukan dana cadangan			50,000.00	50,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**305,551.48**	**846,389.06**	**63,666.67**	**(150,000.00)**	**(100,000.00)**

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel VII.2
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Provinsi Maluku
Tahun 2022-2024 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Realisasi 2020	Proyeksi Pagu OPD			
			2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	3,045,754	3,317,664	2,878,436	2,989,971	3,134,299
2	Penerimaan Pembiayaan	338,326	852,389	150,000	50,000	50,000
	(***Dikurangi***):					
3	Belanja Transfer	-	206,453	210,708	219,268	226,872
4	Belanja Tak Terduga	-	106,901	112,246	117,858	123,751
5	Pengeluaran Pembiayaan	32,775	6,000	86,333	200,000	150,000
	Kapasitas Riil Pagu OPD	**3,351,305**	**3,850,699**	**2,619,149**	**2,502,844**	**2,683,676**

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku, 2021 (diolah)

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Implementasi perencanaan pembangunan Provinsi Maluku memiliki target capaian yang harus diwujudkan demi terealisasinya visi dan misi kepala daerah. Dalam hierarki perencanaan pembangunan daerah, Indikator Kinerja Makro menjadi salah satu inti dari "rapor" kepala daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya selama masa bakti pembangunan lima tahunan. Adapun target indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Maluku hingga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel VII.3
Target Indikator Kinerja Makro
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,45	69,49	69,80	70,10	70,39	70,69
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	-3,42	4,53	5,00-5,82	5,60-6,27	6,10-6,71
3	Tingkat Kemiskinan	%	17,65	17,99	17,87	16,52	16,13	15,73
4	PDRB per Kapita	Juta Rp	25,60	25,25	25,81	26,38	26,94	27,50
5	Indeks Gini	-	0,380	0,326	0,314	0,305	0,300	0,295
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,08	7,57	6,73	6,45	6,12	6,05

Indikator Kinerja Makro pembangunan Provinsi Maluku merupakan indikator tanggung jawab kepala daerah. Adapun dalam mendukung ketercapaian indikator-indikator tersebut, maka perlu dikawal pencapaian indikator-indikator outcome/indikator program yang mana pencapaiannya merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah di Provinsi Maluku. Indikator-indikator outcome tersebut dicapai dari rumusan program perangkat daerah yang dilaksanakan dalam lima tahun pembangunan Provinsi Maluku oleh perangkat daerah terkait.

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas

Pemerintah Provinsi Maluku berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam perubahan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan adalah sebagai berikut:

Tabel VII. 4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1,731,983,250,715**		**1,834,482,574,190**		**1,365,002,706,314**		**1,451,603,191,339**		**1,500,499,962,783**		**7,883,571,685,341**	
01.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**437,771,376,000**		**437,771,376,000**		**437,771,376,000**		**437,771,376,000**		**437,771,376,000**		**2,188,856,880,000**	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**437,771,376,000**		**437,771,376,000**		**437,771,376,000**		**437,771,376,000**		**437,771,376,000**		**2,188,856,880,000**	
010101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya layanan Penunjang Pemerintahan (Dengan Satuan:jumlah layanan)	8	8	175.200.000.000	8	175.200.000.000	8	175.200.000.000	8	175.200.000.000	8	175.200.000.000	8	876.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
010102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Angka partisipasi sekolah (Dengan Satuan:Persentase Angka Partisipasi Sekolah)	96.90	97.14	87.523.792.000	97.58	87.523.792.000	98.56	87.523.792.000	98.91	87.523.792.000	99.18	87.523.792.000	99.50	437.618.960.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
010103	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Dengan Satuan:Persentase Angka Kelulusan)	100	100	87.523.792.000	100	87.523.792.000	100	87.523.792.000	100	87.523.792.000	100	87.523.792.000	100	437.618.960.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
010104	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (Dengan Satuan:Rasio)	1:18	1:19	87.523.792.000	1:20	87.523.792.000	1:20	87.523.792.000	1:20	87.523.792.000	1:20	87.523.792.000	1:20	437.618.960.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
01.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**303,384,145,572**		**492,384,813,317**		**476,332,551,098**		**530,321,959,825**		**555,416,463,459**		**2,357,839,933,271**	
	DINAS KESEHATAN				**303,384,145,572**		**492,384,813,317**		**476,332,551,098**		**530,321,959,825**		**555,416,463,459**		**2,357,839,933,271**	
010201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	80	80	64.037.617.364	85	143.320.988.375	90	160.222.017.485	95	184.269.264.610	100	187.645.738.312	100	739.495.626.146	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Presentase Program yang Tercapai OPD Dinas Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Masa Pakai Sarana dan Prasarana Perkantoran di OPD Dinas Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Disiplin ASN di OPD Dinas Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
010202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:Per 1000 Kelahiran Hidup)	6	6	138.312.659.924	6	246.467.302.760	6	211.178.818.428	6	228.512.000.928	6	241.884.025.684	6	1.066.354.807.724	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000 kelahiran hidup)	7	7		7		7		7		7		7		DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000 kelahiran hidup)	4	4		4		4		4		4		4		DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 100.000 kelahiran hidup)	132	127		125		123		121		119		116		DINAS KESEHATAN
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	30.73	35		40		45		50		55		60		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Dengan Satuan:Persen)	45	48		51		54		67		60		63		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Dengan Satuan:Persen)	66.9	68.8		70.6		72.5		74.3		76.2		78		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Dengan Satuan:per 100.000 penduduk)	14	> 2		> 2		> 2		> 2		> 2		> 2		DINAS KESEHATAN
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Dengan Satuan:Persen)	61	70		75		80		85		87		90		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Dengan Satuan:Persen)	< 0.2	< 0.2		< 0.2		< 0.2		< 0.2		< 0.2		< 0.2		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Dengan Satuan:Persen)	76.80	80		85		87		90		95		100		DINAS KESEHATAN
		Cakupan kunjungan bayi (Dengan Satuan:Persen)	64	70		73		76		79		82		85		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pembantu puskesmas (Dengan Satuan:Jumlah)	554	506		520		530		540		550		560		DINAS KESEHATAN
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (Dengan Satuan:Persen)	68.28	75		77		79		81		83		85		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan nifas (Dengan Satuan:Persen)	63.52	65		70		75		80		85		90		DINAS KESEHATAN
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	30.27	31		33		35		37		39		41		DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan pelayanan anak balita (Dengan Satuan:Persen)	37	45		50		55		60		65		70		DINAS KESEHATAN
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (Dengan Satuan:Persen)	70	73		76		79		82		85		88		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes (Dengan Satuan:Persen)	60	77		80		85		90		95		100		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Krisis Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Asi Eksklusif (Dengan Satuan:Persen)	25	50		53		56		59		62		65		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (Dengan Satuan:Persen)	66.9	90		93.5		94		94.5		95		95.5		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Madya (Dengan Satuan:Jumla)	34	77		125		148		154		165		170		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Balita Gizi Kurang (Dengan Satuan:Persen)	8.5	8		7.5		7		6.5		6		<= 5		DINAS KESEHATAN
		Presentase Merokok pada 10 - 18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	9.10	9.10		9.10		9		8.90		8.80		8.70		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Keluarga Berencana (Dengan Satuan:Persen)	51.64	60		65		70		75		80		85		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Dengan Satuan:Persen)	63	65		67		69		71		73		75		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Balita Stunting (Dengan Satuan:Persen)	23	25		24		23		22		21		20		DINAS KESEHATAN
		Annual Paracite Incidence (API) (Dengan Satuan:Persen)	1.02	3.1		1.15		1.1		1		0.8		0.5		DINAS KESEHATAN
		Slide Postivity Rate (SPR) (Dengan Satuan:Persen)	< 5	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		DINAS KESEHATAN
		Puskesmas yang Melaksanakan Tatalaksana Program ISPA sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	NA	55		60		65		70		75		80		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Dengan Satuan:Persen)	23	23		25		27		29		31		33		DINAS KESEHATAN
		ODHA yang Mendapat Pengobatan ARV (Dengan Satuan:Persen)	31	55		55		55		55		55		55		DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Prevalensi Ibu Hamil Anemia (Dengan Satuan:Persen)	22.27	20		18		16		14		12		15		DINAS KESEHATAN
		Rumah Sakit dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Dengan Satuan:Jumlah)	2	3		4		5		6		7		8		DINAS KESEHATAN
		Ketersediaan Alat Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	60	61		62		63		64		65		66		DINAS KESEHATAN
		Ketersediaan Obat dan Vaksin (Dengan Satuan:Persen)	95	91		92		93		94		95		96		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit yang Memenuhi Syarat Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	45.8	46.5		47		47.5		48		48.5		50		DINAS KESEHATAN
		Sistem Kewaspadaan Dini (Dengan Satuan:Persen)	53.2	100		80		80		80		80		80		DINAS KESEHATAN
		Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		11		DINAS KESEHATAN
		Pengawasan Sarana Air Bersih (Dengan Satuan:Persen)	57.7	60		63		66		69		72		75		DINAS KESEHATAN
		Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokor (KTR) (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		11		DINAS KESEHATAN
		Kabupaten/Kota yang Melakukan deteksi dini Penyakit Kanker (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		11		DINAS KESEHATAN
		Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Gangguan Indera (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		11		DINAS KESEHATAN
		Kabupaten/Kota dengan Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		11		DINAS KESEHATAN
		Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM (Dengan Satuan:Jumlah)	482	500		520		540		560		580		600		DINAS KESEHATAN
		Keluarga Menggunakan Jamban Memenuhi Syarat Kesehatan (Dengan Satuan:Jumlah)	68	70		72		74		76		78		75		DINAS KESEHATAN
		Kabupaten/Kota Sehat (Dengan Satuan:Persen)	18	18		20		22		24		26		28		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Evidence Based (Dengan Satuan:Jumlah)	11	11		11		11		11		11		11		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (Dengan Satuan:Persen)	55	60		65		70		75		80		85		DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:Persen)	18	20		22		24		26		28		30		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Jiwa (Dengan Satuan:Persen)	NA	5		8		11		14		17		20		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Dengan Satuan:Persen)	55	60		70		80		90		100		110		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Balita Gizi Buruk (Dengan Satuan:Persen)	0.9	0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Vitamin A pada Bayi dan Balita (Dengan Satuan:Persen)	61	78		80		82		84		86		88		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Balita (D/S) (Dengan Satuan:Persen)	55	65		67		69		71		73		75		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kalori (Dengan Satuan:Persen)	18.5	18		17		16		15		14		13		DINAS KESEHATAN
		Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayannan terpadu PTM sesuai Standar (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		4		7		9		10		11		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Beryodium (Dengan Satuan:Persen)	64	75		79		83		87		91		96		DINAS KESEHATAN
		Campak Dosis Kedua (Dengan Satuan:Persen)	45.7	51.1		56.5		61.9		67.2		72.6		78		DINAS KESEHATAN
		Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0		2		5		11		13		15		DINAS KESEHATAN
010203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per satuan penduduk (Dengan Satuan:per satuan penduduk)	15	35	36.300.711.684	36	37.041.985.982	37	38.534.884.210	38	50.280.065.028	39	56.656.559.171	40	218.814.206.075	DINAS KESEHATAN
		Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	5	6		7		8		9		10		11		DINAS KESEHATAN
		Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:per Satuan Penduduk)	2.65	11		12		13		14		15		16		DINAS KESEHATAN
		Rasio Bidan Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	78	95		96		97		98		99		100		DINAS KESEHATAN
		Rasio Perawat Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	217	117		220		225		230		235		240		DINAS KESEHATAN
		Rasio Apoteker Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	14.88	12		16		17		18		19		20		DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rasio Sarjana Kesehatan Masyarakat Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	24	35		36		37		38		39		40		DINAS KESEHATAN
010204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengunaan Obat Generik di Puskesmas (Dengan Satuan:Persen)	95	95	32.026.880.000	96	32.026.880.000	97	33.070.561.626	98	33.122.745.706	99	33.177.538.992	100	163.424.606.324	DINAS KESEHATAN
		Penggunaan Obat Generik di Rumah Sakit (Dengan Satuan:Persen)	67	70		72		74		76		78		80		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap (Dengan Satuan:Persen)	32	35		37.50		40		42.50		45		47.50		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Dengan Satuan:Persen)	45	45		47.50		50		52.50		55		57.50		DINAS KESEHATAN
		Penggunaan Obat Rasional (Dengan Satuan:Persen)	70	70		73		76		79		82		85		DINAS KESEHATAN
		Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Dengan Satuan:Persen)	85	85		87		89		91		93		95		DINAS KESEHATAN
		Makanan Jajanan Anak Sekolah (Dengan Satuan:Persen)	71	73		75		77		79		81		83		DINAS KESEHATAN
		Industri Rumah Tangga Pangan (Dengan Satuan:Persen)	88	90		91		93		94		95		95		DINAS KESEHATAN
010205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Organisasi Masyarakat yang Mendukung Kesehatan (Dengan Satuan:Jumlah)	12	12	32.706.276.600	14	33.527.656.200	16	33.326.269.349	18	34.137.883.553	20	36.052.601.300	22	169.750.687.002	DINAS KESEHATAN
		Pos Kesehatan Desa (Dengan Satuan:Persen)	31.15	32		36		40		44		48		52		DINAS KESEHATAN
		Kecematan dengan Indikator Keluarga Sehat (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1		2		3		4		5		6		DINAS KESEHATAN
		Aparatur Pemerintahan Desa yang Memanfaatkan 10% Dana Desa untuk Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	37.24	40		43		46		49		52		55		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Model Intervensi Kesehatan (Dengan Satuan:Jumlah)	4	5		6		7		8		9		10		DINAS KESEHATAN
01.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**903,621,146,924**		**827,111,864,938**		**276,754,834,270**		**310,091,890,969**		**323,439,649,298**		**2,641,019,386,399**	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**903,621,146,924**		**827,111,864,938**		**276,754,834,270**		**310,091,890,969**		**323,439,649,298**		**2,641,019,386,399**	
010301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhinya Penunjang Administrasi Kantor (Dengan Satuan:Persen)	100	100	8,056,774,259	100	36.194.026.863	100	35.020.643.926	100	36.942.329.540	100	37.286.058.024	100	153.499.832.612	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Bangunan Pengaman Pada WS dan Pengembangan Irigasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	243.733.178.917	100	316.527.440.772	100	54.893.718.050	100	61.513.089.854	100	67.622.898.839	100	744.290.326.432	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
010303	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Akses Air Minum Layak (Dengan Satuan:Persen)	76.76	79.36	78.712.331.322	80.53	17.497.384.571	81.23	34.597.253.800	82.03	37.162.123.028	82.13	40.098.492.257	82.13	208.067.584.978	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010304	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Akses sanitasi layak (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	70.84	899,445,200	71.25	7,000,000,000	72.34	11.000.000.000	73.44	3,100,000,000	73.44	21,999,445,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses Air Minum Layak (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	0	0	0	0	82.03	1,300,000,000	82.13	300,000,000	82.13	1,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (Dengan Satuan:Meter)	100	100	56.093.625.766	100	45.100.386.500	100	2,850,000,000	100	3,335,000,000	100	3,668,500,000	100	111.047.512.266	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010307	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Permukiman (Dengan Satuan:Persen)	100	100	53.712.331.322	100	48.604.437.600	100	12.075.000.000	100	13.782.500.000	100	15.160.750.000	100	143.335.018.922	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010308	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	78.249.222.501	100	27.606.388.863	100	44.300.000.000	100	48.730.000.000	100	53.603.000.000	100	252.488.611.364	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010309	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bagunan dan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	17.827.169.502	100	50.331.068.325	100	31.310.296.160	100	34.113.296.160	100	37.285.596.160	100	170.867.426.307	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Kemantapan Jalan (Dengan Satuan:Persen)	46.06	60.58	363.022.211.435	61.37	275.163.989.844	64.58	44.157.923.100	66.58	51.508.553.153	70.59	57.258.854.326	70.59	791.111.531.858	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010311	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2,451,801,900	100	4,868,800,100	100	4,400,000,000	100	4,605,000,000	100	4,830,500,000	100	21,156,102,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
010312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentasi Ketaatan RTRW (Dengan Satuan:-)	100	100	1,762,500,000	73	4,318,496,300	100	6,149,999,234	100	6,099,999,234	100	3,224,999,692	100	21,555,994,460	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
01.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**56,140,822,896**		**30,182,984,338**		**89,540,802,182**		**96,704,066,916**		**104,440,393,709**		**377,009,070,041**	
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**56,140,822,896**		**30,182,984,338**		**89,540,802,182**		**96,704,066,916**		**104,440,393,709**		**377,009,070,041**	
010401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian program dan kegiatan dinas (Dengan Satuan:%)	100	100	10.030.213.167	100	13.025.772.768	100	15.042.742.695	100	16.246.162.110	100	17.545.855.078	100	71,890,745,818	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
010402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	100	100	1,330,324,955	100	5,487,736,620	100	10.256.400.000	100	11.076.912.000	100	11.963.064.960	100	40,114,438,535	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
010403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	100	100	23.924.519.387	100	7,668,475,170	100	31.308.022.487	100	33.812.664.846	100	36.517.679.874	100	133.231.361.764	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
010405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (Dengan Satuan:%)	100	100	20.855.765.387	100	4,000,999,780	100	32.933.637.000	100	35.568.327.960	100	38.413.793.797	100	131.772.523.924	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**18,443,013,742**		**21,798,404,834**		**29,551,330,071**		**30,521,984,075**		**31,029,908,280**		**131,344,641,002**	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**13,752,613,742**		**14,910,204,834**		**19,688,080,071**		**20,672,484,075**		**21,706,108,280**		**90,729,491,002**	
010501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya penunjang uruasan pemerintahan Daerah Provinsi (Dengan Satuan:%)	100	100	6,036,475,542	100	6,727,228,120	100	9,587,755,171	100	10.067.142.930	100	10.570.500.077	100	42,989,101,840	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
010502	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menigkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	100	100	7,604,138,200	100	8,052,982,422	100	9,744,804,900	100	10.232.045.145	100	10.743.647.403	100	46,377,618,070	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
010504	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran. (Dengan Satuan:%)	100	100	112,000,000	100	129,994,292	100	355,520,000	100	373,296,000	100	391,960,800	100	1,362,771,092	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**4,690,400,000**		**6,888,200,000**		**9,863,250,000**		**9,849,500,000**		**9,323,800,000**		**40,615,150,000**	
010501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	0	20	3,262,500,000	20	3,438,200,000	20	5,272,250,000	20	5,904,500,000	20	5,081,300,000	100	22,958,750,000	B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
010503	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Menurunnya Indeks risiko bencana di daerah (Dengan Satuan:indeks)	160.50	160.35	1,427,900,000	160.35	3,450,000,000	160.25	4,591,000,000	160.15	3,945,000,000	160.05	4,242,500,000	159.95	17,656,400,000	B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**12,622,745,581**		**25,233,130,763**		**55,051,812,693**		**46,191,913,554**		**48,402,172,037**		**187,501,774,628**	
	DINAS SOSIAL				**12,622,745,581**		**25,233,130,763**		**55,051,812,693**		**46,191,913,554**		**48,402,172,037**		**187,501,774,628**	
010601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:persen)	100	100	10.307.745.581	100	15.259.181.832	100	29.352.624.197	100	18.342.593.538	100	19.386.881.981	100	92,649,027,129	DINAS SOSIAL
		Jumlah dan Jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		terpenuhinya serta meningkatnya administrasi, sarana dan prasarana perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terlaksananya cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
010602	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	100	1,109,898,478	100	2,789,000,000	100	3,871,900,000	100	4,414,200,000	100	12,184,998,478	DINAS SOSIAL
		Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Dengan Satuan:Persen)	0	0		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
010603	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	CAKUPAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (Dengan Satuan:Persen)	100	100	50,000,000	100	149,950,235	100	100,000,000	100	150,000,000	100	200,000,000	100	649,950,235	DINAS SOSIAL
010604	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabiliotas terlantar di dalam panti (Dengan Satuan:persen)	100	100	860,000,000	100	4,915,117,931	100	8,783,988,496	100	8,651,700,016	100	9,203,370,056	100	32,414,176,499	DINAS SOSIAL
		Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Presentase cakupan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
		Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
010605	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1,145,000,000		2,778,117,949		10.703.200.000		11.805.720.000		12.972.720.000		39,404,757,949	DINAS SOSIAL
010606	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	100	665,926,007	100	1,623,000,000	100	1,670,000,000	100	1,875,000,000	100	5,833,926,007	DINAS SOSIAL
010607	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terlaksananya cakupan pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	260,000,000	100	354,938,331	100	1,700,000,000	100	1,700,000,000	100	350,000,000	100	4,364,938,331	DINAS SOSIAL
02	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**147,816,869,656**		**201,239,457,837**		**228,836,898,790**		**246,755,445,139**		**272,149,901,121**		**1,096,798,572,543**	
02.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**9,190,522,101**		**15,827,998,693**		**16,118,372,354**		**17,002,709,450**		**20,460,573,334**		**78,600,175,932**	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**9,190,522,101**		**15,827,998,693**		**16,118,372,354**		**17,002,709,450**		**20,460,573,334**		**78,600,175,932**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
020701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Terselenggaranya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah Dinas Nakertrans Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Persen)	40	40	9,190,522,101	50	13.137.007.145	60	13.668.099.341	80	13.629.709.450	100	16.901.133.334	100	66,526,471,371	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
020702	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dengan Satuan:persen)	0	0	0	0	0	60	119,999,900	80	280,000,000	100	136,290,000	100	536,289,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
020703	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	0.53	0	0	1.53	849,996,482	2.53	1,005,562,492	3.75	1,350,000,000	5	1,312,500,000	5	4,518,058,974	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
020704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negerj) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	6.30	0	0	8	78,527,900	8.2	210,005,007	8.5	410,000,000	8.7	226,800,000	8.7	925,332,907	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
020705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Dengan Satuan:Persen)	0.97	0	0	5.7	299,136,666	7.9	320,008,181	8.5	423,000,000	9	383,850,000	9.0	1,425,994,847	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
020706	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:Persen)	36.58	0	0	39.90	1,463,330,500	45	794,697,433	63	910,000,000	85	1,500,000,000	85	4,668,027,933	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
02.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5,804,938,942**		**5,702,340,002**		**9,229,203,000**		**9,294,518,000**		**10,274,723,000**		**40,305,722,944**	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**5,804,938,942**		**5,702,340,002**		**9,229,203,000**		**9,294,518,000**		**10,274,723,000**		**40,305,722,944**	
020801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dengan Satuan:%)	60	65	4,504,938,942	67.50	4,140,435,002	70	6,373,987,000	72.50	5,675,461,000	75	6,384,137,000	75	27,078,958,944	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Dengan Satuan:%)	0	0		67.50		70		72.50		75		75		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Dengan Satuan:%)	10.5	10.8	400,000,000	11	93,884,000	11.2	347,743,000	11.5	455,455,000	12	514,000,000	12	1,811,082,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (Dengan Satuan:%)	27	28		28.5		28.5		29		30		27.5		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Dengan Satuan:%)	0	0		12		15		20		25		25		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (Dengan Satuan:%)	50	52		54		54		55		56		56		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Dengan Satuan:%)	50.25	52.25		57		66		70		70.5		70.5		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian (Dengan Satuan:%)	6.2	6.7		6.9		7.2		7.5		8		8		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (Dengan Satuan:%)	32.5	33.5	300,000,000	33	482,746,000	35.5	463,000,000	35.5	599,400,000	35.5	565,864,000	35.5	2,411,010,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Dengan Satuan:%)	95	95		95		95		95		96		96		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (Dengan Satuan:%)	0	0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan Layanan Rehabilitas Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitas Sosial Terlatih bagi Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu (Dengan Satuan:%)	5.62	6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan Penegakkan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Dengan Satuan:%)	60	60		70		70		70		70		70		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Dengan Satuan:%)	5	5.05		5.09		6		6		6		6		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Dengan Satuan:%)	0	78.5		79.5		80		80		80		80		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan (Dengan Satuan:%)	0	75		75		75		75		75		75		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Dengan Satuan:%)	30	30.5		29.5		29.5		29.5		29.1		29.1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	217,461,000	0	254,473,000	0	395,202,000	0	445,922,000	0	1,313,058,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020805	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terwujudnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (Dengan Satuan:%)	90	0	0	90.91	110,060,000	100	310,000,000	100	325,500,000	100	358,050,000	100	1,103,610,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presntase Kabupaten/Kota Layak Anak (Dengan Satuan:%)	0	75.6	600,000,000	78.5	617,000,000	78.5	810,000,000	82.5	965,000,000	100	1,061,500,000	100	4,053,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Dengan Satuan:%)	58	0	0	60	40,754,000	60	670,000,000	60	878,500,000	60	945,250,000	60	2,534,504,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (Dengan Satuan:%)	0	0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (Dengan Satuan:%)	0	78.5		79.5		79.5		80		80		80		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:%)	0	0.7		0.7		1		1		1		1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**10,912,924,251**		**14,600,258,223**		**14,789,506,040**		**15,325,541,342**		**16,091,318,449**		**71,719,548,305**	
	DINAS KETAHANAN PANGAN				**10,912,924,251**		**14,600,258,223**		**14,789,506,040**		**15,325,541,342**		**16,091,318,449**		**71,719,548,305**	
020901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya Perencanaan Yang Efektif, Penatausahaan Keuangan Yang Tertib dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100	100	8,381,374,251	100	11.360.993.592	100	10.212.839.973	100	10.520.041.972	100	11.045.544.110	100	51,520,793,898	DINAS KETAHANAN PANGAN
020902	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	100,000,000	100	90,005,136	100	94,505,393	100	99,230,662	100	104,192,196	100	487,933,387	DINAS KETAHANAN PANGAN
020903	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Maluku (Dengan Satuan:%)	100	100	1,855,000,000	100	2,597,253,485	100	3,902,554,363	100	4,097,682,082	100	4,302,566,186	100	16,755,056,116	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PANGAN MASYARAKAT															
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KETAHANAN PANGAN
020904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	416,550,000	100	363,005,740	100	381,156,027	100	400,213,828	100	420,224,519	100	1,981,150,114	DINAS KETAHANAN PANGAN
020905	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	160,000,000	100	189,000,270	100	198,450,284	100	208,372,798	100	218,791,438	100	974,614,790	DINAS KETAHANAN PANGAN
02.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**9,082,418,208**		**11,399,724,864**		**12,131,587,335**		**11,183,610,178**		**13,087,790,688**		**56,885,131,273**	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**9,082,418,208**		**11,399,724,864**		**12,131,587,335**		**11,183,610,178**		**13,087,790,688**		**56,885,131,273**	
021101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah upaya penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)	6	7	5,597,682,726	7	5,912,227,133	6	9,017,554,813	6	6,623,876,848	6	6,955,070,692	6	34,106,412,212	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah upaya penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)	6	7		7		6		6		6		6		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah upaya penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)	6	7		7		6		6		6		6		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
021102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibuat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	2	1,499,999,575	1	800,000,780	1	800,000,000	1	750,000,000	1	3,850,000,355	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
021103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Upaya)	1	3	2,037,535,482	3	2,169,998,916	2	749,998,614	3	1,387,498,545	3	1,456,873,472	3	7,801,905,029	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
021105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)	1	1	258,500,000	1	267,499,930	1	202,713,328	1	212,848,994	1	223,491,444	1	1,165,053,696	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
021106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Jumlah upaya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	1	1	335,700,000	1	649,999,812	1	650,123,510	1	682,629,686	1	716,761,170	1	3,035,214,178	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Maluku (Dengan Satuan:Upaya)														
021107	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah objek pengakuan dan/atau peningkatan kapasitas MHA atau MA dalam PPLH di Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Objek)	0	150	475,000,000	55	449,999,865	2	136,063,240	3	442,866,402	4	550,009,722	4	2,053,939,229	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
021108	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (Dengan Satuan:Upaya)	0	1	228,000,000	1	299,999,681	1	375,133,100	1	393,889,755	1	413,584,243	1	1,710,606,779	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
021109	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi yang diberikan untuk masyarakat (Dengan Satuan:Jenis)	0	1	150,000,000	1	149,999,952	1	199,999,950	1	209,999,948	1	220,499,945	1	930,499,795	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
021110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah upaya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Upaya)	0	0	0	0	0	0	0	1	430,000,000	1	451,500,000	1	881,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
021111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah upaya pengelolaan persampahan (Dengan Satuan:Upaya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,350,000,000	1	1,350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**0**		**8,035,476,235**		**9,891,568,155**		**13,340,287,470**		**15,374,963,138**		**46,642,294,998**	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**0**		**8,035,476,235**		**9,891,568,155**		**13,340,287,470**		**15,374,963,138**		**46,642,294,998**	
021201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Tercapai	0	0	0	100	7,224,659,113	100	8,696,568,155	100	9,409,258,876	100	10.702.690.255	100	36,033,176,399	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tercapai Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0	0	0	0.75	264,153,340	0.80	240,000,000	0.85	994,660,887	0.90	1,188,200,020	0.90	2,687,014,247	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Penduduk Berakte Keluarga	0	0	0	0.85	191,150,190	0.90	250,000,000	0.95	1,136,440,207	100	1,393,156,238	100	2,970,746,635	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	3	206,403,051	3	375,000,000	3	1,427,427,500	3	1,642,541,625	0	3,651,372,176	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (Dengan Satuan:Ada/Tidak Ada)	0	0	0	Ada	149,110,541	Ada	330,000,000	Ada	372,500,000	Ada	448,375,000	Ada	1,299,985,541	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**15,055,210,000**		**12,034,000,000**		**13,891,126,000**		**16,242,526,000**		**16,232,926,000**		**73,455,788,000**	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**15,055,210,000**		**12,034,000,000**		**13,891,126,000**		**16,242,526,000**		**16,232,926,000**		**73,455,788,000**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
021301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD (Dengan Satuan:Nilai)	C	C	6,711,210,000	CC	6,209,000,000	B	6,764,126,000	B	7,842,526,000	BB	7,809,926,000	BB	35,336,788,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
021302	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif (Dengan Satuan:Kelembagaan Desa)	60	0	0	64	200,000,000	70	220,000,000	72	240,000,000	75	260,000,000	75	920,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
021303	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kawasan Perdesaan yang berkembang (Dengan Satuan:Persen)	18	41	625,000,000	42	625,000,000	43	625,000,000	44	625,000,000	45	625,000,000	45	3,125,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
021304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa baik (Dengan Satuan:Persen)	10	20	4,669,000,000	30	1,550,000,000	40	1,970,000,000	50	2,850,000,000	60	2,745,000,000	60	13,784,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
021305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan status desa mandiri (Dengan Satuan:Persen)	0.33	1.33	3,050,000,000	2.33	3,450,000,000	3.33	4,312,000,000	4.33	4,685,000,000	6.33	4,793,000,000	6.33	20,290,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**0**		**1,051,474,301**		**1,197,500,000**		**2,697,125,000**		**3,085,193,750**		**8,031,293,051**	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**0**		**1,051,474,301**		**1,197,500,000**		**2,697,125,000**		**3,085,193,750**		**8,031,293,051**	
021402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	45.7	250,000,000	45.99	547,500,000	46.27	629,625,000	46.23	724,068,750	184.0	2,151,193,750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:Persentase)	0	0	0	2.91	498,300,800	0	0	2.87	932,500,000	2.84	1,071,125,000	11.0	2,501,925,800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	39.68	303,173,501	40.68	650,000,000	41.68	1,135,000,000	42.68	1,290,000,000	164.00	3,378,173,501	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**7,427,940,625**		**18,384,370,039**		**28,856,306,398**		**32,597,287,198**		**36,674,464,156**		**123,940,368,416**	
	DINAS PERHUBUNGAN				**7,427,940,625**		**18,384,370,039**		**28,856,306,398**		**32,597,287,198**		**36,674,464,156**		**123,940,368,416**	
021501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase kecukupan layanan dan sarana administrasi perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	0	100	3,136,783,285	100	11.109.295.007	100	12.920.715.584	100	14.003.615.583	100	14.891.095.583	100	56,061,505,042	DINAS PERHUBUNGAN
021502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Angka Kecelakaan di Jalan Raya (Dengan Satuan:Persen)	12	9	1,645,970,518	9	4,629,888,213	9	13.290.404.004	9	15.948.484.805	9	19.138.181.763	9	54,652,929,303	DINAS PERHUBUNGAN
021503	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Provinsi (Dengan Satuan:Persen)	50.23	50.23	2,089,238,022	55.24	2,089,238,019	56.16	2,089,238,010	67.94	2,089,238,010	69.50	2,089,238,010	69.50	10,446,190,071	DINAS PERHUBUNGAN
021505	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah (Dengan Satuan:Persen)	0	100	555,948,800	100	555,948,800	100	555,948,800	100	555,948,800	100	555,948,800	100	2,779,744,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**21,552,064,014**		**21,687,064,014**		**26,852,794,014**		**34,660,261,359**		**41,188,079,921**		**145,940,263,322**	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**21,552,064,014**		**21,687,064,014**		**26,852,794,014**		**34,660,261,359**		**41,188,079,921**		**145,940,263,322**	
021601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Pemenuhan Operasional perangkat daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	11.275.531.928	100	11.410.531.928	100	11.475.531.928	100	14.059.999.273	100	16.235.817.835	100	64,457,412,892	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
021602	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Dengan Satuan:persen)	10	83.33	3,213,743,854	83.33	3,213,743,854	83.33	6,943,743,854	100	9,446,743,854	100	11.828.743.854	100	34,646,719,270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
021603	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Peresentase pemanfaatan Jaringan TIK (Dengan Satuan:persen)	20	30	7,062,788,232	60	7,062,788,232	80	8,433,518,232	100	11.153.518.232	100	13.123.518.232	100	46,836,131,160	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**12,925,462,799**		**14,659,713,592**		**16,591,281,684**		**17,677,843,241**		**19,560,322,883**		**81,414,624,199**	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**12,925,462,799**		**14,659,713,592**		**16,591,281,684**		**17,677,843,241**		**19,560,322,883**		**81,414,624,199**	
021701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mengembangkan dan menguatkan kapasitas dan institusi dinas (Dengan Satuan:PERSENTASE)	100	100	10.910.243.499	100	10.920.620.086	100	10.458.333.503	100	10.908.997.651	100	13.499.235.013	100	56,697,429,752	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
021703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif (Dengan Satuan:satuan)	500	210	120,000,000	210	140,000,000	210	170,000,000	210	185,000,000	210	193,000,000	1050	808,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
021704	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	terlaksananya penukuran tingkat kesehatan koperasi (Dengan Satuan:unit)	10	10	10,000,000	11	10,000,000	13	10,000,000	15	10,000,000	17	10,000,000	56	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
021705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	peningkatan SDM Koperasi dan UKM (Dengan Satuan:satuan)	220	760	975,219,300	696	2,417,093,506	518	2,537,948,181	518	2,664,845,590	518	2,798,087,870	310	11,393,194,447	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
021706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (Dengan Satuan:Satuan)	165	25	350,000,000	30	457,000,000	70	1,076,000,000	75	1,250,000,000	80	1,875,000,000	275	5,008,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
021707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlaksananya Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan retrukturisasi usaha (Dengan Satuan:Satuan)	175	40	350,000,000	50	485,000,000	60	689,000,000	70	789,000,000	80	975,000,000	300	3,288,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
021708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terciptanya UMKM yang unggul dan berdaya saing (Dengan Satuan:Satuan)	300	60	210,000,000	70	230,000,000	80	1,650,000,000	90	1,870,000,000	100	210,000,000	400	4,170,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**5,690,233,321**		**10,191,103,773**		**18,586,370,667**		**16,721,185,758**		**18,560,795,659**		**69,749,689,178**	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**5,690,233,321**		**10,191,103,773**		**18,586,370,667**		**16,721,185,758**		**18,560,795,659**		**69,749,689,178**	
021801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Dengan Satuan:Baik)	Baik	Baik	4,808,785,021	Baik	7,173,362,511	Baik	10.044.201.494	Baik	7,324,799,668	Baik	7,754,951,655	Baik	37,106,100,349	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Layanan OPD (Dengan Satuan:Persen)	90.30 %	90%		90%		90%		90%		90%		90%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan:Jumlah)	1	1	305,236,800	1	242,924,088	2	1,288,420,000	2	1,417,262,000	2	1,629,851,300	2	4,883,694,188	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA) (Dengan Satuan:Jumlah)	10	10	206,647,000	10	1,499,998,692	45	5,420,000,000	45	5,962,000,000	45	6,856,300,000	45	19,944,945,692	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:Nilai)	91	90	272,975,000	91	487,498,719	92	968,418,774	92.5	1,065,260,651	93	1,225,049,749	93	4,019,202,893	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi (Dengan Satuan:Jumlah)	50	50	14,289,500	50	650,300,363	50	715,330,399	50	786,863,439	50	904,892,955	50	3,071,676,656	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan investasi (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	82,300,000	100%	137,019,400	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	189,750,000	100%	724,069,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**30,070,379,000**		**44,827,992,000**		**34,474,992,000**		**31,299,992,000**		**31,674,992,000**		**172,348,347,000**	
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				**30,070,379,000**		**44,827,992,000**		**34,474,992,000**		**31,299,992,000**		**31,674,992,000**		**172,348,347,000**	
021901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Kualitas Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	50	60	18.690.379.000	70	18.739.992.000	80	18.759.992.000	90	14.984.992.000	100	15.009.992.000	100	86,185,347,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
021902	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Dengan Satuan:%)	50	60	5,865,000,000	70	4,250,000,000	80	5,615,000,000	90	5,615,000,000	100	5,615,000,000	100	26,960,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
021903	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tingkat Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (Dengan Satuan:%)	50	60	5,465,000,000	70	21.638.000.000	80	9,800,000,000	90	10.300.000.000	100	10.550.000.000	100	57,753,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
021904	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dengan Satuan:%)	50	60	50,000,000	70	200,000,000	80	300,000,000	90	400,000,000	100	500,000,000	100	1,450,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
02.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**560,999,007**		**560,999,007**		**560,999,007**		**810,999,007**		**940,999,007**		**3,434,995,035**	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**560,999,007**		**560,999,007**		**560,999,007**		**810,999,007**		**940,999,007**		**3,434,995,035**	
022002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:persen)	10	10	560,999,007	20	560,999,007	30	560,999,007	20	810,999,007	20	940,999,007	100	3,434,995,035	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**252,215,336**		**252,215,336**		**477,123,636**		**888,514,136**		**1,078,514,136**		**2,948,582,580**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
022102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)	10	20	252,215,336	20	252,215,336	20	477,123,636	20	888,514,136	20	1,078,514,136	100	2,948,582,580	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**12,185,885,000**		**12,185,885,000**		**12,185,885,000**		**12,185,885,000**		**12,185,885,000**		**60,929,425,000**	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**12,185,885,000**		**12,185,885,000**		**12,185,885,000**		**12,185,885,000**		**12,185,885,000**		**60,929,425,000**	
022202	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	meningkatnya Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Jumlah Cagar Budaya)	63	64	12.185.885.000	65	12.185.885.000	65	12.185.885.000	68	12.185.885.000	70	12.185.885.000	75	60,929,425,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
022203	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Dengan Satuan:Jumlah festival seni daerah)	4	4	0	6	0	6	0	8	0	8	0	9	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
022204	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Terlestarikannya Cagar Budaya (Dengan Satuan:Data)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
022205	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
022206	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
02.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**6,795,097,052**		**9,634,752,758**		**12,203,283,500**		**13,962,160,000**		**14,723,360,000**		**57,318,653,310**	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**6,795,097,052**		**9,634,752,758**		**12,203,283,500**		**13,962,160,000**		**14,723,360,000**		**57,318,653,310**	
022301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terwujudnya tata sistem tata kelola dinas pepustakaan dan kearsipan secara baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	6,691,747,052	100	7,726,080,758	100	9,046,489,000	100	10.517.160.000	100	11.083.360.000	100	45,064,836,810	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
022302	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat (Dengan Satuan:NIlai)	49.86	52.90	52,250,000	54	1,819,971,000	58	2,486,794,500	62	2,710,000,000	65	2,840,000,000	65	9,909,015,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
022303	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Dengan Satuan:Indeks)	6.58	17.51	51,100,000	18	88,701,000	19	670,000,000	20	735,000,000	21	800,000,000	21	2,344,801,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
02.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**310,580,000**		**204,090,000**		**799,000,000**		**865,000,000**		**955,000,000**		**3,133,670,000**	
022402	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Dengan Satuan:Persen)	25	25	285,580,000	30	179,090,000	35	724,000,000	40	760,000,000	45	820,000,000	45	2,768,670,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
022403	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	25	27	25,000,000	30	25,000,000	32	50,000,000	35	75,000,000	38	100,000,000	38	275,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:Persen)														
022404	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terwujudnya tata perizinan dan penggunaan arsip secara baik (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	0	0	0	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	90,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
03	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**224,564,259,236**		**291,560,045,164**		**396,933,350,055**		**475,715,515,809**		**464,765,018,191**		**1,853,538,188,455**	
03.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**69,748,710,498**		**80,576,831,982**		**106,871,249,323**		**122,610,634,861**		**135,273,238,347**		**515,080,665,011**	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				**69,748,710,498**		**80,576,831,982**		**106,871,249,323**		**122,610,634,861**		**135,273,238,347**		**515,080,665,011**	
032501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	94.28	95.23	39.180.237.498	95.71	38.159.798.174	96.18	38.796.257.816	96.57	49.136.663.861	97.15	52.796.870.247	97.15	218.069.827.596	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PAD Sektor Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan:Rp)	3279772750	400000 0000		595700 0000		625000 0000		656250000		68906250 00		689062 5000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
032502	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikelola (Dengan Satuan:Ha)	150000	159901.48	5,055,915,000	420690.96	4,376,213,500	168305 5.09	7,944,957,000	1933055.09	9,640,709,000	2283055.09	10.604.779.900	238305 5.09	37,622,574,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
032503	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Dengan Satuan:Poin)	107.74	101.27	14.424.260.000	101.78	20.255.942.100	102.29	44.342.272.200	102.80	42.259.780.000	103.31	46.485.758.000	103.31	167.768.012.300	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	544953.5	523261.6		525878.9		528507.3		531149.8		533805.6		533805.6		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
032504	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan Budidaya (Ikan) (Dengan Satuan:Ton)	2077	2094	5,414,633,000	3141	12.024.423.208	4712	6,117,574,307	7068	12.044.626.000	10602	14.904.088.600	10602	50,505,345,115	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) (Dengan Satuan:Poin)	109.52	101		97.50		98.50		99.50		100.50		100.50		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Produksi Perikanan Budidaya (Rumput Laut) (Dengan Satuan:Ton)	618463	664344		265738		305599		351439		404155		404155		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
032505	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (Dengan Satuan:%)	45	50	4,053,070,000	60	4,733,225,400	65	6,726,470,000	70	4,782,434,000	75	5,260,677,400	75	25,555,876,800	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
032506	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi ikan (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Tahun)	67.34	68.01	1,620,595,000	70.05	1,027,229,600	72.15	2,943,718,000	74.31	4,746,422,000	76.54	5,221,064,200	76.54	15,559,028,800	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
03.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**12,929,017,312**		**31,143,978,397**		**28,493,704,192**		**34,855,075,367**		**36,907,703,111**		**144,329,478,379**	
	DINAS PARIWISATA				**12,929,017,312**		**31,143,978,397**		**28,493,704,192**		**34,855,075,367**		**36,907,703,111**		**144,329,478,379**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
032601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	10.084.621.137	100	12.522.199.642	100	12.439.812.824	100	14.275.989.439	100	14.993.912.888	100	64,316,535,930	DINAS PARIWISATA
032602	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Destinasi Wisata (Dengan Satuan:Persen)	2.84	11.53	1,296,227,800	3.54	5,216,548,258	2.94	5,332,758,813	3.78	5,586,896,752	4.51	5,853,741,587	4.51	23,286,173,210	DINAS PARIWISATA
032603	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (Dengan Satuan:Persen)	23.01	12.37	767,964,500	16.67	5,462,200,552	20	4,348,707,333	22	6,646,142,698	24	6,874,449,833	24	24,099,464,916	DINAS PARIWISATA
		persentase pertumbuhan pengeluaran wisatawan (Dengan Satuan:persen)	-40.23	-10.71		100.22		100		101		102		102		DINAS PARIWISATA
032604	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Persen)	0.71	55.32	336,918,500	0.98	3,559,338,926	5	3,236,316,643	10	5,053,132,474	15	5,728,039,096	15	17,913,745,639	DINAS PARIWISATA
032605	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi yang Tersetifikasi di Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Orang)	80	0	443,285,375	45	4,383,691,019	50	3,136,108,579	55	3,292,914,004	60	3,457,559,707	60	14,713,558,684	DINAS PARIWISATA
03.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**66,893,288,009**		**68,331,088,009**		**69,739,069,266**		**71,858,269,266**		**73,841,469,266**		**350,663,183,816**	
	DINAS PERTANIAN				**66,893,288,009**		**68,331,088,009**		**69,739,069,266**		**71,858,269,266**		**73,841,469,266**		**350,663,183,816**	
032701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah (persen) (Dengan Satuan:%)	100	100	38.671.610.743	100	39.154.710.743	100	39.712.592.000	100	40.966.692.000	100	42.079.792.000	100	200.585.397.486	DINAS PERTANIAN
032702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Bertambahnya Jumlah Sarana Pertanian yang dikembangkan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	17.494.160.000	1	18.089.360.000	1	18.689.460.000	1	19.264.560.000	1	19.839.660.000	1	93,377,200,000	DINAS PERTANIAN
032703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Bertambahnya Jumlah Prsarana Pertanian yang dikembangkan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	9,618,000,000	1	9,690,000,000	1	9,760,000,000	1	9,815,000,000	1	9,895,000,000	1	48,778,000,000	DINAS PERTANIAN
032704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terkendalinya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dengan Satuan:%)	100	100	277,017,266	100	302,017,266	100	352,017,266	100	402,017,266	100	452,017,266	100	1,785,086,330	DINAS PERTANIAN
032705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)	30	50	250,000,000	55	275,000,000	60	300,000,000	65	325,000,000	70	350,000,000	70	1,500,000,000	DINAS PERTANIAN
032706	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terlaksananya Perizinan Usaha Pertanian (Dengan Satuan:%)	100	0	0	100	165,000,000	100	185,000,000	100	215,000,000	100	225,000,000	100	790,000,000	DINAS PERTANIAN
032707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani (Dengan Satuan:%)	97	97	582,500,000	98	655,000,000	98	740,000,000	99	870,000,000	100	1,000,000,000	100	3,847,500,000	DINAS PERTANIAN
03.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**12,505,735,000**		**21,244,203,000**		**89,286,460,608**		**138,078,740,000**		**148,664,526,520**		**409,779,665,128**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS KEHUTANAN				**12,505,735,000**		**21,244,203,000**		**89,286,460,608**		**138,078,740,000**		**148,664,526,520**		**409,779,665,128**	
032801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD (Dengan Satuan:persen)	100	100	2,572,708,000	100	4,023,647,000	100	42.021.783.000	100	46.940.302.000	100	48.046.325.520	100	143.604.765.520	DINAS KEHUTANAN
032803	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan (Dengan Satuan:Lokasi)	10	10	6,782,259,000	18	8,235,478,000	18	34.497.276.608	18	61.947.117.000	18	68.547.408.000	18	180.009.538.608	DINAS KEHUTANAN
032804	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Angka persentase peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan (Dengan Satuan:persen)	65	65	2,629,276,000	66	7,200,945,000	67	350,500,000	68	1,752,571,000	0	1,927,828,000	0	13,861,120,000	DINAS KEHUTANAN
032805	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (Dengan Satuan:Unit)	73	0	0	13	1,176,316,000	14	5,334,288,000	15	7,596,750,000	15	8,367,038,000	16	22,474,392,000	DINAS KEHUTANAN
032806	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah Unit Bangunan Sipil Teknis KTA (Dengan Satuan:Unit)	30	30	521,492,000	11	607,817,000	257	7,082,613,000	175	19.842.000.000	215	21.775.927.000	230	49,829,849,000	DINAS KEHUTANAN
03.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**14,187,508,417**		**14,331,096,554**		**15,929,594,766**		**17,162,796,315**		**18,879,080,947**		**80,490,076,999**	
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				**14,187,508,417**		**14,331,096,554**		**15,929,594,766**		**17,162,796,315**		**18,879,080,947**		**80,490,076,999**	
032901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentasi Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	100	8,990,407,417	100	9,212,643,100	100	8,850,129,841	100	9,247,000,315	100	10.171.700.347	100	46,471,881,020	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
032902	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah Peta Potensi Geologi dan Potensi Air Tanah (Dengan Satuan:Dokumen (Peta))	8	6	201,750,000	21	559,386,699	22	415,451,907	23	449,997,000	24	494,996,700	25	2,121,582,306	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
032903	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah IUP Terbit, dibina, dan diawasi (Dengan Satuan:IUP)	40	5	470,650,000	8	393,973,400	9	542,782,773	9	1,046,940,000	9	1,151,634,000	40	3,605,980,173	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
032905	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Dengan Satuan:Rumah Tangga)	0	350	2,624,701,000	365	1,665,100,112	375	2,050,010,056	390	2,255,009,000	400	2,480,514,900	400	11,075,335,068	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
032906	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektifikasi dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran (Dengan Satuan:% / RTS)	90,95/375	95/375	1,900,000,000	96/420	2,499,993,243	97/592	4,071,220,189	98/500	4,163,850,000	100/500	4,580,235,000	100/500	17,215,298,432	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
03.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**4,900,000,000**		**5,500,000,000**		**6,150,000,000**		**7,800,000,000**		**8,950,000,000**		**33,300,000,000**	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				**4,900,000,000**		**5,500,000,000**		**6,150,000,000**		**7,800,000,000**		**8,950,000,000**		**33,300,000,000**	
033002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jenis Bahan Berbahaya (Dengan Satuan:Jenis)	2	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	750,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:Persen)	3,5-4	3.5-4	3,300,000,000	3,5-4	3,800,000,000	3,5-4	4,300,000,000	3,5-4	5,400,000,000	3,5-4	6,400,000,000	3,5-4	23,200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
033005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (Dengan Satuan:Pesen)	10	10	750,000,000	10	750,000,000	10	750,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	10	4,250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Konsumen (Dengan Satuan:Laporan)	2	3	700,000,000	3	800,000,000	4	950,000,000	4	1,100,000,000	5	1,250,000,000	5	4,800,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga (Dengan Satuan:Persen)	65	75		80		90		0		0		90		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentse Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku (Dengan Satuan:Komoditi)	6	6		6		6		6		6		6		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (Dengan Satuan:Kelompok Pedagang)	0	0	0	0	0	0	0	15	150,000,000	15	150,000,000	30	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
03.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**43,400,000,000**		**70,255,000,000**		**80,215,000,000**		**82,200,000,000**		**41,350,000,000**		**317,420,000,000**		
033101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Persen)	95	100	26.900.000.000	100	28.755.000.000	100	28.715.000.000	100	20.700.000.000	100	20.350.000.000	100	125.420.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Kinerja Layanan Organisasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:USD (Juta))	25	25	16.500.000.000	30	41.500.000.000	35	51.500.000.000	35	61.500.000.000	35	21.000.000.000	35	192.000.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:Orang)	35,719	35,719		35,719		35,719		35,719		35,719		35,719		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
03.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**0**		**177,847,222**		**248,271,900**		**1,150,000,000**		**899,000,000**		**2,475,119,122**		
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			**0**		**177,847,222**		**248,271,900**		**1,150,000,000**		**899,000,000**		**2,475,119,122**		
033202	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pertumbuhan kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	20	177,847,222	0	0	40	500,000,000	40	500,000,000	100	1,177,847,222	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
033203	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan/Unit Pemukinan Transmigrasi yang siap dibangun (Dengan Satuan:Kawasan)	0	0	0	0	0	1	148,271,900	1	250,000,000	1	189,000,000	3	587,271,900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
033204	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing (Dengan Satuan:Kelompok)	7	0	0	0	0	5	100,000,000	10	400,000,000	10	210,000,000	32	710,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
04	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**120,985,749,419**		**397,764,111,247**		**417,276,606,065**		**496,449,911,369**		**605,247,039,219**		**2,037,723,417,319**		
04.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**120,985,749,419**		**283,658,098,247**		**295,208,983,105**		**314,697,518,068**		**332,627,449,265**		**1,347,177,798,104**		
	SEKRETARIAT DAERAH			**120,985,749,419**		**283,658,098,247**		**295,208,983,105**		**314,697,518,068**		**332,627,449,265**		**1,347,177,798,104**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
040101	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum Pelayanan Perkantoran (Dengan Satuan:Presentase)	100	100	107.862.381.263	100	116.334.971.201	100	119.992.818.504	100	130.877.564.097	100	140.771.554.117	100	615.839.289.182	SEKRETARIAT DAERAH
040102	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Penerapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	1,573,381,200	100	1,839,758,284	100	3,094,787,773	100	3,389,527,162	100	3,713,003,520	100	13,610,457,939	SEKRETARIAT DAERAH
040103	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan, Penataan Otonomi Daerah dan Kerjasama (Dengan Satuan:Presentase)	100	100	5,013,197,500	100	41.568.182.332	100	42.366.260.466	100	42.736.003.941	100	43.122.228.177	100	174.805.872.416	SEKRETARIAT DAERAH
040104	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				299,999,755		114.342.521.264		119.035.195.950		126.044.455.924		132.354.741.596		492.076.914.489	SEKRETARIAT DAERAH
040105	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Penanganan Perkara Litigasi, Non Litigasi dan HAM serta Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Secara Maksimal (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	100	2,468,610,386	100	2,838,910,154	100	2,980,855,661	100	3,129,898,443	0	11,418,274,644	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Serta Pendokumentasian dan Informasi Hukum Secara Maksimal (Dengan Satuan:Persen)	0	0		100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
040106	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya perekonomian dan pembangunan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	2,661,789,701	12	3,171,554,780	12	3,488,710,258	12	3,837,581,283	12	4,221,339,412	12	17,380,975,434	SEKRETARIAT DAERAH
040107	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (Dengan Satuan:persentase)	100	100	1,650,000,000	100	1,815,000,000	100	2,063,050,000	100	2,269,355,000	100	2,496,291,000	100	10,293,696,000	SEKRETARIAT DAERAH
040108	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Fasiitasi Administrasi Pembangunan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	1,925,000,000	100	2,117,500,000	100	2,329,250,000	100	2,562,175,000	100	2,818,393,000	100	11,752,318,000	SEKRETARIAT DAERAH
04.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**0**		**114,106,013,000**		**122,067,622,960**		**181,752,393,301**		**272,619,589,954**		**690,545,619,215**	
	SEKRETARIAT DPRD				**0**		**114,106,013,000**		**122,067,622,960**		**181,752,393,301**		**272,619,589,954**		**690,545,619,215**	
040201	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	Terlaksanaya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dengan Satuan:Persen)	86	90	0	93	64.686.434.000	95	63.470.784.510	98	93.857.135.625	100	140.785.703.440	100	362.800.057.575	SEKRETARIAT DPRD
040202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Dengan Satuan:Persen)	87	87	0	90	49.419.579.000	94	58.596.838.450	96	87.895.257.676	97	131.833.886.514	100	327.745.561.640	SEKRETARIAT DPRD
05	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**338,625,140,912**		**430,207,390,400**		**487,161,595,487**		**502,531,057,143**		**532,781,966,952**		**2,291,307,150,894**	
05.01	**PERENCANAAN**				**350,000,000**		**30,264,974,457**		**30,825,087,588**		**32,331,765,117**		**36,009,199,172**		**129,781,026,334**	
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**350,000,000**		**523,300,000**		**750,600,000**		**810,680,000**		**875,534,000**		**3,310,114,000**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
050102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Dengan Satuan:%)	100	100	350,000,000	100	523,300,000	100	750,600,000	100	810,680,000	100	875,534,000	100	3,310,114,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**0**		**29,741,674,457**		**30,074,487,588**		**31,521,085,117**		**35,133,665,172**		**126,470,912,334**	
050101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	15 dokumen		0	15 dokumen	12.931.938.647	15 dokumen	13.963.631.957	15 dokumen	14.554.686.705	15 dokumen	16.351.446.838	15 dokumen	57,801,704,147	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
050102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6 Dokumen	0	0	6 Dokumen	8,315,870,122	6 dokumen	7,234,232,306	6 Dokumen	7,595,943,922	6 Dokumen	8,975,741,118	6 Dokumen	32,121,787,468	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
050103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen/Laporan)	12 Dokumen/ Laporan		0	12 Dokumen/ Laporan	8,493,865,688	12 Dokumen/ Laporan	8,876,623,325	12 Dokumen/ Laporan	9,370,454,490	12 Dokumen/ Laporan	9,806,477,216	12 Dokumen/ Laporan	36,547,420,719	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
05.02	**KEUANGAN**				**322,003,317,286**		**338,179,952,530**		**355,517,913,516**		**372,847,325,905**		**391,516,089,036**		**1,780,064,598,273**	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**507,145,300**		**475,291,198**		**527,936,790**		**527,936,790**		**580,730,469**		**2,619,040,547**	
050203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang dan Penataausahaan Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	507,145,300	100	475,291,198	100	527,936,790	100	527,936,790	100	580,730,469	100	2,619,040,547	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**270,697,489,449**		**284,232,363,925**		**298,844,064,449**		**313,366,181,224**		**329,034,490,281**		**1,496,174,589,328**	
050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas evaluasi SAKIP (Dengan Satuan:persentase / skor / nilai)	100%	100%	14.934.358.843	100%	15.681.076.786	100%	16.465.130.625	100%	17.288.387.156	100%	18.152.806.513	100%	82,521,759,923	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
050202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:persentase)	100%	100%	254.163.158.090	100%	266.871.315.997	100%	280.214.881.796	100%	294.225.625.884	100%	308.936.907.175	100%	1.404.411.888.942	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
050203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat kepatuhan terhdap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:persentase)	100%	100%	1,599,972,516	100%	1,679,971,142	100%	2,164,052,028	100%	1,852,168,184	100%	1,944,776,593	100%	9,240,940,463	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				**50,798,682,537**		**53,472,297,407**		**56,145,912,277**		**58,953,207,891**		**61,900,868,286**		**281,270,968,398**	
050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terselenggaranya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	38.578.093.849	100	40.608.519.842	100	42.649.445.833	100	44.781.918.125	100	47.021.014.031	100	213.638.991.680	BADAN PENDAPATAN DAERAH
050202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1,073,767,951	100	1,130,282,054	100	1,176,296,157	100	1,235,110,965	100	1,296,866,513	100	5,912,323,640	BADAN PENDAPATAN DAERAH
050204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase terlaksannya program pengelolaan pendapatan daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	11.146.820.737	100	11.733.495.511	100	12.320.170.287	100	12.936.178.801	100	13.582.987.742	100	61,719,653,078	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
05.03	KEPEGAWAIAN				948,000,000		12,225,022,450		19,016,917,632		17,250,284,700		17,832,369,392		67,272,594,174	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				948,000,000		12,225,022,450		19,016,917,632		17,250,284,700		17,832,369,392		67,272,594,174	
050301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaiandan Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	80 %	80 %	948,000,000	85 %	8,598,382,900	90 %	11.668.917.632	905%	9,880,034,700	100 %	9,927,106,892	100 %	41,022,442,124	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD (Dengan Satuan:%)	70	70 %		75 %		80 %		85 %		90 %		90 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya (Dengan Satuan:%)	75 %		0	75 %	3,626,639,550	80 %	7,348,000,000	85 %	7,370,250,000	90 %	7,905,262,500	90 %	26,250,152,050	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Persentase PNS yang meningkat Kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar (Dengan Satuan:%)	75 %			75 %		80 %		85 %		90 %		90 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang Terevaluasi Kinerjanya (Dengan Satuan:%)	80 %			80 %		90 %		95 %		100 %		100%		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	85 %			85 %		90 %		95 %		100%		100 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	80 %			80 %		84 %		88 %		90 %		90 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Persentase Pelayanan Kasus Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	80 %			80 %		84 %		88 %		90 %		90 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				0		25,476,992,604		46,315,297,951		50,265,677,132		54,603,103,349		176,661,071,036	
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA				0		25,476,992,604		46,315,297,951		50,265,677,132		54,603,103,349		176,661,071,036	
050401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Layanan Administrasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	100	12.064.939.605	100	20.482.018.259	100	21.883.222.271	100	23.416.555.802	100	77,846,735,937	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	100	13.412.052.999	100	25.833.279.692	100	28.382.454.861	100	31.186.547.547	100	98,814,335,099	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				0		6,039,217,724		8,260,216,017		13,135,726,818		13,440,763,158		40,875,923,717	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				0		6,039,217,724		8,260,216,017		13,135,726,818		13,440,763,158		40,875,923,717	
050502	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah penelitian yang dihasilkan setiap tahun (Dengan Satuan:Jumlah Dokumen Penelitian)	10 Dokumen Penelitian	0	0	10 Dokumen Penelitian	6,039,217,724	10 Dokumen Penelitian	8,260,216,017	10 Dokumen Penelitian	13.135.726.818	10 Dokumen Penelitian	13.440.763.158	10 Dokumen Penelitian	40,875,923,717	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
05.06	PENGELOLAAN PERBATASAN				0		1,181,745,617		5,150,198,184		2,470,357,330		3,399,664,197		12,201,965,328	
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH				0		1,181,745,617		5,150,198,184		2,470,357,330		3,399,664,197		12,201,965,328	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
050601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan BPPD Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Bulan)	0	0	0	12	836,674,560	12	4,736,112,917	12	1,973,455,010	12	2,803,381,412	12	10,349,623,899	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
050602	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Bulan)	0	0	0	12	345,071,057	12	414,085,267	12	496,902,320	12	596,282,785	12	1,852,341,429	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
05.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**				**15,323,823,626**		**16,839,485,018**		**22,075,964,599**		**14,229,920,141**		**15,980,778,648**		**84,449,972,032**	
	BADAN PENGHUBUNG				**15,323,823,626**		**16,839,485,018**		**22,075,964,599**		**14,229,920,141**		**15,980,778,648**		**84,449,972,032**	
050701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opersional OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi (Dengan Satuan:persen)	100	100	14.519.023.626	100	16.075.296.841	100	19.450.964.599	100	11.335.857.641	100	12.942.013.023	100	74,323,155,730	BADAN PENGHUBUNG
050702	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Terlaksananya Penyelenggaraan pemerintah yang sesuai standar aturan/SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100	804,800,000	100	764,188,177	100	2,625,000,000	100	2,894,062,500	100	3,038,765,625	100	10,126,816,302	BADAN PENGHUBUNG
06	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**20,950,400,000**		**31,090,144,149**		**36,605,000,000**		**39,940,000,000**		**47,347,000,000**		**175,932,544,149**	
06.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**20,950,400,000**		**31,090,144,149**		**36,605,000,000**		**39,940,000,000**		**47,347,000,000**		**175,932,544,149**	
	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI				**20,950,400,000**		**31,090,144,149**		**36,605,000,000**		**39,940,000,000**		**47,347,000,000**		**175,932,544,149**	
060101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum dengan Baik dan Akuntabel (Dengan Satuan:%)	100%	100%	9,890,400,000	100%	15.740.594.250	100%	16.235.000.000	100%	15.935.000.000	100%	19.227.000.000	100%	77,027,994,250	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
060102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, Itjen dan Inspektorat (Dengan Satuan:%)	75	80	8,550,000,000	85	11.442.037.897	90	15.395.000.000	95	17.655.000.000	100	20.070.000.000	100	73,112,037,897	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Dengan Satuan:Level)	C	CC		CC		B		B		BB		BB		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
060103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengawasan (Dengan Satuan:Skala 1-4)	1.5	1.5	2,510,000,000	2	3,907,512,002	2.5	4,975,000,000	2.5	6,350,000,000	3	8,050,000,000	3	25,792,512,002	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		Persentase Implementasi MCP Korsupgah dan Stranas (Dengan Satuan:%)	70	75		78		82		85		88		88		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
08	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**11,457,750,000**		**11,540,750,000**		**17,005,000,000**		**18,272,000,000**		**20,304,000,000**		**78,579,500,000**	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**11,457,750,000**		**11,540,750,000**		**17,005,000,000**		**18,272,000,000**		**20,304,000,000**		**78,579,500,000**	
080101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP (Dengan Satuan:LEVEL SAKIP)	CC	CC	6,600,000,000	B	6,673,000,000	B	8,785,000,000	B	9,232,000,000	B	9,629,000,000	B	40,919,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PERSENTASE LAYANAN KANTOR (KEPEGAWAIAN, UMUM,KEUANGAN DAN PERENCANAAN) (Dengan Satuan:%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
080102	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	JUMLAH PEMBINAAN SEPARATISME, RADIKALISME DAN TINDAK KRIMINALITAS (Dengan Satuan:%)	100%	100%	684,750,000	100%	694,750,000	100%	970,000,000	100%	1,090,000,0*****00	100%	1,225,000,000	100%	4,664,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080103	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE ASPEK HAK-HAK POLITIK (Dengan Satuan:%)	55.62	60%	3,320,000,000	65%	3,320,000,000	70%	4,700,000,000	75%	5,300,000,000	80%	6,150,000,000	80%	22,790,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PERSENTASE ASPEK KEBEBASAN SIPIL (Dengan Satuan:%)	81.38%	83%		85%		87%		89%		90%		90%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PERSENTASE LEMBAGA DEMOKRASI (Dengan Satuan:%)	64.55%	68%		71%		74%		77%		80%		80%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT (Dengan Satuan:JUMLAH KOORDINASI)	10	10	278,000,000	11	278,000,000	12	1,100,000,000	13	1,150,000,000	14	1,200,000,000	14	4,006,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	JUMLAH PEMBINAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN, PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Dengan Satuan:JUMLAH PEMBINAAN)	2	3	250,000,000	3	250,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,500,000,000	20	4,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		JUMLAH PEMBINAAN TERHADAP PAHAM KEAGAMAAN BERMASALAH (Dengan Satuan:JUMLAH PEMBINAAN)	3	6		9		11		13		16		16		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	JUMLAH PEMBINAAN KAMTRAMTIBMAS (Dengan Satuan:JUMLAH PEMBINAAN)	12	13	325,000,000	14	325,000,000	16	450,000,000	18	500,000,000	20	600,000,000	20	2,200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			TOTAL:		2,596,383,419,938		3,197,884,472,987		2,948,821,156,711		3,231,267,120,799		3,443,094,888,266		15,417,451,058,701	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapain visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

8.1.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penetapan target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Maluku tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VIII.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Target					
			2019	2020	2021	2022		2023		2024	
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,45	69,49	69,71	69,23	70,10	69,81	70,39	69,91	70,69
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	-3,42	3,04	6,42-6,84	5,00-5,82	6,55-6,93	5,60-6,27	6,78-7,01	6,10-6,71
3	Tingkat Kemiskinan	%	17,65	17,99	16,30	15,18	16,11	14,73	15,92	13,43	15,73
4	PDRB per Kapita	Juta Rp	25,60	25,25	26,07		26,38		26,94		27,50
5	Indeks Gini	-	0,380	0,326	0,320	0,321	0,310	0,317	0,300	0,314	0,295
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,08	7,57	6,93	6,13	6,45	5,65	6,12	4,97	6,05

8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangan oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Provinsi Maluku pada perubahan RPJMD periode pembangunan 2019-2024 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel VIII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Target						Target Akhir
			2019	2020	2021	2022		2023		2024		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	CC (58,20)	CC	NA	BB	B (67,50)	BB	B (70,00)	A	BB (72,50)	BB (72,50)
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,45	69,49	69,71	69,23	70,10	69,81	70,39	69,91	70,69	70,69
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	-3,42	3,04	6,42-6,84	5,00-5,82	6,55 - 6,93	5,60 - 6,27	6,78 - 7,01	6,10 - 6,71	6,10 - 6,71
4	Tingkat Kemiskinan	%	17,65	17,99	16,30	15,18	16,11	14,73	15,92	13,43	15,73	15,73
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,08	7,57	6,93	6,13	6,45	5,65	6,12	4,97	6,05	6,05
6	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	27,10	24,99	NA	22,58	22,58	23,4	23,40	24,22	24,22	24,22
7	Indeks Wiliamson/ Indeks Kesenjangan Wilayah	-	0,222	0,388	NA		0,319		0,285		0,250	0,250
8	Indeks Gini	-	0,38	0,326	0,320	0,321	0,305	0,317	0,300	0,314	0,295	0,295
9	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	-	79,4	NA	NA		80,5		80,75		81	81
10	Indeks pembangunan Pemuda	-	NA	NA	NA	54,90	54,00	55,00	54,50	55,10	55,00	55,00

8.1.3. Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VIII.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,73	-0,92	3,04	5,00-5,82	5,60 - 6,27	6,10 - 6,71
1.2	Tingkat inflasi	2,72	1,69	4,01	2,04-3,80	2,10-3,24	2,09-2,99
1.3a	PDRB ADHB	46.151,91	46.263,80	48.564,22	52.355,41	54.824,33	57.293,24
1.3b	PDRB Per Kapita	25,6	25,25	26,07	26,38	26,94	27,5
1.4	Indeks gini	0,38	0,326	0,320	0,31	0,3	0,295
1.5	Persentase Penduduk miskin	17,65	17,99	16,30	16,11	15,92	15,73
1.6	Tingkat pengangguran Terbuka	7,08	7,57	6,93	6,45	6,12	6,05
1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,05	2,55	0,5	0,5	0,5	0,5
1.7	Pengeluaran perkapita	1.002.239	1.083.921	1.112.746	1.113.825	1.161.389	1.196.209
1.8	IPM	69,45	69,49	69,71	70,10	70,39	70,69
1.9	Indeks Reformasi Birokrasi	58,2	CC (58,20)	NA	B (67,50)	B (70,00)	BB (72,50)
1.10	Nilai SAKIP	59,34 (CC)	NA	NA	B (70,00)	BB (72,50)	BB (75,00)
1.11	Indeks Pelayanan Publik	NA	-3,82	NA	3,92	3,96	4
1.12	Indeks Persepsi Anti Korupsi	NA	NA	NA	3,3	3,35	3,4
1.13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	NA	NA	70,5	71	71,5
1.14	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	NA	58,15	NA	66,65	71,65	76,95
1.15	Indeks pembangunan Pemuda	NA	NA	NA	54	54,5	55
1.16	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,04	92,97	93,19	93,49	93,74	94,00
1.17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,34	76,86	NA	77,46	77,66	77,87
1.18	Indeks Williamson	0,222	0,388	NA	0,319	0,285	0,250
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Sekolah SMA Sederajat	96,9	97,14	97,58	98,56	98,91	99,18
2	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Dengan Satuan:Persentase Angka Kelulusan)	100	100	100	100	100	100
3	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (Dengan Satuan:Rasio)	1:18	1:19	1:20	1:20	1:20	1:20

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:Per 1000 Kelahiran Hidup)	6	6	6	6	6	6
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000 kelahiran hidup)	7	7	7	7	7	7
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1000 kelahiran hidup)	4	4	4	4	4	4
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 100.000 kelahiran hidup)	132	127	125	123	121	119
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	30,73	35	40	45	50	55
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Dengan Satuan:Persen)	45	48	51	54	67	60
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Dengan Satuan:Persen)	66,9	68,8	70,6	72,5	74,3	76,2
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	100
9	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Dengan Satuan:per 100.000 penduduk)	14	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Dengan Satuan:Persen)	61	70	75	80	85	87
11	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Dengan Satuan:Persen)	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2
12	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Dengan Satuan:Persen)	76,80	80	85	87	90	95
13	Cakupan kunjungan bayi (Dengan Satuan:Persen)	64	70	73	76	79	82
14	Cakupan pembantu puskesmas (Dengan Satuan:Jumlah)	554	506	520	530	540	550
15	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (Dengan Satuan:Persen)	68,28	75	77	79	81	83
16	Cakupan pelayanan nifas (Dengan Satuan:Persen)	63,52	65	70	75	80	85

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
17	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	30,27	31	33	35	37	39
18	Cakupan pelayanan anak balita (Dengan Satuan:Persen)	37	45	50	55	60	65
19	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (Dengan Satuan:Persen)	70	73	76	79	82	85
20	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes (Dengan Satuan:Persen)	60	77	80	85	90	95
22	Cakupan Pelayanan Krisis Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan Asi Eksklusif (Dengan Satuan:Persen)	25	50	53	56	59	62
24	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (Dengan Satuan:Persen)	66,9	90	93,5	94	94,5	95
25	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Madya (Dengan Satuan:Jumla)	34	77	125	148	154	165
26	Prevalensi Balita Gizi Kurang (Dengan Satuan:Persen)	8,5	8	7,5	7	6,5	6
27	Presentase Merokok pada 10 - 18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	9,10	9,10	9,10	9	8,90	8,80
28	Cakupan Keluarga Berencana (Dengan Satuan:Persen)	51,64	60	65	70	75	80
29	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Dengan Satuan:Persen)	63	65	67	69	71	73
30	Prevalensi Balita Stunting (Dengan Satuan:Persen)	23	25	24	23	22	20
31	Annual Paracite Incidence (API) (Dengan Satuan:Persen)	1,02	3,1	1,15	1,1	1	0,8
32	Slide Postivity Rate (SPR) (Dengan Satuan:Persen)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
33	Puskesmas yang Melaksanakan Tatalaksana Program ISPA sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	NA	55	60	65	70	75

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Dengan Satuan:Persen)	23	23	25	27	29	31
35	Persentase ODHA yang Mendapat Pengobatan ARV (Dengan Satuan:Persen)	31	55	55	55	55	55
36	Prevalensi Ibu Hamil Anemia (Dengan Satuan:Persen)	22,27	20	18	16	14	12
37	Jumlah Rumah Sakit dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Dengan Satuan:Jumlah)	2	3	4	5	6	7
38	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	60	61	62	63	64	65
39	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (Dengan Satuan:Persen)	95	91	92	93	94	95
40	Persentase Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit yang Memenuhi Syarat Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	45,8	46,5	47	47,5	48	48,5
41	Persentase Penerapan Sistem Kewaspadaan Dini (Dengan Satuan:Persen)	53,2	100	80	80	80	80
42	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1	4	7	9	10
43	Persentase Pengawasan Sarana Air Bersih (Dengan Satuan:Persen)	57,7	60	63	66	69	72
44	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokor (KTR) (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1	4	7	9	10
45	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan deteksi dini Penyakit Kanker (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1	4	7	9	10
46	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini Gangguan Indera (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1	4	7	9	10
47	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1	4	7	9	10
48	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM (Dengan Satuan:Jumlah)	482	500	520	540	560	580

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
49	Persentase Keluarga Menggunakan Jamban Memenuhi Syarat Kesehatan (Dengan Satuan:Jumlah)	68	70	72	74	76	78
50	Persentase Kabupaten/Kota Sehat (Dengan Satuan:Persen)	18	18	20	22	24	26
51	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Evidence Based (Dengan Satuan:Jumlah)	11	11	11	11	11	11
52	Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (Dengan Satuan:Persen)	55	60	65	70	75	80
53	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:Persen)	18	20	22	24	26	28
54	Cakupan Puskesmas Mampu Pelayanan Kesehatan Jiwa (Dengan Satuan:Persen)	NA	5	8	11	14	17
55	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Dengan Satuan:Persen)	55	60	70	80	90	100
56	Prevalensi Balita Gizi Buruk (Dengan Satuan:Persen)	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
57	Cakupan Vitamin A pada Bayi dan Balita (Dengan Satuan:Persen)	61	78	80	82	84	86
58	Cakupan Pelayanan Balita (D/S) (Dengan Satuan:Persen)	55	65	67	69	71	73
59	Prevalensi Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kalori (Dengan Satuan:Persen)	18,5	18	17	16	15	14
60	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayannan terpadu PTM sesuai Standar (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1	4	7	9	10
61	Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Beryodium (Dengan Satuan:Persen)	64	75	79	83	87	91
62	Persentase Pelaksanaan Campak Dosis Kedua (Dengan Satuan:Persen)	45,7	51,1	56,5	61,9	67,2	72,6
63	Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi Utama (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	2	5	11	13
64	Rasio dokter per satuan penduduk (Dengan Satuan:per satuan penduduk)	15	35	36	37	38	39

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
65	Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	5	6	7	8	9	10
66	Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:per Satuan Penduduk)	2,65	11	12	13	14	15
67	Rasio Bidan Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	78	95	96	97	98	99
68	Rasio Perawat Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	217	117	220	225	230	235
69	Rasio Apoteker Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	14,88	12	16	17	18	19
70	Rasio Sarjana Kesehatan Masyarakat Per Satuan Penduduk (Dengan Satuan:Per Satuan Penduduk)	24	35	36	37	38	39
71	Persentase Pengunaan Obat Generik di Puskesmas (Dengan Satuan:Persen)	95	95	96	97	98	99
72	Persentase Penggunaan Obat Generik di Rumah Sakit (Dengan Satuan:Persen)	67	70	72	74	76	78
73	Persentase Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Rawat Inap (Dengan Satuan:Persen)	32	35	37,50	40	42,50	45
74	Persentase Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Dengan Satuan:Persen)	45	45	47,50	50	52,50	55
75	Persentase Penggunaan Obat Rasional (Dengan Satuan:Persen)	70	70	73	76	79	82
76	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Dengan Satuan:Persen)	85	85	87	89	91	93
77	Persentase Penyediaan Makanan Jajanan Anak Sekolah (Dengan Satuan:Persen)	71	73	75	77	79	81
78	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (Dengan Satuan:Persen)	88	90	91	93	94	95
79	Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendukung Kesehatan (Dengan Satuan:Jumlah)	12	12	14	16	18	20
80	Persentase Pos Kesehatan Desa (Dengan Satuan:Persen)	31,15	32	36	40	44	48
81	Persentase Kecematan dengan Indikator Keluarga Sehat (Dengan Satuan:Jumlah)	NA	1	2	3	4	5

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
82	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memanfaatkan 10% Dana Desa untuk Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	37,24	40	43	46	49	52
83	Jumlah Model Intervensi Kesehatan (Dengan Satuan:Jumlah)	4	5	6	7	8	9
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (Dengan Satuan:-)	0	10%	20%	50%	75%	100%
2	Akses Air Minum Layak (Dengan Satuan:%)	0	86,74	87,00	87,26	87,52	87,78
3	Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah (Dengan Satuan:-)		17,81	18,31	18,81	19,41	20,00
4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (Dengan Satuan:-)	0	10%	20%	50%	75%	100%
5	Capaian Sanitasi (Dengan Satuan:Meter)	0	11218	1213	923	923	1456
6	Capaian Pengurangan Kumuh (Dengan Satuan:Meter)	0	25563 Meter	9726 Meter	8290 Meter	8766 Meter	9520 Meter
7	Persentase bangunan ber-IMB (Dengan Satuan: Persen)	0		50,00	52,50	55,00	57,50
8	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	0,23%	10%	12,50%	15%	17,50%
9	Presentase Kemantapan Jalan (Dengan Satuan:satuan)	0	60,58	62,58	64,58	66,58	70,58
10	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (Dengan Satuan:-)	0	4%	6%	12%	18%	20%
11	Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR (Dengan Satuan:-)	0	65,80	67,00	68,50	70,00	71,50
Perumahan Rakyat							
1	Persentase capaian program dan kegiatan dinas (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (Dengan Satuan:%)	84,23	69,77	100	100	100	100
3	Indeks risiko bencana di daerah (Dengan Satuan:indeks)	160,35	160,35	160,25	160,15	160,05	159,95
Sosial							
1	Cakupan penerbitan pengumpulan sumbangan lintas daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
3	CAKUPAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
4	Presentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabiliotas terlantar di dalam panti (Dengan Satuan:persen)	100	100	100	100	100	100
5	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
6	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
7	Presentase cakupan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
8	Presentase cakupan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Presentase cakupan penanganan bencana alam dan sosial (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
10	cakupan pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
Tenaga Kerja							
1	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dengan Satuan:persen)	0	20	20	60	80	100
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	0,53	0,53	1,53	2,53	3,75	5
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	6,30	6,30	8	8,2	8,5	8,7
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (Dengan Satuan:Persen)	0,97	0,97	5,7	7,9	8,5	9
5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang- undangan Bidang Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:Persen)	36,58	36,58	39,90	45	63	85
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0	0
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (Dengan Satuan:%)	30	26,75	26,85	27,05	27,50	30
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Dengan Satuan:%)	20	20	30	45	52	65
4	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (Dengan Satuan:%)	0	41	43	45	47	50
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Dengan Satuan:%)	0	40	42	44	46	48
6	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian (Dengan Satuan:%)	0	20	21	22	23	25

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Rasio KDRT (Dengan Satuan:%)	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35
8	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Dengan Satuan:%)	0	12	15	18	21	25
9	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (Dengan Satuan:%)	0	50	55	60	65	70
10	Cakupan Layanan Rehabilitas Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitas Sosial Terlatih bagi Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu (Dengan Satuan:%)	0	50	55	60	65	70
11	Cakupan Penegakkan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0	0
12	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Dengan Satuan:%)	0	30	35	40	45	50
13	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Dengan Satuan:%)	0	24	26	28	30	32
14	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan (Dengan Satuan:%)	0	25	25	30	30	35
15	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (Dengan Satuan:%)	0	2%	2%	2%	1,50%	1,50%
16	Persentase Keluarga Sejahtera (Dengan Satuan:%)		50	53	55	58	60
17	Cakupan kab/kota yang mengelola sistem data gender dan anak (Dengan Satuan:%)	100	0	82	82	82	91
18	Presntase Kabupaten/Kota Layak Anak (Dengan Satuan:%)	100	18,18	27,27	45,45	72,72	100
19	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh	50	30	35	40	45	50

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
	petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Dengan Satuan:%)						
20	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (Dengan Satuan:%)	50	30	35	40	45	50
21	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (Dengan Satuan:%)	75	30	45	60	75	75
22	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:%)	2,73	0	0	0	0	0
Pangan							
1	Inflasi komoditas pangan (Dengan Satuan:%)			<5%	<5%	<5%	<5%
2	Persentase cadangan pangan(Dengan Satuan:%)		67,3	70%	70%	75%	75%
3	Angka PPH Ketersediaan (Dengan Satuan:-)			100	100	100	100
4	Persentase Pengawasan Pangan Segar yang aman dan bermutu (Dengan Satuan:%)		55,00	57,50	60,00	62,50	65,00
Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	50%	38%	40%	45%	50%	60%
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	0%	0	0	1	1	1
Lingkungan Hidup							
1	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibuat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	2	1	1	2
2	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Upaya)	0	3	3	3	3	3
3	Jumlah upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) lintas daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
	dalam 1 (satu) daerah provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)						
4	Jumlah upaya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku (Dengan Satuan:Upaya)	0	1	1	1	1	1
5	Jumlah objek kelembagaan MHA dan kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku yang diakui keberadaannya (Dengan Satuan:Objek)	0	11	9	2	3	4
6	Jumlah upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (Dengan Satuan:Upaya)	0	1	1	1	1	1
7	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi yang diberikan untuk masyarakat (Dengan Satuan:Jenis)	0	1	1	2	2	2
8	Jumlah upaya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Upaya)	0	0	0	0	1	1
9	Jumlah upaya pengelolaan persampahan (Dengan Satuan: Upaya)	0	0	0	0	0	1
Administrasi Kependudukan							
1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,79	0,91	0,93	0,8	0,85	0,9
2	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	0,67	0.82	0.73	100	100	100
3	Rasio pasangan ber-Akte Nikah	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3	3	3	3
5	Status Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (Dengan Satuan:Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Pemberdayaan Masyarakat							
1	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif (Dengan Satuan:Kelembagaan Desa)	60	62	64	70	72	75
2	Persentase Kawasan Perdesaan yang berkembang (Dengan Satuan:Persen)	18	41	42	43	44	45

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa baik (Dengan Satuan:Persen)	10	20	30	40	50	60
4	Persentase peningkatan status desa mandiri (Dengan Satuan:Persen)	0,33	1,33	2,33	3,33	4,33	6,33
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Dengan Satuan:Persen)	46,9	36,6	45,7	45,99	46,27	46,23
2	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:Persentase)	3,3	3,16	2,91	2,89	2,87	2,84
3	Persentase Keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan Karakter (Dengan Satuan:Persen)	37,68	38.68	39,68	40,68	41,68	42,68
Perhubungan							
1	Presentasi Angka Kecelakaan di Jalan Raya (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	0
2	Presentasi Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan, Presentasi Pelabuhan Laut yang Terbangun, Pertumbuhan Trayek Angkutan Laut Perintis (Dengan Satuan:Dokemen)	7	0	1	3	5	7
3	Presentasi terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah (Dengan Satuan:Dokemen)	1	0	0	0	0	1
Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Dengan Satuan:persen)	83,33	83,33	83,33	83,33	100	100
2	Peresentase pemanfaatan Jaringan TIK (Dengan Satuan:persen)	20	30	60	80	100	100
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif (Dengan Satuan:persen)	0	0	0	70	70	70

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Pengukuran Pengukuran tingkat Kesehatan Koperasi (Dengan Satuan:unit)	0	10	11	13	15	17
3	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas (Dengan Satuan:satuan)	0		100%	100%	100%	100%
4	Persentase Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang- undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri tangguh serta akuntabel (Dengan Satuan:Satuan)				70	75	80
5	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (Dengan Satuan:%)		91,22	91,50	91,78	92,06	92,34
6	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha (Dengan Satuan:%)		1,51%	25%	25%	25%	25%
Penanaman Modal							
1	Jumlah dokumen peluang Investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	0	2	2	2
2	Jumlah pelaku usaha yang berminat berinvestasi (PMDN dan PMA) (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	0	250	250	250
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:Nilai)	91	90	91	92	92,5	93
4	Jumlah pelaku usaha yang dipantau, dibina dan diawasi (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	0	50	50	50
5	Persentase pertumbuhan investasi (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	100%	100%	100%
Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Dengan Satuan:%)	50	60	70	80	90	100
2	Tingkat Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (Dengan Satuan:%)	50	60	70	80	90	100
3	Tingkat Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dengan Satuan:%)	50	60	70	80	90	100
Statistik							
1	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi (Dengan Satuan:persen)	0	0	0	47,62	47,62	4,76
Persandian							

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)	0	20	20	20	20	20
Kebudayaan							
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Jumlah Cagar Budaya)	63	64	65	65	68	70
Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat (Dengan Satuan:NIlai)	49,86	52,90	54	58	62	65
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Dengan Satuan:Indeks)	6,58	17,51	18	19	20	21
Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Dengan Satuan:Persen)	0	10%	20%	50%	75%	100%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:Persen)	25	27	30	32	35	38
3	Jumlah tata perizinan dan penggunaan arsip secara baik (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	0	1	1	1
Urusan Pilihan							
Kelautan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap		523,261	533,7262	544,400744	555,288759	566,394534
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya		200,81	204,8262	208,922724	213,101178	217,363202
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		59,49%	65%	70%	75%	80%
Pariwisata							
1	Pertumbuhan Destinasi Wisata (Dengan Satuan:Persen)	0	5	5	5	5	5
2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (Dengan Satuan:Persen)	100,000	2	2	2	2	2

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3	persentase pertumbuhan pengeluaran wisatawan (Dengan Satuan:persen)	0	5	6	7	8	9
4	Presentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Persen)	0	10	15	20	25	30
5	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi (Dengan Satuan:Persen)	0	5	5	5	5	5
Pertanian							
1	Jumlah Penambahan Sarana Pertanian yang dikembangkan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penambahan Prasarana Pertanian yang dikembangkan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1	1	1	1
3	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)	30	50	55	60	65	70
5	Persentase Perizinan Usaha Pertanian yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan bina kelompok petani (Dengan Satuan:%)	97	97	98	98	99	100
Kehutanan							
1	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Hasil Hutan (Dengan Satuan:Lokasi)	10	10	18	18	18	18
2	persentase peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan (Dengan Satuan:persen)	65	65	66	67	68	0
3	Jumlah Unit Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial (Dengan Satuan:Unit)	73	0	13	14	15	15
4	Jumlah Unit Bangunan Sipil Teknis KTA (Dengan Satuan:Unit)	30	30	11	257	175	215
Energi Sumber Daya Mineral							
1	Jumlah Peta Potensi Geologi (Dengan Satuan:Dokumen (Peta))	8	6	21	22	23	24
2	Jumlah Peta Potensi Air Tanah dan Jumlah Batuan Sumur Bor (Dengan Satuan:Peta/Sumur Bor)	2	6	19	20	21 Peta, 2 Sumur Bor	22 Peta, 3 Sumur Bor

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah IUP yang Dibina (Dengan Satuan:IUP)	40	5	8	9	9	9
4	Jumlah IUP yang Diawasi (Dengan Satuan:IUP)	60	8	12	13	14	13
5	Jumlah PETI yang ditertibkan (Dengan Satuan:Lokasi)	35	4	7	8	8	8
6	Persentase rumah tangga pengguna listrik (Dengan Satuan:RUmah Tangga)	0	350	365	375	390	400
7	Rasio Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (Dengan Satuan:%)	0,0068	0,0068	0,0072	0,0075	0,0079	0,0083
8	Rasio Elektifikasi (Dengan Satuan:%)	90,95	95	96	97	98	99
9	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) (Dengan Satuan:Rumah Tangga Sasaran (RTS)	0	0	350	365	375	390
Perdagangan							
1	Jumlah Perizinan Jenis Bahan Berbahaya (Dengan Satuan:Jenis)	2	2	2	2	2	0
2	Jumlah sarana distribusi perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1	1	1	0
3	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:Persen)	3,5-4	3.5-4	3,5-4	3,5-4	3,5-4	3,5-4
4	Jumlah realisasi jenis pupuk bersubsidi (Dengan Satuan:jenis)	0	0	0	2	2	2
5	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (Dengan Satuan:Pesen)	10	10	10	10	10	10
6	Persentase Penanganan Konsumen (Dengan Satuan:Persen)	65	75	80	90	0	0
7	Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga (Dengan Satuan:Persen)	65	75	80	90	0	0
8	Persentse Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku (Dengan Satuan:persen)	10	10	10	10	0	0
Perindustrian							
1	Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:USD (Juta))	25	25	30	35	0	0
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan:Orang)	35,719	35,719	35,719	35,719	0	0
3	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi		0%	10%	10%	10%	10%

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		0%	100%	100%	100%	100%
Transmigrasi							
1	Persentase Pertumbuhan kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:Persen)	0	0	20	0	40	40
2	Jumlah Kawasan/Unit Pemukinan Transmigrasi yang siap dibangun (Dengan Satuan:Kawasan)	0	0	0	1	1	1
3	Jumlah Kelompok masyarakat kawasan transmigrasi yang berdaya saing (Dengan Satuan:Kelompok)	7	7	0	5	10	10
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
Sekretariat Daerah							
1	Persentase OPD yang mengumpulkan LAKIP secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	59.7		60	63	65	68
3	Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah (EKPPD)	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kebijakan kesra yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100
5	Persentase produk hukum yang disahkan (satuan: persen)		100	100	100	100	100
6	Persentase Penurunan Inflasi Daerah (Satuan: Persen)		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		50	50	55	55	60
8	Maturitas UKPBJ (Satuan: Level)			level 3	level 3	level 3	level 3
Sekretariat DPRD							
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan	87	87	90	94	96	97
Perencanaan							
1	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Status Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, RKPDP yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:Ya/Tidak)	Tidak	0	0	Ya	Ya	Ya
3	Persentase Kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD (Dengan Satuan:Persen (%))	91,26 %	0	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Dengan Satuan:Persen (%))	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dengan Satuan:Persen (%))	91,26 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase Konsistensi PenjabaranProgram RKPD kedalam APBD (Dengan Satuan:Persen (%))	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %
Keuangan							
1	Jumlah Pengelolaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	2	2	2	2
2	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:persentase)	0	80,00%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%
3	Tingkat kepatuhan terhdap pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:persentase)	0	50,00%	55,00%	55,00%	60,00%	60,00%
4	Persentase terselenggaranya program pengelolaan keuangan daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
5	Persentase terlaksannya program pengelolaan pendapatan daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100
Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	9%	65,95%	20%	20%	20%	20%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	60%	7,47%	60%	60%	65%	65%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	38%	0.942	42%	44%	46%	48%
Penelitian dan Pengembangan							

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (Dengan Satuan:persen (%))	75%	0	100%	100%	100%	100%
2	Provinsi Inovatif (Dengan Satuan:Inovatif)	0	0	0	Inovatif	Inovatif	Inovati
Kepegawaian							
1	Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya (Dengan Satuan:%)	0	0	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PNS yang meningkat Kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar (Dengan Satuan:%)	0	0	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang Terevaluasi Kinerjanya (Dengan Satuan:%)	0	0	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	0	0	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	0	0	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pelayanan Kasus Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	0	0	100%	100%	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Dengan Satuan:Persen)	0	0	100	100	100	100
Pengelolaan Perbatasan							
1	Persentase pengelolaan Kabupaten Perbatasan di Provinsi Maluku (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan Penghubung							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:-)						
Manajemen Keuangan							
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	92%	0%	100%	100%	100%	100%
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	NA	0%	100%	100%	100%	100%
3	Assets management	1. Ya	1. Ya	1. Ya	1. Ya	1. Ya	1. Ya
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	2. Ya	2. Ya	2. Ya	2. Ya	2. Ya	2. Ya
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	3. Ya	3. Ya	3. Ya	3. Ya	3. Ya	3. Ya

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
	3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	4. Ya	4. Ya	4. Ya	4. Ya	4. Ya	4. Ya
	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)						
4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5%	0,04%	5%	5%	5%	5%
Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	111%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	NA	NA	100%	100%	100%	100%
Inspektorat Daerah							
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, Itjen dan Inspektorat (Dengan Satuan:%)	75	80	85	90	95	100
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Dengan Satuan:Level)	C	CC	CC	B	B	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengawasan (Dengan Satuan:Skala 1-4)	-	-	-	2,5	2,5	3
4	Persentase Implementasi MCP Korsupgah dan Stranas (Dengan Satuan:%)	70	75	78	82	85	88
Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Jumlah Pembinaan Separatisme, Radikalisme Dan Tindak Kriminalitas (Dengan Satuan:%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Aspek Hak-Hak Politik (Dengan Satuan:%)	55,62	60%	65%	70%	75%	80%
3	Persentase Aspek Kebebasan Sipil (Dengan Satuan:%)	81,38%	83%	85%	87%	89%	90%
4	Persentase Lembaga Demokrasi (Dengan Satuan:%)	64,55%	68%	71%	74%	77%	80%
5	Jumlah Koordinasi Dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Jumlah Koordinasi)	10	10	11	12	13	14
6	Jumlah Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan, Pengedaran Dan Penyalahgunaan Narkoba (Dengan Satuan:Jumlah Pembinaan)	2	3	3	4	4	4

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Jumlah Pembinaan Terhadap Paham Keagamaan Bermasalah (Dengan Satuan:Jumlah Pembinaan)	3	6	9	11	13	16
8	Jumlah Pembinaan Kamtramtibmas (Dengan Satuan:Jumlah Pembinaan)	12	13	14	16	18	20
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
I	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
1	**Pangan**						
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.002.239	1.083.921	1.097.366	1.113.825	1.161.389	1.196.209
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	495.021	551.786	563.602	578.440	611.731	637.738
2	**Pertanian**						
2.1	Nilai Tukar Petani	100,27	98,56	97,53	98,5	100,5	102,5
II.	**Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**						
2.1	Indeks Infrastruktur	NA	NA	70	70,75	71,5	72,25
2.2.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum Layak	NA	48,21	50	52,5	55	60
2.3.	Rasio elektrifikasi	92,3	95,58	96	96,5	97	97,5
2.4.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mampu Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler	602	796	821	846	871	896
III.	**Iklim Berinvestasi**						
3.1.	Jumlah Kejadian Kriminalitas yang Dilaporkan	3.635	2.274	2.100	1.950	1.750	1.500
3.2.	Pertumbuhan Investasi	NA	NA	10	15	20	25
3.3.	Indeks Desa Membangun	0,5809	0,6086	0,62	0,6325	0,645	0,66
IV.	**Sumber Daya Manusia**						
1.1	Rasio ketergantungan	NA	NA	57,5	56	54,5	53

BAB IX
PENUTUP

Dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2024. Pada saat ini RPJMD telah dilaksanakan pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 pada dokumen RKPD dan dilakukan perubahan RPJMD ditahun 2021. Dokumen ini memuat visi, misi, dan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana mengoperasionalkan Perubahan RPJMD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar Perubahan RPJMD (RPJMD-P) ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi merupakan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Perubahan RPJMD tahun 2024 hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen Perubahan RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih dengan kondisi terkini. Pedoman transisi bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2024, menyusun dokumen capaian kinerja untuk wacana kepala daerah berikutnya. Kemudian selama sampai akhir periode RPJMD-P maka diperlukan

pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMD-P Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2025 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005- 2025, Rancangan RKP Tahun 2025, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah. Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2025, dan hal-hal penting lainnya.

Penyusunan RKPD tahun 2025 disusun mengacu pada RPJPD, diharapkan pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS tahun 2025 serta APBD tahun anggaran 2025.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD-P Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD-P Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Provinsi Maluku tahun 2019-2024, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.

2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2), Perangkat Daerah menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJMD-P untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.

3. Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2022 hingga 2024.

4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD-P Provinsi Maluku tahun 2019-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja OPD.

5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD-P Provinsi Maluku dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Gubernur terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap inikator kinerja sasaran.

6. RPJMD ini akan menjadi dasar Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.

7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

8. Pemerintah Provinsi Maluku wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD-P kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan YME, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen Perubahan RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku pada masa yang akan datang.

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL